

Energizing Challenges **Embracing Opportunities**

ANNUAL REPORT 2023



Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal

PT Pertamina Energy Terminal atau disebut “PET”, “Kami”, dan “Perusahaan”, menyajikan Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Penyusunan Laporan Tahunan 2023 bertujuan untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi terkait:

1. Ikhtisar Kinerja Keuangan, Kinerja Bisnis & Operasional dan Kinerja Lainnya
2. Laporan Manajemen, yaitu dari Dewan Komisaris dan Direksi
3. Profil Perusahaan
4. Analisis & Diskusi Manajemen
5. Tata Kelola Perusahaan
6. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
7. Hasil Audit Laporan Keuangan 2023 dari Kantor Akuntan Publik

Laporan tahunan ini juga memuat informasi-informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan yang bukan merupakan pernyataan data historis dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward looking statement*) sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut termasuk yang disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan ekonomi, politik dan sosial di Indonesia.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp” atau “IDR” merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan “Dollar AS atau USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Kantor Pusat

Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten 42446
Fax: (0254) 601148
Telp: (0254) 601146/601147
Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: [pet.pertamina](https://www.instagram.com/pet.pertamina)
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Website: <https://pertamina-pet.com>

Kantor Bisnis Jl. Yos Sudarso No. 205, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360.

About the Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

PT Pertamina Energy Terminal, referred to as “PET,” “We,” and “The Company,” presents the Annual Report ending on December 31, 2023. The preparation of the 2023 Annual Report aims to enhance the quality of transparency regarding:

1. Financial Performance Overview, Business & Operational Performance, and Other Performances
2. Management Report, from the Board of Commissioners and Directors
3. Company Profile
4. Management Analysis & Discussion
5. Corporate Governance
6. Corporate Social Responsibility
7. Audited 2023 Financial Statements by the Public Accounting Firm

The annual report contains information including projections, plans, strategies, and objectives that are not historical data and may be categorized as forward-looking statements as defined in applicable provisions.

Forward-looking statements involve risks and uncertainties about results and events that may materially differ from what is estimated and stated in such statements, including those caused by changes in the economic, political, and social environment in Indonesia.

The currency unit “Rupiah” or “Rp” or “IDR” refers to the official currency of Indonesia, while “US Dollar or USD” refers to the official currency of America. Unless otherwise stated, all financial information is presented in Indonesian Rupiah currency in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

For further information, please contact:

Head Office

Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Banten Province 42446
Fax: (0254) 601148
Phone: (0254) 601146/601147
Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: [pet.pertamina](https://www.instagram.com/pet.pertamina)
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Website: <https://pertamina-pet.com>

Business Office Jl. Yos Sudarso No. 205, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, North Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 14360.

Penjelasan Tema 2023

Theme 2023 Explanation

Energizing Challenges Embracing Opportunities

2023



Tahun 2023 menjadi tahun yang *challenging* bagi PT Pertamina Energy Terminal (PET), setelah *rebranding* yang dilakukan oleh PET.

Dengan semangat baru PET terus mencari dan mengembangkan peluang yang ada dan berusaha untuk terus melaju menggapai target-target dengan tantangan yang ada.

The year 2023 has been a challenging year for (PET) following the rebranding by PET.

With renewed spirit, PET continues to seek and develop existing opportunities, striving to advance and achieve targets despite the occurring challenges.



2022

Energizing New Chapter, Level Up Challenge

Pada tahun 2022 menjadi titik berserajah bagi PT Pertamina Energy Terminal, dimana pada tahun ini telah Perseroan melakukan *rebranding* dari yang sebelumnya bernama PT Peteka Karya Tirta menjadi PT Pertamina Energy Terminal (PET). Perubahan nama ini juga ditandai dengan berubahnya lini bisnis di PET, yang semula hanya berfokus pada bisnis *fresh water*, kini melebarkan pasar dengan mengelola 6 *terminal storage*.

Seiring dengan perubahan nama serta lini bisnis PET, tentunya menjadi langkah baru khususnya dalam proses bisnis perusahaan menuju ke arah yang lebih baik. Diharapkan perusahaan lebih siap dan mampu menghadapi tantangan yang semakin besar.

Dengan terbukanya peluang-peluang baru bagi perusahaan serta dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan, maka perlu adanya dukungan seluruh Pekerja PET dengan semangat yang tinggi, dan rasa percaya diri dalam upaya menghadapi berbagai tantangan yang akan datang serta semangat untuk terus berinovasi untuk kemajuan Perusahaan.

In 2022, it was a milestone year for PT Pertamina Energy Terminal (PET), as the company underwent rebranding from its previous name, PT Peteka Karya Tirta. This change also marked a shift in PET's business line, expanding beyond the fresh water business to managing 6 terminal storages.

Along with the name change and the expansion of PET's business line, it signifies a new chapter in the company's journey towards improvement. It is expected the company is better prepared and capable of facing greater challenges.

With the opening of new opportunities for the company and the realization of set targets, the support of all PET employees is crucial. This support should be accompanied by high spirits, and confidence to face upcoming challenges, as well as the drive to innovate continuously for the progress of the company.



2021

Transformasi Bisnis Untuk Menjadi Terminal Terintegrasi Bertaraf Internasional

Business Transformation to Become an Integrated Terminal of International Standard

Tahun 2021 merupakan fase penting untuk PT Peteka Karya Tirta ("PKT") sebagai titik awal pertumbuhan bisnis yang lebih baik serta daya saingnya dengan menciptakan nilai tambah sebagai perusahaan bertaraf internasional.

Penetapan PKT sebagai salah satu anak perusahaan PT Pertamina International Shipping ("PIS") dan penyerahan pengelolaan 6 terminal menjadikan PKT bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih besar dan siap menghadapi tantangan dinamika bisnis yang terus berlanjut serta memiliki perencanaan untuk pengelolaan & pengembangan bisnis yang terintegrasi bagi SH Integrated Marine Logistics dengan tujuan meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Transformasi ini merupakan langkah strategis PKT beradaptasi dengan perubahan bisnis ke depan, agar dapat bergerak lebih lincah dan lebih cepat, serta fokus untuk pengembangan bisnis yang lebih luas dan agresif.

The year 2021 was an important phase for PT Peteka Karya Tirta ("PKT") as a starting point for better business growth and competitiveness by creating added value as an international-standard company.

PKT's designation as one of PT Pertamina International Shipping's ("PIS") subsidiaries, with the transfer of management of six terminals, has transformed PKT into a greater company and prepared it to face the ongoing challenges of dynamic business and has a plan for integrated business management and development for SH Integrated Marine Logistics to increase company profitability.

This transformation is a PKT strategic step to adapt to future business changes, to be agile and faster, and to focus on wider and more aggressive business development.

Daftar Isi

Table of Contents

Ikhtisar Utama	Tentang Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal About the Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal	3	Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition	56
	Penjelasan Tema Explanation of Theme	4	Struktur Grup Perusahaan Company Group Structure	59
	Daftar Isi Table of Contents	6	Anak Perusahaan & Afiliasi Subsidiaries & Affiliates	60
			Keanggotaan Asosiasi Association Membership	60
			Nama dan Alamat Lembaga &/Profesi Penunjang Names and Addresses of Supporting Institutions &/or Professions	60
Laporan Manajemen	IKHTISAR UTAMA MAIN OVERVIEW	8	Informasi pada Situs Web Perusahaan Company Website Information	62
	Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Performance Overview	10	Peristiwa Penting Tahun 2023 Significant Events in 2023	63
	Ikhtisar Kinerja Bisnis & Operasional Business & Operational Performance Overview	12	Penghargaan & Sertifikasi Tahun 2023 Awards & Certifications in 2023	64
	Ikhtisar Saham & Obligasi Stocks & Bonds Overview	15	Sinergi Pertamina Group Pertamina Group Synergy	68
	Ikhtisar Dividen Dividend Overview	16		
Profil Perusahaan	Ikhtisar Kinerja Lainnya Other Performance Overview	16	ANALISIS & DISKUSI MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS	70
			Tinjauan Ekonomi Makro Macro Economic Review	72
	LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT	18	Tinjauan Industri Industry Review	78
	Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners Report	20	Tinjauan Per Segmen Usaha Business Segment Review	84
	Laporan Direksi Board of Directors Report	26	Pendapatan per Segmen Revenue per Segment	87
Analisis dan Pembahasan Manajemen	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE	32	Kinerja Keuangan Komprehensif Comprehensive Financial Performance	89
	Identitas Perusahaan Company Identity	34	Kemampuan Membayar Utang Ability to Pay Debt	96
	Riwayat Singkat Perusahaan Company Brief History	36	Tingkat Kolektibilitas Piutang Accounts Receivable Collectibility Rate	97
	Jejak Langkah Perusahaan Company Milestones	37	Struktur Modal Capital Structure	97
	Visi dan Misi Perusahaan Company Vision and Mission	38	Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal Management Policy on Capital Structure	98
Tata Kelola Perusahaan	Tata Nilai Perusahaan Company Values	39	Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Material Commitments for Capital Expenditure	100
	Bidang Usaha Business Fields	40	Investasi Barang Modal Capital Expenditure	101
	Produk dan Jasa Products and Services	40	Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Soundness Level	101
	Wilayah Operasional Operational Areas	41	Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Occurring After the Accountant's Report Date	102
	Kantor Cabang atau Perwakilan Branch Offices or Representatives	42	Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi Business Prospects, Industry Conditions, and Economic Conditions	103
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Struktur Organisasi Organizational Structure	44	Kebijakan Dividen Dividend Policy	107
	Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	46	Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP) Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Employee Share Ownership Program and/or Management (ESOP/MSOP) Share Ownership by Directors and Commissioners	108
	Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition	48		
	Profil Direksi Board of Directors Profile	50		
	Komposisi Direksi Board of Directors Composition	52		
	Sumber Daya Manusia Human Resources	53		

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Realization of the Use of Funds from Public Offerings	108	Kebijakan Anti Korupsi Anti-Corruption Policy	189
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi Material Transaction Information Involving Conflict of Interest or Transactions with Affiliated Parties	109	Penilaian Penerapan GCG Assessment of GCG Implementation	190
Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan Changes in Legislation and Their Impact on Company Performance	111	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY	194
Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perseroan Changes in Accounting Policies, Reasons, and Their Impact on Company Financial Statements	121	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Corporate Social and Environmental Responsibility	198
Informasi Kelangsungan Usaha Business Continuity Information	122	Tanggung Jawab Sosial terkait Operasi yang Adil Social Responsibility related to Fair Operations	203
TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE	124	Tanggung Jawab Sosial dalam Penerapan HAM Social Responsibility in Human Rights Implementation	205
Dasar Penerapan GCG Basis for GCG Implementation	128	Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup Social Responsibility towards the Environment	206
Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure	129	Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat Social Responsibility towards the Community	214
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	130	Tanggung Jawab Sosial terhadap K3 Social Responsibility towards Occupational Health and Safety	222
Direksi Board of Directors	142	Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan Social Responsibility towards Customers	228
Dewan Komisaris Board of Commissioners	150	Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2023 PT Pertamina Energy Terminal Statement of Responsibility of the Board of Commissioners on the 2023 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal	230
Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi Nomination of Board of Commissioners and Directors	162	Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan 2023 PT Pertamina Energy Terminal Statement of Responsibility of the Board of Directors on the 2023 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal	231
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Remuneration for Board of Commissioners and Directors	164	LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS	232
Komite Audit Audit Committee	165		
Komite Nominasi & Remunerasi Nomination & Remuneration Committee	167		
Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee	167		
Sekretaris Perusahaan Company Secretary	168		
Internal Audit Internal Audit	170		
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	173		
Manajemen Risiko Risk Management	175		
Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	180		
Perkara Hukum Tahun 2023 Legal Cases in 2023	182		
Sanksi Administratif 2023 Administrative Sanctions in 2023	182		
Kode Etik Perusahaan Company Code of Conducts	182		
Akses dan Transparansi Informasi Access and Transparency of Information	184		
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	186		

0.1

IKHTISAR UTAMA

MAIN OVERVIEW





Ikhtisar Kinerja Keuangan

Overview of Stocks & Bonds

Laporan Laba Rugi

Statement of Profit or Loss

Disajikan dalam Ribuan Rupiah

Presented in Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	2021	2020*	2019
Pendapatan Revenue	953.536.263	950.826.380	501.240.296	698.277.349	59.120.656
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(859.791.613)	(849.311.367)	(642.426.718)	(694.227.819)	(41.195.111)
Laba Bruto Gross Profit	93.744.650	101.515.013	(141.186.422)	4.049.530	17.925.545
Beban Umum dan Administrasi General and administrative expenses	(76.759.071)	(76.329.330)	(14.436.526)	29.165.500	(6.930.544)
Pendapatan Keuangan Finance Income	5.738.039	1.280.154	186.217	790.810	1.024.464
Beban Keuangan Finance Cost	(6.970.466)	(8.278.007)	(108.944)	(4.618)	(108.897)
Lain-Lain, (Bersih) Others (net)	75.458.611	1.681.870	(2.050.689)	(21.883.260)	1.856.426
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit before income tax	91.211.763	19.869.700	(157.673.637)	(46.999.230)	13.766.994
Beban Pajak Penghasilan Income tax expenses	(23.110.754)	(6.697.097)	5.771.917	(7.408.653)	(3.138.274)
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Net Income / (Loss) for the Year (After Merging Entities)	68.101.009	13.172.603	(151.901.720)	(54.407.883)	10.628.720
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for The Year	67.142.703	15.458.167	(19.273.579)	25.625.295	10.604.638

*Disajikan Kembali
*Restatement

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

Financial Position Overview

Disajikan dalam Ribuan Rupiah

Presented in Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	2021	2020*	2019
Aset Lancar Current Assets	971.620.233	800.872.278	237.547.942	44.977.912	42.241.820
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	7.064.729.216	6.693.042.084	6.849.439.323	6.573.571.197	36.601.251
Jumlah Aset Total Assets	8.036.349.449	7.493.914.362	7.086.987.265	6.618.549.109	78.843.071
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	555.798.172	560.942.801	342.515.552	196.903.107	9.537.308
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	621.407.714	140.970.701	371.446.020	313.925.588	3.139.712
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.177.205.886	701.913.502	713.961.572	510.828.695	12.677.020
Ekuitas Equity	6.859.143.563	6.792.000.860	6.373.025.693	6.107.720.414	66.166.051
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	8.036.349.449	7.493.914.362	7.086.987.265	6.618.549.109	78.843.071

*Disajikan Kembali
*Restatement

Laporan Arus Kas
Statement of Cash Flows

Disajikan dalam Ribuan Rupiah
Presented in Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	2021	2020*	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	106.717.645	579.529.442	(16.153.876)	(1.770.250)	12.590.605
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(515.906.551)	(356.211.246)	(77.509.672)	(6.542.200)	(10.725.542)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	541.588.115	295.450.212	97.658.000	(481.318)	(1.373.409)
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) of Cash and Cash Equivalent	132.399.209	518.768.408	3.994.452	(8.793.768)	491.654
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at the beginning of the year	532.135.822	13.367.414	9.372.962	18.166.730	17.675.076
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at the end of the year	664.535.031	532.135.822	13.367.414	9.372.962	18.166.730

***Disajikan Kembali**
*Restatement

Rasio Keuangan (%)
Financial Ratio (%)

Rasio Ratio	2023	2022	2021	2020*	2019
Tingkat Pengembalian atas Aset Return on Assets	0,85	0,18	(2,14)	(0,82)	13,48
Tingkat Pengembalian atas Ekuitas Return on Equity	0,99	0,19	(2,38)	(0,89)	16,06
Margin Bersih atas Pendapatan Net Profit Margin	7,14	1,39	(30,31)	(7,79)	17,97
Rasio Utang atas Aset Debt to Asset Ratio	14,65	9,37	10,07	7,72	16,06
Rasio Liabilitas atas Ekuitas Debt to Equity Ratio	17,16	10,33	11,20	8,36	17,97

***Disajikan Kembali**
*Restatement

Ikhtisar Kinerja Bisnis & Operasional

Operational and Business Performance Overview

Working Loss

Working Loss

Terminal	RKAP 2023 (%)	2023 (%)	2022* (%)	2021 (%)
Pulau Sambu Sambu Island	-0,07	-0,03	-0,01	0,03
Tanjung Uban (BBM)	-0,07	-0,03	-0,02	0,23
Tanjung Uban (LPG)	-0,20	-0,13	-0,54	-
Tanjung Sekong	-0,06	-0,13	0,01	-0,01
Kotabaru	-0,07	-0,03	0,01	0,04
Baubau	-0,07	0,01	0,01	0,01

*Disajikan Kembali

*Restatement

Supply Loss

Supply Loss

Terminal	RKAP 2023 (%)	2023 (%)	2022* (%)	2021 (%)
Pulau Sambu Sambu Island	-0,13	0,09	-0,02	0,08
Tanjung Uban (BBM) (Fuel)	-0,13	0,06	-0,16	0,12
Tanjung Uban (LPG)	-0,13	-0,11	-0,09	-
Tanjung Sekong	-0,13	-0,04	-0,01	0,02
Kotabaru	-0,13	0,03	0,06	0,10
Baubau	-0,13	-0,02	0,00	0,10

*Disajikan Kembali

*Restatement

Integrated Port Time (IPT)

Integrated Port Time (IPT)

Terminal	RKAP 2023 (Jam) (Hour)	2023 (Jam) (Hour)	2022* (Jam) (Hour)	2021 (Jam) (Hour)
Pulau Sambu Sambu Island	59,06	30,64	37,61	38,89
Tanjung Uban	42,00	30,57	33,06	37,88
Tanjung Sekong	43,00	42,91	36,76	37,97
Kotabaru	35,00	26,63	18,29	22,76
Baubau	57,00	54,65	57,08	48,75

*Disajikan Kembali

*Restatement

Critical Equipment Availability (CEA)

Critical Equipment Availability (CEA)

Terminal	RKAP 2023 (%)	2023 (%)	2022 (%)	2021 (%)
Pulau Sambu Sambu Island	95	91	100	96,77
Tanjung Uban	95	97	98,65	91,15
Tanjung Sekong	95	95	97,82	100
Kotabaru	95	96	98,87	99,00
Baubau	95	100	98,00	95,73

Thruput Penyaluran

Throughput Distribution

Terminal	RKAP 2023 (KL atau MT) (KL or MT)	2023 (KL atau MT) (KL or MT)	2022 (KL atau MT) (KL or MT)	2021 (KL atau MT) (KL or MT)
Pulau Sambu Sambu Island	703.716	251.456	574.320	839.542
Tanjung Uban (BBM)	3.594.192	3.254.147	3.418.062	2.907.775
Tanjung Uban (LPG)	950.208	702.703	998.295	955.526
Tanjung Sekong	2.689.104	3.008.417	2.743.265	2.800.289
Kotabaru	1.367.532	1.492.139	1.397.058	1.381.930
Baubau	2.166.336	2.575.040	2.279.972	1.939.305

Fresh Water

Fresh Water

No	Keterangan Description	Audited 2022	RKAP 2023	Audited 2023	% Realisasi Audited 2023 terhadap % Audited Realization 2023 to	
		A	B	C	Audited 2023 (C/A)	RKAP 2023 (C/B)
		Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)
1	Volume air di Ciwandan Water Volume at Ciwandan	1.855.655	2.127.533	1.869.104	101%	88%
2	Volume air di Cab. Batam & Pulau Sambu Water Volume at Batam & Sambu Island Branches	1.407.017	1.173.070	1.033.638	73%	88%
3	Volume air di Cab. Belawan Water Volume at Belawan Branch	335	1.833	1.610	481%	88%
4	Volume air di Cab. Dumai Water Volume at Dumai Branch	19.938	16.867	14.818	74%	88%
5	Volume air di Cab. Pekanbaru Water Volume at Pekanbaru Branch	3.905	5.014	4.405	113%	88%
6	Volume air di Cab. Teluk Kabung Water Volume at Teluk Kabung Branch	27.957	30.350	26.663	95%	88%
7	Volume air di Cab. Tanjung Uban Water Volume at Tanjung Uban Branch	34.466	38.721	34.089	99%	88%

Fresh Water
Fresh Water

No	Keterangan Description	Audited 2022	RKAP 2023	Audited 2023	% Realisasi Audited 2023 terhadap % Audited Realization 2023 to	
		A	B	C	Audited 2023 (C/A)	RKAP 2023 (C/B)
		Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)
8	Volume air di Cab. Panjang Water Volume at Panjang Branch	21.685	21.396	18.797	87%	88%
9	Volume air di Cab. Plaju & STS Muntok Water Volume at Plaju & STS Muntok Branches	37.147	35.384	31.086	84%	88%
10	Volume air di Cab. Tg. Gerem & Tg. Sekong Water Volume at Tg. Gerem & Tg. Sekong Branches	17.983	22.289	19.623	109%	88%
11	Volume air di Cab. Tg. Priok Water Volume at Tg. Priok Branch	26.260	31.056	27.341	104%	88%
12	Volume air di Cab. Balongan & Cirebon Water Volume at Balongan & Cirebon Branches	5.423	6.596	5.795	107%	88%
13	Volume air di Cab. Surabaya & Gresik Water Volume in Surabaya & Gresik Branches	21.262	25.676	22.557	106%	88%
14	Volume air di Cab. Tanjung Wangi Water Volume at Tanjung Wangi Branch	10.854	11.674	10.277	95%	88%
15	Volume air di Cab. Manggis Water Volume at Manggis Branch	32.192	25.044	22.067	69%	88%
16	Volume air di Cab. Mauwere Water Volume at Mauwere Branch	805	0	0	-	-
17	Volume air di Cab. Kupang Water Volume at Kupang Branch	11.704	9.435	8.289	71%	88%
18	Volume air di Cab. Pontianak Water Volume at Pontianak Branch	13.200	9.736	8.553	65%	88%
19	Volume air di Cab. Kotabaru Water Volume at Kotabaru Branch	20.410	25.499	22.402	110%	88%
20	Volume air di Cab. Semarang Water Volume at Semarang Branch	0	228	200	0%	88%
21	Volume air di Cab. Balikpapan & Lawe2 Water Volume at Balikpapan & Lawe2 Branches	54.997	81.741	71.812	131%	88%

Fresh Water

No	Keterangan Description	Audited 2022	RKAP 2023	Audited 2023	% Realisasi Audited 2023 terhadap % Audited Realization 2023 to	
		A	B	C	Audited 2023 (C/A)	RKAP 2023 (C/B)
		Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)	Volume (M3)
22	Volume air di Cab. Wayame Water Volume at Wayame Branch	35.775	31.911	28.035	78%	88%
23	Volume air di Cab. Cilacap Water Volume at Cilacap Branch	39.335	34.333	30.163	77%	88%
24	Volume air di Cab. Tuban Water Volume at Tuban Branch	3.535	5.134	4.510	128%	88%
25	Volume air di Teluk Semangka Water Volume at Teluk Semangka	775	345	305	39%	88%
26	Volume air di Rembang Water Volume at Rembang	4.226	4.852	4.275	101%	88%
27	Volume air di Bima Water Volume at Bima	590	499	440	75%	88%
28	Distribusi AMDK Bottled Drinking Water Distribution	960	1.180	1.040	108%	88%
Total Tonase Total Tona		3.671.281	3.777.397	3.321.894	90%	88%

Waste Management

No	Project	Satuan (Unit)	2023	2022	2021	Δ%	
			1	2	3	(1-2):2	(2-3):3
1	PSTB	[Ton]	-	2.882,82	3.182,6	-	-9%
2	Deslopping (Dumai)		-	14.958,88	710,9	-	2.004%
Total			-	17.841,70	3.893,5	-	358%

Ikhtisar Saham & Obligasi

Stocks & Bonds Overview

Selama tahun 2023, PET tidak melakukan melakukan aksi korporasi terkait penawaran saham umum maupun penerbitan efek lainnya. Oleh karena itu, PET tidak memiliki informasi terkait ikhtisar saham dan/atau efek lainnya.

Throughout 2023, PET did not conduct any corporate actions related to public stock offerings or the issuance of other securities. Therefore, PET does not have any information regarding a summary of stocks and/or other securities.

Ikhtisar Dividen

Dividend Overview

Berdasarkan hasil RUPS yang dilaksanakan tahun 2023 untuk tahun buku 2022, PET tidak memberikan dividen kepada pemegang saham.

Based on the results of the GMS held in 2023 for the fiscal year 2022, PET did not distribute dividends to shareholders.

Ikhtisar Kinerja Lainnya

Other Performance Overview

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Pada tahun 2023, Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah 60,57 dengan katagori kurang sehat (BBB).

Assessment GCG

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan *self-assessment*.

Company Soundness Level

In 2023, the Company Soundness Level was 60.57 with Less Sound Category (BBB).

Assessment GCG

In 2023, the Company conducted self-assesment on GCG.



0.2

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT
REPORT





Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners Report



Bambang Sujito

Komisaris | Commissioner

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Kami Hormati

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya. Oleh perkenan-Nya, PT Pertamina Energy Terminal (PET) mampu menghadapi berbagai tantangan, melampaui target kinerja, dan mencatatkan pertumbuhan bisnis yang signifikan di tahun 2023. Pencapaian tersebut tentunya memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi Bangsa Indonesia, sesuai visi PET "Menjadi perusahaan terminal energi terintegrasi kelas dunia."

Kami, selaku Dewan Komisaris memastikan perusahaan dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, kami menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian selama periode pelaporan, juga pandangan atas prospek usaha, serta implementasi tata kelola perusahaan.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Kami melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi dengan mengacu pada pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Kami menilai Direksi telah mengelola PET dengan baik dan secara keseluruhan mampu melebihi target dan menjalankan proses bisnis sesuai dengan aspek *Good Corporate Governance* (GCG). Di tahun 2023, PET berhasil membukukan laba sebesar Rp68,10 miliar mengalami peningkatan sebesar 416,99% atau Rp54,93 miliar dari Rp13,17 miliar pada tahun 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2023, total aset PET Rp8,03 triliun atau meningkat 7,24%. Jumlah arus kas dari Aktivitas Investasi meningkat 44,83% atau sebesar Rp356,21 miliar dari Rp356,21 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp515,91 miliar pada tahun 2023. Kinerja kesehatan keuangan dengan pengukuran kesehatan BUMN mencapai angka ... yang masuk kategori Sehat.

Laporan Keuangan PET telah diaudit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*PricewaterhouseCoopers*), yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Daniel Kohar, S.E.,CPA tertanggal 30 April 2024 dengan pendapat atas Laporan Keuangan Konsolidasian PET tanggal 30 April 2024: menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kami berharap kinerja PET dapat terus maju, sehat, dan berkembang secara berkelanjutan.

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

We express our gratitude to God Almighty for His boundless grace. Through His grace, PT Pertamina Energy Terminal (PET) has been able to accomplish notable business growth in 2023, surpass performance goals, and overcome a number of obstacles. Indeed, these successes contribute indirectly to the Indonesian economy in line with PET's goal "To be a World Class Integrated Energy Terminal Company."

The Board of Commissioners is responsible for ensuring the business is run in a way that adheres to good corporate governance practices. Here, we offer our opinions on business prospects and the application of corporate governance, as well as the outcomes of our supervision and evaluation throughout the reporting period.

Evaluation of the Board of Directors' Performance

We assessed the performance of the Board of Directors by referring to the achievement of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). We find that the Board of Directors has managed PET well, exceeding targets and conducting business processes in accordance with Good Corporate Governance (GCG) principles. In 2023, PET successfully recorded a profit of Rp68.10 Billion increased by 416.99% or RP 54.93 Billion from Rp 13.17 Billion in 2022.

As of December 31, 2023, PET's total assets amounted to Rp8.03 trillion, reflecting a 7.24% increase. The cash flow from investment activities increased by 44.83%, or Rp356.21 billion, from Rp356.21 billion in 2022 to Rp515.91 billion in 2023. The financial soundness performance, as measured by the SOEs health score, reached ..., placing it in the Sound category.

PET's financial statements have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partners (*PricewaterhouseCoopers*), signed by Public Accountant Daniel Kohar S.E.,CPA on April 30, 2024, with an opinion on the Consolidated Financial Statements of PET dated April 30, 2024: presenting fairly, in all material respects, The financial position of the Company as of December 31, 2023, along with its financial performance and cash flows for the year ended, are in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. We hope PET's performance can continue to advance, remain sound, and develop sustainably.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Kami melaksanakan pengawasan terhadap implementasi strategi dan anggaran perusahaan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Bentuk pengawasan dilakukan melalui arahan, rekomendasi, dan nasihat kepada Direksi dengan tujuan untuk mencapai target RKAP. Secara berkala, kami melakukan kunjungan kerja lapangan yang bertujuan mengidentifikasi kondisi dan kendala di lapangan. Kami juga secara berkala mengevaluasi pencapaian RKAP, serta memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku.

Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin mengadakan rapat bersama setidaknya 1 kali dalam 1 bulan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat bersama dengan Direksi. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja PET dan berbagai kendala yang dihadapi.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dewan Komisaris menilai bahwa perumusan maupun implementasi strategi PET pada tahun 2023 berjalan dengan baik. Berbagai strategi seperti transformasi digital, peningkatan nilai sinergi Grup Pertamina, kemitraan strategis, telah dilakukan dengan baik. Akselerasi *green business* juga telah berjalan, baik melalui penggunaan teknologi energi bersih pada terminal. Kami akan memberikan dukungan dengan pengawasan yang seksama atas implementasi strategi usaha untuk memastikan PET menjalankan usaha dengan prinsip *operation excellence* yang sejalan dengan target, tujuan, dan rencana keberlanjutan PET.

Pandangan atas Prospek Usaha

Kinerja positif ekonomi dan industri di tahun 2023 diperkirakan akan terus berlanjut di tahun 2024. Meskipun demikian, Direksi perlu mempertimbangkan ancaman krisis ekonomi global yang dapat mempengaruhi ekonomi dan industri secara makro. Perusahaan perlu untuk terus mempertajam keunggulan kompetitifnya.

Dewan Komisaris menilai masih diperlukan peningkatan dan pendalaman kajian strategi Perseroan untuk dapat diwujudkan dalam bentuk RJPP yang dapat dijadikan pijakan bagi arah pertumbuhan dan perkembangan bisnis PET di masa depan. Dewan Komisaris mengarahkan bisnis ke depan dengan berbagai program yang juga menjadi visi Direksi antara lain dengan merencanakan:

1. Pengembangan pasar *non-captive* dan pasar global.
2. Peningkatan PET ke peringkat asia dalam hal terminal

Supervision of Strategy Implementation

We oversee the implementation of the company's strategies and budget as outlined in the Work Plan and Budget (RKAP). Our supervision includes guidance, recommendations, and advice to the Board of Directors with the aim of achieving RKAP targets. Regularly, we conduct field visits to identify conditions and obstacles on the practice. We periodically evaluate the achievement of the RKAP and ensure the Company's compliance with applicable laws and norms.

The Board of Commissioners and the Board of Directors constantly hold joint meetings at least once a month. Throughout 2023, the Board of Commissioners held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. In these forums, the Board of Commissioners can request explanations from the Board of Directors regarding PET's performance achievements and various challenges faced.

The Board of Commissioners sees the development and execution of PET's strategies in 2023 have been carried out effectively based on our assessment. Numerous tactics, including digital transformation, augmenting the Pertamina Group's synergistic value, and forming strategic alliances, have been effectively executed. Additionally, the green business acceleration has advanced well, especially with the terminal's usage of clean energy technologies. In order to guarantee PET operates with operational excellence in line with PET's ambitions, objectives, and sustainability plans, we will continue to offer support and comprehensive supervision of business strategy implementation.

Outlook on Business Prospects

The positive economic and industrial performance in 2023 is expected to continue into 2024. However, the Board of Directors needs to consider the threat of a global economic crisis that could impact the economy and industry at a macro level. The Company needs to continuously sharpen its competitive edge.

The Board of Commissioners believes further enhancement and in-depth study of the Company's strategies are needed, which should be reflected in RJPP to serve as a foundation for PET's future growth and business development. The Board of Commissioners directs future business with various programs relevant to the vision of the Board of Directors, including planning for:

1. Development of non-captive and global markets
2. Elevation of PET to an Asia-ranking terminal

Dewan Komisaris memberikan tanggapan positif atas prospek usaha yang telah disusun Direksi. Tanggapan ini kami sampaikan dengan memperhatikan peluang usaha di masa depan, serta arahan dan kebijakan PT Pertamina (Persero) maupun pemangku kepentingan lainnya. Pengembangan usaha di bidang Terminal menjadi hal signifikan yang menopang ketahanan energi. Kami memandang upaya pengembangan bisnis PET melalui penjajakan pasar baru, sinergi Grup Pertamina, serta kemitraan strategis, mampu memberikan hasil positif pada tahun 2023. Kami mendukung keberlanjutan pengembangan bisnis ini sebagai langkah pemanfaatan prospek usaha PET.

Selanjutnya dalam strategi PET ke depan diperlukan pula penyusunan peta jalan *green energy business* dengan mengacu kepada *Grand Strategy* Energi Nasional yang disusun Pemerintah dan kebijakan PT Pertamina (Persero) tentang pengembangan energi baru terbarukan (EBT).

Secara organisasi, Direksi diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi, untuk meraih peluang prospek usaha. Kami berharap Direksi selalu merencanakan prospek usaha dengan mengelola risiko yang mungkin timbul dengan efektif, serta mengevaluasi proses bisnis dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, kepatuhan, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Kami memberikan dukungan penuh agar PET terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan demi tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penilaian atas Efektivitas Pengendalian Internal dan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris menyadari bahwa pengendalian internal yang efektif dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan syarat kunci untuk mencapai kinerja PET yang berkelanjutan.

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan pengawasan jalannya penerapan GCG dan pengendalian internal melalui berbagai mekanisme rapat dan pertemuan antara lain rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (setiap bulan) serta secara berkala melakukan kunjungan kerja ke Terminal. Terhadap pengukuran untuk GCG PET di Tahun 2023, serta dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, Dewan Komisaris telah memberikan arahan untuk dilakukan *Self Assessment* GCG PET untuk tahun buku 2023.

The Board of Commissioners positively responds to the business prospects prepared by the Board of Directors. This response considers future business opportunities, as well as the guidance and policies of PT Pertamina (Persero) and other stakeholders. Business development in the terminal sector is significant in supporting energy security. We view PET's business development efforts through exploring new markets, synergy within the Pertamina Group, and strategic partnerships as capable of yielding positive results in 2023. We support the sustainability of this business development as a step towards leveraging PET's business prospects.

Furthermore, future PET strategies require the formulation of a green energy business roadmap, referring to the Government's National Energy Grand Strategy and PT Pertamina (Persero)'s policies on the development of new and renewable energy (EBT).

Organizationally, the Board of Directors is expected to continue enhancing synergy to seize business opportunities. It is our aim that the Board of Directors would consistently consider prudence, compliance, health, safety, and environmental principles while planning business opportunities and evaluating business operations. We wholeheartedly back PET's efforts to attain sustainable growth by enhancing and streamlining its operations over time.

Assessment of the Effectiveness of Internal Control and Corporate Governance Implementation

The Board of Commissioners recognizes that effective internal control and good corporate governance (GCG) implementation are key prerequisites for achieving sustainable PET performance.

In 2023, the Board of Commissioners monitored GCG implementation and internal control through various meeting mechanisms, including monthly meetings with the Board of Directors and periodic field visits to the terminal. Regarding GCG measurement for PET in 2023, and in response to the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decision No. SK-12/S.MBU/08/2023 on the Revocation of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decision No: SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/Parameters for the Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance Implementation in State-Owned Enterprises, the Board of Commissioners has directed a Self-Assessment of PET's GCG for the 2023 financial year.

Ikhtisar Utama	<i>Self Assessment GCG PET</i> untuk tahun buku 2023 harus dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, serta tetap memperhatikan arahan dari <i>Holding</i>. Dalam pelaksanaan <i>Assessment GCG</i> untuk tahun buku 2023 dimaksud agar fokus pada evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan (rekomendasi <i>area of improvement</i> tahun 2022). Oleh karena itu, kami berharap kualitas penerapan GCG dapat dipertahankan serta terus ditingkatkan, terutama dalam meningkatkan efisiensi proses kerja dan tanggung jawab pada setiap tugas yang diberikan.
Laporan Manajemen	Dalam penerapan praktik pengendalian internal, sistem pengendalian internal perlu dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan Kementerian BUMN maupun standar COSO. Peningkatan <i>Internal Control over Financial Reporting</i> (IcoFR) serta mengadopsi dan menerapkan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diperlukan untuk menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberantas korupsi maupun gratifikasi.
Profil Perusahaan	Selain itu dalam rangka memperkuat penerapan pengendalian internal, PET telah memiliki Organisasi Audit Internal yang saat ini tugasnya dilakukan oleh Internal Audit PT Pertamina International Shipping (PIS), untuk melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi eksternal auditor yang disampaikan dalam <i>Internal Control Memorandum</i> (ICM) oleh KAP maupun Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK RI.
Analisis dan Pembahasan Manajemen	Dalam hal mitigasi risiko tindak kecurangan (fraud), terdapat instrumen penguat dalam bentuk saluran <i>Whistle Blower System</i> (WBS) di lingkungan PET yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina (Persero), PET mengadopsi sistem pemantauan risiko, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal PT Pertamina (Persero), serta menerapkannya dalam setiap aspek pengelolaan usaha.
Tata Kelola Perusahaan	Sementara pada tata kelola teknologi informasi dan komunikasi, PET telah menerapkan keandalan teknologi informasi, yang dilengkapi dengan perlindungan keamanan data maupun perlindungan dari serangan siber. PET juga telah melaksanakan program-program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara konsisten sebagai bagian kontribusi perusahaan kepada masyarakat.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi yang telah memiliki komitmen untuk mewujudkan pengelolaan bisnis secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, melalui penerapan GCG dan implementasi sistem pengendalian internal.

The GCG Self-Assessment for the 2023 financial year should be conducted according to the provisions of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, while also taking guidance from the Holding. In the implementation of the GCG Assessment for the 2023 financial year, focus should be on evaluating the assessment results and following up on improvement recommendations (2022's recommended areas of improvement). Therefore, we hope the quality of GCG implementation can be maintained and continuously improved, especially in enhancing the efficiency of work processes and responsibility for each assigned task.

The internal control system needs to be established in accordance with the Ministry of State-Owned Enterprises regulations and COSO standards. Enhancing Internal Control over Financial Reporting (IcoFR) and adopting ISO 37001:2016 on Anti-Bribery Management Systems (SMAP) are necessary to demonstrate the Company's commitment to combating corruption and gratuities.

In addition, in order to strengthen the implementation of internal controls, PET has an Internal Audit Organization whose current tasks are carried out by the PIS, to monitor the follow-up of external auditors' recommendations submitted in the Internal Control Memorandum (ICM) by the CAP as well as the Inspection Results Report by the BPK RI.

In the case of mitigating the risk of fraud, there are reinforcements in the form of the Whistle Blower System (WBS) channel in the PET environment which is currently managed by the PT Pertamina (Persero), PET adopts a risk monitoring system, risk management, and internal control system, and implements them in every aspect of business management.

While regarding the information and communication technology governance, PET has implemented information technology reliability, which comes with data security protection as well as protection from cyber attacks. PET has also implemented Social and Environmental Responsibility (SRE) programs consistently as part of the Company's contribution to society

The Board of Commissioners appreciates the Board of Directors' commitment to achieving responsible and sustainable business management through GCG implementation and internal control systems.

Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, tidak terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komisaris: Hufron Asrofi

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi anggota Komisaris berdasarkan Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal sesuai ketentuan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tentang penggantian komisaris PT Pertamina Energy Terminal Tanggal 05 Maret 2024. Susunan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal adalah sebagai berikut:

Komisaris: Bambang Sujito

Apresiasi

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas kerja sama dan jalinan hubungan yang baik selama ini. Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada jajaran Direksi atas dedikasi dan kinerjanya, yang membawa PET memperoleh pencapaian membanggakan di tahun 2023. Penghargaan ini juga kami sampaikan kepada seluruh Perwira PET di seluruh wilayah kerja yang telah memberikan kemampuan terbaiknya.

Kami berharap PET terus mengembangkan kapasitasnya dan memperluas jangkauan pasar sebagai penyedia jasa terminal yang terintegrasi, memperluas bisnisnya, serta turut memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bangsa Indonesia.

Composition of the Board of Commissioners

There are no changes to the composition of the Board of Commissioners in 2023. Therefore, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 is as follows:

Commissioner: Hufron Asrofi

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners based on the Circular Shareholders Resolution of PT Pertamina Energy Terminal in accordance with Article 10, Paragraph 5 of the company's Articles of Association regarding the replacement of commissioners of PT Pertamina Energy Terminal dated March 5, 2024. The composition of the Board of Commissioners of PT Pertamina Energy Terminal is as follows:

Commissioner: Bambang Sujito

Appreciation

We extend our gratitude to all stakeholders for their cooperation and good relations over the years. We express our high appreciation to the Board of Directors for their dedication and performance, which led PET to achieve notable accomplishments in 2023. This appreciation is also extended to all PET Officers across all work areas who have given their best efforts.

We hope that PET continues to develop its capacity, expand its market reach as an integrated terminal service provider, grow its business, and contribute positively to the Indonesian economy.

Jakarta, Mei 2024 | Jakarta, May 2024

Atas Nama Dewan Komisaris
PT Pertamina Energy Terminal
On behalf of the Board of Commissioners,
PT Pertamina Energy Terminal

Bambang Sujito
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Bayu Prostiyo

Direktur | Director

“ Direksi telah menetapkan kebijakan strategis agar Perusahaan dapat melalui berbagai tantangan yang sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka menengah dan panjang Perusahaan.

The Board of Directors have established strategic policies for the Company to navigate various challenges, which are part of the Company’s medium and long-term strategies. ”

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Atas nama Direksi PT Pertamina Energy Terminal merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT Pertamina Energy Terminal Tahun 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Adapun yang tertuang dalam laporan tahunan ini merupakan gambaran dari langkah-langkah strategis yang telah dilakukan manajemen dalam memberikan dampak positif terhadap kinerja perseroan secara berkelanjutan.

Tinjauan Makro Ekonomi

Kondisi perekonomian global maupun nasional masih dihadapkan dengan tekanan dan ketidakpastian, sebagai dampak belum berakhirnya konflik geopolitik kawasan. Ekonomi negara-negara Eropa melemah dipicu oleh dampak eskalasi ketegangan geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina dan Kawasan Timur Tengah. Konflik geopolitik kawasan tersebut telah menyebabkan pasokan komoditas dan energi ke negara-negara Eropa terhambat dan terganggunya *supply chain* beberapa komoditas yang dibutuhkan industri.

Dikutip dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 diperkirakan turun ke 3,0% dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024. Kinerja ekonomi global pada 2023 menampilkan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi, dengan negara-negara EMDEs yang mengalami penurunan dan stagnasi. Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan akan turun dari 1,6% pada 2023 menjadi 1,4% pada 2024 sebelum meningkat menjadi 1,7% pada 2025. Sementara pertumbuhan negara EMDEs akan turun dari 4,0% pada 2023 menjadi 3,8% pada 2024 dan stagnan 3,8% pada 2025. Di negara maju, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi yaitu 2,3% pada 2023, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 tetap kuat di tengah perlambatan ekonomi global. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan domestik dan kinerja ekspor yang terus positif. Pertumbuhan ekspor didukung oleh permintaan kuat dari mitra perdagangan utama. Indonesia sendiri menikmati “surplus” pada kenaikan harga beberapa komoditas. Konsumsi rumah tangga meningkat seiring dengan peningkatan mobilitas dan daya beli yang meningkat,

Dear Valued Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Directors of PT Pertamina Energy Terminal, it is an honor to present the 2023 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal as a form of accountability to our shareholders and all stakeholders. The annual report outlines the strategic steps management has taken to deliver a sustainable positive impact on the Company's performance.

Macroeconomic Review

Global and national economic conditions continue to face pressure and uncertainty, resulting from the ongoing geopolitical conflicts in certain regions. The economies of European countries have weakened due to the escalation of geopolitical tensions, particularly between Russia and Ukraine, and in the Middle East. These regional geopolitical conflicts have disrupted commodity and energy supplies to European countries and affected the supply chain of several industrial commodities.

According to the 2023 Economic Report by Bank Indonesia, global economic growth slowed with increasing uncertainty. After recording high growth of 3.5% in 2022, global economic growth in 2023 is projected to decrease to 3.0% and continue to slow to 2.8% in 2024. The global economic performance in 2023 showed divergent growth between advanced economies, notably the United States (US), which grew relatively high, and emerging markets and developing economies (EMDEs), which experienced decline and stagnation. Economic growth in advanced economies is forecasted to decrease from 1.6% in 2023 to 1.4% in 2024 prior to increasing to 1.7% in 2025. Meanwhile, growth in EMDEs will decrease from 4.0% in 2023 to 3.8% in 2024 and remain at 3.8% in 2025. In advanced economies, economic growth is driven by the US, which is expected to grow relatively high at 2.3% in 2023, supported by household consumption and domestically oriented service sectors.

On the other hand, Indonesia's economic growth in 2023 remains strong amidst the global economic slowdown. It is driven by increased domestic demand and continued positive export performance, supported by strong demand from key trading partners. Indonesia has benefited from a “surplus” due to rising prices of several commodities. Household consumption has increased along with improved mobility and purchasing power, and lower inflation. Indonesia's Balance of

serta penurunan inflasi. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mendukung tetap terjaganya stabilitas eksternal. Penguatan nilai tukar Rupiah berlanjut sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kendala-Kendala yang Dihadapi Perusahaan

Iklim perekonomian makro maupun mikro di sepanjang tahun 2023 bergerak secara dinamis, hal tersebut menimbulkan tantangan tersendiri selaras dengan dampak kinerja Perusahaan pada masing-masing segmen usaha.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh PET tahun 2023 antara lain:

1. Sarana dan fasilitas *sub-standard*
2. Kapasitas dan kapabilitas SDM yang terbatas
3. Evaluasi dan negosiasi tarif komersial
4. Penyelesaian *dispute* novasi/addendum kontrak

Implementasi Strategi serta Kinerja Tahun 2023

Guna menjamin inisiatif strategis yang selaras dengan pencapaian *shareholder's aspiration* dan RJP, pada tahun 2023 Perusahaan memiliki strategi, antara lain:

1. Optimasi biaya operasional
2. Meningkatkan kinerja operasional terminal dengan *upgrading* dan revitalisasi sarfas untuk kehandalan infrastruktur operasi dan aspek *safety*
3. Optimasi struktur organisasi
4. Penetrasi pasar baru dan ekspansi bisnis
5. Menangkap peluang bisnis baru serta menambah portfolio
6. Optimalisasi biaya dengan skema kerja sama, baik itu *sharing fee* atau *profit sharing*
7. Penerapan ESG dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan di berbagai lini operasional
8. Upaya dekarbonisasi
9. Meningkatkan *image* sebagai Green Terminal

Peran Direksi dalam Penerapan Kebijakan Strategis

Direksi beserta jajaran senantiasa berkomitmen untuk fokus terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun 2023 dengan 5 sasaran yaitu *Financial*, *Customer Focus*, *Internal Process*, *Learning Growth*, dan *Boundary KPI*.

Peranan Direksi dalam penentuan, perumusan, dan pengimplementasian kebijakan strategis Perseroan sangat penting, dalam memastikan keberhasilan kebijakan strategis. Direksi senantiasa melakukan pengkajian dan observasi mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi. Lebih lanjut, Direksi juga senantiasa melakukan pengawasan secara berkelanjutan, serta melakukan

Payments (BoP) performance supports maintaining external stability. The strengthening of the Rupiah exchange rate continues in line with the consistency of Bank Indonesia's monetary policy and the easing of global financial market uncertainties.

Challenges Faced by the Company

The macro and microeconomic climate throughout 2023 has been dynamic, presenting unique challenges that align with the impact on the Company's performance across its business segments. Some of the challenges faced by PT Pertamina Energy Terminal (PET) in 2023 include:

1. Sub-standard facilities and infrastructure;
2. Limited capacity and capabilities of human resources
3. Evaluation and negotiation of commercial tariffs
4. Resolving disputes related to contract novation/addendums

Implementation of Strategies and Performance in 2023

In ensuring strategic initiatives in line with shareholder aspirations and the Company's Long-Term Plan (RJP), the Company had several strategies in 2023, including:

1. Operational cost optimization
2. Enhancing terminal operational performance through upgrading and revitalizing facilities for operational infrastructure reliability and safety aspects
3. Organizational structure optimization
4. Penetrating new markets and expanding business
5. Capturing new business opportunities and expanding the portfolio
6. Cost optimization through cooperation schemes such as sharing fees or profit sharing
7. Implementing ESG by using environmentally friendly technology and renewable energy across various operational lines
8. Efforts in decarbonization
9. Enhancing the image as a Green Terminal

Role of the Board of Directors in Strategic Policies Implementation

The Board of Directors and their team are consistently committed to achieving the targets set in 2023 with five objectives: Financial, Customer Focus, Internal Process, Learning Growth, and Boundary KPI.

The role of the Board of Directors in determining, formulating, and implementing the Company's strategic policies is crucial to ensure the success of these policies implementation. The Board of Directors constantly conducts in-depth reviews and observations of the challenges faced. Furthermore, the Board of Directors also continuously monitors and evaluates the

evaluasi pengimplementasian kebijakan strategis untuk memberikan hasil yang lebih baik ke depannya.

Kinerja PET Tahun 2023

Seiring dengan perbaikan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan, kinerja Perusahaan 2023 dibawah target yang ditetapkan. Kinerja Utama Perseroan Tahun 2023 diukur melalui 5 (lima) perspektif, yaitu *Financial*, *Customer Focus*, *Internal Process*, *Learning Growth*, dan *Boundary KPI*. Nilai total KPI PET tahun 2023 tercapai 101,60%.

Pada tahun 2023, pendapatan sebesar Rp953,54 miliar atau turun 0,85% dari target RKAP 2023. Penurunan tersebut terjadi karena belum maksimalnya utilisasi penggunaan *storage* di Pulau Sambu, adanya pengalihan *supply* ke Arun, serta adanya penetapan harga pertalite yang terlalu tinggi pada tahun 2022 dimana harga tersebut menjadi basis acuan angka dalam penetapan RKAP 2023, sehingga angka RKAP 2023 yang ditetapkan terlalu tinggi. Perusahaan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp68,10 miliar atau naik 54,94% dari target RKAP 2023.

Prospek Usaha

Dalam *World Economic Outlook* (WEO) edisi Januari 2024, IMF mengestimasi ekonomi Indonesia sama-sama tumbuh 5,0% pada 2023 dan 2024. IMF juga memperkirakan ekonomi global tumbuh stabil di level 3,1% pada 2023 dan 2024. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun ini ditopang adanya perbaikan kondisi di China, Amerika Serikat, dan negara-negara berkembang. IMF juga menggambarkan proyeksi ekonomi global 2024 dengan istilah “*resilient but slow*”, atau “tangguh meskipun lambat”.

Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa harga komoditas bahan bakar dan non-bahan bakar akan turun pada 2024-2025, dan tingkat suku bunga di negara-negara maju akan menurun. IMF memperkirakan rata-rata harga minyak bumi akan turun 2,3% pada 2024, dan harga komoditas non-bahan bakar turun 0,9%.

Kemudian suku bunga bank sentral di AS, Eropa, dan Inggris diprediksi turun mulai semester kedua 2024, seiring dengan melandainya inflasi di negara-negara tersebut. Secara kumulatif, IMF memproyeksikan inflasi global akan turun dari 6,8% pada 2023, menjadi 5,8% pada 2024.

PET telah menyiapkan rangkaian strategi yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024. Pada tahun 2024, Perusahaan akan fokus untuk dapat melaksanakan inisiatif yang *Big & Bold* seiring dengan upaya memantapkan *positioning* PET dalam bisnis terminal.

implementation of strategic policies to achieve better results in the future.

PET Performance in 2023

With the continuous improvement in business management, the Company’s performance in 2023 was below the set targets. The main performance of the Company in 2023 was measured through five perspectives: Financial, Customer Focus, Internal Process, Learning Growth, and Boundary KPI. The total KPI score achieved by PET in 2023 was 101.61%.

In 2023, the revenue amounted to Rp953.54 billion, dropping by 0.85% from the 2023 RKAP target. This drop occurred due to the suboptimal utilization of storage at Pulau Sambu, impact of supply shifts to Arun, and the high price of Pertalite in 2022, which became the basis for the 2023 RKAP target, resulting in an excessively high 2023 RKAP target. The Company recorded a profit for the year of Rp68.10 billion, an increase of 59.94% from the 2023 RKAP target.

Business Prospects

In the January 2024 edition of the World Economic Outlook (WEO), the IMF estimated Indonesia’s economy to grow by 5.0% in both 2023 and 2024. The IMF also forecasted global economic growth to remain stable at 3.1% in 2023 and 2024. According to the IMF, global economic growth this year is supported by improved conditions in China, the United States, and developing countries. The IMF described the 2024 global economic outlook as “*resilient but slow*.”

This projection is based on the assumption of declining fuel and non-fuel commodity prices in 2024-2025, and decreasing interest rates in developed countries. The IMF predicted the average price of crude oil would drop by 2.3% in 2024, and non-fuel commodity prices would fall by 0.9%.

Additionally, central bank interest rates in the US, Europe, and the UK are expected to decrease starting from the second half of 2024, as inflation in these countries subsides. Cumulatively, the IMF projects global inflation to decrease from 6.8% in 2023 to 5.8% in 2024.

PET has prepared a series of strategies outlined in the 2024 Work Plan and Budget (RKAP). In 2024, the Company will focus on executing “Big & Bold” initiatives in an effort to solidify PET’s positioning in the terminal business.

Penerapan Governansi Perusahaan

PET berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Governansi di setiap aktivitas usaha untuk menciptakan Perusahaan yang berintegritas dan terpercaya. Pengelolaan Perusahaan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip GCG sesuai peraturan perundang-undangan dan *best practice* untuk menghasilkan nilai yang optimal bagi pemegang saham, dan manfaat bagi pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar.

Komitmen PET terhadap implementasi GCG direalisasikan melalui pembentukan organ-organ Perseroan sesuai dengan kaidah dan landasan GCG di Indonesia baik Organ Utama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maupun Organ Pendukung seperti komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan *Whistleblowing System* (WBS).

Pada tahun 2023, PET telah melakukan *self-assessment* terhadap penerapan GCG dalam lingkungan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan telah menindaklanjuti 106 AOI terhadap 152 AOI yang kami evaluasi. Hal ini menggambarkan peningkatan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh Organ Perusahaan di PET pada tahun 2023, sekaligus juga merupakan perwujudan upaya PET untuk terus tumbuh secara berkesinambungan.

Untuk meningkatkan penerapan Governansi oleh Perwira PET, pelatihan dan sosialisasi terkait Governansi diberikan secara berkala kepada seluruh Perwira.

Tanggung Jawab Sosial

Perusahaan memandang tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaganya kesehatan dan keselamatan kerja, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan yang menyentuh 3 (tiga) aspek CSR yakni Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan.

Komitmen Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan mencerminkan dedikasinya untuk menjadi perusahaan korporatif yang bertanggung jawab, turut berkontribusi pada pembangunan jangka panjang, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Corporate Governance Implementation

PET is committed to applying governance principles in every business activity to create an integrity and trustworthy Company. The Company's management always refers to GCG principles following regulations and best practices to generate optimal value for shareholders and benefits for stakeholders and the surrounding community.

PET's commitment to GCG implementation is realized through the establishment of corporate organs according to GCG principles in Indonesia, including main organs like the General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors, as well as supporting organs like committees, Corporate Secretary, Internal Audit, and Whistleblowing System (WBS).

In 2023, PET conducted a self-assessment of GCG implementation within the Company. Additionally, the Company has followed up on 106 AOIs out of the 152 AOIs that we evaluated. It reflects an improvement in the implementation of Good Corporate Governance across all Company Organs in PET in 2023, and it also represents PET's efforts to continue growing sustainably.

In enhancing governance implementation by PET employees, governance-related training and socialization are provided periodically to all employees.

Corporate Social Responsibility

The company views Corporate Social Responsibility (CSR) as a manifestation of its concern for the environment, respect for human rights, the obligation to provide a comfortable workplace, maintaining good working relationships with employees, prioritizing health and safety, and participating in the development of the local economy and community.

Through its Social Responsibility Program, the Company supports community development and environmentally sustainable development, consistently and continuously addressing the three aspects of CSR: Economic, Social, and Environmental.

The Company's commitment to social responsibility reflects its dedication to being a responsible corporate entity, contributing to long-term development, and improving community welfare.

Komposisi Direksi

Selama tahun 2023, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

1 Januari 2023-03 Juli 2023
Direktur: Hari Purnomo

03 Juli 2023-31 Desember 2023
Direktur: Bayu Prostiyo

Apresiasi

Dalam kesempatan ini, Direksi ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada pemegang saham, Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan atas kepercayaan serta dukungannya selama ini. Apresiasi juga ditujukan kepada Perwira PET serta mitra usaha yang senantiasa mendorong untuk terus mengoptimalkan potensi yang dimiliki Perusahaan. Kami senantiasa optimis Perusahaan akan terus menciptakan nilai tambah dan pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang.

Composition of the Board of Directors

During 2023, there were changes in the composition of the Board of Directors. The changes in the Board of Directors composition are as follows:

January 1, 2023 - July 3, 2023
Director: Hari Purnomo

July 3, 2023 - December 31, 2023
Director: Bayu Prostiyo

Appreciation

On this occasion, the Board of Directors would like to express their gratitude to the shareholders, the Board of Commissioners, and stakeholders for their trust and support. Appreciation is also extended to PET officers and business partners who continually drive the Company to optimize its potential. We remain optimistic the Company will continue to create added value and sustainable performance growth in the future.

Jakarta, Mei 2024 | Jakarta, May 2024

Atas Nama Dewan Direksi
PT Pertamina Energy Terminal
On behalf of the Board of Directors,
PT Pertamina Energy Terminal

Bayu Prostiyo
Direktur
Director

0.3

PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE





Identitas Perusahaan

Company Identity

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan
Manajemen

Tata Kelola
Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan





Nama Perusahaan
Company Name

PT Pertamina Energy Terminal (PET)



Tanggal Pendirian
Establishment Date

21 Januari 1988
January 21, 1988



Status Perusahaan
Company Status

Cucu Perusahaan BUMN
Second Tier Subsidiary of State Owned Enterprise

Dasar Hukum Pendirian

Legal Basis of Establishment

Akta No. 69 oleh Ny. Yetty Taher, S.H., Tanggal 21 Januari 1988 di Jakarta
Deed No. 69 by Mrs. Yetty Taher, S.H., January 21, 1988 in Jakarta



Kepemilikan
Share ownership

PT Pertamina International Shipping ("PIS") 99,98301%
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK") 0,01698%
PT Pertamina Port and Logistics ("PPL") 0,00001%



Modal Dasar
Authorized Capital

Rp38.214.276.000.000,00 (tiga puluh delapan triliun dua ratus empat belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta Rupiah)
Rp 38,214,276,000,000.00 (thirty eight trillion two hundred fourteen billion two hundred seventy six million Rupiah)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Per 31 Desember 2023
Issued and Fully Paid-Up Capital as of December 31, 2023

Rp9.957.086.000.000 (Sembilan Triliun Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Enam Juta Rupiah) dengan modal dasar dibagi menjadi 9.957.086 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam) lembar saham dengan nilai Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
Rp 9,557,086,000,000 (Nine Trillion Five Hundred Fifty Seven Billion and Eighty Six Million Rupiah) with authorized capital 9,957,086 (Nine Million Nine Hundred Fifty Seven and eighty six Rupiah) shares with a value of IDR 1,000,000.00 (One Million Rupiah)



Bidang Usaha Utama
Primary Business Field

Tank Terminal
Fresh Water Supply



Jumlah Karyawan 2023
Number of Employees in 2023

155 Pekerja
155 Employees



Alamat Kantor Pusat dan Akses Informasi Perusahaan
Head Office Address and Company Information

Kantor Pusat
Head Office
Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten 42446
Fax: (0254) 601148
Telp: (0254) 601146/601147
Email: corsec.pet@pertamina.com
Instagram: pet.pertamina
Youtube: Pertamina Energy Terminal
Website: https://pertamina-pet.com

Kantor Bisnis
Business Office

Jl. Yos Sudarso No.205, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360

Riwayat Singkat Perusahaan

Company Brief History



PT Pertamina Energy Terminal sudah berdiri sejak 21 Januari 1988 menjadi perusahaan yang menyediakan berbagai jasa salah satunya adalah pengelolaan air bersih. Perjalanan bisnis PT Pertamina Energy Terminal merambah ke produksi air mineral dalam kemasan dengan merek Patraqua pada tahun 2016. Selanjutnya di tahun 2019 PT Pertamina Energy Terminal kembali melebarkan lini bisnis ke Waste Management.

Tahun 2021 menjadi momentum bersejarah bagi PT Pertamina Energy Terminal. Di tahun 2021 menjadi tonggak awal PT Pertamina Energy Terminal merambah ke dunia terminal, setelah dipercaya oleh PT Pertamina (Persero) untuk mengelola 6 terminal dan terjadi *spin off* 6 terminal sebagai aset milik PT Pertamina Energy Terminal. Di tahun yang sama pula, PT Pertamina Energy Terminal resmi diambil alih dan menjadi anak perusahaan PT Pertamina International Shipping.

Pada tahun 2022 Perseroan melakukan rebranding dengan nama baru PT Pertamina Energy Terminal, berdasarkan pernyataan keputusan Pemegang Saham perubahan Anggaran Dasar No. 17 tanggal 28 November 2022.

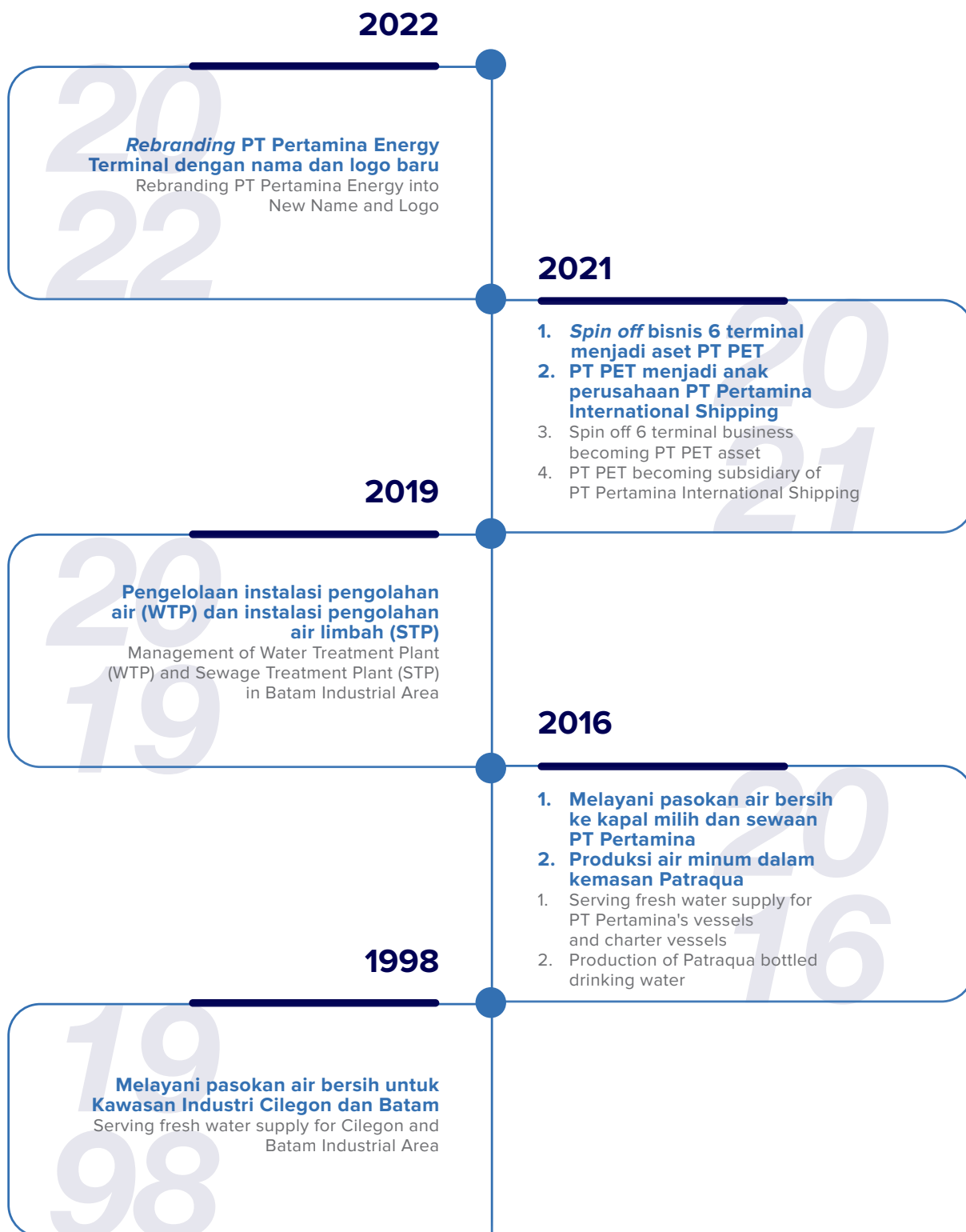
PT Pertamina Energy Terminal was established on January 21, 1988, as a company that provides various services including fresh water management. The business journey of PT Pertamina Energy Terminal expanded to producing bottled mineral water under the brand Patraqua in 2016. Furthermore, in 2019, PT Pertamina Energy Terminal diversified its business lines into Waste Management.

The year 2021 was a historic moment for PT Pertamina Energy Terminal. PT Pertamina Energy Terminal began its journey into the terminal industry, after being entrusted by PT Pertamina (Persero) to manage 6 terminals and spin off these 6 terminals as assets owned by PT Pertamina Energy Terminal. In the same year, PT Pertamina Energy Terminal was officially taken over and became a subsidiary of PT Pertamina International Shipping.

In 2022, the Company underwent rebranding with a new name, PT Pertamina Energy Terminal, based on the decision of the Shareholders regarding the change in the Articles of Association No. 17 dated November 28, 2022.

Jejak Langkah Perusahaan

Corporate Milestone



Main Overview

Management Report

Company Profile

Management Discussion and Analysis

Good Corporate Governance

Corporate Social Responsibility

Visi dan Misi Perusahaan

Company Vision and Mission

PET telah memformulasikan dan mengembangkan Visi dan Misi Perusahaan sesuai dengan rujukan regulasi yang berlaku serta praktik-praktik terbaik. Visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Visi dan Misi Perusahaan kami adalah sebagai berikut:

PET has formulated and developed Company Vision and Mission according to applicable regulation guidelines and best practices. Company Vision and Mission has been approved by the Board of Commissioners and Board of Directors. Vision and Mission of the Company are as follows:

VISI *VISION*

**Menjadi Perusahaan
Terminal Energi
Terintegrasi Kelas
Dunia**

To be a World Class
Integrated Energy
Terminal Company

MISI *MISSION*

1. Menjalankan bisnis jasa pengelolaan terminal secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat dengan mengutamakan aspek keselamatan, keberlanjutan, lingkungan, dan layanan prima.
 2. Mengembangkan *World Class Green Terminal* dalam mendukung penerapan *Environmental, Social and Governance (ESG)* dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan.
1. To carry out integrated terminal handling services business based on strong commercial principles by emphasizing safety, sustainability, environment, and service excellence.
 2. Develop World Class Green Terminal to support implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) by utilizing green technology and renewable energy.



Tata Nilai Perusahaan

Company Values

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Usaha Milik Negara sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, akselerator kesejahteraan sosial (*social welfare*), penyedia lapangan kerja, dan penyedia talenta, dibutuhkan transformasi Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, dimana salah satunya melalui penetapan Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Oleh karena itu, PET menjunjung tinggi nilai-nilai Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK) yang menjadi *core values* setiap insan PT Pertamina (Persero) selaku induk Perusahaan PET dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Adapun AKHLAK yang senantiasa dijalankan PET adalah sebagai berikut:

In the event of establishment of State Owned Enterprise role as developing engine for economy, accelerator of social welfare, job provider, and talent provider, transformation of Human Resource of State Owned Enterprise is required, where one of the implementation is through Core Values determination of Human Resource of State Owned Enterprise as identity and adhesive work culture to supports sustainable performance improvement. Therefore, PET upholds the value of Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative (AKHLAK) as core values of employees of PT Pertamina (Persero) as Holding of PET in conducting its business. Whereas AKHLAK PET always carries as the following:

AKHLAK

A

Amanah

Menjunjung tinggi dengan amanah yang telah diberikan

Trustworthy

Uphold the trust given.

K

Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kemampuan.

Competent

Continue to learn and develop capabilities.

H

Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan.

Harmonious

Care for each other and respect differences.

L

Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Loyal

Remain dedicated and prioritize the interests of the nation and country.

A

Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

Adaptive

Continue to innovate and be enthusiastic about moving forward or facing the changes.

K

Kolaboratif

Membangun kerja sama yang sinergis.

Collaborative

Build synergistic cooperation.

Bidang Usaha

Line of Business

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Akta No 90 Pasal 3, PT Pertamina Energy Terminal memiliki bidang usaha sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan
2. *Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi*
3. Konstruksi
4. Perdagangan Besar dan Eceran reparasi Mobil dan Sepeda Motor
5. Pengangkutan dan Pergudangan

Kegiatan usaha yang sedang berlangsung saat ini di PT Pertamina Energy Terminal, sebagai berikut:

1. Industri Pengolahan
2. *Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi*
3. Konstruksi
4. Pengangkutan dan Pergudangan

Line of Business according to the Article of Association of Deed No. 90 Article 3, PT Pertamina Energy Terminal conducts line of business as follows:

1. Processing Industry
2. Water Treatment, Sewage Treatment, Treatment and Recovery of Waste Materials, and Remediation Activities
3. Construction
4. Wholesale Sales and Retail Sales, Car and Motorcycle Repair
5. Transportation and Warehousing

Operating Line of Businesses of PT Pertamina Energy are as the following:

1. Processing Industry
2. Water Treatment, Sewage Treatment, Treatment and Recovery of waste materials, and Remediation activities.
3. Construction
4. Transportation and Warehousing

Produk dan Jasa

Product and Services

Produk dan jasa yang dihasilkan PT Pertamina Energy Terminal adalah:

1. Jasa Terminal yaitu penyimpanan/penyaluran Minyak & Gas Bumi
2. Produk/Jasa *Fresh Water Supply*, yaitu penyaluran dan pengelolaan Air Baku dan Air Bersih serta pengadaan Air Minum Dalam Kemasan
3. Pengelolaan Limbah B3 & Non B3

The products and services provided by PT Pertamina Energy Terminal are:

1. Terminal Services particularly storage/ distribution of Oil & Gas
2. Fresh Water Supply Products/Services, particularly the distribution and management of Raw Water and fresh Water as well as the procurement of Bottled Drinking Water
3. Hazardous (B3) & Non Hazardous (B3) Waste Management

Wilayah Operasional

Operational Area



<i>Tank Terminal</i>	<i>Fresh Water Supply</i>					
A1. Pulau Sambu Sambu Island	B1. Belawan	B7. Pontianak	B13. Tg. Gerem	B19. Gresik	B25. Manggis	B31. Bima
A2. Tanjung Uban	B2. Dumai	B8. Padang	B14. Tg. Priok	B20. Surabaya	B26. Anyer	B32. Cilegon
A3. Tanjung Sekong	B3. Pekanbaru	B9. Plaju	B15. Balongan	B21. Teluk Semangka	B27. Kupang	B33. Marunda
A4. Tuban	B4. Batam	B10. Panjang	B16. Cirebon	B22. Kotabaru	B28. Wayame	B34. Rembang
A5. Kotabaru	B5. STS Muntok	B11. Tg. Wangi	B17. Cilacap	B23. Tg Sekong	B29. Baubau	
A6. Baubau	B6. Tg. Uban	B12. Sambu	B18. Tuban	B24. Balikpapan	B30. Makassar	

Kantor Cabang atau Perwakilan

Branch Offices or Representation

Tank Terminal

No	Lokasi Location	Alamat Address	No Telp Phone Number	Email
1	Fuel Terminal Pulau Sambu Sambu Island Fuel Terminal	Tanjung Sari, Belakang Padang, Batam, Kepulauan Riau 29416	-	sekretaris.onpsambu@ mitrakerja.pertamina.com
2	Integrated Terminal Tanjung Uban Tanjung Uban Integrated Terminal	Jl Nusa Indah No. 1 Komplek Pertamina, Tanjung Uban, Bintan Utara, Bintan	0771-81254/81255	mk.eka.syafitri@mitrakerja. pertamina.com
3	Terminal LPG Tanjung Sekong Tanjung Sekong LPG Terminal	Jl. Yos Sudarso Link Baru I/ II, Lebak Gede, Pulomerak, Cilegon, Banten 42438	0254-8495195/8495196/ 8495197/8495198	mk.yenny.azwar@mitrakerja. pertamina.com
4	Fuel Terminal Kotabaru Kotabaru Fuel Terminal	Jl. H. Hasan Basrie Km 4.5 Kotabaru, Pulau Laut, Kalimantan Selatan	0518-21624/051824282	mk.rakhmad.wahyuni@ mitrakerja.pertamina.com
5	Fuel Terminal Bau-Bau Bau-Bau Fuel Terminal	Jl Dayanuikhsanuddin Km 8, Sulaa, Betoambari, Baubau Sulawesi Tenggara	0402-2822990	mk.muhammad.asaf@ mitrakerja.pertamina.com

Fresh Water Supply

Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address	Email
Water Operation Cabang Balikpapan Balikpapan Branch Water Operation	Jl. RE. Martadinata RT. 15 No. 26, Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah	sufyani@pertamina.com Pi2t.4dhe@gmail.com
Water Operation Cabang Bima Bima Branch Water Operation	Jl. Sultan Kaharuddin No.174 Wadumbolo, Kota Bima	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Cilacap Cilacap Branch Water Operation	Jl. Tongkol No. 20 Cilacap Selatan, PT. Pertamina Trans Kontinental Cabang Cilacap	Pet.cilacap@gmail.com Alfinzulfian29@gmail.com
Water Operation Cabang Dumai Dumai Branch Water Operation	Gedung Pertamina Trans Kontinental Jl. Sultan Syarif Kasim No.262 Dumai	Deny.suryana@pertamina.com Yayanandrian256@gmail.com
Water Operation Cabang Gresik Gresik Branch Water Operation	Jln.Harun Thohir Komplek Perkantoran Pertamina RT.001 RW.006 Desa Pulopancikan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Pekanbaru Pekanbaru Branch Water Operation	Sungai Pakning, Bukit Batu, Bengkalis Regency, Riau	Deny.suryana@pertamina.com Yayanandrian256@gmail.com
Water Operation Cabang Plaju Plaju Branch Water Operation	Jl. Beringin No 01 Komplek Plaju, Kota Palembang, Sumatera Selatan	ketutayu07@gmail.com Pkt_plaju@ptk-karyatirta.com
Water Operation Cabang Pontianak Pontianak Branch Water Operation	Jl. RE. Martadinata RT. 15 No. 26, Kel. Mekar Sari, Kec. Balikpapan Tengah	Pi2t.4dhe@gmail.com Sufyani@pertamina.com
Water Operation Cabang Rembang Rembang Branch Water Operation	Jl. Nasional Rembang-Tuban KM 138, Desa Sedangmulyo,Kecamatan Rembang Sluke,Kabupaten Rembang-Jawa Tengah	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Surabaya Surabaya Branch Water Operation	Teluk Kumai Barat No.113/5 RT:003 RW:002 KEL : Perak Utara, Kec. Pabean Cantikan, Kota Surabaya	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Teluk Kabung Teluk Kabung Branch Water Operation	Komp. Pratama Indah Cindakir Teluk Kabung, Blok H No.8 RT. 02 / RW. 05, Kel. Teluk Kabung Utara, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang	Rudi.setiawan2@pertamina.com

Fresh Water Supply
Fresh Water Supply

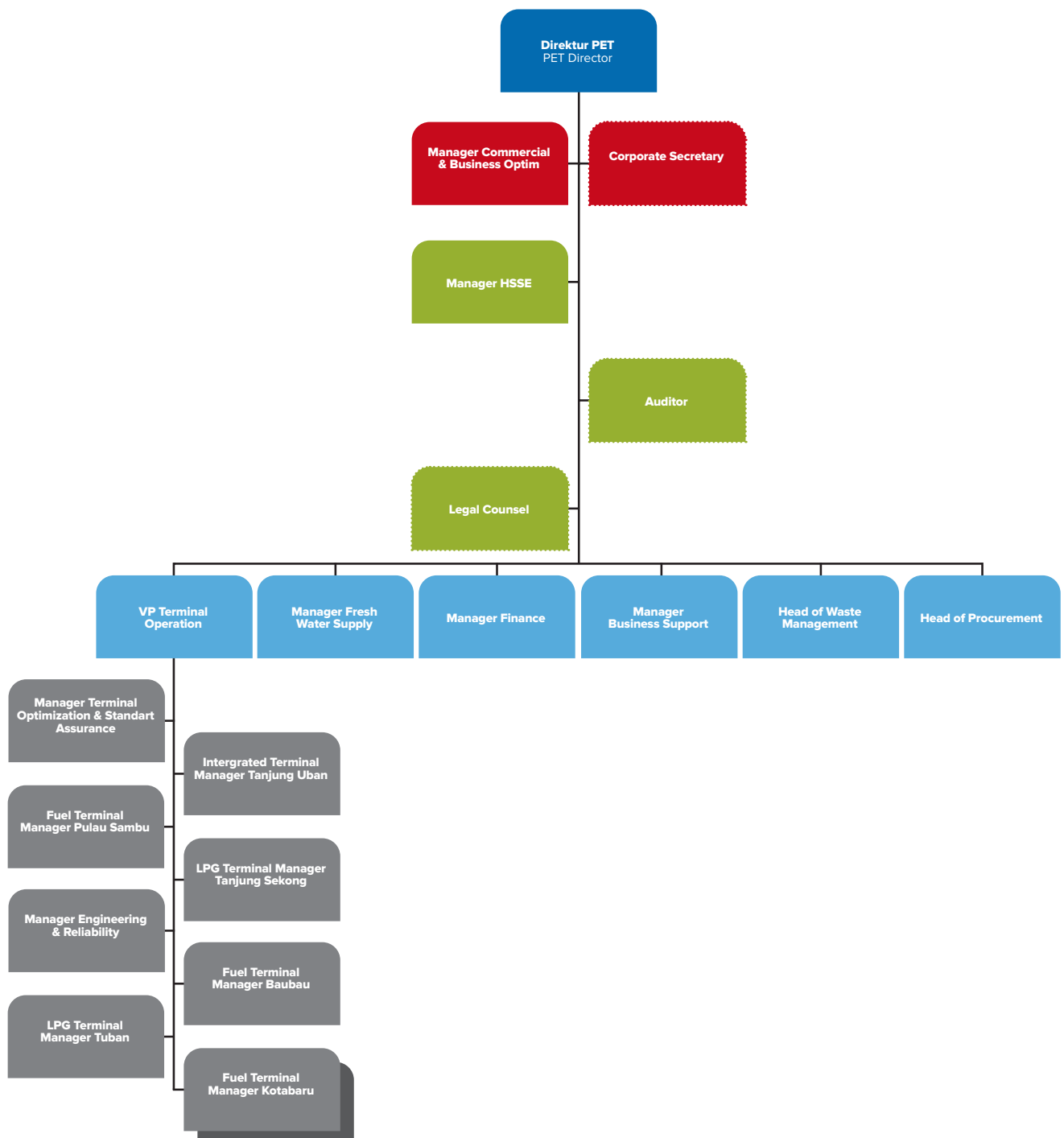
Kantor Cabang Branch Office	Alamat Address	Email
Water Operation Cabang Tuban Tuban Branch Water Operation	Jl. Tanjung Awar-awar, Desa Remen, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban	Nugrahapetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Wayame Wayame Branch Water Operation	Jl. Ir. M Putuhena KM 24 Wayame, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku	mariopktwayame@gmail.com
Water Operation Cabang Kupang Kupang Branch Water Operation	Pertamina FT Tenau Kupang Jl. Yossudarso No 1 Kupang, NTT, Kec.Alak, Kota Kupang	Rudi.setiawan2@pertamina.com Hetady06pelipus79@gmail.com
Water Operation Cabang Balongan Balongan Branch Water Operation	Jl. Kedung Krisik Selatan No. 9 RT/RW 002/006 Kel.Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon	balonganpetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Kotabaru Kotabaru Branch Water Operation	Jl. H. Hasan Basri Km. 4,5 Kel. Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru Kal - Sel 72117	Pi2t.4dhe@gmail.com Parkyoga16@gmail.com
Water Operation Cabang Belawan Belawan Branch Water Operation	Belawan II, Medan Kota Belawan, Kota Medan	Aamarullah.pkt@gmail.com Deny.suryana@pertamina.com Yayanandrian256@gmail.com
Water Operation Cabang Muntok Muntok Branch Water Operation	Jl. Raya Tg. Kalian (Seberang SLTP Negeri 2) Muntok - Bangka Barat	Ketutayu07@gmail.com
Water Operation Cabang Manggis Manggis Branch Water Operation	Jl. Raya Ulakan, Manggis, Karangasem, Marine Manggis	pktmanggis@gmail.com
Water Operation Cabang Batam Batam Branch Water Operation	Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Gedung Pertamina Trans Kontinental, Batam, Kota Batam, Nongsa, Kep. Riau	Lihat.syahati@pertamina.com Reniangriani15@yahoo.co.id
Water Operation Cabang Tanjung Wangi Tanjung Wangi Branch Water Operation	Jl. Gatot Subroto No.72, Lkr. Kp. Baru, Bulusan, Kec. Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur	Pkt.tanjungwangi@gmail.com
Water Operation Cabang Tanjung Priok Tanjung Priok Branch Water Operation	Jl. Yos Sudarso No.205, Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	Irfan.firgiawan@pertamina.com
Water Operation Cabang Lampung Lampung Branch Water Operation	Jl. Sumatera Komp. Pelabuhan Panjang Kantor Security Reklamasi, Bandar Lampung	Nur.akbar2@pertamina.com
Water Operation Cabang Tanjung Uban Tanjung Uban Branch Water Operation	Jl. Nusa Indah No. 01, Tanjung Uban, Kepulauan Riau	Lihat.syahati@pertamina.com Sarman.manalu@gmail.com
Water Operation Cabang Tanjung Gerem Gerem Branch Water Operation	Jl. RE Martadinata No. 50 Tg Gerem, Merak, Banten	Aamarullah.pkt@gmail.com
Water Operation Cabang Tanjung Sekong Tanjung Sekong Branch Water Operation	Link Baru I/II Jl. Yos Sudarso, Lb. Gede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon	Aamarullah.pkt@gmail.com
Water Operation Cabang Semarang Semarang Branch Water Operation	Jl. Deli, Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa tengah	balonganpetekakaryatirta@gmail.com
Water Operation Cabang Batam - Industri Batam Branch Water Operation	Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Gedung Pertamina Trans Kontinental, Batam, Kota Batam, Nongsa, Kep. Riau	Lihat.syahati@pertamina.com Reniangriani15@yahoo.co.id
Water Operation Cabang Ciwandan - Industri Ciwandan Branch Water Operation	PT Pertamina Energi Terminal Jl. Raya Anyer KM 119 Kepuh Ciwandan, Cilegon, Banten	najiullah@pertamina.com

Struktur Organisasi

Organization Structure

Organisasi PT Pertamina Energy Terminal berdasarkan Kpts-002/PKT0000/2022-S8 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi BOD-1 Ke Bawah tanggal 28 April 2022. Struktur Organisasi PT Pertamina Energy Terminal adalah sebagai berikut:

The organization of PT Pertamina Energy Terminal is based on Kpts-002/PKT0000/2022-S8 regarding the Improvement of the Organizational Structure from BOD-1 Downwards dated April 28, 2022. The organizational structure of PT Pertamina Energy Terminal is as follows:





Profil Dewan Komisaris

Board of Commissioners Profile



Bambang Sujito

Komisaris
Commissioner

(05 Maret 2024-sekarang)
(March 5, 2024-present)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Bekasi
Usia Age	54 Tahun 54 Years Old
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	• Magister Hukum Sumber Daya Alam, Universitas Indonesia (2014) • Sarjana Hukum Perdata, Universitas Gadjah Mada (1996) • Master of Laws in Natural Resource Law, University of Indonesia (2014) • Bachelor of Civil Law, University of Gadjah Mada (1996)
Dasar hukum pengangkatan Decree of Appointment	Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal sesuai ketentuan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tentang penggantian komisaris PT Pertamina Energy Terminal Tanggal 05 Maret 2024. Circular Shareholders Resolution of PT Pertamina Energy Terminal in accordance with Article 10, Paragraph 5 of the Company's articles of association regarding the replacement of commissioners of PT Pertamina Energy Terminal dated March 5, 2024.
Pengalaman Kerja Career Experience	• Koordinator Hukum Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Sekretariat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara KESDM (Juni 2022 - September 2023) • Koordinator Penyusunan Perundang-undangan II Biro Hukum, ESDM KESDM (2020– Mei 2022) • Kepala Bagian Penyusunan Perundang - undangan II Biro Hukum, KESDM (2018-2020) • Kepala Bagian Penelahaan Hukum Biro Hukum, KESDM (2017-2018) • Kepala Bagian Penyusunan Perundang - undangan I Biro Hukum, KESDM (2015-2017) • Coordinator of Legal Affairs, Directorate General of Mineral and Coal, Secretariat of the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources (June 2022 - September 2023) • Coordinator for Legislative Drafting II Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2020 - May 2022) • Head of Legislative Drafting II, Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2018 - 2020) • Head of Legal Analysis, Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2017 - 2018) • Coordinator for Legislative Drafting I Law Firm, Ministry of Energy and Mineral Resources (2015-2017)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal KESDM (Oktober 2023-sekarang) Head of Law Firm at Secretariat General of the Ministry of Energy and Mineral Resources (October 2023- Present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relation	Tidak Ada None



Hufron Asrofi

Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	62 Tahun 62 Years old
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	- Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" (2000) - Sarjana Hukum Keperdataan, Universitas Islam Jakarta (1985) - Master of Law, College of Law "IBLAM" (2000) - Bachelor of Civil Law, Jakarta Islamic University (1985)
Dasar hukum pengangkatan Decree of Appointment	Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Peteka Karya Tirta sesuai ketentuan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tentang penggantian komisaris PT Peteka Karya Tirta Tanggal 26 Agustus 2021. Circular shareholder resolution of PT Peteka Karya Tirta in accordance with article 10 paragraph 5 of the Limited Liability Company's articles of association regarding the replacement of commissioners of PT Peteka Karya Tirta dated August 26, 2021
Pengalaman Kerja Career Experience	- Tenaga Ahli Menteri Sekretariat Jenderal KESDM (2020-sekarang) - Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Biro Hukum (2015-2020) - Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2014-2015) - Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (2011-2014) - Staf diperbantukan pada BPH Migas (Kepala Bagian Hukum dan Humas) (2005-2011) - Experts of the Minister of Energy and Mineral Resources Secretariat General (2020-present) - Head of the Legal Bureau of the Secretariat General of the Law Bureau (2015-2020) - Secretary of the Directorate General of Oil and Gas (2014-2015) - Secretary of the Directorate General of Oil and Gas Secretariat of the Directorate General of Oil and Gas (2011-2014) - Auxiliary Staff to BPH Migas (Head of Legal and Public Relations Division) (2005-2011)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Staf ahli Menteri ESDM Bidang Percepatan Regulasi & Kerjasama Kelembagaan (2020-sekarang) Experts in the Minister of Energy and Mineral Resources for Acceleration Regulatory & Institutional Cooperation (2020-present)
Hubungan Afiliasi Affiliate Relation	Tidak Ada None

Komposisi Dewan Komisaris

Board of Commissioners Composition

Selama tahun 2023, tidak terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Komisaris: Hufon Asrofi

Pada tahun 2024, terdapat perubahan komposisi anggota Komisaris berdasarkan Keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal sesuai ketentuan pasal 10 ayat 5 anggaran dasar perseroan tentang penggantian komisaris PT Pertamina Energy Terminal Tanggal 05 Maret 2024. Susunan Komisaris PT Pertamina Energy Terminal adalah sebagai berikut:

Komisaris: Bambang Sujito

There are no changes to the composition of the Board of Commissioners in 2023. Therefore, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2023 is as follows:

Commissioner: Hufon Asrofi

In 2024, there was a change in the composition of the Board of Commissioners based on the Circular Shareholders Resolution of PT Pertamina Energy Terminal in accordance with Article 10, Paragraph 5 of the company's Articles of Association regarding the replacement of commissioners of PT Pertamina Energy Terminal dated March 5, 2024. The composition of the Board of Commissioners of PT Pertamina Energy Terminal is as follows:

Commissioner: Bambang Sujito



Profil Direksi

Board of Directors Profile



Bayu Prostiyo

Direktur
Director

(03 Juli 2023-31 Desember 2023)
(July 3, 2023 - December 31, 2023)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	47 Tahun 47 Years Old
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	- Profesi Insinyur Universitas Gajah Mada (2023) - Magister Teknik Universitas Indonesia (2009) - Sarjana Teknik institut Teknologi Sepuluh November (1996) - Engineering Profession, Gadjah Mada University (2023) - Master of Engineering, University of Indonesia (2009) - Bachelor of Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1996)
Dasar hukum pengangkatan Decree of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Perseroan Terbatas PT Pertamina Energy Terminal No. 06 Tanggal 07 Juli 2023 Deed of Circular Shareholder Resolution of Limited Liability Company PT Pertamina Energy Terminal No. 06 dated July 7, 2023
Pengalaman Kerja Career Experience	- Manager Supply & Distribution JBT PT Pertamina Patra Niaga (2022-2023) - Manager Fleet Operation PT Pertamina Patra Niaga (2021-2023) - Integrated Terminal Manager Jakarta (2020-2021) - Supply & Distribution JBT Manager PT Pertamina Patra Niaga (2022-2023) - Fleet Operation Manager PT Pertamina Patra Niaga (2021-2023) - Integrated Terminal Manager Jakarta (2020-2021)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliate Relation	Tidak Ada None



Hari Purnomo

Direktur
Director

(1 Januari 2023-03 Juli 2023)
(January 1, 2023 - July 3, 2023)

Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia
Domisili Domicile	Jakarta
Usia Age	44 Tahun 44 Years Old
Latar Belakang Pendidikan Educational Background	- Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran (2021) - Magister Administrasi Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015) - Sarjana Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002) - Doctor in Management Science, Padjadjaran University (2021) - Master of Business Administration, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2015) - Bachelor of Marine Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (2002)
Dasar hukum pengangkatan Decree of Appointment	Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler Perseroan Terbatas PT Peteka Karya Tirta No. 01 Tanggal 13 Desember 2021 Deed of Circular Shareholder Resolution of Limited Liabe Company PT Peteka Karya Tirta No. 01 December 13, 2021
Pengalaman Kerja Career Experience	- Region Manager Supply & Distribution Sulawesi (2021) - Region Manager Supply & Distribution VII (2020) - Integrated Terminal Manager Jakarta (2019) - OH Terminal BBM Jakarta Group (2018-2019) - OH Terminal BBM Medan Group (2018) - OH Terminal BBM Medan Group (2017-2018) - Regional Manager Supply & Distribution Sulawesi (2021) - Regional Manager Supply & Distribution VII (2020) - Integrated Terminal Manager Jakarta (2019) - OH Fuel Terminal Jakarta Group (2018-2019) - OH Fuel Medan Group Terminal (2018) - OH Fuel Terminal Medan Group (2017-2018)
Jabatan Rangkap Concurrent Position	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliate Relation	Tidak Ada None

Komposisi Direksi

Board of Directors Composition

Selama tahun 2023, terdapat perubahan komposisi anggota Direksi. Perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

1 Januari 2023 - 03 Juli 2023
Direktur: Hari Purnomo

03 Juli 2023 - 31 Desember 2023
Direktur: Bayu Prostiyo

Throughout 2023, there was a change in the composition of the Board of Directors. The changes in the composition of the Board of Directors are as follows:

January 1, 2023 - July 3, 2023
Director: Hari Purnomo

July 3, 2023 - December 31, 2023
Director: Bayu Prostiyo

Sumber Daya Manusia

Human Resources

Perseroan meyakini bahwa pengelolaan SDM yang baik dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan. Memiliki SDM yang andal, loyal, dan kompeten merupakan modal utama Perseroan guna meraih visi, misi, dan kesuksesan usaha yang berkelanjutan.

The Company believes good human resources management is in line with the achievement of the Company's goals. Having reliable, loyal, and competent human resources is the Company's main asset in achieving its vision, mission, and sustainable business success.

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Composition of Employees Based on Gender

Jenis Kelamin Gender	Tahun 2022 In 2022		Tahun 2023 In 2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Laki-laki Male	138	93,24%	144	92,90%
Perempuan Female	10	6,76%	11	7,10%
Jumlah Total	148	100,00%	155	100,00 %

Komposisi Karyawan berdasarkan Jabatan

Composition of Employees Based on Position

Jabatan Position	Tahun 2022 In 2022		Tahun 2023 In 2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Vice President (VP)	1	0,68%	1	0,65%
Manager/setara Manager/ Equivalent	10	6,76%	13	8,39%
Staf & Assistant Manager Staff & Assistant Manager	137	92,57%	141	90,97%
Jumlah Total	148	100,00%	155	100,00 %

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia

Composition of Employees Based on Age

Usia Age	Tahun 2022 In 2022		Tahun 2023 In 2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
<25 Tahun Years old	1	0,68%	1	0,65%
26-30 Tahun Years old	24	16,22%	29	18,71%
31-35 Tahun Years old	31	20,95%	25	16,13%
36-40 Tahun Years old	40	27,03%	43	27,74%
41-45 Tahun Years old	16	10,81%	24	15,48%
46-50 Tahun Years old	14	9,46%	16	10,32%
>50 Tahun Years old	22	14,86%	17	10,97%
Jumlah Total	148	100,00%	155	100,00 %

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Composition of Employees Based on Educational Background

Tingkat Pendidikan Educational Background	Tahun 2022 In 2022		Tahun 2023 In 2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pascasarjana Post Graduate	3	2,03%	3	1,94%
Sarjana Bachelor	53	35,81%	39	25,16%
Diploma	50	33,78%	48	30,97%
SLTA dan Setara High Schools and Equivalent	33	22,30%	64	41,29%
<SLTA < High Schools	9	6,08%	1	0,65%
Total	148	100,00%	155	100,00%

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Composition of Employees Based on Employment Status

Status Ketenagakerjaan Employment Status	Tahun 2022 In 2022		Tahun 2023 In 2023	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Pegawai Tetap (PWTT) Perbantuan PTK Permanent Auxiliary Employee from PTK	2	1,37%	4	2,58%
Pegawai Tetap (PWTT) Permanent Employee	33	22,60%	40	25,81%
Pegawai Tetap (PWTT) Holding Permanent Direct Hire Employee from Holding	106	72,60%	100	64,52%
Pegawai Tetap (PWTT) PIS Permanent Direct Hire Employee from PIS	5	3,42%	5	3,23%
Pegawai Tetap (PWTT) PHE Permanent Direct Hire Employee from PHE	-	-	1	0,65%
BKO TNI Polri	-	-	5	3,23%
Jumlah Total	146	100,00%	155	100,00%

Program Pengembangan Pekerja

Employee Development Program

Jenis Pelatihan Training Type	Jumlah Peserta Number of Employee	Waktu Date	Penyelenggara Organizer	Biaya Cost	
Sertifikasi CRP (Certified Risk Professional) for Executive	1	11/12/2023	IRBA	Rp7.500.000,00	
Gas Tester Batch 21	8	22/11/2023	HSE TC	Rp26.400.000,00	(estimated)
Gas Tester Batch 22	3	24/11/2023	HSE TC	Rp9.900.000,00	(estimated)
ISO Awareness	10	8/11/2023 - 9/11/2023	PT PertaMC	Rp20.000.000,00	
Pengendalian Penyimpangan (Fraud) Cargo	6	31/10/2023 - 03/11/2023	HSE TC	Rp67.640.628,00	(estimated)
Certified Risk Professional (CRP)	7	07/11/2023 - 10/11/2023	HSE TC	Rp52.500.000,00	(estimated)

Rencana Pelatihan

Training Plan

Rencana Pelatihan Training Plan	
Fungsi dan Jenis Pelatihan Function and Type of Training	Waktu Pelaksanaan Implementation Time
Engginer Reliability – Asset Integrity Management	Q3 - Q4
Terminal Operation - Sertifikasi IMO ISPS Terminal Operation - IMO ISPS Certification	Q2 - Q3
Finance & Risk Management - Certified Risk Professional	Q2 - Q4
Terminal Operation - Petugas Pengambil Contoh Terminal Operation - Sample Collection Officer	Q2 - Q3
Terminal Optimization - Mechanical Equipment and Machine Design	Q3 - Q4
TOSA - Demand & Production Fore Casting	Q3 - Q4
Procurement & Asset Management - Procurement Negotiation	Q3 - Q4
Procurement & Asset Management - Verifikator TKDN	Q3 - Q4
Finance & Risk Management - Financial Reporting	Q3 - Q4
HSSE - Security Management System	Q3 - Q4
HSSE - HSSE Audit & Inspection	Q3 - Q4
CBO - Business Analysis & Forecasting	Q3 - Q4
CBO - Business Negotiation Management	Q3 - Q4
HC & ICT - Manpower Planning	Q3 - Q4

Adanya Persamaan Kesempatan kepada Seluruh Karyawan

PET memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada setiap anak bangsa terbaik untuk berkarya dan bekerja di Perseroan, tanpa memandang unsur gender, agama, ras, maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi. Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan adil, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan memberikan kesempatan pengembangan karier kepada seluruh perwira PET.

Equal Opportunity for All Employees

PET provides equal and equitable opportunities to every outstanding citizen to work and contribute to the Company, regardless of gender, religion, race, or any other discriminatory factors. The recruitment system is carried out transparently and fairly, based on the planning of employee needs to support the achievement of the Company’s short-term and long-term goals. The Company provides career development opportunities to all PET officers.

Komposisi Pemegang Saham
Shareholder Composition

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The shareholder composition of the Company as of December 31, 2023 is as follows:

Table with 6 columns: Nama Pemegang Saham, Jumlah Saham, Nilai Nominal, Persentase, Pemegang Saham Utama, Pemegang Saham Pengendali. It lists three shareholders: PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental, and PT Pertamina Port and Logistics.

Komposisi Pemegang Saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris & Direksi per 31 Desember 2023

Sepanjang tahun 2023 tidak ada satu pun anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang memiliki saham Perseroan.

Composition of Shareholders by Board of Commissioners & Directors as of December 31, 2023

Throughout 2023, none of the members of the Board of Commissioners and Directors of the Company owned shares in the Company.



Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Information Regarding Majority and Controlling Shareholder



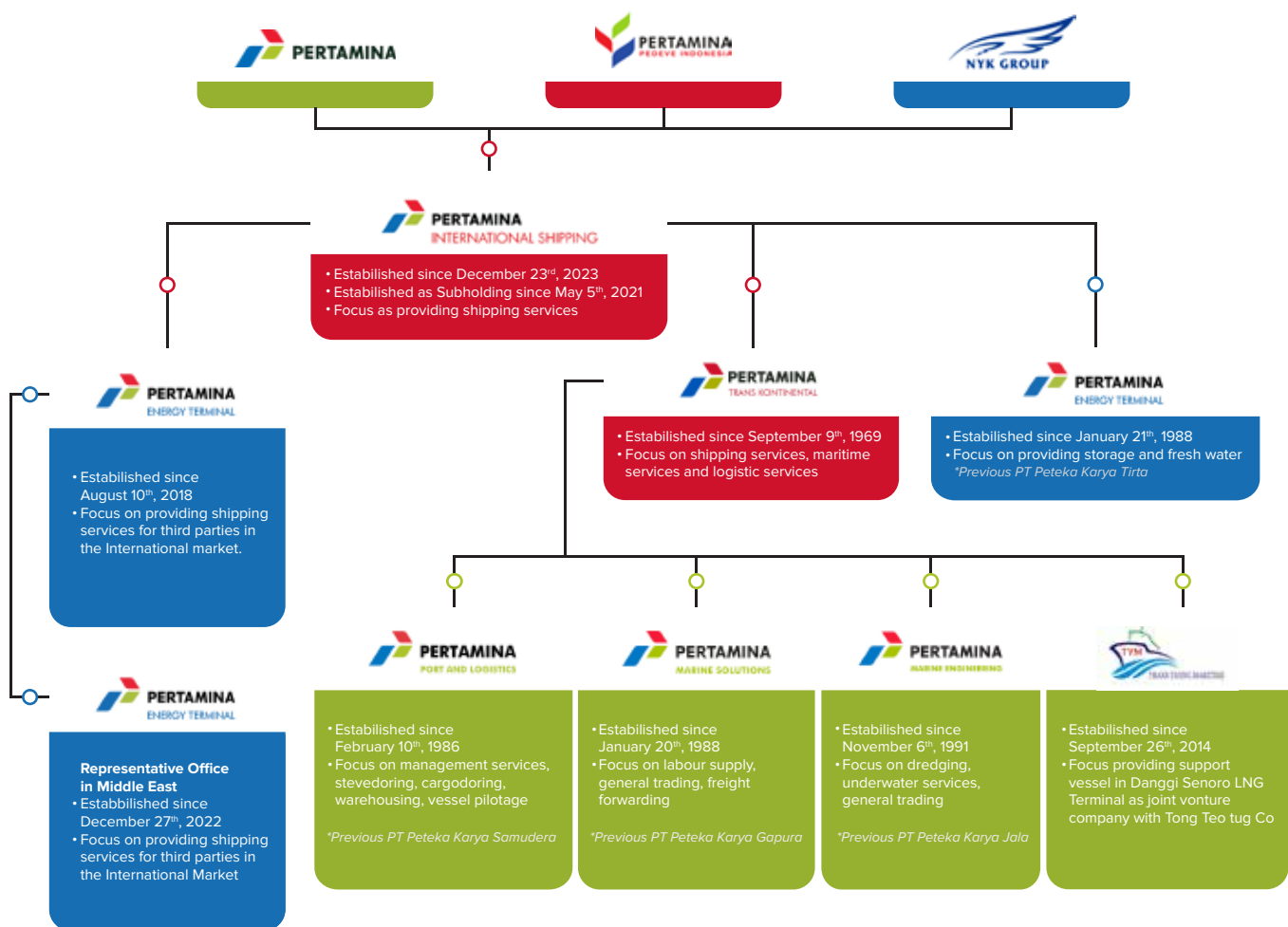
Struktur Group Perusahaan

Corporate Group Structure

Berdasarkan pada Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) No. S-616/ MBU/08/2021 tanggal 25 Agustus 2021 tentang Persetujuan Restrukturisasi *Subholding Shipping* menjadi *Subholding Integrated Marine Logistics*, maka terdapat perubahan dalam struktur grup Perusahaan sebagai berikut:

Referring to Letter of Minister of State Owned Enterprise of Indonesia in General Meeting of Shareholders (GMS) No. S-616/MBU/08/2021 dated August 25, 2021 regarding the Approval of Sub-holding Shipping Restructure to Sub-holding Integrated Marine Logistics, therefore, there is changes in the group structure in the Company as the following:

Company Group Subholding Intergrated Marine Logistic



Anak Perusahaan & Afiliasi

Subsidiaries & Affiliates

Pada tahun 2023, Perusahaan tidak memiliki Anak Perusahaan. PET memiliki saham minoritas pada PT Pertamina Marine Engineering dengan persentase kepemilikan 0,83% dengan nilai wajar Rp100.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar Rp100.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2022 dan nilai wajar Rp999.003 pada tanggal 31 Desember 2021.

In 2023, the Company had no subsidiaries. PET has a minority stake in PT Pertamina Marine Engineering with a 0.83% ownership percentage and a fair value of Rp100,000,000 as of December 31, 2023, a fair value of Rp100,000,000 as of December 31, 2022, and a fair value of Rp999,003 as of December 31, 2021.

Keanggotaan Asosiasi

Association Membership

Nama Asosiasi Association Name	Posisi Position
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Association of Indonesian National Contractors	Anggota Member

Kronologi Pencatatan Saham

Selama tahun 2023, Perseroan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nominal dan harga perusahaan.

Stock Listing Chronology

Throughout 2023, the Company has no stock listing chronology, number of shares, nominal value and price.

Efek Lainnya

Selama tahun 2023, Perseroan tidak melakukan Perusahaan belum melakukan aktivitas penerbitan dan perdagangan efek apapun. Oleh karena itu, tidak terdapat informasi terkait efek lainnya.

Other Securities

Throughout 2023, the Company does not conduct any activities related to the issuance and trading of any other securities. Therefore, there is no information regarding other securities.

Nama dan Alamat Lembaga &/Profesi Penunjang

Name and Address of Supporting Institutions and/or Professions

Selama tahun 2023, PET bekerja sama dengan Lembaga dan/atau Profesi Penunjang sebagai berikut:

Throughout 2023, PET collaborates with the following supporting institutions and/or professions

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (PwC Indonesia)

Alamat Address	: Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta, 12920
Periode penugasan Assignment Period	: 01 Januari - 31 Desember 2023 January 1 - December 31, 2022
Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan Information related to audit services and/or non audit given	: Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Preparation of Financial Statements for the Fiscal Year 2023
Biaya jasa (fee) Service Fee	: Rp 436.000.000
Jasa lainnya yang diberikan Other services provided	: -

Notaris

Notary

Nama Name	: Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn.
Alamat Address	: Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Energy Terminal Deed of Circular Shareholders Resolution PT Pertamina Energy Terminal
Periode penugasan Assignment Period	: 07 Juli 2023 July 07, 2023

Nama Name	: Miryany Usman S.H
Alamat Address	: Jl. Wijaya I No. 9 A-B; Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	: Berita Acara RUPS PT Pertamina Energy Terminal Minutes of the GMS of PT Pertamina Energy Terminal
Periode penugasan Assignment Period	: 06 Juni 2023 June 06, 2023

Nama Name	: Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn.
Alamat Address	: Grand Slipi Tower Lantai 16 Unit B1, Jl. S. Parman Kav 22-24, Jakarta Barat
Ruang Lingkup Pekerjaan Scope of Work	: Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina Energy Terminal Deed of Circular Shareholders Resolution PT Pertamina Energy Terminal
Periode penugasan Assignment Period	: 06 November 2023 November 06, 2023

Informasi pada Situs Web Perusahaan

Information on Company Website

Informasi terkait Pertamina Energy Terminal yang dimuat pada website Perusahaan <https://pertamina-pet.com> antara lain sebagai berikut:

Information related to Pertamina Energy Terminal is published on company website <https://pertamina-pet.com> as follows:

Beranda Home	
Tentang Kami About Us	• Profil Perusahaan • Visi & Misi • Tata Nilai • Manajemen • Penghargaan dan Sertifikasi • <i>World Class Green</i> Terminal • Company Profile • Vision and Mission • Values • Management • Achievement and Certification • World Class Green Terminal • Company Profile
Bisnis Kami Our Business	• Tank Terminal 1. LPG Terminal Tanjung Sekong 2. LPG Terminal Tuban 3. <i>Fuel</i> Terminal Pulau Sambu 4. <i>Integrated</i> Terminal Tanjung Uban 5. <i>Fuel</i> Terminal Kotabaru 6. <i>Fuel</i> Terminal Baubau • Fresh Water Supply 1. Kapal 2. Industri 3. AMDK • Tank Terminal 1. Tanjung Sekong LPG Terminal 2. Tuban LPG Terminal 3. Sambu Island Fuel Terminal 4. Tanjung Uban Integrated Terminal 5. Kotabaru Fuel Terminal 6. Baubau Fuel Terminal • Fresh Water Supply 1. Ships 2. Industries 3. Bottled Drinking Water (AMDK)
Media & Informasi News and Info	• Berita • Galeri • Pengumuman • News • Gallery • Announcement
Lainnya Other	• Kepemilikan Saham • Laporan • Komitmen & Berkelanjutan • Karir • Kontak • Shareholders • Report • Sustainable Growth • Career • Contact

Peristiwa Penting Tahun 2023

Significant Events in 2023

01.

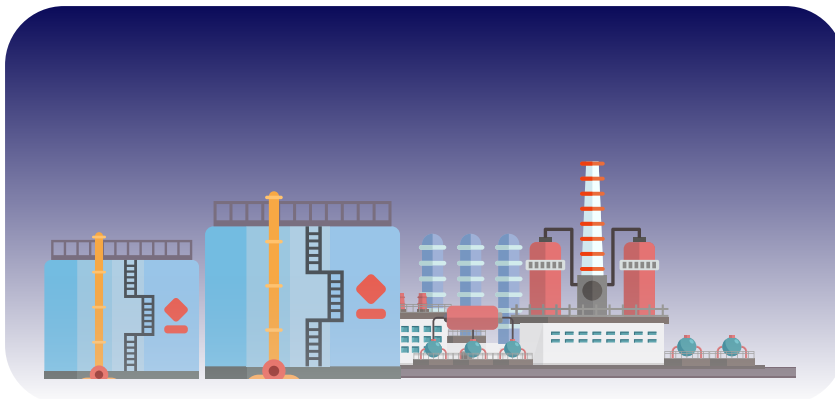


13 Juli 2023

Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan Layanan Reguler dan Fasilitas Ekstra PT PLN (Persero) dengan PT Pertamina Energy Terminal

July 13, 2023

Signing of the Electricity Power Purchase Agreement with Regular Service and Extra Facilities between PT PLN (Persero) and PT Pertamina Energy Terminal



02.

22 Desember 2023

Fuel Handling Service Integrated Terminal Tanjung Uban dengan Vitol CHN Venture Pte Ltd

December 22, 2023

Fuel Handling Service at the Integrated Terminal Tanjung Uban with Vitol CHN Venture Pte Ltd

Penghargaan & Sertifikasi Tahun 2023

Awards and Certification In 2023

Ikhtisar Utama

Laporan Manajemen

Profil Perusahaan

Analisis dan Pembahasan Manajemen

Tata Kelola Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan



01



02



03



04



05



06



07



08



09

Penghargaan | Awards

01 •

Zero Accident Award
Kotabaru Fuel Terminal (2023)
Penyelenggara: Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Organizer: Minister of Manpower of the Republic of Indonesia
Tanggal: 10 Februari 2023
Date: February 10, 2023

02 •

Tempat Penimbunan Pabean (TPB) Terbaik I Tahun 2023
Best Customs Bonded Warehouse (TPB) of 2023
Penyelenggara: KPPBC TMP B Tanjungpinang
Organizer: KPPBC TMP B Tanjungpinang
Tanggal: 22 Februari 2024
Date: February 22, 2024

03 •

Renewable Energy Certificate
Fuel Terminal Baubau
Penyelenggara: APX, Inc.
Organizer: APX, Inc.
Tanggal: 6 Desember 2023.
Date: December 6, 2023.

04 •

Penghargaan Wajib Pajak Daerah Tahun 2023
Regional Taxpayer Award 2023
Water Terminal Cilegon
Water Terminal Cilegon
Penyelenggara: BPKPAD Kota Cirebon
Organizer: City Revenue Office of Cirebon
Tanggal: 03 April 2023
Date: April 3, 2023

05 •

PROPER Hijau 2023 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia
Green PROPER 2023 by Indonesian Ministry of Environment and Forestry

06 •

Penghargaan Wajib Pajak Badan Usaha Penyumbang Pajak Terbesar dari Sektor PBB P2 Tahun 2023
Taxpayer Award for the Largest Tax Contributor Company in the PBB P2 Sector for the Year 2023
Penyelenggara: Pemerintah Baubau
Organizer: Baubau Government
Tanggal: 03 April 2023
Date: April 3, 2023

07 •

Renewable Energy Certificate
Fuel Terminal Kotabaru
Penyelenggara: APX, Inc.
Organizer: APX, Inc.
Tanggal: 1 Desember 2023.
Date: December 1, 2023.

08 •

Renewable Energy Certificate
Integrated Terminal Tanjung Uban
Penyelenggara: APX, Inc.
Organizer: APX, Inc.
Tanggal: 18 Desember 2023.
Date: December 18, 2023.

09 •

Renewable Energy Certificate
LPG Terminal Tanjung Sekong
Penyelenggara: APX, Inc.
Organizer: APX, Inc.
Tanggal: 29 Desember 2023.
Date: December 29, 2023.



Sertifikasi | Certification

01.

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 14001:2015 - *Environmental Management System* (FT Kotabaru)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
bsi

Masa Berlaku
Expiration Date
11 September 2021 - 10 September 2024
September 11, 2021 - September 10, 2024

05.

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 14001:2015 - *Environmtal Management System* (FT Baubau)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
bsi

Masa Berlaku
Expiration Date
5 September 2022 - 20 Oktober 2024
September 5, 2022- October 20, 2024

02.

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 9001:2015 - *Quality Management System* (FT Kotabaru)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
bsi

Masa Berlaku
Expiration Date
11 September 2021 - 10 September 2024
September 11, 2021 - September 10, 2024

06.

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 9001:2015 - *Quality Management System* (FT Baubau)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
bsi

Masa Berlaku
Expiration Date
5 September 2022 - 20 Oktober 2024
September 5, 2022 - October 20, 2024

03.

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 45001:2018 - *Occupational Health & Safety System* (FT Kotabaru)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
bsi

Masa Berlaku
Expiration Date
26 November 2021 - 25 November 2024
November 26, 2021 - November 25, 2024

07.

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 45001:2018 - *Occupational Health & Safety System* (FT Baubau)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia

Masa Berlaku
Expiration Date
5 September 2022 - 20 Oktober 2024
September 5, 2022- October 20, 2024

04.

Nama Sertifikasi
Certification Name
SNI ISO/IEC 17025:2005 Pertamina Pulau Sambu

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Issuer Certification Institution
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia

Masa Berlaku
Expiration Date
20 Januari 2021-19 Januari 2026
January 20, 2021 - January 19, 2026

Sinergi Pertamina Group

Pertamina Group Synergy

Disajikan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

Nama Perusahaan Company Name	Bentuk Sinergi Form of Synergy	Sisi Side	Realisasi Tahun Realization Year		Persentase Kenaikan/ Penurunan Percentage of Increase/ Decrease
			2022	2023	
PT Pertamina (Persero)	Chargeback biaya ICT Chargeback ICT Cost	Pembeli Buyer	733.567.726	3.172.726.574	77%
PT Mitra Tours & Travel	Penyedia Jasa Ticket Ticketing Service Provider	Pembeli Buyer	630.996.342,5	199.256.040	77%
PT Prima Armada Raya	Penyedia Jasa Kendaraan Vehicle Service Provider	Pembeli Buyer	4.914.938.148,74	4.882.499.509,66	(1)%
PT Kilang Pertamina Internasional	Supply Air Tawar Fresh Water Supply	Pembeli Buyer	1.642.854.000	5.817.272.000	77%
PT Pertamina Trans Kontinental	Pemakaian Listrik, Air dan <i>Fresh Water</i> <i>Electricity, Water, and Fresh Water Usage</i>	Pembeli Buyer	1.476.823.181	797.388.453	(85)%
PT Pertamina Marine Solutions	Penyedia Tenaga Kerja Human Resource Provider	Pembeli Buyer	22.234.148.781	40.589.447.099	77%
PT Pertamina Port and Logistics	Pemakaian Listrik dan Air Electricity and Water Usage	Pembeli Buyer	900.400.577	2.217.101.835	59%
Jumlah Total			32.533.728.756,24	57.675.691.510,66	281%

Disajikan dalam Rupiah
Presented in Rupiah

Nama Perusahaan Company Name	Bentuk Sinergi Form of Synergy	Sisi Side	Realisasi Tahun Realization Year		Persentase Kenaikan/ Penurunan Percentage of Increase/ Decrease
			2022	2023	
PT Pertamina (Persero)	<i>Supply Fresh Water</i>	Penjual Seller	0	0	0
PT Pertamina Patra Niaga	Jasa Penyimpanan dan Penyerahan Bahan Bakar Minyak di Terminal Bahan Bakar Minyak Storage and Delivery Services of Fuel at the Fuel Terminal	Penjual Seller	790.047.627.789	863.233.058.890	8%
PT Pertamina International Shipping	<i>Supply Fresh Water</i>	Penjual Seller	36.999.817.670	18.424.990.050	(101)%
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur	Pengoperasian dan pemeliharaan <i>Water Treatment Plant</i> ("WTP") dan <i>Sewage Treatment Plant</i> ("STP") Operation and Maintenance of Water Treatment Plant (WTP) and Sewage Treatment Plant (STP)	Penjual Seller	7.628.022.160	6.682.254.851	(14)%
PT Mitra Tours & Travel	<i>Supply Fresh Water</i>	Penjual Seller	0	21.072.000	100%
PT Pertamina Trans Kontinental	<i>Supply Fresh Water, Waste Management</i>	Penjual Seller	5.456.174.822	6.235.756.800	13%
PT Pertamina Marine Solutions	<i>Supply Fresh Water</i>	Penjual Seller	168.493.170	502.501.500	66%
PT Pertamina Marine Engineering	<i>Supply Fresh Water</i>	Penjual Seller	26.504.500	32.673.000	19%
Jumlah Total			840.326.640.111	895.132.307.091	91%

0.4

ANALISA DAN DISKUSI MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS





Tinjauan Ekonomi Makro

Macroeconomic Review

Perekonomian Global

Kendati masih mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2023 kondisi perekonomian global masih terus bergerak ke arah pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Iklim bisnis tampak mulai membaik, begitu juga dengan mobilitas masyarakat yang mulai pulih, dari sebelumnya yang mengalami hambatan. Kondisi tersebut menciptakan peningkatan terhadap permintaan (demand) di sektor energi, antara lain seperti terlihat pada kenaikan harga minyak mentah di tingkat global. Komoditas tersebut diperlukan untuk mendukung pergerakan transportasi.

Dikutip dari Laporan Perekonomian Bank Indonesia tahun 2023, pertumbuhan ekonomi global melambat dengan ketidakpastian yang semakin meningkat. Setelah mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 3,5% pada 2022, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2023 diperkirakan turun ke 3,0% dan terus melambat menjadi 2,8% pada 2024. Kinerja ekonomi global pada 2023 menampilkan divergensi pertumbuhan yang terjadi antara negara maju, terutama Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi, dengan negara-negara EMDEs yang mengalami penurunan dan stagnasi. Pertumbuhan ekonomi negara maju diperkirakan akan turun dari 1,6% pada 2023 menjadi 1,4% pada 2024 sebelum meningkat menjadi 1,7% pada 2025. Sementara pertumbuhan negara EMDEs akan turun dari 4,0% pada 2023 menjadi 3,8% pada 2024 dan stagnan 3,8% pada 2025. Di negara maju, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Amerika Serikat (AS) yang tumbuh relatif tinggi yaitu 2,3% pada 2023, ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan sektor jasa yang berorientasi domestik.

Sementara itu, ekonomi Tiongkok melemah seiring dengan konsumsi rumah tangga dan penurunan kinerja sektor properti. India menjadi salah satu pusat ekonomi dunia, dengan pertumbuhan 6,7% pada 2023 menjadi 5,8% pada 2024 dan kembali meningkat ke 6,0% pada 2025. Negara ASEAN-5 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan prakiraan pertumbuhan 4,4% pada 2023 dan 2024, serta meningkat menjadi 4,6% pada 2025. Di samping tetap kuatnya permintaan domestik, pertumbuhan India dan ASEAN-5 juga didukung oleh kebijakan perdagangan dan investasi yang tetap terbuka di tengah fragmentasi geopolitik yang berlanjut.

Penurunan inflasi dunia berjalan lambat di tengah pengetatan kebijakan moneter bank sentral di banyak negara. Setelah mencapai puncaknya sebesar 11,6%

Global Economy

Although experiencing a slowdown compared to the previous year, in 2023 the global economic conditions continued to recover from the impact of the COVID-19 pandemic. The business climate began to improve, as did the mobility of people, which had previously been hindered. This situation led to an increase in demand in the energy sector, as evidenced by the rise in crude oil prices globally. This commodity is essential for supporting transportation.

As cited from the 2023 Bank Indonesia Economic Report, global economic growth has slowed with increasing uncertainty. After recording high growth of 3.5% in 2022, global economic growth in 2023 is projected to decrease to 3.0% and continue to slow down to 2.8% in 2024. The global economic performance in 2023 shows a divergence in growth between developed countries, particularly the United States (US) which is growing relatively high, and emerging market and developing economies (EMDEs) which are experiencing declines and stagnation. The economic growth of developed countries is expected to drop from 1.6% in 2023 to 1.4% in 2024 before increasing to 1.7% in 2025. Meanwhile, the growth of EMDEs will decrease from 4.0% in 2023 to 3.8% in 2024 and remain stagnant at 3.8% in 2025. In developed countries, economic growth is driven by the United States (US) which is growing relatively high at 2.3% in 2023, supported by household consumption and the domestic-oriented services sector.

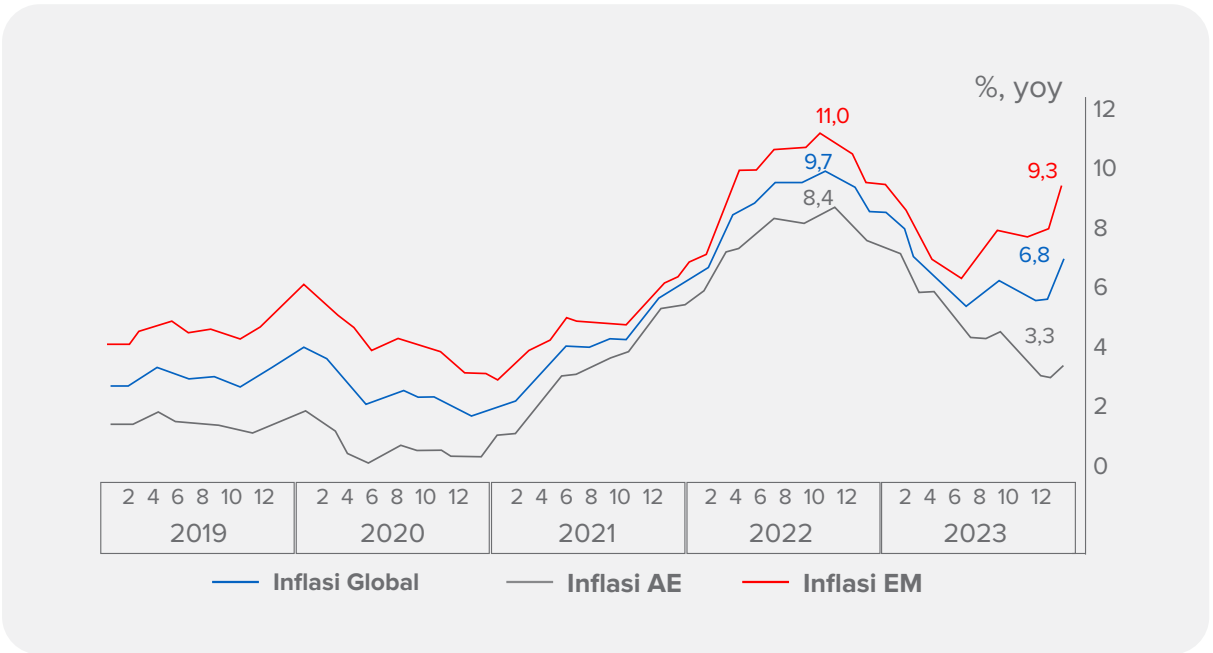
Meanwhile, the Chinese economy is weakening due to household consumption and a decline in the performance of the property sector. India has become one of the world's economic centers, with growth of 6.7% in 2023, decreasing to 5.8% in 2024, and rising again to 6.0% in 2025. The ASEAN-5 countries also show fairly good performance, with projected growth of 4.4% in 2023 and 2024, increasing to 4.6% in 2025. In addition to strong domestic demand, the growth of India and the ASEAN-5 is also supported by open trade and investment policies amidst ongoing geopolitical fragmentation.

The decline in global inflation is progressing slowly amidst the monetary policy tightening by central banks in many countries. After peaking at 11.6% in the second

pada kuartal kedua tahun 2022, inflasi dunia diperkirakan turun menjadi 6,8% pada Desember 2023, dengan inflasi negara maju tercatat 3,3%, sementara inflasi negara EMDEs tercatat 9,3%.

quarter of 2022, global inflation is projected to decrease to 6.8% by December 2023, with inflation in developed countries recorded at 3.3%, while inflation in EMDEs is recorded at 9.3%.

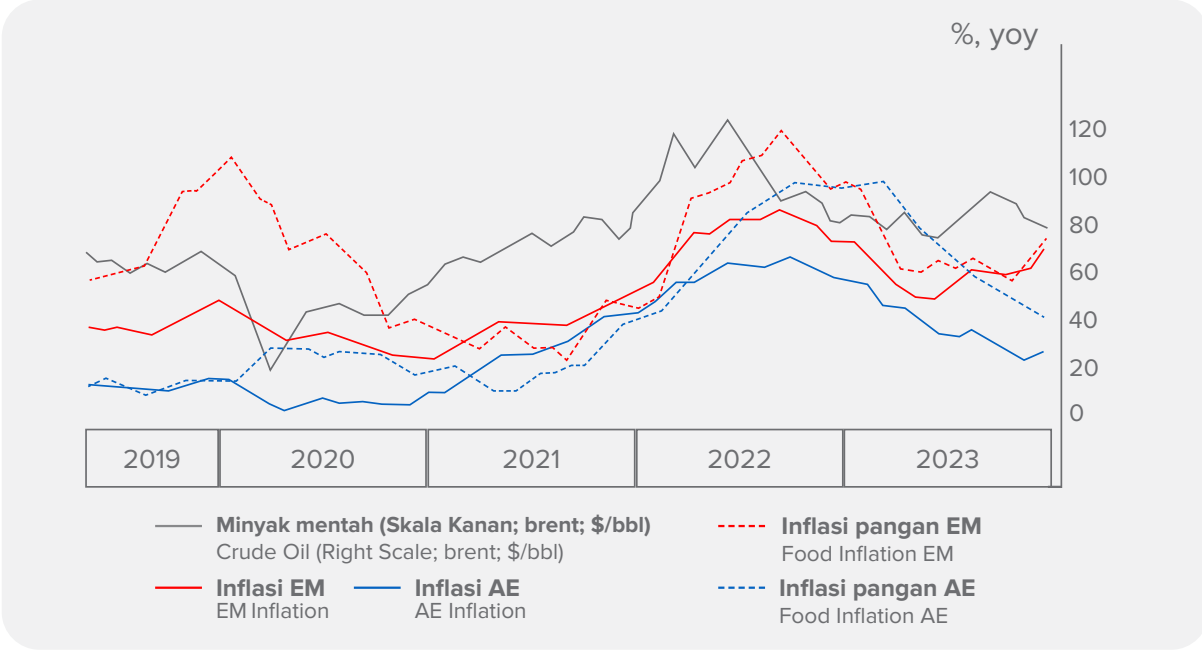
Grafik Inflasi Global, AEs, dan EMDEs
Graph of Inflation in Global, AEs, and EMDEs



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah
Source : Bloomberg and IMF, processed

Des'23: angka sementara
Dec '23: preliminary figures

Grafik Inflasi, Inflasi Pangan, Harga Minyak
Graphic of Inflation, Food Inflation and Oil Prices



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah
Source: Bloomberg and IMF, processed

Des'23: angka sementara
Dec '23: preliminary figures

Penurunan inflasi sejalan dengan penurunan harga energi dan pangan dan dampak dari pengetatan kebijakan

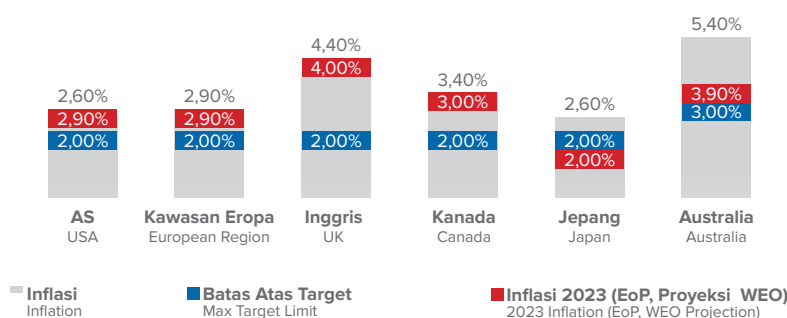
The decline in inflation aligns with the reduction in energy and food prices and the effects of tightened monetary

moneter bank sentral di banyak negara. Meski demikian, inflasi di negara-negara maju masih jauh di atas sasaran yang ingin dicapai, yaitu 2%, sedangkan di kebanyakan negara EMDEs telah di bawah sasaran. Di AS, sebagai contoh, inflasi masih tinggi, yaitu sekitar 3,4% pada akhir 2023 dan diperkirakan menurun ke 2,3% pada akhir 2024. Demikian pula di Uni Eropa dan Inggris, inflasi masih sekitar 2,9% dan 4% pada akhir 2023 dan diperkirakan menurun ke sekitar 2,3% dan 2,4% pada akhir 2024. Sementara di negara EMDEs, inflasi sejumlah negara masih di atas sasaran, di antaranya Brazil dan Meksiko di Amerika Latin. Negara-negara EMDEs lain telah mampu menurunkan inflasinya kembali ke sasaran, termasuk Indonesia. Perkembangan di atas menunjukkan bahwa pengetatan moneter oleh bank-bank sentral negara maju masih akan berlanjut pada 2024 untuk memastikan inflasi kembali ke sasaran, yaitu 2%. Kondisi ini mempersulit bank-bank sentral negara EMDEs untuk mengarahkan kebijakan moneternya ke tujuan ekonomi domestik, khususnya stabilitas harga dan pertumbuhan, karena keharusan mempertahankan stabilitas eksternal dari dampak negatif tingginya suku bunga global tersebut.

policies by central banks in various countries. However, inflation in developed countries remains significantly above the target of 2%, whereas in most EMDEs, it has fallen below the target. In the United States, for example, inflation remains high at approximately 3.4% at the end of 2023 and is projected to decrease to 2.3% by the end of 2024. Similarly, in the European Union and the United Kingdom, inflation is still around 2.9% and 4% at the end of 2023 and is forecasted to decline to approximately 2.3% and 2.4% by the end of 2024. Meanwhile, in some EMDE countries, inflation remains above the target, including Brazil and Mexico in Latin America. Other EMDE countries have managed to reduce their inflation back to target levels, including Indonesia. These developments indicate the monetary tightening by central banks in developed countries will continue into 2024 to ensure inflation returns to the target of 2%. The situation complicates the efforts of central banks in EMDE countries to steer their monetary policies towards domestic economic goals, particularly price stability and growth, due to the necessity of maintaining external stability amidst the adverse effects of high global interest rates.

Grafik Inflasi Negara AEs vs Target

Graph of Inflation in Advanced Economies vs. Target



Data per Desember 2023

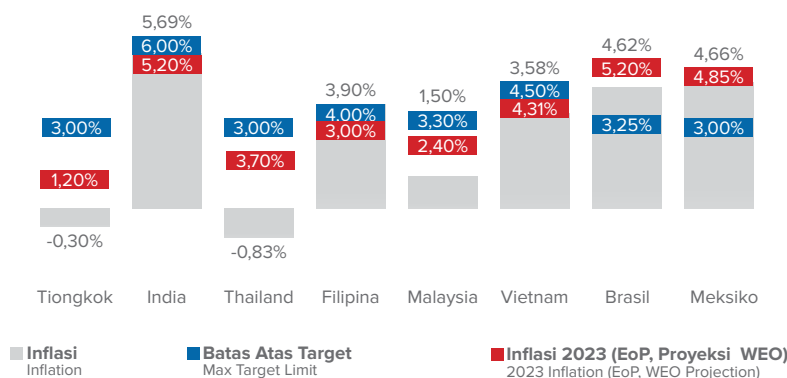
Sumber: CEIC, Bank Sentral AE, Bloomberg, diolah * Inflasi PCE

Data as of December 2023

Source: CEIC, Central Banks of AE, Bloomberg, processed *PCE Inflation

Grafik Inflasi Negara EMDEs vs Target

Graph of Inflation in EMDEs vs. Target



Data per Desember 2023

Sumber: CEIC, Bank Sentral EMDEs, Bloomberg, diolah

Data as of December 2023

Source: CEIC, Central Banks of EMDEs, Bloomberg, processed

Perekonomian Nasional

Selama tahun 2023, perekonomian global dihadapkan pada ketidakpastian yang dipicu oleh risiko perlambatan pertumbuhan di Tiongkok dan Amerika, ketegangan geopolitik antara Ukraina- Rusia, konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi, volatilitas harga komoditas, ancaman perubahan iklim, kontraksi manufaktur global, dan peningkatan harga minyak dunia. Menghadapi tantangan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan, namun tetap tumbuh baik dan berdaya tahan terhadap dampak rambatan global. Perbaikan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III 2023 terus berlanjut terutama ditopang oleh permintaan domestik, di tengah melambatnya kinerja sektor eksternal sejalan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia. Di sisi permintaan domestik, konsumsi swasta tetap tumbuh kuat, termasuk konsumsi generasi muda, seiring dengan meningkatnya konsumsi di sektor jasa, masih tingginya keyakinan konsumen, terjaganya daya beli seiring dengan inflasi yang rendah, dan stimulus kebijakan fiskal termasuk pemberian subsidi dan berbagai program bantuan sosial. Pertumbuhan investasi juga tetap baik didorong berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi nonbangunan. Sementara di sisi eksternal, pertumbuhan riil ekspor barang menurun seiring pelemahan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok, dan penurunan harga komoditas, sedangkan ekspor jasa tumbuh tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah wisatawan mancanegara.

Memasuki triwulan IV 2023, berbagai indikator terkini seperti penjualan eceran, indeks keyakinan konsumen, penjualan semen, dan Purchasing Manager's Index (PMI) yang berada pada zona ekspansi mengonfirmasi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tetap baiknya pertumbuhan ekonomi juga tecermin pada kinerja lapangan usaha (LU) utama seperti industri pengolahan, pertambangan, konstruksi, dan LU yang terkait dengan jasa termasuk transportasi dan pergudangan, akomodasi dan makan minum, serta informasi dan telekomunikasi. Dengan perkembangan tersebut Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai kisaran 4,5-5,3% pada 2023, dan akan meningkat menjadi 4,7-5,5% pada 2024 dan 4,8-5,6% pada 2025. Berlanjutnya perbaikan ekonomi pada 2024 terutama didorong oleh permintaan domestik sejalan dengan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), penyelenggaraan Pemilu, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Bank Indonesia juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan, dengan terus meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran, dengan sinergitas kebijakan fiskal Pemerintah yang makin erat. Untuk tahun 2024, beberapa lembaga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 tetap stabil sekitar 5%. Beberapa lembaga tersebut termasuk World Bank yang memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,9%, ADB dan IMF sebesar 5,0%, serta OECD sebesar 5,2%. Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

National Economy

In 2023, the global economy faced uncertainties triggered by the risk of slowed growth in China and the United States, geopolitical tensions between Ukraine and Russia, the Palestine-Israel conflict, economic fragmentation, commodity price volatility, the threat of climate change, global manufacturing contraction, and rising world oil prices. Despite these challenges, Indonesia's economic growth experienced a decline but remained robust and resilient against global ripple effect. Economic growth improvement until the third quarter of 2023 has continued, primarily supported by domestic demand amidst the slowdown in external sector performance in line with the global economic downturn. On the domestic demand side, private consumption remains strong, including consumption by the younger generation, along with increased consumption in the services sector, sustained high consumer confidence, maintained purchasing power due to low inflation, and fiscal policy stimuli including subsidies and various social assistance programs. Investment growth also remains solid, driven by the ongoing completion of National Strategic Projects (PSN) and non-building investments. On the external side, real export growth of goods has declined due to weakening demand from major trading partners, especially China, and falling commodity prices. However, services exports have grown significantly, in line with the rise in international tourist arrivals.

Entering the fourth quarter of 2023, various current indicators such as retail sales, consumer confidence index, cement sales, and the Purchasing Manager's Index (PMI) in the expansion zone confirm the continuation of Indonesia's economic growth. The sustained economic growth is also reflected in the performance of key sectors such as manufacturing, mining, construction, and services-related sectors including transportation and warehousing, accommodation and food services, as well as information and telecommunications. With these developments, Bank Indonesia forecasts economic growth to reach a range of 4.5-5.3% in 2023, and to increase to 4.7-5.5% in 2024 and 4.8-5.6% in 2025. The continued economic improvement in 2024 will mainly be driven by domestic demand in line with the salary increase for Civil Servants (ASN), the implementation of the elections, and the development of the Nusantara Capital City (IKN). Bank Indonesia also supports economic growth, particularly from the demand side, by continuously enhancing macroprudential policy stimuli and accelerating payment system digitalization, along with increasingly close fiscal policy synergy with the Government. For 2024, several institutions project Indonesia's economic growth in 2024 remains stable around 5%. Some of these institutions include The World Bank projects economic growth Indonesia at 4.9%, ADB and IMF at 5.0%, as well OECD at 5.2%. The Indonesian government itself has set an economic growth target of 5.2%.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023-2025 (% , yoy)
Indonesia Economic Growth Table 2023-2025 (% , yoy)

Komponen	2022	2023			2023	2024	2025
		I	II	III			
Pertumbuhan Ekonomi	5,31	5,04	5,17	4,94	4,5 - 5,3	4,7 - 5,5	4,8 - 5,6
Konsumsi Rumah tangga	4,93	4,54	5,22	5,06	4,5 - 5,3	4,6 - 5,4	4,6 - 5,4
Konsumsi pemerintah	-4,51	3,34	10,57	-3,76	2,9 - 3,7	2,8 - 3,6	2,8 - 3,6
Investasi	3,87	2,11	4,63	5,77	4,1 - 4,9	5,0 - 5,8	5,2 - 6,0
Ekspor	16,28	11,94	-2,97	-4,26	-0,5 - 0,3	-0,4 - 0,4	6,1 - 6,9
Impor	14,75	3,69	-3,06	-6,18	-2,9 - -2,1	-1,1 - -0,3	7,1 - 7,9

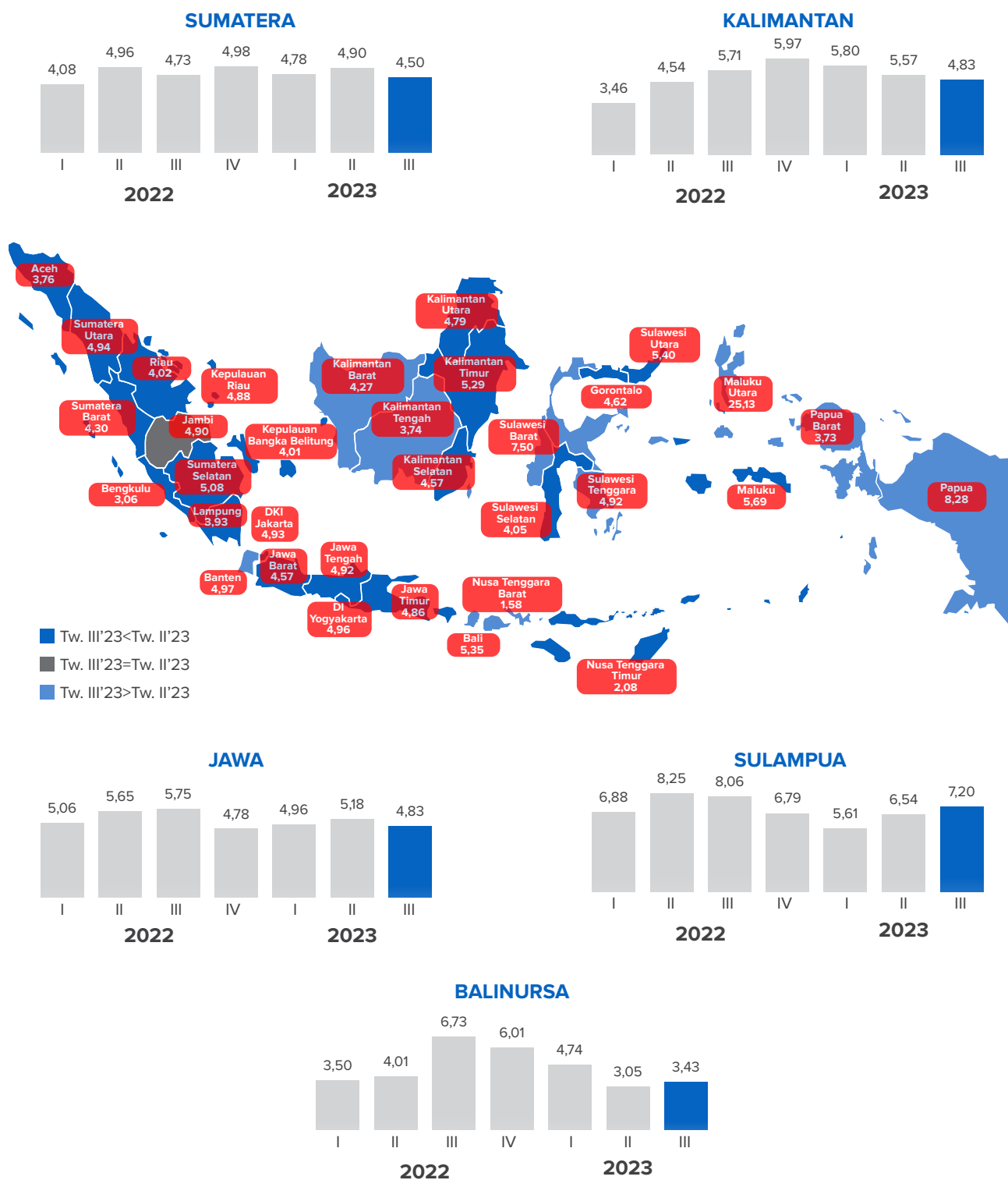
Sumber: BPS, Proyeksi Bank Indonesia
Source: BPS, Bank Indonesia Projections

Keterangan: P Proyeksi Bank Indonesia
***Angka sangat sementara; **Angka sangat sangat sementara**
Note: Bank Indonesia Projection
Highly Preliminary Figures; **Extremely Preliminary Figures

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia juga tetap baik. Hingga triwulan III 2023, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Tingginya pertumbuhan ekonomi Sulampua terutama bersumber dari ekspor sejalan dengan kemajuan hilirisasi mineral, di samping juga didukung konsumsi swasta yang tetap kuat. Ekonomi wilayah Jawa juga tumbuh kuat didukung oleh konsumsi dan investasi bangunan seiring dengan terus berlanjutnya penyelesaian PSN di tengah tekanan terhadap ekspor manufaktur. Di wilayah Kalimantan, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh investasi bangunan terkait dengan pembangunan IKN dan konsumsi swasta yang tetap kuat, di tengah kinerja ekspor komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang melemah akibat penurunan permintaan dari negara mitra dagang utama, terutama Tiongkok. Ekonomi wilayah Sumatera juga tumbuh baik karena ditopang konsumsi swasta dan investasi bangunan seiring dengan berlanjutnya PSN yang mampu menahan dampak kinerja ekspor komoditas SDA yang melambat, khususnya batubara dan minyak kelapa sawit. Sementara itu, ekonomi wilayah Balinusra juga tetap tumbuh positif terutama bersumber dari konsumsi swasta sejalan dengan kembali pulihnya pariwisata dan investasi di sektor pertambangan. Ke depan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus membaik di sebagian besar wilayah di tengah normalisasi pertumbuhan ekonomi Kalimantan sejalan dengan normalisasi belanja modal IKN, serta Sulampua karena selesainya realisasi investasi modal pada beberapa proyek hilirisasi nikel. Dengan perkembangan tersebut, untuk keseluruhan tahun 2023, perekonomian wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Balinusra, dan Sulampua diperkirakan tumbuh masing-masing pada kisaran 4,1-4,9%, 4,6-5,4%, 4,8-5,6%, 3,4-4,2%, dan 6,2-7,0% untuk kemudian meningkat pada 2024 masing-masing menjadi 4,5-5,3%, 4,7-5,5%, 4,3-5,1%, 3,8-4,6%, dan 6,7-7,5%.

Spatially, economic growth across almost all regions of Indonesia remains strong. Up to the third quarter of 2023, the highest economic growth was recorded in the Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) region, followed by Jawa, Kalimantan, Sumatra, and Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). The high economic growth in Sulampua is primarily driven by exports, in line with advancements in mineral and coal downstreaming, and is also supported by strong private consumption. Jawa's economy also experienced strong growth, supported by consumption and building investment, alongside the ongoing completion of PSN amidst pressure on manufacturing exports. In Kalimantan, economic growth was sustained by building investments related to the development of the new capital city (IKN) and strong private consumption, despite weakened commodity exports due to decreased demand from major trading partners, especially China. Sumatra's economy grew well, supported by private consumption and building investments, which helped cushion the impact of the slowing commodity exports, particularly coal and palm oil. Meanwhile, the economy in Balinusra continued to grow positively, primarily driven by private consumption in line with the recovery of tourism and investments in the mining sector. Looking ahead, economic growth is expected to continue improving in most regions, amidst the normalization of economic growth in Kalimantan as capital spending for the IKN normalizes, and in Sulampua as the realization of capital investment in several nickel downstreaming projects completes. With these developments, for the entirety of 2023, the economies of Sumatra, Jawa, Kalimantan, Balinusra, and Sulampua are forecasted to grow in the ranges of 4.1-4.9%, 4.6-5.4%, 4.8-5.6%, 3.4-4.2%, and 6.2-7.0%, respectively. These growth rates are expected to increase in 2024 to 4.5-5.3%, 4.7-5.5%, 4.3-5.1%, 3.8-4.6%, and 6.7-7.5%, respectively.

Gambar Ekonomi Spasial Triwulan III 2023 (% yoy)
Figure: Spatial Economy Quarter III 2023 (% YoY)



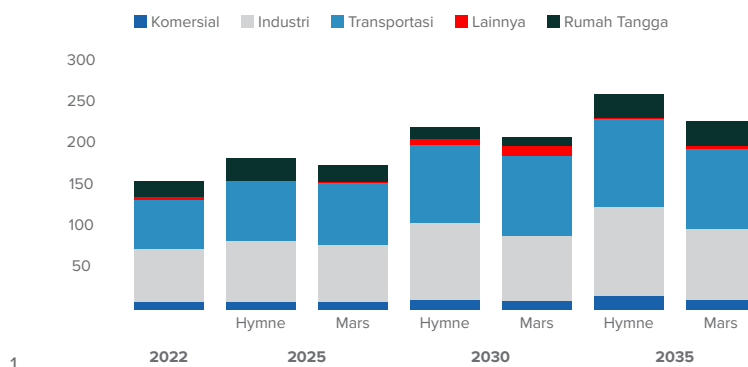
Sumber: BPS, diolah
Source : BPS, processed

Tinjauan Industri

Industry Review

Dikutip dari *Outlook Energi Indonesia*, Permintaan energi pada masing-masing skenario dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan populasi, dan kebijakan yang diambil selama periode proyeksi. Dalam sepuluh tahun ke depan, permintaan energi final pada skenario *Hymne* diproyeksikan tumbuh rata-rata sebesar 4,6%. Sedangkan permintaan energi final skenario *Mars* tumbuh lebih rendah rata-rata 3,5% per tahun sejalan dengan adanya efisiensi energi di semua sektor. Permintaan energi pada masing-masing skenario tahun 2025, 2030, dan 2033 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini.

According to the Indonesia Energy Outlook, energy demand in each scenario is influenced by economic growth, population growth, and policies enacted during the projection period. Over the next decade, final energy demand in the Hymne scenario is projected to grow at an average rate of 4.6% per year. In contrast, final energy demand in the Mars scenario is expected to grow at a lower average rate of 3.5% per year due to energy efficiency measures implemented across all sectors. The projected energy demand for the years 2025, 2030, and 2033 under each scenario is illustrated in the following chart:



Gambar Permintaan Energi Final per Sektor
Figure Final Energy Demand Per Sector

BBM mendominasi konsumsi energi final di tahun 2022 hingga 10 tahun ke depan sehingga pada tahun 2033 konsumsi BBM mencapai 113 juta TOE (*Hymne*) dan 96 juta TOE (*Mars*). Namun demikian rata-rata pertumbuhan konsumsi BBM pada kedua skenario di bawah rata-rata pertumbuhan total konsumsi energi final yaitu 4% (*Hymne*) dan 2,5% (*Mars*). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya substitusi BBM ke energi listrik, pemanfaatan biodiesel hingga B40 mulai dan etanol E5 serta dimulainya penggunaan hidrogen sebesar 0,045 juta TOE pada sektor transportasi mulai tahun 2031.

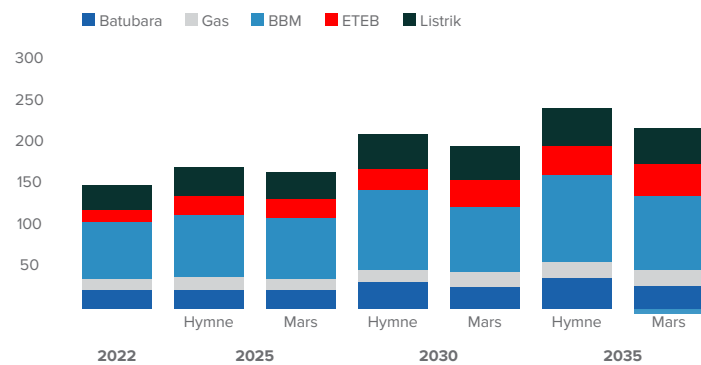
Fossil fuels dominated final energy consumption in 2022 and will continue to do so for the next 10 years, reaching 113 million TOE (*Hymne*) and 96 million TOE (*Mars*) by 2033. However, the average growth rate of fossil fuel consumption in both scenarios is below the average growth rate of total final energy consumption, which is 4% (*Hymne*) and 2.5% (*Mars*). This condition is influenced by efforts to substitute fossil fuels with electricity, the utilization of biodiesel up to B40, and ethanol E5, as well as the introduction of hydrogen amounting to 0.045 million TOE in the transportation sector starting in 2031.

Pertumbuhan konsumsi energi terbesar berdasarkan jenisnya adalah ETEB (biodiesel dan bioetanol) yang masing-masing meningkat rata-rata sebesar 7,4%/tahun (*Hymne*) dan 7,5%/tahun (*Mars*) dengan adanya peningkatan campuran FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) dalam minyak diesel sebesar 40% pada tahun 2025 dan etanol pada bensin sebesar 10% mulai tahun 2025. Konsumsi gas dalam 10 tahun ke depan rata-rata tumbuh sekitar 3,2% (*Hymne*) dan 2% (*Mars*), sementara konsumsi batubara tumbuh sekitar 5,4% (*Hymne*) dan 3% (*Mars*).

The largest growth in energy consumption by type is seen in ETEB (ETEB - biodiesel and bioethanol), each increasing at an average rate of 7.4% per year (*Hymne*) and 7.5% per year (*Mars*) due to the increased blending of FAME (*Fatty Acid Methyl Ester*) in diesel oil to 40% by 2025 and ethanol in gasoline to 10% starting in 2025. Gas consumption over the next 10 years is expected to grow at an average rate of around 3.2% (*Hymne*) and 2% (*Mars*), while coal consumption is projected to grow by approximately 5.4% (*Hymne*) and 3% (*Mars*).

Perkembangan konsumsi energi final per jenis energi sebagaimana ditunjukkan pada Gambar di bawah ini:

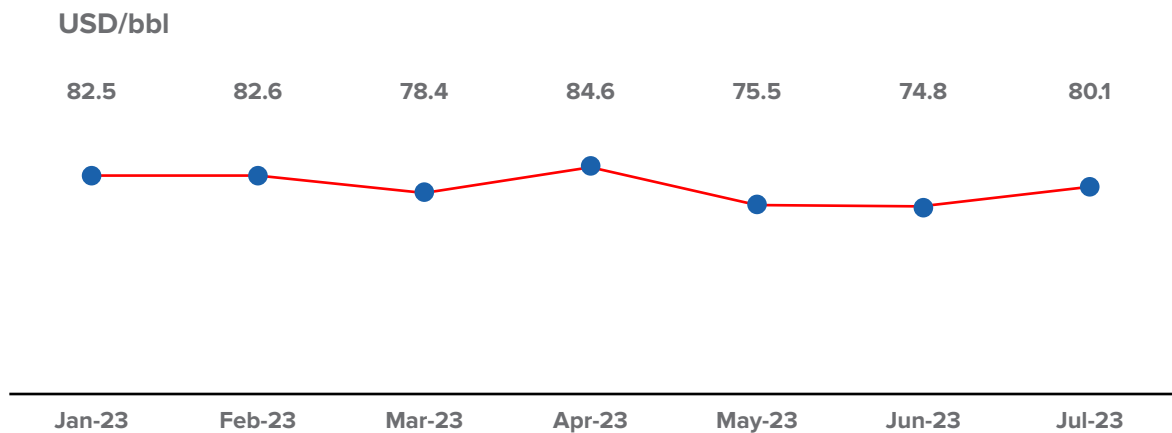
The development of final energy consumption by type of energy is shown in the figure below:



Gambar Permintaan Energi Final per Jenis Energi
Figure Final Energy Demand per Type of Energy

Dikutip dari Pertamina Outlook Energy 2023, Industri hulu migas dinilai telah menunjukkan ketahanannya dengan pemulihan yang kuat dari pandemi Covid-19. Namun, saat ini terdapat tantangan besar berikutnya bagi pelaku usaha migas, yakni untuk menunjukkan keberlanjutan dan mampu memenuhi permintaan energi seiring dengan pemulihan ekonomi dan kegiatan produksi masyarakat. Ditambah dengan tren global transisi energi yang terjadi di beberapa negara di dunia, hal itu tentunya akan menekan permintaan atau *demand* produk migas di masa mendatang. Melihat perkembangan harga minyak di sepanjang tahun 2023, terlihat bahwa harga minyak dunia masih berada di atas rata-rata 70 dolar AS/barel

According to the Pertamina Energy Outlook 2023, the upstream oil and gas industry has demonstrated its resilience with a strong recovery from the Covid-19 pandemic. However, the next significant challenge for oil and gas businesses is to demonstrate sustainability and the ability to meet energy demand in line with economic recovery and increased production activities. Additionally, the global trend of energy transition occurring in several countries around the world will inevitably pressure the demand for oil and gas products in the future. Observing the oil price trends throughout 2023, it is shown that global oil prices have remained above an average of 70 USD per barrel.



Gambar Harga Dated Brent 2023
Sumber: statista.com (2023)
Figure: Dated Brent Price 2023
Source: statista.com (2023)

Saat ini, perusahaan migas dunia juga dituntut untuk menjadi salah satu penggerak utama dalam mendorong percepatan transisi energi global. Perusahaan migas di Eropa, seperti Total, ENI, dan BP, telah melakukan investasi energi terbarukan ke dalam portofolio bisnisnya. Terdapat beberapa hal yang menjadi pendorong bagi perusahaan migas dunia untuk bergerak dalam transisi energi, antara lain:

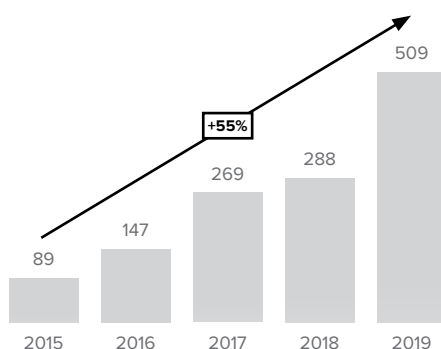
Currently, global oil and gas companies are demanded to be one of the main drivers in accelerating the global energy transition. European oil and gas companies, such as Total, ENI, and BP, have already incorporated renewable energy investments into their business portfolios. Several factors are driving global oil and gas companies to engage in the energy transition, including:

1. Tekanan dekarbonisasi: Mengurangi emisi operasional, mengembangkan CCS/CCUS, dan mendorong implementasi bahan bakar rendah karbon.
2. Diversifikasi bisnis energi: Berinvestasi dalam EBET untuk mendukung portofolio bisnis yang berkelanjutan ke depan.

1. Decarbonization Pressure: Reducing operational emissions, developing CCS/CCUS and promoting the implementation of low-carbon fuels.
2. Energy Business Diversification: Investing in renewable energy to support a sustainable business portfolio in the future.

Investasi perusahaan migas dunia ke depan akan semakin terdiversifikasi dengan penurunan investasi di sektor hulu, dan digantikan dengan peningkatan investasi energi terbarukan atau rendah karbon. Hal itu ditujukan untuk membuat portofolio bisnis perusahaan yang berkelanjutan.

Moving forward, global oil and gas companies' investments will become increasingly diversified, with a reduction in upstream sector investments and a corresponding increase in renewable or low-carbon energy investments. This shift aims to create a sustainable business portfolio for the companies.



Gambar Investasi Proyek Sustainability Global
Sumber: Analisis PEI (2022)
 Figure: Global Sustainability Project Investment
 Source: PEI Analysis (2022)

Permintaan energi global diukur pada titik akhir penggunaan energi *decarbonizes* dalam ketiga skenario. Pangsa bahan bakar fosil dalam total akhir konsumsi energi (TFC) menurun dari sekitar 65% pada 2019 menjadi 30-50% pada tahun 2050 dalam tiga skenario. Peran listrik meningkat secara substansial, dengan listrik konsumsi meningkat sebesar 75- 85% dari prospek di ketiganya skenario. Porsi listrik pada titik akhir penggunaan meningkat dari 20% pada 2019 menjadi sekitar 30% di Momentum Baru dan 45-50% di Dipercepat dan *Net Zero*.

Global energy demand at the end-use level is expected to undergo significant decarbonization across three projected scenarios. The share of fossil fuels in total final consumption (TFC) is anticipated to decrease from around 65% in 2019 to between 30% and 50% by 2050 in these scenarios. The role of electricity is projected to increase substantially, with electricity consumption rising by 75-85% across all scenarios. The share of electricity in final energy consumption is expected to grow from 20% in 2019 to approximately 30% in the New Momentum scenario and 45-50% in the Accelerated and Net Zero scenarios.

Indonesia memiliki salah satu cadangan minyak terbukti terbesar di antara negara-negara Asia Tenggara. Negara ini juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, dan akibatnya, permintaan akan produk minyak bumi dan produk minyak turunan kemungkinan besar akan meningkat di masa depan. Perkembangan seperti itu cenderung menghadirkan peluang signifikan bagi pemain yang terlibat di pasar. Meningkatnya adopsi energi terbarukan dapat menahan pasar selama periode perkiraan. Indonesia telah mulai menambahkan energi terbarukan ke dalam bauran energinya untuk mengurangi pangsa batubara dan minyak bumi domestik agar memiliki emisi yang lebih rendah dan ekonomi hijau.

Indonesia boasts one of the largest proven oil reserves among Southeast Asian countries. The nation's rapid economic growth is likely to drive an increase in demand for petroleum and petroleum products in the future, presenting significant opportunities for market players. However, the rise in renewable energy adoption might constrain the market during the forecast period. Indonesia has started incorporating renewable energy into its energy mix to reduce the domestic share of coal and petroleum, aiming for lower emissions and a greener economy.

Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan target untuk mencapai penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Target tersebut, ditambah dengan kebijakan dan program pemerintah, telah menghasilkan beberapa proyek energi terbarukan yang dikembangkan di seluruh negeri.

Maka dalam hal ini, bagi PT Pertamina Energy Terminal (“PET”) sebagai *energy storage provider*. Menjadikan situasi dan proyeksi kondisi industri minyak dan gas di masa mendatang sebagai acuan dalam melakukan adaptasi dan pengembangan bisnis *storage*. Segala upaya dimaksimalkan sebagai bentuk dukungan dalam transisi energi. Tidak terlepas dari bisnis yang dijalankan saat ini, sebagai *storage provider* untuk bahan bakar minyak dan gas PET dituntut untuk berinovasi dalam memberikan layanan *storage* secara adaptif menyikapi volatilitas pangsa pasar di masa mendatang. Berbagai kemungkinan transisi energi dapat dijadikan sebagai peluang bisnis bagi PET kedepannya untuk dapat mempertahankan eksistensi perusahaan dan dukungan sebagai salah satu Anak Perusahaan PT Pertamina International Shipping dan PT Pertamina (Persero).

Di sisi lain meninjau lanskap energi yang terus berlanjut dan berubah secara adaptif adalah transisi sistem energi rendah karbon dan sistem terminal *storage* yang berbasis *Green Port* dan *Smart Port*. Dilansir dari *Ports and Maritime Organization*, *Green Port* merupakan suatu konsep baru dalam pengembangan pelabuhan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, konservasi energi, *community development*, dan kepentingan ekonomi dari pelabuhan itu sendiri. Implementasi konsep *Green Port* dan *Smart Port* telah dijalankan dan diterapkan oleh pelabuhan-pelabuhan di dunia, antara lain Belanda (Rotterdam), USA (Los Angeles), dan Jerman (Hamburg), sedangkan Malaysia dan Singapura tengah melakukan uji coba untuk disegerakan dalam penerapannya.

The government has set targets for renewable energy usage to reach 23% by 2025 and 31% by 2050. These targets, supported by government policies and programs, have spurred the development of several renewable energy projects across the country.

For PT Pertamina Energy Terminal (PET), an energy storage provider, understanding and adapting to the future conditions of the oil and gas industry is crucial. PET aims to optimize efforts to support the energy transition, despite its current role as a storage provider for petroleum and gas. PET is expected to innovate in providing adaptive storage services in response to future market volatility. The various possibilities in energy transition present business opportunities for PET to maintain its corporate existence and support as a subsidiary of PT Pertamina International Shipping and PT Pertamina (Persero).

In the evolving energy landscape, transitioning to low-carbon energy systems and green, smart terminal storage systems is critical. According to the Ports and Maritime Organization, the Green Port concept represents a new approach to sustainable port development, integrating environmental conservation, energy efficiency, community development, and economic interests of the port. The implementation of Green Port and Smart Port concepts has been adopted by ports worldwide, including Rotterdam (Netherlands), Los Angeles (USA), and Hamburg (Germany). Malaysia and Singapore are also testing these concepts for imminent implementation.





Merancang penerapan Smart Traffic Management System
Plan the implementation of Smart Traffic Management system



Menggunakan bahan bakar terbarukan dan investasi energi ramah lingkungan
Utilize renewable fuel and investment in environmentally friendly energy



Memperhitungkan batas gangguan antara Kawasan Pelabuhan dengan Kawasan perkotaan
Considering disturbance boundary between the port area and urban area



Revitalisasi Area Hijau (Green Space)
Green Space Revitalization



Recycling Plan for Sustainable Port



Memantau polusi emisi gas buangan dari kapal
Monitor vessel exhaust gas emission pollution



Meningkatkan penggunaan moda transportasi ramah lingkungan
Improve the use of environmentally friendly transportation



Mengembangkan Onshore Power Supply System (OPS)
Develop Onshore Power Supply System (OPS)

Salah satu negara tetangga yang berkembang pesat pada sistem penyimpanan terminal dengan menerapkan sistem *Green Port* dan *Smart Port* adalah Singapura. Tarif sewa penyimpanan di Singapura meningkat lebih dari 25% dari tahun sebelumnya menjadi sekitar \$7/ meter kubik per bulan, menurut *S&P Global Platts*. Singapura juga merupakan stasiun pengisian bahan bakar kapal terbesar di dunia dengan lebih dari 47 juta MT bahan bakar bunker. Sementara variasi harga antar terminal penyimpanan tergantung pada infrastruktur dan kemampuan terminal. Pelaku pasar melaporkan bahwa biaya sewa penyimpanan untuk spektrum minyak mentah dan produk minyak telah meningkat lebih dari 25% y-o-y menjadi sekitar \$7/cu m per bulan.

Salah satu terminal *benchmarking* yaitu PSA yang mengembangkan *mega port* sebagai etalase untuk teknologi dan sistem pelabuhan terbaru dengan mengadopsi inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di pelabuhannya serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Singapore, a neighboring country, has rapidly developed its terminal storage system by implementing Green Port and Smart Port systems. According to *S&P Global Platts*, storage rental rates in Singapore have increased by more than 25% from the previous year, reaching approximately \$7 per cubic meter per month. Singapore is also the largest bunkering station globally, handling over 47 million MT of bunker fuel. The price variations between storage terminals depend on the infrastructure and capabilities of each terminal. Market players report the rental costs for crude oil and oil products storage have risen by more than 25% year-on-year to around \$7/ cu m per month.

One notable terminal, PSA, has developed a mega port showcasing the latest port technology and systems. By adopting technological innovations, PSA has enhanced productivity and efficiency at its ports while reducing dependence on manual labor.

Dengan penerapan otomatisasi sistem terminal dengan *automated loading and discharging system*, alih-alih penggerak utama dioperasikan oleh masing-masing pengemudi, saat ini kegiatan perawatan dan analisis telah menggunakan kendaraan berpemandu otomatis (AGV) di pelabuhan. PSA juga mengadaptasi penggunaan *drone* dan robot untuk tugas-tugas mulai dari inspeksi dan perbaikan hingga distribusi komoditas.

The terminal has implemented an automated loading and discharging system, where automated guided vehicles (AGVs) now handle maintenance and analysis activities instead of manual drivers. PSA has also embraced the use of drones and robots for tasks ranging from inspection and repairs to commodity distribution.

Dalam menerapkan sistem *green port*, terminal di Singapura berfokus pada pengelolaan kapal yang akan sandar. Kapal harus beralih ke bahan bakar yang lebih ramah lingkungan sebelum melintasi batas pelabuhan, menurut *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA). Adanya insentif untuk biaya Pelabuhan bagi kapal-kapal dengan emisi karbon rendah sebesar 10% adalah bagian dari serangkaian tindakan untuk mendorong penggunaan bahan bakar bunker rendah karbon atau nol karbon. Perubahan lain adanya program oleh *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA) yaitu pengurangan biaya pelabuhan 30% untuk menggunakan bahan bakar nol-karbon di pelabuhan sementara semua kapal yang menggunakan bahan bakar rendah karbon bisa mendapatkan pengurangan biaya sebesar 25%. Selain pada manajemen kapal, pengelolaan operasional Pelabuhan dilakukan dengan menerapkan *smart grid system* untuk meminimalisir penggunaan energi listrik di Pelabuhan.

In implementing the Green Port system, Singapore’s terminals focus on managing incoming vessels. According to the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), vessels must switch to more environmentally friendly fuels before crossing the port boundary. Incentives for low-carbon emission ships include a 10% port fee reduction as part of a series of measures to promote the use of low-carbon or zero-carbon bunker fuels. Additionally, MPA offers a 30% port fee reduction for ships using zero-carbon fuels, while all ships using low-carbon fuels can receive a 25% reduction. Operational management at the ports is optimized by implementing a smart grid system to minimize electricity usage. This system helps ensure energy efficiency and sustainability in port operations.

ADVANCED PORT TECHNOLOGIES	INTELLIGENT PORT SYSTEM (PORT DIGITALISATION)	GREEN TECHNOLOGIES
Penggunaan fasilitas <i>automated loading and discharging system</i> yang menekankan presisi proses distribusi dengan adaptasi computer, kamera dan sensor. Penggunaan drone untuk inspeksi peralatan dan fasilitas Pelabuhan The implementation of automated loading and discharging systems that emphasize the precision of distribution processes through the adaptation of computers, cameras, and sensors. The use of drones for the inspection of port equipment and facilities.	Penggunaan <i>one-stop</i> untuk efektifitas dan efisiensi <i>port clearance</i>. Penggunaan <i>intelligent planning system</i> untuk optimalisasi waktu <i>turnaround</i> kapal di pelabuhan dan labuh kapal The use of a one-stop system for the effectiveness and efficiency of port clearance. The utilization of an intelligent planning system to optimize the turnaround time of ships at the port and anchorage.	Sumber listrik di Pelabuhan menggunakan energi rendah emisi karbon. Menerapkan <i>smart grid system</i> yang dapat secara aktif mengontrol konsumsi energi listrik di Pelabuhan. Menggunakan <i>solar panel system</i> sebagai energi terbarukan The use of low carbon emission energy sources for electricity at the port. Implementing a smart grid system that can actively control energy consumption at the port. Utilizing solar panel systems as a renewable energy source.

Figure Smart Port and Green Port System

Faktorisasi tersebut menjadi fokus penting bagi PET yang merupakan industri jasa terminal penyimpanan minyak dan gas, *fresh water supply*, dan *waste management* untuk dapat beradaptasi terhadap regulasi secara global dalam pengelolaan terminal yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja operasional terminal, serta meningkatkan kapabilitas bisnis perusahaan.

Figure Smart Port and Green Port System

These factors become a critical focus for PET, which operates in the oil and gas storage, fresh water supply, and waste management industries. PET must adapt to global regulations on environmentally friendly and technology-based terminal management to enhance the operational effectiveness and efficiency of its terminal operations and to improve the company’s business capabilities.

Tinjauan Per Segmen Usaha

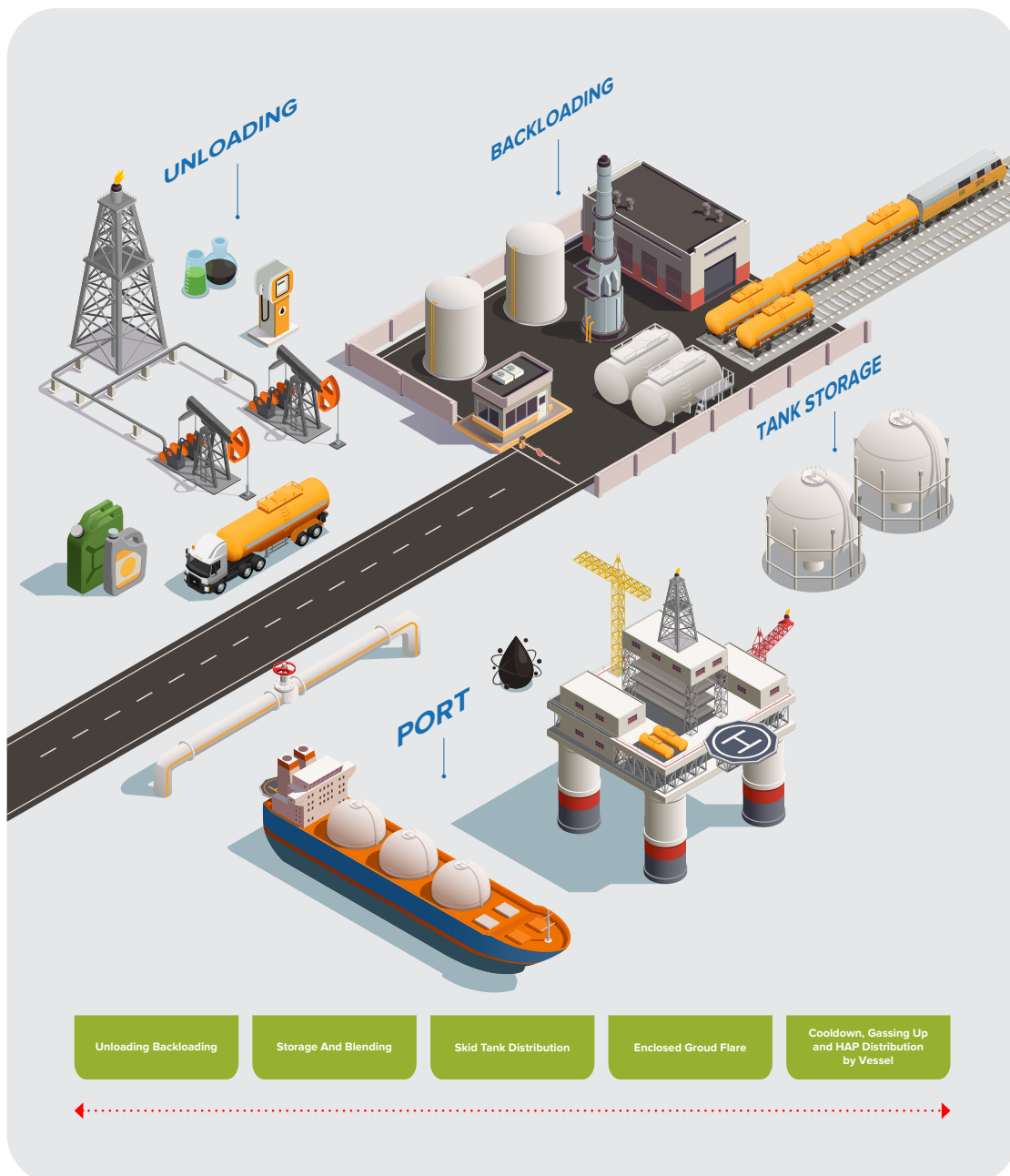
Business Segment Overview

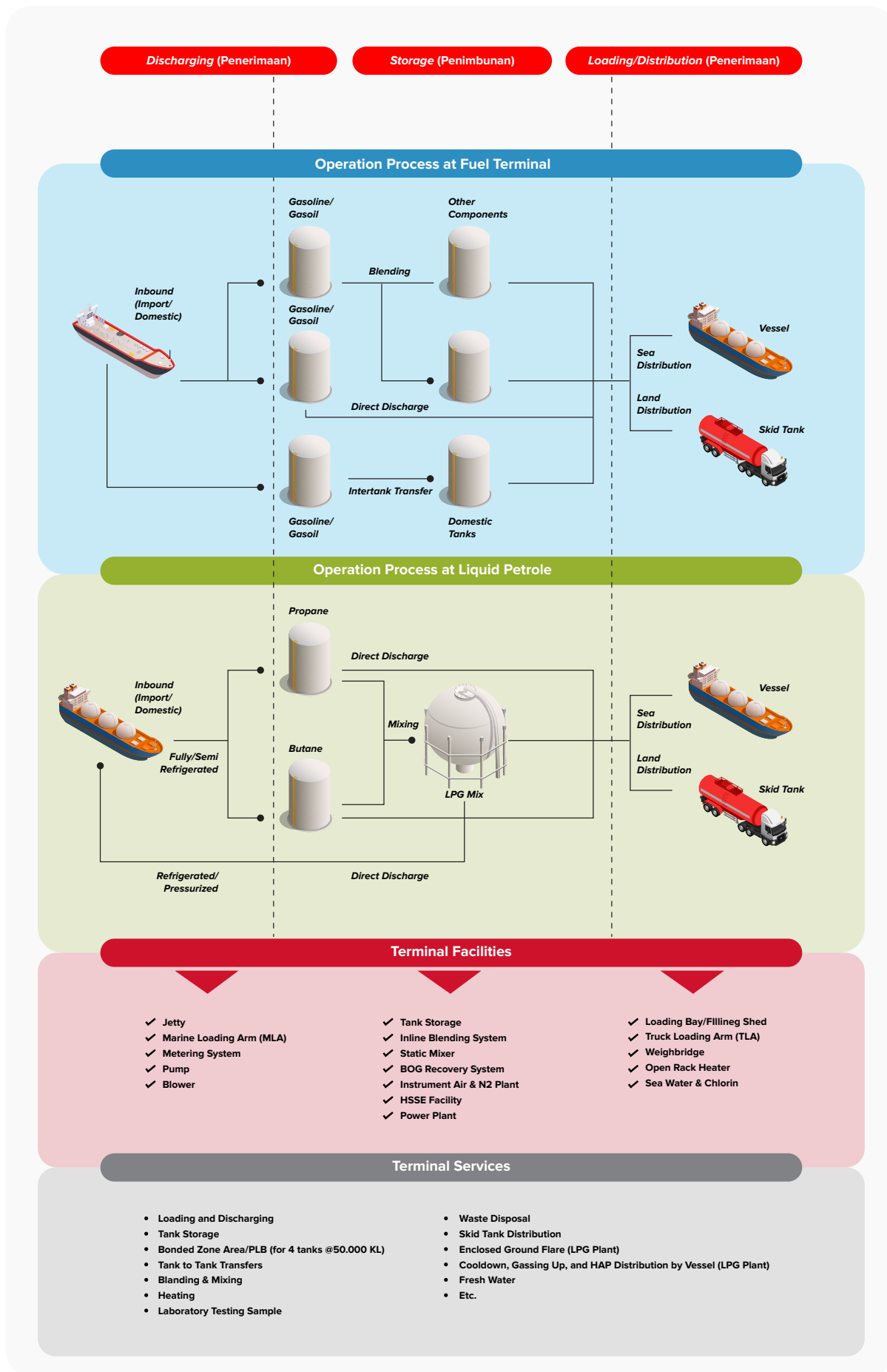
Terminal

Terhitung mulai bulan September 2021 PET mulai melakukan usaha pengelolaan Terminal BBM dan LPG, khususnya pada Fuel Terminal Pulau Sambu, Integrated Terminal Tanjung Uban, LPG Terminal Tanjung Sekong, Fuel Terminal Kotabaru, Fuel terminal Baubau. Adapun pengelolaan terminal tersebut meliputi kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran BBM dan LPG. Secara garis besar, aktivitas di terminal antara lain:

Terminals

As of September 2021, PET began managing Fuel and LPG terminals, specifically at Fuel Terminal Pulau Sambu, Integrated Terminal Tanjung Uban, LPG Terminal Tanjung Sekong, Fuel Terminal Kotabaru, and Fuel Terminal Baubau. The management of these terminals includes activities related to the reception, storage, and distribution of Fuel and LPG. In general, the activities at the terminals include:





Sarana dan Prasarana Terminal
Terminal Infrastructure and Facilities

Fresh Water

PET awalnya adalah Anak Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental yang bergerak dibidang pengelolaan dan pengadaan air bersih yang maju, unggul dan terpercaya serta berwawasan lingkungan. Berdiri pada 21 Januari 1988 dengan fokus bisnis antara lain:

1. *Supply fresh water* ke Industri wilayah Cilegon dan Batam sejak tahun 1988
2. *Supply fresh water* ke kapal milik dan charter PT Pertamina Group serta kapal pihak ketiga lainnya dilaksanakan sejak tahun 2016, dengan sebaran lokasi operasional di 28 wilayah di seluruh Indonesia.

Produksi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Patraqua dan Pengelolaan *Water Treatment Plant* (WTP) dilakukan sejak tahun 2016.

Dengan Pengalaman operasional kurang lebih 34 tahun telah mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah dan pemegang saham dalam membangun usahanya.

Proses Bisnis Supply Fresh Water Industri Supply Fresh Water Industry Business Process

Fresh Water

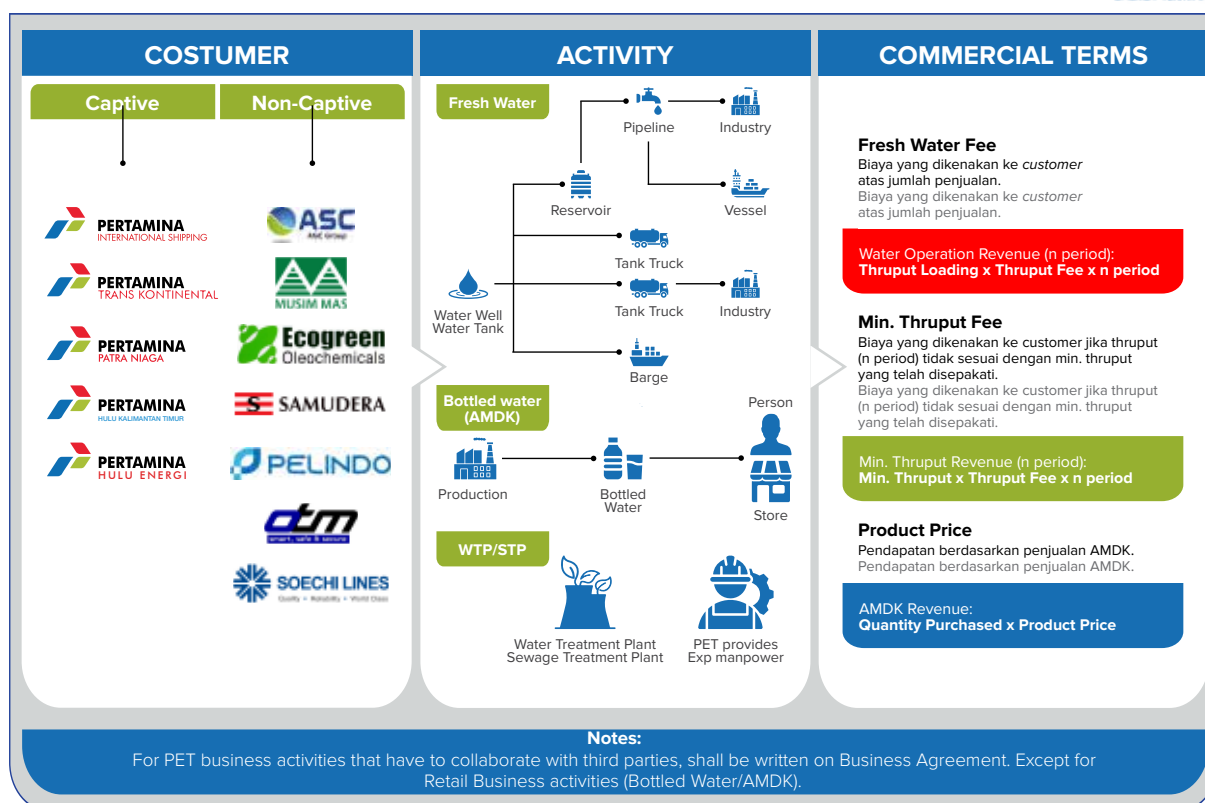
PET initially began as a subsidiary of PT Pertamina Trans Kontinental, specializing in the management and supply of clean water. The company is recognized for its advanced, superior, and reliable services with an environmental focus. Established on January 21, 1988, its business focuses include:

1. Supplying fresh water to industries in the Cilegon and Batam areas since 1988.
2. Supplying fresh water to vessels owned and chartered by the Pertamina Group and other third-party vessels since 2016, with operational locations spread across 28 regions throughout Indonesia.

Producing bottled drinking water under the brand "Patraqua" and managing Water Treatment Plants (WTP) since 2016.

With approximately 34 years of operational experience, PET has successfully contributed to the government and shareholders in building its business.

WATER OPERATION PROCESS BUSINESS



Pendapatan per Segmen

Segment Revenue

Pendapatan Segmen Terminal per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp885,26 miliar mengalami peningkatan 4,33% atau setara Rp36,73 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp848,52 miliar. Pendapatan Segmen *Clean Water Supply* PET per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp68,28 miliar mengalami penurunan 1,04% atau setara Rp718,38 juta jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp69,00 miliar.

Terminal Segment revenue as of December 31, 2023 amounted to Rp885.26 billion, experiencing an increase of 4.33% or equivalent to Rp36.73 billion compared to the previous year which was Rp848.52 billion. Clean Water Supply PET Segment revenue as of December 31, 2023 amounted to Rp68.28 billion, experiencing a decrease of 1.04% or equivalent to Rp718.38 million compared to the previous year which was Rp69.00 billion.

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands of Rupiah

Ikhtisar Operasional Operational Overview	2023	2022
Terminal	885.255.683	848.521.587
<i>Clean water supply</i>	68.280.580	68.998.962
<i>Water supply support services</i>	-	33.305.831
Jumlah Total	953.536.263	950.826.380

Kapasitas Produksi
Capacity of Production

Fresh Water	2023	2022
<i>Unit Deep Well</i>	19	25

Hingga sampai 31 Desember Tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 6 unit *deep well* dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan *deep well* tersebut dialihfungsikan menjadi sumur imbuhan/resapan untuk memenuhi KepMen ESDM No. 196.K/HK.02/MEM.G/2021 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah Pada Cekungan Air Tanah Serang-Tangerang. Pemilihan 6 unit *deep well* tersebut mempertimbangkan kondisinya yang sudah tidak produktif dan memiliki kadar TDS yang cukup tinggi.

As of December 31, 2023, there was a reduction of six deep wells compared to 2022. This change occurred because these deep wells were repurposed into recharge/infiltration wells to comply with the Ministry of ESDM No. 196.K/HK.02/MEM.G/2021 concerning the Establishment of Groundwater Conservation Zones in the Serang-Tangerang Groundwater Basin. The selection of these six deep wells took into account their unproductive condition and high Total Dissolved Solids (TDS) levels.

Disajikan dalam M3
Presented in M3

Fresh Water	2023	2022
Produksi <i>Deep Well</i> (Ciwandan) Deep Well Production (Ciwandan)	1.869.104	1.894.397
Produksi Air Permukaan (Batam) Surface Water Production (Batam)	1.024.684	1.280.210
Pengisian Air Ke Kapal Water Supply to Vessel	427.066	571.566
Distribusi AMDK Patraqua Bottled Drinking Water Patraqua Distribution	1.040	609
Volume Produksi Production Volume	3.321.894	3.746.782

Volume Produksi Tahun 2023 adalah sebesar 3.321.894 M³ tercapai 88% dari RKAP 2023 yaitu sebesar 3.777.397 M³ dan 89% terhadap *Audited 2022* yaitu sebesar 3.746.782 M³.

Adapun penyebab tidak tercapainya RKAP 2023 adalah penurunan permintaan air industri di, dan penurunan permintaan FW ke kapal di Wilayah Dumai per Juni 2023 (Waruna Group).

1. Penurunan suplai air ke kapal

Total pengisian air ke kapal adalah jumlah (*volume* atau *tonase*) yang dihasilkan untuk *supply* air ke kapal-kapal di seluruh wilayah kerja PET. Sampai dengan bulan Desember 2023 total pengisian air ke kapal sebesar 427.066 M³. Angka tersebut menurun sebesar 25% dari tahun 2022. Penurunan penyaluran ke kapal disebabkan oleh menurunnya permintaan suplai air untuk kapal di wilayah Dumai, Cilacap & Balikpapan khususnya kapal-kapal dari Waruna Group.

2. Penurunan debit dari Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) di Ciwandan

Total produksi *deep well* adalah jumlah (*volume* atau *tonase*) yang dihasilkan dari pemompaan air dari sumur bor untuk disalurkan ke *customer* industri di Ciwandan. Sampai dengan bulan Desember 2023 total penyaluran dari produksi *deep well* sebesar 1.869.104 M³. Angka tersebut menurun sebesar 1,34% dari tahun 2022. Penurunan penyaluran ke industri disebabkan oleh menurunnya debit air yang diijinkan untuk disalurkan sesuai SIPA terbaru yang diterbitkan Kementerian ESDM.

3. Penurunan permintaan industri di Batam

Total produksi air permukaan adalah jumlah (*volume* atau *tonase*) yang dihasilkan dari *Water Treatment Plant* (WTP) untuk disalurkan ke *customer* industri di Batam. Sampai dengan bulan Desember 2023 total penyaluran dari WTP Batam sebesar 1.024.684 M³. Angka tersebut menurun sebesar 20% dari tahun 2022. Penurunan penyaluran ke industri Batam disebabkan salah satu customer besar PET yaitu PT Musim Mas melakukan stop sementara permintaan air baku dan penurunan kapasitas tampung kolam air akibat pendangkalan lumpur.

4. Penurunan permintaan industry di Ciwandan

Penurunan permintaan *industry* di Ciwandan sehubungan dengan adanya perbaikan plant (PT Asahimas Chemical)

Production Volume in 2023 amounted to 3,321,894 cubic meters, achieving 88% of the 2023 RKAP which was 3,777,397 cubic meters, and 89% compared to the Audited 2022 which was 3,746,782 cubic meters.

The reasons for not achieving the 2023 Company Work Plan and Budget include a decrease in industrial water demand and a reduction in FW demand for ships in the Dumai area as of June 2023 (Waruna Group).

1. Decrease in water supply to Vessels

The total volume of water supplied to vessels is the amount (volume or tonnage) produced to supply water to vessels across all PET operational areas. As of December 2023, the total water supplied to ships was 427,066 m³. This figure represents a 25% decrease compared to 2022. The decline in water supply to ships was primarily due to a decrease in demand for water supply for ships in the Dumai, Cilacap, and Balikpapan areas, especially from the Waruna Group.

2. Decrease in Water Volume from Groundwater Extraction Permit (SIPA) in Ciwandan

The total production from deep wells is the amount (volume or tonnage) of water pumped from boreholes for distribution to industrial customers in Ciwandan. As of December 2023, the total distribution from deep well production was 1,869,104 m³. This figure represents a 1.34% decrease compared to 2022. The reduction in industrial water distribution was due to the decreased water volume allowed to be distributed as per the latest SIPA issued by the Ministry of Energy and Mineral Resources.

3. Decrease in Industrial Demand in Batam

The total production of surface water is the amount (volume or tonnage) produced from the Water Treatment Plant (WTP) for distribution to industrial customers in Batam. As of December 2023, the total distribution from WTP Batam was 1,024,684 m³. This represents a 20% decrease compared to 2022. The decline in distribution to Batam’s industry was caused by one of PET’s major customers, PT Musim Mas, temporarily halting its raw water demand and the reduced water storage capacity due to siltation in the reservoir.

4. Decrease in Industrial Demand in Ciwandan

The decrease in industrial demand in Ciwandan is related to the plant maintenance at PT Asahimas Chemical.

Kinerja Keuangan Komprehensif

Comprehensive Financial Performance

Pembahasan kinerja keuangan komprehensif disampaikan dengan mengacu pada Laporan Keuangan PT Pertamina Energy Terminal yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PricewaterhouseCoopers).

Hasil audit Laporan Keuangan PET tahun 2023 menghasilkan Opini sesuai Laporan Keuangan Audited: menyajikan secara wajar, dalam hal semua material, posisi keuangan PET tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia.

The discussion of comprehensive financial performance is presented with reference to the Financial Statements of PT Pertamina Energy Terminal ending on December 31, 2023, and 2022 which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis, and Rekan (PricewaterhouseCoopers).

The audit results of PET's Financial Statements for the year 2023 resulted in an Opinion in accordance with the Audited Financial Statements: fairly present, in all material respects, the financial position of PET as of December 31, 2023, as well as the financial performance and cash flows for the year ended on that date, in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia. The financial statements are prepared in accordance with the applicable Financial Accounting Standards (PSAK) in Indonesia.

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Jumlah Aset Total Assets	8.036.349.449	7.493.914.362	542.435.087	7,24%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.177.205.886	701.913.502	475.292.384	67,71%
Ekuitas Equity	6.859.143.563	6.792.000.860	67.142.703	0,99%

PET mencatat jumlah aset pada akhir tahun 2023 meningkat sebesar 7,24% dibandingkan dengan jumlah aset PET tahun 2022. Peningkatan tersebut dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kenaikan pada aset tidak lancar PT Pertamina Energy Terminal yaitu pada akun aset tetap. Di sisi lain, jumlah liabilitas PET juga mengalami peningkatan di tahun 2023 yakni sebesar 67,71% dibandingkan tahun 2022 dikarenakan pinjaman pemegang saham. PET mencatatkan peningkatan ekuitas sebesar 0,99% di tahun 2023, hal ini dikarenakan saldo laba belum dicadangkan.

PET recorded a 7.24% increase in assets at the end of 2023 compared to PET's assets in 2022. This increase is due to the rise in non-current assets of PT Pertamina Energy Terminal in 2023, specifically in the fixed asset account. On the other hand, PET's liabilities also increased in 2023 by 67.71% compared to 2022, due to shareholder loans. PET recorded an increase in equity by 0.99% in 2023, this is because the retained earnings were not allocated.

Aset

Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Asset Lancar Current Assets	971.620.233	800.872.278	170.747.955	21,32%
Asset Tidak Lancar Non-current Assets	7.064.729.216	6.693.042.084	371.687.132	5,55%
Total Asset	8.036.349.449	7.493.914.362	542.435.087	7,24%

Pada tanggal 31 Desember 2023, total aset PET Rp8,03 triliun atau meningkat 7,24%. Total aset terdiri dari aset lancar Rp971,62 miliar dan aset tidak lancar Rp7,06 triliun. Peningkatan jumlah aset sebesar Rp542,44 miliar atau 7,24% didominasi oleh peningkatan aset tidak lancar sebesar Rp371,69 miliar.

On December 31, 2023, PET's total assets amounted to Rp8.03 trillion, representing a 7.24% increase. Total assets comprised current assets of Rp971.62 billion and non-current assets of Rp7.06 trillion. The increase in total assets by Rp542.44 billion or 7.24% was mainly driven by an increase in non-current assets amounting to Rp371.69 billion.

Aset Lancar

Current Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	664.535.031	532.135.822	132.399.209	24,88%
Piutang Usaha Trade Receivables				
Pihak Berelasi Related Parties	70.986.611	72.019.202	(1.032.591)	-1,43%
Pihak Ketiga Third Parties	3.191.934	3.040.372	151.562	4,98%
Aset Kontrak Contract Assets				
Pihak Berelasi Related Parties	228.949.130	163.166.081	65.783.049	40,32%
Pihak Ketiga Third Parties	3.663.605	9.053.739	(5.390.134)	-59,53%
Pajak dibayar Dimuka - Pajak Lain-Lain Prepaid Taxes- Other Taxes	-	20.446.589	(20.446.589)	-100,00%
Persediaan Inventories	20.457	667.644	(647.187)	-96,94%
Uang Muka dan Biaya dibayar Dimuka Advances and Prepayments	273.465	342.829	(69.364)	-20,23%
Aset Lancar Total Current Assets	971.620.233	800.872.278	170.747.955	21,32%

Aset lancar PET tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,32% menjadi Rp971,62 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp800,87 miliar. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan jumlah kas dan setara kas serta adanya kenaikan piutang usaha khususnya dari pihak berelasi.

PET's current assets in 2023 experienced a 21.32% increase to Rp971.62 billion compared to Rp800.87 billion in 2022. This increase was driven by an increase in cash and cash equivalents as well as an increase in trade receivables, particularly from related parties.

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Aset Tetap Fixed Assets	6.828.196.678	6.465.383.116	362.813.562	5,61%
Aset Hak Guna Right-of use assets	65.324.048	159.685.541	(94.361.493)	-59,09%
Penyertaan Saham Investments in Shares	1.313.570	1.194.214	119.356	9,99%
Pajak dibayar dimuka Prepaid Taxes	96.665.234	-	96.665.234	-
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	47.293.181	62.707.772	(15.414.591)	-24,58%
Taksiran Pengembalian Pajak-Pajak Penghasilan Estimated Claim for Tax Refund Corporate Income tax	25.936.505	2.296.824	23.639.681	1.029,23%
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	-	1.774.617	(1.774.617)	-100,00%
Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	7.064.729.216	6.693.042.084	371.687.132	5,55%

Aset tidak lancar perusahaan meningkat 5,55% atau sebesar Rp371,69 miliar dari Rp6,69 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp7,06 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini dikarenakan adanya peningkatan aset tetap.

The company's non-current assets increased by 5.55% or Rp371.69 billion from Rp6.69 trillion in 2022 to Rp7.06 trillion in 2023. This increase is due to the increase in fixed assets.

Liabilitas

Liabilities

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	555.798.172	560.942.801	(5.144.629)	-0,92%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	621.407.714	140.970.701	480.437.013	340,81%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.177.205.886	701.913.502	475.292.384	67,71%

Jumlah liabilitas PET mengalami peningkatan 67,71% atau sebesar Rp475,29 miliar. Liabilitas jangka pendek PET penurunan 0,92% atau sebesar Rp5,1 miliar. Namun liabilitas jangka panjang PET mengalami peningkatan signifikan 340,81% atau sebesar Rp480,44 miliar.

Total liabilities of PET increased by 67.71% or Rp475.29 billion. PET's current liabilities decreased by 0.92% or Rp5.1 billion. However, PET's non-current liabilities experienced a significant increase of 340.81% or Rp480.44 billion.

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Utang Usaha Trade Payables				
Pihak Berelasi Related Parties	117.339.255	87.489.901	29.849.354	34,12%
Pihak Ketiga Third Parties	16.596.447	19.636.781	(3.040.334)	-15,48%
Biaya Masih Harus dibayar Accrued Expenses	338.423.981	42.294.364	296.129.617	700,16%
Utang Pajak Tax Payable				
Pajak Penghasilan Corporate Income Tax	-	17.836.643	(17.836.643)	-100,00%
Pajak Lain-Lain Other Taxes	8.808.620	6.104.257	2.704.363	44,30%
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Kontrak Current Portion of Contract Liabilities	-	314.116.000	(314.116.000)	-100,00%
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Sewa Current Portion of Lease Liabilities	73.206.947	72.467.328	739.619	1,02%
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Current Portion of Post Employment	1.422.922	997.527	425.395	42,64%
Liabilitas Jangka Pendek Total current liabilities	555.798.172	560.942.801	(5.144.629)	-0,92%

Jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan sebesar 0,92% atau Rp5,14 miliar dari Rp560,94 miliar tahun 2022 menjadi Rp555,80 miliar tahun 2023.

The total current liabilities decreased by 0.92% or Rp5.14 billion from Rp560.94 billion in 2022 to Rp555.80 billion in 2023.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	54.994.989	126.147.319	(71.152.330)	-56,40%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post Employment Liabilities	23.277.449	14.823.382	8.454.067	57,03%
Kontrak Liabilitas Contract Liabilities	543.135.276	-	543.135.276	-
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	621.407.714	140.970.701	480.437.013	340,81%

Jumlah liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan signifikan 340,81% atau Rp480,44 miliar dari Rp140,97 miliar tahun 2022 menjadi Rp621,41 miliar tahun 2023.

The total non-current liabilities experienced a significant increase of 340.81% or Rp480.44 billion from Rp140.97 billion in 2022 to Rp621.41 billion in 2023.

Ekuitas

Equity

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Modal saham - nilai nominal per saham Rp1.000, modal dasar 38.214.276 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 9.957.086 lembar saham Share Capital - par Rp 1,000 per shares, share capital authorised 38,214,276 shares, share capital issued and fully paid 9,957,086 shares	9.957.086.000	9.957.086.000	0	0,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid in Capital	(3.241.595.356)	(3.241.595.356)	0	0,00%
Rugi Komprehensif Lain Other Comprehensive Loss	(2.884.576)	(1.926.270)	(958.306)	49,75%
Saldo Laba Retained Earnings			0	-
Dicadangkan Appropriated	10.220.812	10.220.812	0	0,00%
Belum Dicadangkan Unappropriated	136.316.683	68.215.674	68.101.009	99,83%
Jumlah Ekuitas Total Equity	6.859.143.563	6.792.000.860	67.142.703	0,99%

Hingga 31 Desember 2023, Jumlah Ekuitas Perusahaan mengalami kenaikan sebesar 0,99% atau setara Rp67,14 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

As of December 31, 2023, the Company's Equity increased by 0.99% or approximately Rp67.14 billion compared to the previous year.

Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Statement of Profit or Loss Comprehensive Consolidated

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Pendapatan Revenue	953.536.263	950.826.380	2.709.883	0,29%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue	(859.791.613)	(849.311.367)	(10.480.246)	1,23%
Labanya Bruto Gross Profit	93.744.650	101.515.013	(7.770.363)	-7,65%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(76.759.071)	(76.329.330)	(429.741)	0,56%
Pendapatan Keuangan Finance Income	5.738.039	1.280.154	4.457.885	348,23%
Beban Keuangan Finance Costs	(6.970.466)	(8.278.007)	1.307.541	-15,80%
Lain-Lain, (Bersih) Others, (net)	75.458.611	1.681.870	73.776.741	4.386,59%
Labanya Sebelum Pajak Penghasilan Profit before Income tax	91.211.763	19.869.700	71.342.063	359,05%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(23.110.754)	(6.697.097)	(16.413.657)	245,09%
Labanya/(Rugi) Tahun Berjalan Profit/(Loss) for the Year	68.101.009	13.172.603	54.928.406	416,99%
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	67.142.703	15.458.167	51.684.536	334,35%

Pendapatan

Pada tahun 2023, pendapatan sebesar Rp953,54 Miliar atau naik 0,29% jika dibandingkan tahun 2022. Yang disebabkan oleh peningkatan penjualan pada segmen bisnis jasa penyimpanan di terminal.

Beban Pokok Pendapatan

Pada tahun 2023, Beban pokok pendapatan sebesar Rp859,79 miliar di mana terjadi kenaikan biaya operasi sebesar Rp10,48 miliar atau naik 1,23%. Kenaikan disebabkan oleh gaji dan tunjangan serta biaya maintenance.

Laba/Rugi Bruto

Pada akhir tahun 2023, PET mencatat laba bruto sebesar Rp93,74 miliar, atau mengalami penurunan sebesar Rp7,77 miliar atau 7,65% dibandingkan tahun 2022 laba bruto sebesar Rp101,52 miliar.

Laba sebelum pajak penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan 359,05% atau sebesar Rp71,34 miliar dari Rp19,87 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp91,21 miliar pada tahun 2023.

Laba/Rugi Tahun Berjalan

Laba Tahun Berjalan mengalami peningkatan sebesar 416,99% atau sebesar Rp54,93 miliar dari Rp13,17 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp68,10 miliar pada tahun 2023. Laba tahun berjalan meningkat disebabkan adanya pembukuan pendapatan lain-lain yang berasal dari selisih/potongang pengembalian uang muka.

Laporan Arus Kas

Revenue

In 2023, the revenue amounted to Rp953.54 billion, representing an increase of 0.29% compared to 2022. caused by increased in sales of storage service business segment in terminal.

Cost of Revenue

In 2023, the cost of revenue amounted to Rp859.79 billion due to increase in operating expenses of Rp10.48 billion, or a rise of 1.23%. This increase was due to the salary and remuneration, and maintenance costs.

Gross Profit/Loss

At the end of 2023, PET recorded a gross profit of Rp93.74 billion, or a decrease of Rp7.77 billion or 7.65% compared to the gross profit of Rp101.52 billion in 2022.

Profit/Loss before Income Tax

Profit before income tax increased by 359.05% or Rp71.34 billion from Rp19.87 billion in 2022 to Rp91.21 billion in 2023.

Net Profit/Loss

Net profit for the year increased by 416.99% or Rp54.93 billion from Rp13.17 billion in 2022 to Rp68.10 billion in 2023. The increase in net profit was due due to other income originating from the difference/discount on the return of advance payments.

Statement of Cash Flow

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Keterangan Description	2023	2022	Perubahan 2022-2023 Change in 2022-2023	
			Jumlah Total	%
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	106.717.645	579.529.442	(472.811.797)	-81,59%
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	(515.906.551)	(356.211.246)	(159.695.305)	44,83%
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	541.588.115	295.450.212	246.137.903	83,31%
Kenaikan/(Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas Net Increase/(Decrease) Cash and Cash Equivalents	132.399.209	518.768.408	(386.369.199)	-74,48%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning of the Year	532.135.822	13.367.414	518.768.408	3.880,84%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of The Year	664.535.031	532.135.822	132.399.209	24,88%

Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2023, jumlah arus kas dari Aktivitas Operasi menurun 81,59% atau sebesar Rp472,81 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan kas dari pelanggan yang diiringi pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan.

Kas dari Aktivitas Investasi

Pada tahun 2023, jumlah arus kas dari Aktivitas Investasi meningkat 44,83% atau sebesar Rp159,70 miliar dari Rp356,21 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp515,91 miliar pada tahun 2023.

Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2023, jumlah arus kas dari Aktivitas Pendanaan meningkat 83,31% atau sebesar Rp246,14 miliar dari Rp295,45 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp541,59 miliar pada tahun 2023.

Cash from Operating Activities

In 2023, the cash flow from Operating Activities decreased by 81.59% or Rp472.81 billion. This decrease was a decrease in cash receipts from customers accompanied by cash payments to suppliers and employees.

Cash from Investing Activities

In 2023, the cash flow from Investing Activities increased by 44.83% or Rp159.70 billion from Rp356.21 billion in 2022 to Rp515.91 billion in 2023.

Cash from Financing Activities

In 2023, the cash flow from Financing Activities increased by 83.31% or Rp246.14 billion from Rp295.45 billion in 2022 to Rp541.59 billion in 2023.



Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

PET senantiasa menjaga likuiditas perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab kepada kreditor. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan menjaga saldo kecukupan kas, memonitor jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. PET juga selalu mempertahankan kredibilitas perusahaan.

PET consistently maintains the company's liquidity as a responsibility to creditors. Liquidity risk management is done by maintaining sufficient cash balances, monitoring loan maturities and funding sources, and readiness to maintain market position. PET also always maintains the company's credibility.

Secara kuantitatif, kemampuan membayar utang jangka pendek direfleksikan dalam rasio likuiditas. PET menggunakan rasio kas dan rasio lancar sebagai komponen rasio likuiditas. Pada 31 Desember 2023, PET mencatat rasio kas (*cash ratio*) sebesar 119,56% dan rasio lancar (*current ratio*) tercatat sebesar 174,82%.

Quantitatively, the ability to pay current debt is reflected in liquidity ratios. PET uses cash ratio and current ratio as components of liquidity ratios. As of December 31, 2023, PET recorded a cash ratio of 119.56% and a current ratio of 174.82%.

Rasio Likuiditas

Liquidity Ratio

Rasio Ratio	2023	2022
Rasio Kas Cash Ratio	119,56	94,86
Rasio Lancar Current Ratio	174,82	142,77

Peningkatan rasio lancar disebabkan oleh pencatatan dan pengelolaan kolektabilitas piutang yang lebih baik di mana peningkatan ini dari 142,77% di tahun 2022 menjadi 174,82% di tahun 2023.

The increase in the current ratio was due to better recording and management of receivables collectability, rising from 142.77% in 2022 to 174.82% in 2023.

Rasio Solvabilitas

Solvency Ratio

Rasio Ratio	2023	2022
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset Debt to Total Assets Ratio	14,65	9,37
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	17,16	10,33

PET menggunakan rasio liabilitas terhadap total aset dan rasio liabilitas terhadap ekuitas sebagai komponen dari rasio solvabilitas. Pada 31 Desember 2023, rasio liabilitas terhadap total aset sebesar 14,65%, sementara rasio liabilitas terhadap ekuitas sebesar 17,16%. Dari hasil yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023 PET memiliki kemampuan membayar utang jangka panjang perusahaan, tercermin dari rasio solvabilitas yang baik.

PET uses the Liabilities-to-total-assets ratio and the debt-to-equity ratio as components of the solvency ratio. As of December 31, 2023, the debt-to-total-assets ratio stands at 14.65%, while the debt-to-equity ratio is 17.16%. Based on these results, we can conclude that in 2023, PET has the ability to pay off non-current debts, as reflected in its good solvency ratio.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Accounts Receivable Collection Rate

Tingkat kolektibilitas piutang digunakan untuk mengukur periode waktu yang diperlukan Perusahaan untuk menagih piutang menjadi kas sejak selesainya pekerjaan/jasa dilakukan. Tingkat kolektibilitas piutang terdiri dari *average collection* periode (rata-rata periode penagihan). Rata-rata periode penagihan piutang Perusahaan pada tahun 2023 adalah sebanyak 28,39 hari.

The accounts receivable collection rate is used to measure the period of time it takes for the company to collect receivables into cash after the completion of work/services. The accounts receivable collection rate consists of the average collection period. The average receivables collection period of the Company in 2023 was 28.39 days.

Struktur Modal

Capital Structure

Struktur modal merupakan perimbangan antara penggunaan modal sendiri dengan pinjaman/ utang yang terdiri dari utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Komposisi struktur permodalan PET tahun 2022-2023 sebagai berikut:

Capital structure is the balance between the use of equity and debt, which includes current debt and non-current debt. The composition of PET's capital structure for the years 2022-2023 is as follows:

Komposisi Struktur Modal

Capital Structure Composition

Dalam Ribuan Rupiah
In Thousands Rupiah

Uraian Description	2022	Komposisi % Composition %	2021	Komposisi % Composition %
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.177.205.886	15%	701.913.502	9%
Jumlah Ekuitas Total Equities	6.859.143.563	85%	6.792.000.860	91%
Jumlah Total	8.036.349.449	100%	7.493.914.362	100%

Dari komposisi struktur modal PET, baik di tahun 2022 dan 2023, terlihat modal perusahaan didominasi oleh ekuitas dibandingkan dengan liabilitas. Aset yang dibiayai oleh liabilitas tahun 2023 sebesar 15%, meningkat apabila dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 9%. Adapun aset yang dibiayai oleh ekuitas pada tahun 2023 sebesar 85% meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar 91%.

From the composition of PET's capital structure, both in 2022 and 2023, it is shown the company's capital is predominantly comprised of equity rather than liabilities. Assets financed by liabilities in 2023 accounted for 15%, an increase compared to 9% in 2022. Meanwhile, assets financed by equity in 2023 amounted to 85%, an increased compared to 2023 which recorded at 91%.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

PET melakukan pengelolaan struktur permodalan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan dapat menyesuaikan dengan cara mengusahakan pendanaan melalui pinjaman untuk memelihara struktur permodalan. Tujuan utama pengelolaan modal perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat dalam rangka mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Manajemen melakukan pengawasan struktur modal menggunakan rasio utang terhadap ekuitas (rasio *solvabilitas - debt to equity ratio*), yang merupakan nilai utang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2023, rasio utang terhadap ekuitas tercatat sebesar 17,16%, meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 10,33%.

PET manages its capital structure and makes adjustments as needed based on changes in economic conditions. The company can adjust by seeking funding through loans to maintain the capital structure. The primary goal of corporate capital management is to ensure the maintenance of a sound capital ratio to support operations and maximize returns for shareholders. Management monitors the capital structure using the debt-to-equity ratio, which is the value of debt divided by total equity. In 2023, the debt-to-equity ratio was recorded at 17.16%, an increase from the previous year's 10.33%.

Perbandingan Antara Target Pada Awal Tahun Buku Dan Realisasinya

Comparison Between Target at the Beginning of the Fiscal Year and Its Realization

Dinyatakan dalam Rupiah
Stated in Rupiah

Deskripsi Description	Desember 2023 December 2023	
	RKAP 2023	Audited
I Pendapatan Operasi Operating Income		
Bisnis <i>Supply Fresh Water</i> Supply Fresh Water Business	74.645.033.160	68.280.580.280
Bisnis 5 Terminal: 5 Business Terminals	887.035.607.064	885.255.682.779
- Tanjung Uban	349.946.010.590	367.639.971.551
- Pulau Sambu	157.410.000.000	32.531.884.467
- Kotabaru	28.962.686.722	41.848.227.188
- Bau-bau	88.660.766.938	121.149.115.298
- Tanjung Sekong	262.056.142.814	322.086.484.275
Total Pendapatan Total Revenues	961.680.640.224	953.536.263.059
II <i>COST OF GOOD SOLD</i>		
Bisnis <i>Supply Fresh Water</i> Supply Fresh Water Business	67.960.933.656	76.699.628.032
Bisnis 5 Terminal: 5 Business Terminals:	307.580.428.583	394.532.196.096
- Tanjung Uban	107.878.216.374	139.809.454.861
- Pulau Sambu	73.372.974.073	71.188.722.733
- Kotabaru	25.939.569.215	30.850.235.077
- Bau-bau	27.780.925.015	49.216.043.237
- Tanjung Sekong	72.608.743.906	103.467.740.188
Depresiasi Depreciation	343.999.547.310	388.559.789.003
Total Cost of Good Sold	719.540.909.549	859.791.613.131
<i>Gross Profit/(Loss)</i>	242.139.730.675	93.744.649.929

Dinyatakan dalam Rupiah
Stated in Rupiah

Deskripsi Description	Desember 2023 December 2023	
	RKAP 2023	Audited
III <i>General and Administration Expenses</i>	141.625.986.513	76.759.070.721
<i>Total Operating Expense</i>	141.625.986.513	76.759.070.721
<i>Profit/(Loss) From Operating</i>	100.513.744.162	16.985.579.208
Jumlah Beban & (Pendapatan) Lain-Lain Total Other Expenses and (Revenues)	(45.475.790.940)	74.226.181.799
<i>Profit/(Loss) Before Tax</i>	55.037.953.322	91.211.761.006
<i>Corporate Income Tax</i>	(11.086.167.548)	(23.110.749.840)
<i>Total income tax expense</i>	(11.086.167.548)	(23.110.749.840)
<i>Profit/(Loss) After Tax</i>	43.951.785.675	68.101.011.166
EBIT	100.513.744.162	16.985.579.208
EBITDA	444.668.443.177	390.303.878.530
<i>Net Profit Margin</i>	43.951.785.675	68.101.011.166
Depresiasi Depreciation	343.999.547.310	388.559.789.003

Dinyatakan dalam Rupiah
Stated in Rupiah

No	Keterangan Description	TARGET RKAP TAHUN 2024 RKAP Target in 2024
I	PENDAPATAN OPERASI OPERATING INCOME	1.233.933.215.790
	<i>Bisnis Supply Fresh Water</i>	85.848.265.287
	Bisnis 5 Terminal: 5 Business Terminals	1.148.084.949.503
	Terminal Tanjung Uban	400.911.283.000
	Terminal Pulau Sambu	168.963.300.000
	Terminal Kotabaru	76.314.935.137
	Terminal Bau-bau	170.462.072.527
	Terminal Tanjung Sekong	331.433.359.839
II	BEBAN OPERASIONAL COST OF GOOD SOLD	825.127.872.177
	<i>Bisnis Supply Fresh Water</i>	48.308.663.647
	Bisnis 5 Terminal: 5 Business Terminals	389.998.413.797
	Terminal Tanjung Uban	139.313.247.168
	Terminal Pulau Sambu	82.719.472.193
	Terminal Kotabaru	31.432.695.372
	Terminal Bau-bau	48.129.194.094
	Terminal Tanjung Sekong	88.403.804.970
	Depresiasi Depreciation	386.820.794.706

No	Keterangan Description	TARGET RKAP TAHUN 2024 RKAP Target in 2024
III	LABA OPERASI OPERATING PROFIT	408.805.342.613
	<i>Payroll & Employee Benefit</i>	64.271.284.831
	<i>Services</i>	70.018.015.191
	<i>Man Power Related</i>	25.186.200.000
	<i>Insurance</i>	5.928.792.103
	<i>Material Consumed</i>	5.227.950.381
	<i>Promotion & Corp Image</i>	2.471.200.000
	<i>Financial Expense</i>	11.122.000.000
	<i>Fuel & Products Consumed</i>	480.000.000
IV	BEBAN OVERHEAD OVERHEAD EXPENSES	184.705.442.506
V	LABA USAHA OPERATING PROFIT	224.099.900.107
	Pendapatan (Beban) Lain Other Revenues (Expenses)	(131.844.677.757)
VI	LABA USAHA SEBELUM PAJAK PROFIT BEFORE INCOME TAX	92.255.222.351
VII	PAJAK INCOME TAX	20.296.149.544
VIII	LABA SETELAH PAJAK PROFIT AFTER INCOME TAX	71.959.072.806

Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal

Material Attachments for Capital Expenditure Investments

PET tidak melakukan ikatan yang material atas investasi barang modal yang dilakukan pada tahun 2023. Pembahasan mengenai ikatan material atas investasi barang modal tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

PET did not engage in any material attachments for capital expenditure investments made in 2023. Discussion regarding material attachments for capital expenditure investments is not disclosed in this Annual Report.

Investasi Barang Modal

Capital Expenditure Investments

Investasi barang modal adalah aktivitas pengeluaran dana yang digunakan untuk membeli sejumlah aset atau investasi yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat di masa depan.

Pada tahun 2023, PET telah melakukan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kendahalan operasional berupa Pemasangan *Camera Vapour Leak Detection*, Pemasangan *External Lightning Protection System* (ELPS), *Revitalisasi Automation di Integrated Terminal Tanjung Uban* dan *Revitalisasi Jetty FT Kotabaru*. Selain itu PET melakukan inventasi Pembangunan Terminal LPG *Refrigerated* Jatim yang ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2026.

Capital expenditure investments are activities involving expenditure of funds used to purchase a quantity of assets or investments expected to provide future value benefits.

In 2023, PET made investments aimed at enhancing operational reliability, including the installation of Camera Vapour Leak Detection, the installation of External Lightning Protection System (ELPS), the revitalization of automation at the Integrated Terminal Tanjung Uban, and the revitalization of the Jetty FT Kotabaru. Additionally, PET invested in the construction of the Refrigerated LPG Terminal Jatim, which is targeted to operate in 2026.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Soundness Level

Indikator Indicators	Nilai Maksimum Max Value	Audited-2023 Nilai SH IML
Nilai Kinerja Keuangan (NKK) Financial Performance Value	70	31,82
Nilai Kinerja Operasional (NKO) Operational Performance Value	20	20,00
Nilai Kinerja Administrasi (NKA) Administration Performance Value	10	8,75
Skor Total Total Score	100	60,57
Kriteria Criteria	BBB (Kurang Sehat) BBB Less Sound	

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Information and Material Facts Occurring After the Accounting's Report Date

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

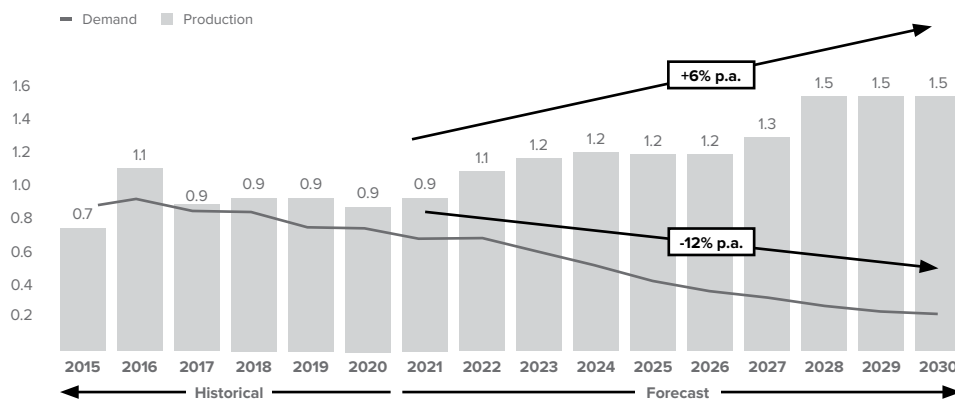
There is no information or material fact occurred after the date of the accounting report.

Prospek Usaha, Kondisi Industri dan Kondisi Ekonomi

Business Outlook, Industry Conditions, and Economic Conditions Expenditure Investments

Secara keseluruhan pengangkutan kargo domestik sampai dengan tahun 2027 diproyeksikan akan naik sebesar 4% per tahun sejalan dengan pertumbuhan permintaan domestik. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara dengan pertumbuhan tertinggi untuk impor minyak mentah yaitu sebesar 3.6% per tahun. Hal tersebut diakibatkan meningkatnya pertumbuhan *demand* minyak mentah sebesar 6% per tahun namun tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Overall, domestic cargo transportation until 2027 is projected to increase by 4% per year in line with domestic demand growth. In the Southeast Asia region, Indonesia is expected to have the highest growth rate for crude oil imports, estimated at 3.6% per year. It is due to the increasing demand for crude oil by 6% per year, which is not matched by a corresponding decrease in production from year to year.



Sumber: ESDM Report 2019, Wood Mackenzie, KPI, ICISTechnon Feb 2021, Muted Sceario Feb 2021

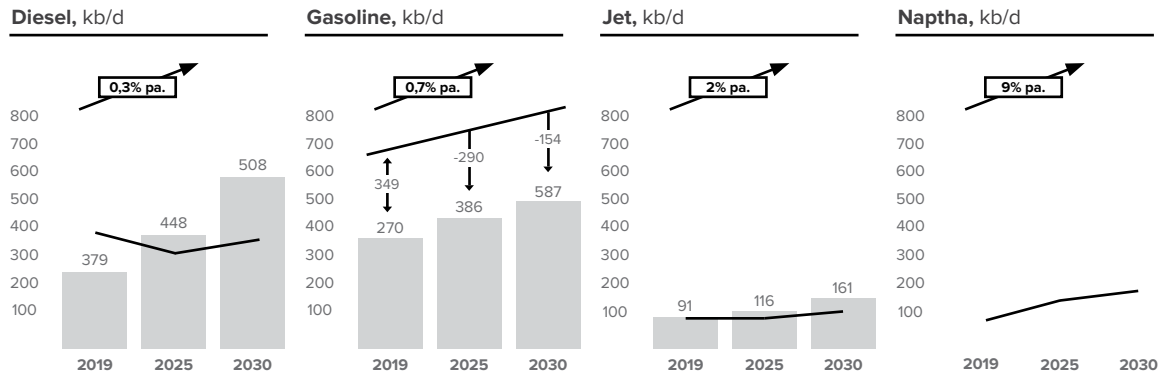
Gambar 10. Pertumbuhan Permintaan dan Produksi (juta bbl)

Source: ESDM Report 2019, Wood Mackenzie, KPI, ICISTechnon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021

Figure 10. Growth of Demand and Production (million bbl)

Demand kargo impor produk berupa diesel, bensin, avtur dan naphtha diproyeksikan akan meningkat akibat defisit produksi domestik. Defisit terbesar berasal dari bensin sebesar ±100 kbpd. Pertumbuhan permintaan diesel dan bensin relatif stabil di 0,3% dan bensin 0,7% per tahun yang berasal dari transportasi mobil dan motor. Sementara itu, pertumbuhan permintaan produk yang lebih besar terdapat pada naphta 9% dan avtur 2% per tahun yang berasal dari industri petrokimia dan penerbangan.

The demand for imported cargo products such as diesel, gasoline, aviation fuel (avtur), and naphtha is projected to increase due to the domestic production deficit. The largest deficit is in gasoline at approximately ±100 thousand barrels per day (kbpd). The growth in demand for diesel and gasoline is relatively stable at 0.3% and 0.7% per year, respectively, driven by transportation via cars and motorcycles. Meanwhile, there is greater demand growth for naphtha at 9% and avtur at 2% per year, stemming from the petrochemical and aviation industries.



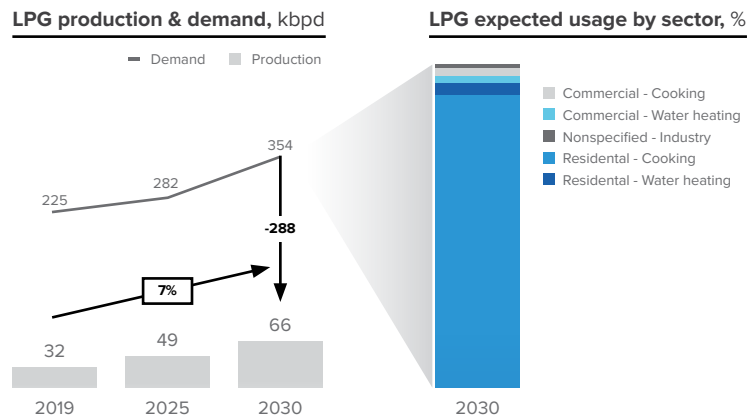
Sumber: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective

Gambar 11. Pertumbuhan Permintaan dan Produksi Indonesia (dalam juta bbl)

Source: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective
Figure 11. Growth of Demand and Production in Indonesia (in million bbl)

Indonesia merupakan importir LPG terbesar di Asia Tenggara dengan cakupan lebih dari 60% volume dan diperkirakan akan meningkat 4,5% per tahun. Pertumbuhan permintaan LPG di Indonesia diproyeksi sebesar 3% per tahun. Sedangkan produksi LPG bertumbuh 7% per tahun. Hingga 2030, diperkirakan terjadi defisit lebih dari 200 kbpd. Konsumsi LPG terbesar di Indonesia sebanyak 90% berasal dari sektor rumah tangga.

Indonesia is the largest LPG importer in Southeast Asia, covering over 60% of the volume, and it is expected to increase by 4.5% per year. The demand for LPG in Indonesia is projected to grow by 3% annually, while LPG production is growing at a rate of 7% per year. By 2030, a deficit of more than 200 kbpd is expected. The largest consumption of LPG in Indonesia, accounting for 90%, comes from the household sector.



Sumber: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective

Gambar 12. Produksi, Permintaan, Proyeksi Konsumsi LPG per Sektor di Indonesia

Source: KPI, ICIS Technon Feb 2021, Muted Scenario Feb 2021, Global Energy Perspective
Figure 12. Production, Demand, Projected LPG Consumption by Sector in Indonesia

Pasar-pasar utama di Asia Tenggara/APAC saat ini mengalami kekurangan kapasitas penyimpanan, sehingga dalam hal ini PET dapat memanfaatkan peluang tersebut melalui sinergi dengan Grup Pertamina agar dapat memaksimalkan pendapatan. Di sisi lain, PET juga siap menangkap peluang untuk ekspansi pasar internasional, dengan memanfaatkan kondisi keterbatasan kapasitas penyimpanan di regional. Selain bisnis terminal yang diharapkan memiliki *footprint* di luar Pertamina Group, bisnis *fresh water* juga diharapkan memiliki pertumbuhan yang sama.

The main markets in Southeast Asia/APAC are currently experiencing a shortage of storage capacity. PET can leverage this opportunity through synergy with the Pertamina Group to maximize revenue. Additionally, PET is poised to seize opportunities for international market expansion by taking advantage of the limited storage capacity in the region. Besides the terminal business, which is expected to establish a footprint outside the Pertamina Group, the fresh water business is also anticipated to experience similar growth.

Terkait dengan upaya untuk dapat memenuhi beberapa tujuan tersebut sekaligus, terdapat beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan oleh PET sepanjang 2023 dan diharapkan dapat berlanjut pada tahun-tahun selanjutnya, sebagai berikut:

1. Utilisasi tangki di Fuel Terminal Sambu untuk penyimpanan kargo milik *Coral Energy*.
2. Kesepakatan *Supplier Held Stock* di Terminal Tanjung Uban bersama SH C&T dan Vitol Asia Pte.Ltd sebagai *lead bidder*.
3. *Upgrading* dan Revitalisasi Tangki, *Jetty*, dan *Filling Shed*.
4. Implementasi *Metering System* dan *Simultaneous Backloading* untuk mengoptimalkan *jetty performance*.
5. Revitalisasi *Critical Equipment* LPG untuk mengurangi *losses*.
6. *Marine Terminal Management and Self Assessment (MTMSA) & MTPQ – OCIMF Certified* untuk LPGT Tanjung Sekong dan Fuel Terminal Baubau.
7. Penetapan dan Penerimaan Kargo Perdana di Pusat Logistik Berikat (PLB) di *Integrated Terminal* Tanjung Uban dan *Fuel Terminal* Pulau Sambu.

PET merencanakan pengembangan bisnis pada tahun 2024 melalui peninjauan prospek usaha sebagai berikut:

1. Eksplorasi terhadap regulasi global dalam pengelolaan terminal
2. Eksplorasi potensi untuk instalasi *Vapor Recovery Unit ("VRU")* di terminal eksisting milik PPN
3. Program green terminal melalui pengembangan *Integrated Green Terminal (IGT)* bersama dengan PIS
4. *Opening Up* FT Pulau Sambu to *3rd party*
5. *Feasibility Study* pembangunan Terminal baru dan akuisisi *World-Class Strategic Terminal*.
6. Penambahan *supply point Fresh Water*
7. Studi diversifikasi dan pengembangan bisnis energi terbarukan, seperti *Used Cooking Oil ("UCO")*, *methanol*, *LNG*, dan *Carbon Capture, Usage and Storage ("CCUS")*.
8. Peninjauan pengembangan bisnis bersama IML Group untuk potensi penyediaan *Port Reception Facility ("PRF")* dan *bunkering supply point*.
9. Studi diversifikasi dan pengembangan bisnis penyimpanan, seperti *floating terminal* dan pengelolaan operasi *ship-to-ship transfer*.

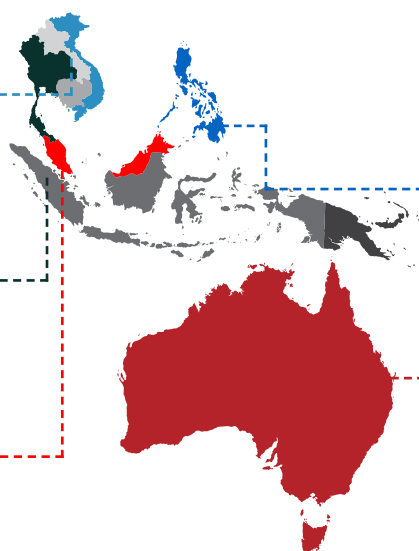
In relation to efforts to achieve several objectives simultaneously, PET has undertaken and plans to continue the following steps throughout 2023 and beyond:

1. Utilization of tanks at Fuel Terminal Sambu for the storage of *Coral Energy* cargo.
2. *Supplier Held Stock* agreement at Terminal Tanjung Uban with SH C&T and Vitol Asia Pte. Ltd as the lead bidder.
3. *Upgrading* and revitalization of tanks, jetties, and filling sheds.
4. Implementation of a metering system and simultaneous backloading to optimize jetty performance.
5. Revitalization of critical LPG equipment to reduce losses.
6. *Marine Terminal Management and Self-Assessment (MTMSA) and MTPQ – OCIMF Certification* for LPG Terminal Tanjung Sekong and Fuel Terminal Baubau.
7. Establishment and receipt of the first cargo at the Bonded Logistics Center (PLB) at *Integrated Terminal* Tanjung Uban and *Fuel Terminal* Pulau Sambu.

PET plans to develop its business in 2024 by exploring the following business prospects:

1. Exploring global regulations in terminal management.
2. Exploring the potential for installing *Vapor Recovery Units (VRU)* at existing PPN terminals.
3. Green terminal program through the development of an *Integrated Green Terminal (IGT)* in collaboration with PIS.
4. *Opening up* FT Pulau Sambu to third parties.
5. Conducting feasibility studies for the construction of new terminals and the acquisition of world-class strategic terminals.
6. Adding fresh water supply points.
7. Studying the diversification and development of renewable energy businesses, such as *Used Cooking Oil (UCO)*, *methanol*, *LNG*, and *Carbon Capture, Usage, and Storage (CCUS)*.
8. Exploring business development opportunities with IML Group for the potential provision of *Port Reception Facilities (PRF)* and bunkering supply points.
9. Studying the diversification and development of storage businesses, such as *floating terminals* and the management of *ship-to-ship transfer* operations.

Vietnam	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	681	1,297
Gasoil	821	1,566
Fuel oil	23	45
Jet fuel and Korosono	141	268
LPG	156	297
Thailand	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	945	1,204
Gasoil	1,969	2,510
Fuel oil	592	754
Jet fuel and Korosono	592	755
LPG	521	664
Malaysia	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	1,453	1,835
Gasoil	1,014	1,281
Fuel oil	60	75
Jet fuel and Korosono	333	420
LPG	249	315



Philippines	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	591	1,053
Gasoil	1,016	1,812
Fuel oil	142	253
Jet fuel and Korosono	104	241
LPG	169	279
Australia	*22 Demand	*40 Outlook
Gasoline	1,312	1,712
Gasoil	2,527	3,170
Fuel oil	40	63
Jet fuel and Korosono	583	890
LPG	74	97

Aspek Pemasaran

Sebagai perusahaan terminal terintegrasi yang berfokus kepada *storage handling service*, aspek pelayanan yang prima yang didukung dengan upaya *upgrading* sarana dan fasilitas serta keandalan operasional yang terus ditingkatkan Perusahaan merupakan salah satu kunci agar PET dapat berkembang ke depan sehingga dapat memenuhi ekspektasi pasar. Strategi ini menjadi hal yang krusial, terlebih pengembangan bisnis PET yang sebelumnya penyuplai *Fresh Water* untuk kebutuhan industri. Lebih lanjut, kehandalan operasional dan safety spirit menjadi landasan utama dalam pengelolaan bisnis ini sehingga pelayanan kepada pelanggan dapat terjaga kualitasnya dan kepercayaan dari pelanggan dapat terjamin kepuasannya.

Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran menjadi hal yang krusial bagi pengembangan bisnis PET yang melayani kebutuhan terminal dan storage secara terintegrasi. Dalam menyusun strategi pemasaran, PET berorientasi pada optimalisasi penggunaan fasilitas penyimpanan BBM eksisting di 5 (lima) terminal dan pembangunan terminal baru yang bertujuan untuk menangkap potensi pangsa pasar permintaan BBM yang terus meningkat.

Strategi Pemasaran PET memetakan langkah-langkah strategis yang berfokus pada kemandirian ekspansi pasar. Dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan secara maksimal, PET menjalankan beberapa strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Mengupayakan pertumbuhan laba, volume dan pangsa pasar, serta mengedepankan cost leadership melalui efisiensi pada semua lini operasi
2. *Upgrade Terminal Capability* (Akselerasi Revitalisasi *Automation & Standardization*)
3. Digitalisasi Proses Bisnis, melalui sentralisasi *reporting* dan digitalisasi *marketing*
4. *Strategic Partnership* dengan *Local Partner* dan Anak Perusahaan Lainnya

Marketing Aspect

As an integrated terminal company focusing on storage handling services, PET recognizes that providing excellent services supported by efforts to upgrade facilities and operational reliability is crucial for its future development and meeting market expectations. This strategy is particularly important given PET's previous role as a supplier of Fresh Water to industrial needs. Furthermore, operational reliability and a safety spirit are the main foundations in managing the business, ensuring the quality of service to customers is maintained and customer satisfaction and trust are guaranteed.

Marketing Strategy

Marketing strategy is crucial for the business development of PET, which serves integrated terminal and storage needs. In developing the marketing strategy, PET focuses on optimizing the use of existing fuel storage facilities in five terminals and constructing new terminals aimed at capturing the potential market share of the continuously increasing demand for fuel.

PET's marketing strategy outlines strategic steps focused on independent market expansion. To maximize the achievement of set targets, PET implements several marketing strategies as follows:

1. Strive for growth in profit, volume, and market share while emphasizing cost leadership through efficiency in all operational lines.
2. Upgrade terminal capability (Accelerating the revitalization of automation and standardization)
3. Digitize business processes through centralized reporting and digital marketing.
4. Form strategic partnerships with local partners and other subsidiaries.

5. Fokus mempertahankan pengelolaan 5 Terminal dan Tersus/TUKS nya.
6. *Upgrade Terminal Capacity.*
7. Pembangunan Terminal Baru.
8. Ekspansi dan penjajakan bisnis baru bersinergi dengan entitas di dalam Pertamina Grup
9. Ekspansi Bisnis (*Strategic Partnership*) dengan *Global Player Terminal/Shore Base* dengan memprioritaskan kawasan yang potensial.
10. Melakukan adaptasi model bisnis terhadap disrupsi pasar dan teknologi;
11. Melakukan akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia

Pangsa Pasar

PET sebagai perusahaan yang mengelola bisnis terminal dan *fresh water* mampu memenuhi kebutuhan jasa layanan terminal terpadu. Pangsa pasar utama PET adalah Pertamina Group yang meliputi PT Pertamina Patra Niaga dalam bentuk kerjasama jasa penyimpanan dan pengelolaan BBM/LPG, PIS dan PTK sebagai konsumen *fresh water* untuk armada kapal, PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur sebagai konsumen dalam kegiatan *Water Treatment Plant* (WTP).

Pada tahun kedua menjalankan bisnis penyimpanan di terminal, PET berfokus pada upaya peningkatan throughput yang dapat dilayani kepada mitra utama dalam hal ini PT Pertamina Patra Niaga di 5 (lima) terminal PWT. Kelima terminal tersebut merupakan terminal strategis sebagai titik suplai penyedia BBM bagi *end terminal* lainnya. Terminal PWT berkontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan BBM di Indonesia. Terminal LPG Tanjung Sekong berperan penting dalam pemenuhan 40% kebutuhan nasional. Terminal Tanjung Uban yang berlokasi strategis karena lokasinya yang berdekatan dengan Singapura sebagai salah satu *international* hub di Kawasan Asia tersebut berperan penting pada kehandalan BBM di wilayah Sumatera Utara dan sekitarnya. Sedangkan untuk wilayah Kalimantan dan sekitarnya, pasokan BBM sebagian besar di suplai dari Terminal Kotabaru, dan Terminal Bau-Bau menjadi titik suplai untuk pemenuhan kebutuhan BBM di wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

5. Focus on maintaining the management of 5 terminals and its Tersus/TUKS.
6. Upgrade terminal capacity.
7. Construct new terminals.
8. Expand and explore new business opportunities in synergy with entities within the Pertamina Group.
9. Expand business (*strategic partnership*) with global terminal/shore base players, prioritizing potential regions.
10. Adapt the business model to market and technology disruptions.
11. Accelerate competitiveness through innovation and strengthening the quality of human resources.

Market Share

PET, as a company managing terminal and fresh water businesses, is able to meet the needs of integrated terminal service offerings. PET's main market share includes the Pertamina Group, which comprises PT Pertamina Patra Niaga for collaboration in storing and managing Fuel/LPG, PIS and PTK as consumers of fresh water for fleet ships, and PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur as a consumer in Water Treatment Plant (WTP) activities.

In its second year of terminal storage business operations, PET focuses on efforts to increase throughput to its main partner, PT Pertamina Patra Niaga, at the 5 PWT terminals. These five terminals serve as strategic supply points for providing fuel to other end terminals. PWT terminals contribute significantly to fulfilling fuel needs in Indonesia. The LPG Terminal Tanjung Sekong plays a crucial role in meeting 40% of the national demand. Terminal Tanjung Uban, strategically located near Singapore as one of the international hubs in the Asia region, plays an important role in fuel reliability in the North Sumatra region and its surroundings. Meanwhile, for the Kalimantan region and its surroundings, most of the fuel supply comes from Kotabaru Terminal, and the Bau-Bau Terminal serves as a supply point for fuel needs in the Sulawesi region and its surroundings.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler tahun 2023 dan 2022 pembagian dividen dimana keseluruhan alokasi laba diperuntukan sebagai cadangan Perusahaan dalam rangka peningkatan manfaat bagi Perusahaan. Dengan demikian sampai dengan akhir tahun buku 2023, Perusahaan tidak memiliki kebijakan mengenai pembagian dividen.

Based on the Circular Shareholders' Resolutions in 2023 and 2022, the allocation of the entire profit was designated as reserves for the Company to enhance its benefits. Consequently, as of the end of the fiscal year 2023, the Company does not have a policy regarding the distribution of dividends.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP) Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Employee and/or Management Stock
Ownership Program (ESOP/MSOP) Ownership
of Shares by the Board of Directors and
Board of Commissioners

Pada tahun 2023, PET tidak program kepemilikan untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran atau opsi penawaran saham. Dengan demikian laporan tahunan tidak menyajikan informasi mengenai *stock option* yang dimiliki oleh perwira dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

Based on the Circular Shareholders' Decision for the years 2023 and 2022, dividend distribution where the entire profit allocation is earmarked as reserves for the Company to enhance its benefits. Therefore, until the end of the 2023 fiscal year, the Company does not have a dividend distribution policy.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of the Use of Funds
from Public Offerings

Pada tahun 2023, Perusahaan belum melaksanakan Penawaran Umum Saham di bursa efek manapun. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari kegiatan Penawaran Saham Umum Perusahaan.

In 2023, PET did not have a stock ownership program for employees and/or management conducted through offering or stock option plans. Therefore, the annual report does not provide information regarding stock options held by officers and management, including the number of shares and exercise prices, timeframes, and eligibility criteria for employees and/or management.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan Atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Involving Conflicts of Interest or Transactions With Related Parties

Transaksi pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Related Party Transactions

The Company engages in transactions with related parties as defined in PSAK 7 (Revised 2015), "Disclosure of Related Parties."

Transactions with related parties are conducted based on terms agreed upon by both parties, which may differ from transactions with parties that are not related.

The nature of related party relationships is as follows:

Pihak Berelasi dan Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Related Parties and Related Entities With Government	Sifat hubungan Relationship	Saldo dan sifat transaksi Balance and Nature of Transaction
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pemegang saham utama Major Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PIS	Pemegang saham mayoritas Majority Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha dan pinjaman dari pemegang saham Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable and Loan from Shareholders
PTK	Pemegang saham Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
PPL	Pemegang saham Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable

	Pihak Berelasi dan Entitas Berelasi Dengan Pemerintah Related Parties and Related Entities With Government	Sifat hubungan Relationship	Saldo dan sifat transaksi Balance and Nature of Transaction
Ikhtisar Utama	PT Pertamina Patra Niaga ("PPN")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
	PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan dan aset kontrak Revenue and Contract Assets
	PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha Revenue, Cost of revenue, Trade receivables, contract assets, and trade Payable
Laporan Manajemen	PME	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Kilang Pertamina International ("KPI")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Pertamina Bina Medika ("PBM")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Patra Jasa ("Patra Jasa")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha Cost of revenue, Trade Receivables, and Trade Payables
Profil Perusahaan	PT Elnusa Petrofin ("Elnusa")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Pertamina Power Indonesia ("PPI")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
Analisis dan Pembahasan Manajemen	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan Cost of Revenue
	PT Pertamina Maintenance & Construction ("PMC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha Cost of revenue and Trade Payables
	PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali Entities Under Common control	Pendapatan dan aset kontrak Revenue and Contract Assets
Tata Kelola Perusahaan	Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah Government Affiliated Entity	
	BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah Government Affiliated Entity	
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan

Changes in Laws and Regulations and the Impact on Company Performance

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
1	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi Instruction of the Minister of Home Affairs Number 53/2022 on the Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 During the Transition to Endemic	Adanya instruksi terkait pemberhentian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi dosis lanjutan secara mandiri atau terpusat di tempat umum antara lain seperti kantor dan pabrik There are instructions on the cessation of the Enforcement of Restrictions on Community Activities (PPKM) and the follow-up of vaccination doses, either independently or centrally at public places such as offices and factories.	Sebagai informasi bagi perusahaan bahwa PPKM diberhentikan dan perusahaan wajib memastikan pekerjaannya mematuhi instruksi tersebut untuk melakukan vaksinasi lanjutan. As information for the Company, PPKM has been dismissed and the Company is required to ensure its employees comply with the instruction to receive follow-up vaccinations.
2	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Penyelenggara Pelabuhan Pada Pelabuhan Yang Diusahakan Secara Komersial Regulation of the Minister of Transportation Number PM 23 of 2015 on Enhancing the Functions of Port Authorities at Commercial Ports	Adanya ketentuan bagi otoritas pelabuhan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan salah satunya dengan melakukan inventarisasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aset dan lahan Badan Usaha Pelabuhan yang telah diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Pelabuhan lainnya. There are provisions for port authorities to carry out the functions of regulation, guidance, control, and supervision of port activities, including conducting comprehensive inventory and evaluation of assets and land of Port Business Entities managed by State-Owned Enterprises and other Port Business Entities.	PET dan/atau anak usahanya yang memiliki lini usaha di bidang penyediaan terminal harus memperhatikan ketentuan ini dalam mengoperasikan terminal. PET and/or its subsidiaries with business lines in terminal provision must adhere to these provisions in terminal operations
3	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan Di Tempat Kerja Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 1 of 2023 on Amendments to the Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 1 of 2020 on the Provision of Women's Protection Homes at the Workplace	Adanya pengaturan terkait dengan Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3) di Tempat Kerja dengan jenis layanan yaitu: • Pencegahan kekerasan terhadap Pekerja/Buruh dan pegawai perempuan; • Penerimaan Pengaduan dan tindak lanjut; dan • Pendampingan There are regulations concerning the Provision of Women's Protection Homes (RP3) at the workplace, offering the following types of services: • Prevention of violence against female workers/employees; • Receiving and following up on complaints; and • Providing assistance.	PET sebagai anak usaha BUMN harus memperhatikan ketentuan tersebut yakni untuk menyediakan layanan RP3 sebagaimana dipersyaratkan. PET, as a subsidiary of a State-Owned Enterprise, must comply with these provisions by providing RP3 services as required.

Main Overview

Management Report

Company Profile

Management Discussion and Analysis

Good Corporate Governance

Corporate Social Responsibility

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
4	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia Regulation of the Minister of Manpower Number 4 of 2023 on Social Security for Indonesian Migrant Workers	Kewajiban bagi calon pekerja migran/pekerja migran Indonesia untuk mengikuti Program Jaminan Sosial meliputi Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK, JKM, JHT). Lebih lanjut, ketentuan ini mengatur manfaat program jaminan sosial tersebut. It is mandatory for prospective/Indonesian migrant workers to participate in the Social Security Program, which includes Health Social Security and Employment Social Security (JKK, JKM, JHT). Furthermore, this regulation outlines the benefits of the social security programs.	PET wajib memastikan pekerjaannya yang ditempatkan atau berada di luar negeri untuk ikut serta dalam jaminan sosial PET must ensure its employees who are placed or located abroad participate in the social security program.
5	Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-1/MBU/02/2023 perihal Optimalisasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial dan Kemanusiaan pada Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN Circular Letter of the Minister of SOEs Number SE-1/MBU/02/2023 on the Optimization of the Implementation of Social and Humanitarian Aid Distribution in the Corporate Social and Environmental Responsibility Program of SOEs	Kewajiban setiap BUMN untuk melakukan optimalisasi penyaluran program tanggung jawab sosial dan lingkungan BUMN dengan lebih memprioritaskan pemilihan lembaga penyalur bantuan melalui kerjasama antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan terafiliasi BUMN, badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN untuk tujuan sosial dan kemanusiaan, badan usaha, dan/atau badan hukum lainnya. This regulation mandates every State-Owned Enterprise (SOE) must optimize the distribution of their social and environmental responsibility programs by prioritizing the selection of aid-distributing institutions through collaborations among SOEs, their subsidiaries, affiliated companies, legal entities established by SOEs for social and humanitarian purposes, business entities, and/or other legal entities.	PET sebagai anak perusahaan BUMN wajib memprioritaskan kerjasama antara BUMN maupun Anak Perusahaan BUMN lainnya, atau Perusahaan terafiliasi BUMN, atau badan hukum yang telah didirikan oleh BUMN dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial Perusahaan PET, as a subsidiary of an S, is required to prioritize collaborations with other SOEs, their subsidiaries, affiliated companies, or legal entities established by SOEs in the implementation of the Company's social responsibility programs.
6	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Decree of the Minister of Manpower Number 88 of 2023 on Guidelines for the Prevention and Handling of Sexual Harassment in the Workplace	Mengatur petunjuk teknis mengenai pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja dan panduan dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja terutama bagi pengusaha/perusahaan, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pihak terkait lainnya di tempat kerja This regulation provides technical guidelines for the implementation of prevention and handling of sexual harassment in the workplace. It serves as a guide for employers, companies, workers, labor unions, and other related parties in the workplace to effectively carry out the prevention and handling of sexual harassment.	Untuk menjaga hubungan industrial yang positif, PET diharap melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja mengacu pada ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan ini. To maintain positive industrial relations, PET is expected to implement prevention and handling measures for sexual harassment in the workplace in accordance with the requirements specified in this regulation.
7	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Regulation of DKI Jakarta Governor Number 15 of 2023 on Amendments to Governor Regulation Number 55 of 2016 on the Implementation of Social Security for Workers through the Social Security Administration Agency for Employment	Adanya kewajiban bagi setiap peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diperuntukkan bagi: • Peserta Penerima Upah yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara termasuk Pekerja pada badan usaha milik daerah; • Peserta Bukan Penerima Upah; • Pekerja yang bekerja pada sektor jasa konstruksi; • Pekerja non-ASN yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah; • Peserta pemagangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; • siswa yang mengikuti kegiatan praktik kerja lapangan pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara; • Peserta pelatihan kerja pada pusat pelatihan kerja; • Pekerja bukan penerima Upah yang merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah, meliputi rukun tetangga/rukun warga dan mitra kerja lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan/atau • Pekerja rentan yang kriterianya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	PET wajib memastikan pekerjaannya telah memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerjaannya sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan ini. PET is required to ensure its employees have employment social security as mandated by this regulation.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
		This regulation mandates that all wage-receiving participants and non-wage-receiving participants must participate in the Social Security Employment program through BPJS Employment. The participation in the Social Security Employment program is intended for: - Wage-Receiving Participants who work for employers other than state organizers, including workers in regional state-owned enterprises; - Non-Wage-Receiving Participants; - Workers in the construction services sector; - Non-ASN workers employed by local government agencies; - Apprentices with employers other than state institutions; - Students participating in fieldwork practices with employers other than state organizers; - Participants in job training at training centers; - Non-Wage-Receiving Workers who are local government partners, including neighborhood and community unit heads and other partners determined by a Governor's Decree; and/or - Vulnerable workers whose criteria are determined by a Governor's Decree.	
8	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Regulation of Minister of Number 23 of 2023 on Export Policy and Regulation	Mengatur mengenai prosedur ekspor di Indonesia meliputi persyaratan ekspor, konfirmasi status wajib pajak, perizinan berusaha, kewajiban pemenuhan dokumen lain, verifikasi atau penelusuran teknis, pengecualian izin berusaha, dan sanksi. This regulation outlines the procedures for exporting in Indonesia, including export requirements, tax status confirmation, business licensing, the obligation to fulfill other documents, technical verification or tracing, exemption from business licenses, and sanctions.	PET perlu mengetahui prosedur ekspor di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. PET needs to understand the export procedures in Indonesia as stipulated in this regulation.
9	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor Regulation of Minister of Trade Number 22 of 2023 on Prohibited Export Goods	Mengatur mengenai barang-barang di bidang kehutanan, pertanian, pupuk subsidi, pertambangan, cagar budaya, dan scrap logam yang dilarang untuk diekspor. This regulation governs the prohibition of exporting certain goods, including those in the forestry, agriculture, subsidized fertilizers, mining, cultural heritage, and metal scrap sectors.	PET perlu mengetahui barang atau kargo apa saja yang dilarang untuk proses ekspor terutama barang-barang di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. PET needs to be aware of which goods or cargo are prohibited from being exported, particularly in the mining sector as stipulated by this regulation.
10	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 20/KM.4 Tahun 2023 Tentang Daftar Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor Decree of Minister of Finance Number 20/KM.4 of 2023 on the List of Prohibited Export Goods Based on the Minister of Trade Regulation Number 22 of 2023 on Prohibited Export Goods	Mengatur mengenai barang yang dilarang untuk di ekspor berdasarkan Permen Perdagangan Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor disampaikan kepada instansi internal Kementerian Keuangan. This decree details the prohibited export goods list based on the Minister of Trade Regulation Number 22 of 2023 and is communicated to the internal departments of the Ministry of Finance.	PET perlu mengetahui barang atau kargo apa saja yang dilarang untuk proses ekspor terutama barang-barang di bidang pertambangan sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. PET needs to understand which goods or cargo are prohibited from being exported, particularly in the mining sector, as stipulated by this regulation.
11	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 21/KM.4 Tahun 2023 Tentang Daftar Barang Yang Dibatasi Untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Ekspor Decree of Minister of Finance Number 21/KM.4 of 2023 on the List of Restricted Export Goods Based on the Minister of Trade Regulation Number 23 of 2023 on Export Policy and Regulation	Mengatur mengenai barang yang dibatasi untuk di ekspor berdasarkan Permen Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor disampaikan kepada instansi internal Kementerian Keuangan. This decree outlines the restricted export goods list based on the Minister of Trade Regulation Number 23 of 2023 on Export Policy and Regulation and is communicated to the internal departments of the Ministry of Finance.	PET perlu mengetahui apa saja barang yang dibatasi untuk dilakukannya ekspor. PET needs to be aware of which goods are restricted for export.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
12	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 on Procedures for Settlement of Small Claims	Mengatur mengenai prosedur penyelesaian Gugatan Sederhana yakni pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan pembuktian sederhana. This regulation governs the procedures for the settlement of small claims, specifically civil lawsuits with a material claim value of up to Rp. 500,000,000.00 (five hundred million rupiah) with simple proof.	Menjadi acuan PET dalam menyelesaikan sengketa gugatan perdata sederhana. This regulation serves as a guideline for PET in resolving simple civil disputes.
13	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 on Electronic Case Administration and Court Proceedings	Ketetapan Mahkamah Agung untuk administrasi perkara di pengadilan secara elektronik agar lebih efektif dan efisien. Persidangan secara elektronik ini berlaku untuk proses dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan, dan upaya hukum banding. This regulation establishes the Supreme Court's guidelines for electronic case administration to improve effectiveness and efficiency. Electronic court proceedings apply to processes such as the submission of claims/petitions/objections/defenses/interventions and their amendments, responses, replies, rejoinders, evidence presentation, conclusions, the delivery of decisions/rulings, and appeals.	Bagi PET peraturan ini menjadi acuan beracara secara elektronik dalam persidangan. This regulation serves as a guideline for PET to conduct court proceedings electronically.
14	Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Government Regulation Number 51 of 2023 on Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021 on Wages	Adanya ketentuan upah minimum yang berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam jabatan dapat diberikan Upah lebih besar dari Upah minimum. Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah. This regulation stipulates the minimum wage applicable to workers/laborers with less than one year of service at a given company. Workers/laborers with less than one year of service who have certain qualifications required for their position may receive wages higher than the minimum wage. Wages for workers/laborers with one year or more of service are based on the wage structure and scale.	PET perlu memperhatikan pemberlakuan upah minimum bagi pekerja PET. Pemberlakuan Upah minimum diatur bahwa pada dasarnya berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dimaksudkan menutup peluang bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun yang memiliki kualifikasi tertentu yang disyaratkan dalam suatu pekerjaan/jabatan, untuk mendapatkan Upah di atas Upah minimum. PET needs to pay attention to the implementation of minimum wages for PET workers. The application of the minimum wage is regulated that basically applies to workers/laborers with less than 1 (one) year of service at the Company concerned. However, this provision is not intended to close the opportunity for Workers/Laborers with less than 1 (one) year of service who have certain qualifications required in a job/position, to earn wages above the minimum wage.
15	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Minister of Finance Regulation Number 118 of 2023 on Guidelines for Managing State-Owned Assets Using the National Asset Management Information System	Diatur pedoman pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung tata kelola yang tertib dan terintegrasi secara elektronik. Bagi pengguna BMN yakni pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN wajib untuk menggunakan aplikasi SIMAN dalam penggunaan dan pengelolaan BMN sesuai ketentuan ini. This regulation provides guidelines for the management of State-Owned Assets (BMN) to support orderly and integrated electronic governance. Users of BMN, including officials with the authority to use BMN, must use the SIMAN application for the utilization and management of BMN according to this regulation.	Dalam hal PET menggunakan dan/atau mengelola Barang Milik Negara maka wajib melaksanakan prosedur tata kelola sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini. If PET uses and/or manages State-Owned Assets, it must follow the governance procedures established in this regulation.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
16	Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (<i>Key Performance Indicator</i>) Pada Badan Usaha Milik Negara Decision of the Minister of State-Owned Enterprises Number SK-306/MBU/11/2023 on Technical Guidelines for Preparing Key Performance Indicators (KPI) for State-Owned Enterprises	Menetapkan petunjuk teknis penyusunan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) bagi Direksi BUMN baik KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual. Petunjuk pada peraturan ini termasuk diantaranya tata cara penentuan dan penetapan indikator KPI, penilaian KPI, dan format dokumen pendukung. This decision establishes technical guidelines for preparing Key Performance Indicators (KPIs) for the Boards of Directors of SOEs, including both collective KPIs for the entire Board and individual KPIs for each director. The guidelines cover procedures for determining and setting KPI indicators, KPI assessments, and the format of supporting documents.	Dalam menetapkan KPI bagi Direksi, PET sebagai anak usaha BUMN wajib berpedoman pada peraturan ini, termasuk diantaranya tata cara penentuan dan penetapan indikator KPI, penilaian KPI, dan format dokumen pendukung. As a subsidiary of an SOE, PET must follow this regulation during KPIs setting process for its directors, including procedures for determining and setting KPI indicators, KPI assessments, and the format of supporting documents.
17	Keputusan Dirjen Perhubungan Laut KP-DJPL 680/2023 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Dan Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Pemanduan Dan Penundaan Kapal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Decision of the Director General of Marine Transportation KP-DJPL 680/2023 on Procedures for Reconciliation and Payment of Non-Tax State Revenue for Ship Pilotage and Towing Services within the Directorate General of Marine Transportation	Menetapkan tata cara rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas jasa pemanduan dan penundaan kapal antara Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (UPT) selaku penyelenggara pelabuhan dan pengawas pemanduan bersama dengan (1) Badan usaha pelabuhan atau terminal khusus penerima pelimpahan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal; dan (2) Badan usaha pelabuhan atau terminal khusus yang melakukan kerjasama pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal. This decision establishes procedures for reconciling Non-Tax State Revenue (PNBP) for ship pilotage and towing services between the Technical Implementing Units of the Directorate General of Marine Transportation (UPT) as the port organizers and pilotage supervisors, and (1) port business entities or special terminals receiving delegated pilotage and towing services, and (2) port business entities or special terminals cooperating in providing pilotage and towing services.	Menjadi acuan bagi PET dalam rangka melaksanakan operasionalnya di lini usaha penyediaan terminal terkait dengan rekonsiliasi PNBP atas jasa pemanduan dan penundaan kapal. This decision serves as a guideline for PET in its terminal service operations related to reconciling PNBP for ship pilotage and towing services.
18	Keputusan Deputi Bidang Keuangan Dan Manajemen Risiko SK-7/DKU.MBU/10/2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara Decision of the Deputy for Finance and Risk Management SK-7/DKU.MBU/10/2023 on Technical Guidelines for Risk Management Reporting of State-Owned Enterprises	BUMN dan anak usahanya wajib mengacu pada ketentuan ini dalam hal melaporkan manajemen risiko perusahaan. Beberapa tahapan yang harus dipastikan sesuai dengan peraturan ini adalah proses pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan proses pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan evaluasi atas pelaporan. This decision requires SOEs and their subsidiaries to adhere to the provisions for reporting corporate risk management. Key stages that must comply with this regulation include monitoring and evaluation processes, implementation of monitoring and evaluation processes, reporting, and evaluation of reporting.	Dalam melakukan pelaporan manajemen risiko perusahaan, PET sebagai anak usaha BUMN wajib untuk berpedoman pada ketentuan ini. In reporting corporate risk management, PET as a subsidiary of an SOE must follow these guidelines.
19	Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko Dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio Badan Usaha Milik Negara Decision of the Deputy for Finance and Risk Management SK-6/DKU.MBU/10/2023 on Technical Guidelines for Risk Management Processes and Aggregation in the Risk Portfolio Taxonomy of State-Owned Enterprises	Menetapkan petunjuk teknis proses bagi BUMN dan anak usahanya dalam mengintegrasikan dan mengagregasi risiko portofolio BUMN. This decision establishes technical guidelines for SOEs and their subsidiaries in integrating and aggregating risk portfolios.	PET sebagai cucu usaha Pertamina perlu mengintegrasikan risiko portofolionya berjenjang ke Pertamina selaku induk usahanya sesuai dengan ketentuan teknis ini. As a second tier subsidiary of Pertamina, PET must integrate its risk portfolio hierarchically to Pertamina, its parent Company, in accordance with these technical guidelines

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
20	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ruang Terbatas Minister of Manpower Regulation Number 11 of 2023 on Occupational Health and Safety in Confined Spaces	Mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di ruang terbatas yang meliputi: - tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tanur, silo, cerobong; - jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa; - sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya, baik alamiah ataupun buatan yang melebihi kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter; dan/atau - ruangan lainnya yang ditentukan. This regulation governs occupational safety and health in confined spaces, which include: - Tanks and/or vessels, steam equipment, furnaces/kilns, silos, chimneys; - Piping networks, tunnels, and other similar underground constructions; - Wells or holes with openings at the top, either natural or artificial, with a depth exceeding 1.5 meters; - Other designated confined spaces.	PET dan/atau pekerjaanya wajib menerapkan K3 yang diatur pada peraturan ini pada saat melaksanakan pekerjaan di ruang terbatas sebagaimana ditetapkan. PET and/or its workers must apply the OHS standards specified in this regulation when working in confined spaces as outlined.
21	Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 244 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024 Decision of the Minister of Manpower Number 244 of 2023 on the Implementation Guidelines for the National Occupational Safety and Health Month 2024	Menetapkan pedoman pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024 diantaranya bagi setiap pimpinan BUMN/BUMD dan perusahaan mulai tanggal 12 Jan 2024 - 12 Feb 2024 dan dilaksanakan terus menerus secara berkesinambungan. This decision sets the guidelines for the implementation of the OHS Month in 2024, which must be observed by the leaders of SOEs/BUMD and companies from January 12, 2024, to February 12, 2024, and continuously thereafter.	Sebagai anak perusahaan BUMN, PET menyelenggarakan Bulan K3 pada periode tersebut sesuai pedoman ini yang mengatur tentang jenis kegiatan, pendanaan, dan mekanisme pelaporan. As a subsidiary of a SOE, PET must conduct the OHS Month during this period in accordance with these guidelines, which cover the types of activities, funding, and reporting mechanisms.
22	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("PTJSL") Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises (PTJSL)	Peraturan ini mencabut dan mengganti Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang PTJSL BUMN sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022. Peraturan ini mengatur beberapa hal penting sebagai berikut: - Penugasan Khusus BUMN dapat menerima penugasan khusus dari pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional. - Pelaksanaan PTJSL PTJSL meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan. - PTJSL melalui pendanaan UMK PTJSL hanya tersedia bagi UMK yang merupakan binaan BUMN yang memenuhi kriteria tertentu. This regulation revokes and replaces Minister of SOEs Regulation Number PER-05/MBU/04/2021 on PTJSL SOEs, as amended by Minister of SOEs Regulation Number PER-6/MBU/09/2022. Key provisions include: - Special Assignments BUMNs may receive special assignments from the central government to perform public utility functions as well as national research and innovation. - Implementation of PTJSL PTJSL involves planning, implementation, monitoring, and reporting stages. - PTJSL Funding for SMEs PTJSL is available only for SMEs fostered by SOEs that meet specific criteria.	PET perlu memperhatikan ketentuan ini sehubungan dengan penugasan khusus dari pemerintah pusat dan pelaksanaan PTJSL. PET must comply with this regulation concerning special assignments from the central government and the implementation of PTJSL.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
23	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-2/MBU/03/2023 on Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises	Peraturan ini memuat pengaturan komprehensif terkait tata kelola BUMN. Cakupan Peraturan ini meliputi: • prinsip tata kelola BUMN; • penerapan Manajemen Risiko pada BUMN; • penilaian tingkat kesehatan BUMN; • perencanaan strategis BUMN; • pedoman kegiatan korporasi signifikan BUMN; • penyelenggaraan TI; dan • pelaporan. This regulation provides comprehensive governance guidelines for SOEs, covering: • Principles of SOEs governance; • Application of Risk Management in SOEs; • Assessment of SOEs soundness levels; • SOEs strategic planning; • Guidelines for significant corporate activities of SOEs; • IT management; and • Reporting.	PET perlu memperhatikan ketentuan ini sehubungan dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMN, Manajemen Risiko, dan Aksi korporasi signifikan BUMN. PET must adhere to this regulation concerning good corporate governance principles for SOEs, Risk Management, and significant corporate activities of SOEs.
24	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises	Peraturan ini bertujuan untuk integrasi dan sinkronisasi seluruh kerangka kerja yang berlaku untuk sumber daya manusia dan aspek organisasi BUMN khususnya terkait Direksi, Dewan Komisiner Perseroan, dan Dewan Pengawas (Manajemen Atas) BUMN dan anak usahanya. This regulation aims to integrate and synchronize all existing frameworks for human resources and organizational aspects of SOEs, particularly related to the Board of Directors, the Board of Commissioners of the Company, and the Board of Supervisors (Top Management) of SOEs and their subsidiaries.	PET perlu memperhatikan ketentuan ini sehubungan dengan Persyaratan pengangkatan menjadi anggota Manajemen Atas Perusahaan, Manajemen talenta Direksi BUMN, Tata cara pengangkatan anggota Manajemen Atas BUMN, Tata cara pengangkatan anggota Manajemen Atas Anak Perusahaan, Tata cara pemberhentian anggota Manajemen Atas Anak Perusahaan, Penghasilan anggota Manajemen Atas BUMN, dan Organ pendukung BUMN Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. PET must comply with this regulation regarding the requirements for appointing members of Top Management, talent management of SOEs' Directors, procedures for appointing members of Top Management of SOEs, procedures for appointing members of Top Management of Subsidiaries, procedures for dismissing members of Top Management of Subsidiaries, remuneration of Top Management of SOEs, and supporting organs of the SOEs' Board of Commissioners/Supervisors.
25	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.32 Tahun 2021 tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 32 of 2021 on Technical Inspections and Safety Examinations of Installations and Equipment in Oil and Gas Business Activities	Merupakan Peraturan Menteri ESDM tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Pemenuhan <i>Compliance</i> terhadap peralatan yang masuk dalam lingkup di permit tersebut dengan <i>output Certificate of Inspection</i> (COI), dan juga Persetujuan Layak Operasi (PLO) dari Ditjen MIGAS This regulation by the Ministry of ESDM pertains to the technical inspections and safety examinations of installations and equipment in oil and gas business activities. Compliance involves obtaining a Certificate of Inspection (COI) and a Certificate of Operational Feasibility (PLO) from the Directorate General of Oil and Gas (Ditjen MIGAS).	PET perlu memperhatikan terkait keselamatan dan peralatan operasional di Terminal Dampaknya jika Instalasi dan Peralatan yang dioperasikan tidak memiliki COI ataupun PLO, maka Badan Usaha tidak memenuhi standard teknis dari ESDM, selain itu sebagai syarat untuk mengajukan Izin Usaha Penyimpanan. PET must ensure the safety and operational equipment in its terminal operations comply with this regulation. If the installations and equipment do not have COI or PLO, the business does not meet the technical standards set by the Ministry of ESDM, which is also a requirement for applying for a Storage Business License.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
26	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 01 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Peraturan ini berisi tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Regulation of the Minister of Environment and Forestry (Permen LHK) No. 01 of 2021. This regulation, issued by the Minister of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia, pertains to the Program for the Assessment of Company Performance Ratings in Environmental Management (PROPER).	Tata cara, <i>checklist</i> kelengkapan dan penilaian PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam bidang Lingkungan). Mengganti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 03/2014. Ada beberapa kriteria tambahan pada Peraturan baru (Biru: PPA, PPU, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah non B3, Bahan B3, Kerusakan lahan dan sampah), (Hijau: LCA, SML, Pemanfaatan sumber daya (energi, Air, Air Limbah, Udara, LB3, Lnon B3), Pemberdayaan masyarakat, Tanggap kebencanaan, dan Inovasi sosial) The procedures, completeness checklist, and assessment for PROPER (Company Performance Rating Program in Environmental Management). Replacing Minister of Environment and Forestry Regulation 03/2014. There are several additional criteria in the new regulation: Blue Category: **PPA, PPU, Hazardous Waste Management (B3), Non-Hazardous Waste Management (non-B3), Hazardous Materials (B3), Land Degradation, and Waste. Green Category: LCA, SML, Resource Utilization (energy, water, wastewater, air, hazardous waste, non-hazardous waste), Community Empowerment, Disaster Response, and Social Innovation.	PET perlu memperhatikan aturan-aturan terbaru dan kriteria penilaian dalam pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah operasional PET PET must pay attention to the latest regulations and assessment criteria in environmental management within PET's operational areas.
27	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral no. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 14 of 2012 on Energy Management	Pengguna energi yang menggunakan energi lebih besar dengan enam ribu setara ton minyak per tahun wajib melakukan manajemen energi dan melaksanakan penghematan energi Energy users with consumption exceeding six thousand tons of oil equivalent per year are required to implement energy management and energy savings measures.	Menjadi acuan bagi PET untuk memperhatikan pelaksanaan penghematan dan manajemen energi This regulation serves as a reference for PET to ensure the implementation of energy conservation and management.
28	Undang-Undang No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas	Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan This law governs the organization of oil and gas business activities based on principles such as people's economy, integration, utility, justice, balance, equity, shared prosperity and welfare, security, safety, legal certainty, and environmental awareness.	PET agar memastikan kegiatan usaha berasaskan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku PET must ensure that its business activities adhere to the principles outlined in this law.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
29	Undang-Undang No. 30 tahun 2007 tentang Energi Law No. 30 of 2007 on Energy	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi adalah dasar hukum yang mengatur pengelolaan energi di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin keamanan energi nasional, meningkatkan efisiensi energi, dan memanfaatkan sumber daya energi secara optimal untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Law No. 30 of 2007 provides the legal foundation for energy management in Indonesia. Its objectives include ensuring national energy security, enhancing energy efficiency, and optimizing energy resource utilization to achieve sustainable development. All energy management activities must prioritize environmentally friendly technologies and comply with safety and occupational health regulations.	Setiap kegiatan pengelolaan energi harus mengutamakan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup serta dalam setiap kegiatan pengelolaan energi wajib memenuhi ketentuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja. PET wajib memastikan kegiatan operasional memenuhi dengan keselamatan dan Kesehatan kerja. Every energy management activity must prioritize the use of environmentally friendly technology and comply with the requirements stipulated in environmental legislation. Additionally, every energy management activity must meet the safety and occupational health standards. PET must ensure its operational activities comply with safety and occupational health standards.
30	UU. No 32/2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management	Merupakan penguatan dari UU no. 23/1997 dan mengatur keutuhan unsur pengelolaan lingkungan hidup, kejelasan kewenangan pusat & daerah, perizinan, pendayagunaan pendekatan ekosistem, kepastian dalam merespons & mengantisipasi perkembangan lingkungan global, penegakan hukum perdata, administrasi & pidana secara lebih jelas. This law strengthens Law No. 23 of 1997 and regulates the integrity of environmental management elements, clarifies the authority of central and regional governments, licensing, utilization of ecosystem approaches, responsiveness to global environmental developments, and enforcement of civil, administrative, and criminal laws.	PET perlu memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup dan lingkungannya di wilayah operasional PET PET must pay attention to and manage environmental protection and management within its operational areas.
31	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Regulation of the Minister of Environment of the Republic of Indonesia No. 02 of 2013 on Guidelines for Environmental Law Enforcement.	Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Guidelines for the Application of Administrative Sanctions in the Field of Environmental Protection and Management	PET perlu memperhatikan implementasi kepatuhan dalam kegiatan operasional Perusahaan. PET needs to pay attention to compliance implementation in the Company's operational activities.
32	Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 291.K/GL.01/MEM.G/2023 mengatur tentang "Standar Penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah" Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Decree No. 291.K/GL.01/MEM.G/2023 on "Standards for the Approval of Groundwater Use"	Keputusan ini ditetapkan pada 14 September 2023 dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya air tanah di Indonesia. This decree was issued on September 14, 2023, and aims to maintain environmental balance and the sustainability of groundwater resources in Indonesia.	PET perlu memperhatikan terkait keseimbangan lingkungan dan penggunaan air tanah PET needs to pay attention to environmental balance and groundwater use.
33	Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu Regulation of the Police No. 7 of 2019 on the Second Amendment to the Regulation of the Chief of the National Police No. 13 of 2017 on the Provision of Security Assistance for National Vital Objects and Specific Objects	Peraturan terkait dengan pemberian keamanan pada Objek Vital Nasional Regulation related to providing security for National Vital Objects.	PET perlu memperhatikan ketentuan ini mengingat aset PET merupakan aset Objek Vital Nasional PET needs to pay attention to this regulation as PET's assets are classified as National Vital Objects.

No.	Peraturan Perundang-undangan Legislative Regulation	Penjelasan atas Peraturan Perundang-undangan yang Diberlakukan Explanation of Enforced Legislative Regulations	Dampak terhadap Perusahaan Impact on Companies
34	Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kepelabuhan Government Regulation No. 64 of 2015 on Ports	Ketentuan yang mengatur mengenai Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri Provisions regulating Special Terminals and Terminals for Personal Use.	PET memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan komitmen pengoperasian Terminal Khusus (Tersus) Niaga Minyak dan Gas Bumi PET has an obligation to fulfill the operational commitments of the Oil and Gas Trade Special Terminal (Tersus).
35	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Maritim Government Regulation No. 21 of 2010 on Maritime Protection	Ketentuan yang mengatur mengenai pencegahan pencemaran dari kegiatan di Pelabuhan Provisions regulating the prevention of pollution from activities in Ports.	PET memiliki kewajiban sebagai pengelola Terminal Khusus untuk menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatannya PET has an obligation as the manager of a Special Terminal to mitigate pollution originating from its activities.
36	Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 39 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Pencemaran di Perairan Pelabuhan Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia No. PM 39 of 2021 on Pollution Control in Port Waters	Ketentuan yang mengatur terkait penanggulangan pencemaran di pelabuhan Provisions regulating pollution control in ports.	PET perlu memahami ketentuan ini khususnya terkait dengan penanggulangan pencemaran di pelabuhan PET needs to understand these provisions, especially related to pollution control in ports.
37	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 5 of 2021 on Business Activity Standards and Products in Risk-Based Business Licensing in the Energy and Mineral Resources Sector	- Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan perizinan - Pemenuhan <i>Compliance</i> oleh Badan Usaha (BU) dari Pemerintah dengan <i>output</i> BU memiliki Perizinan Usaha di <i>sector Energy</i> sesuai dengan kode KBLI nya - Provisions regarding the mechanism for applying for licenses. - Compliance fulfillment by Business Entities (BUs) from the Government, resulting in BUs having Business Licenses in the Energy sector according to their KBLI codes.	- PET perlu memahami dan mematuhi ketentuan ini sehubungan dengan pengajuan perizinan usaha - Dampaknya jika Badan Usaha (termasuk Instalasi / fasilitas) tidak memiliki Perizinan Berusaha, maka kegiatan berusaha oleh BU tersebut dianggap ilegal oleh pemerintah. - PET needs to understand and comply with these provisions concerning business license applications. - The impact if a Business Entity (including installations/ facilities) does not have a Business License is that the business activities of the BU are considered illegal by the government.
38	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Government Regulation No. 22 of 2021 on the Implementation of Environmental Protection and Management	Ketentuan mengenai perizinan lingkungan hidup yang wajib dimiliki oleh badan usaha Provisions regarding environmental permits that must be held by business entities.	PET memiliki kewajiban terkait dengan perizinan pengelolaan lingkungan hidup PET has obligations related to environmental management permits.
39	Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia No. 52 of 2018 on Licensing in Oil and Gas Business Activities	Ketentuan perizinan yang berlaku pada kegiatan minyak dan gas bumi Provisions regarding licensing applicable to oil and gas activities.	PET perlu memahami dan wajib memiliki perizinan yang diperlukan pada kegiatan minyak dan gas bumi PET needs to understand and must possess the necessary licenses for oil and gas business activities.

Perubahan Kebijakan Akuntansi, Alasan dan Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Perseroan

Changes in Accounting Policies, Reasons, And Their Impact on the Company's Financial Statements

PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku pada atau setelah 1 Januari 2023 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

1. Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
2. Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
3. Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi;
4. Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
5. Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan: Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua"; dan
6. Amendemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad ijarah.

The following new/revised Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") have been issued and are effective for fiscal years beginning on or after January 1, 2023, and do not result in changes to the Company's accounting policies and do not have a material impact on the amounts reported in the current year or prior years:

1. Amendments to PSAK 1 "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies;
2. Amendments to PSAK 16 "Current Asset" regarding proceeds before intended use;
3. Amendments to PSAK 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of accounting estimates;
4. Amendments to PSAK 46 "Income Taxes" regarding deferred taxes related to assets and liabilities arising from single transactions;
5. Amendments to PSAK 46 "Income Taxes: International Tax Reform - Pillar Two Model Provisions"; and
6. Amendments to PSAK 107 "Leases Accounting" regarding recognition, measurement, presentation, and disclosure of lease contracts.

Informasi

Kelangsungan Usaha

Business Continuity Information

Faktor-faktor Potensial dan Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Kondisi yang penuh dengan ketidakpastian dari ketegangan geopolitik akibat konflik antara Rusia dan Ukraina yang disusul dengan risiko perang di Timur Tengah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh negara dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengaruh dari ketidakpastian global ini juga dirasakan oleh Indonesia yang berdampak pada perubahan berbagai upaya demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah risiko krisis yang terus membayangi. Kondisi serupa juga menuntut PET untuk senantiasa adaptif dan responsif guna menjaga kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan, sehingga untuk mengelola pertumbuhan ke depan, PET perlu meningkatkan faktor-faktor kekuatan yang ada dan memanfaatkan peluang secara optimal. Faktor-faktor yang dapat diupayakan di antaranya optimasi pengelolaan operasi melalui improvement berkelanjutan, efisiensi biaya operasi melalui program-program cost optimization, serta peningkatan pendapatan usaha melalui ekspansi pasar ke pihak ketiga dan perluasan ke kawasan Regional Asia.

Evaluasi dan Asesmen Manajemen atas Faktor-faktor Potensial dan Berpengaruh terhadap Kelangsungan Usaha Perusahaan

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, Manajemen tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Dalam mengukur serta menilai hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan, parameter yang digunakan Manajemen dalam melakukan pengukuran dan penilaian tersebut adalah Aspek Keuangan dan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan. Selain aspek keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan, Manajemen juga mengambil beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam

Potential and Significant Factors Affecting the Company's Business Continuity

The state of uncertainty of the geopolitical tensions arising from the conflict between Russia and Ukraine followed by the risk of war in the Middle East is a challenge that the entire country must face in an effort to boost economic growth. The impact of this global uncertainty is also experienced by Indonesia, which has affected the shift in efforts to maintain the momentum of economic growth amid the risks of an ongoing crisis. Similar conditions also require PET to keep adaptive and responsive in order to maintain the business and operational survival of the Company. In order to achieve future growth, PET needs to enhance existing strength factors and exploit opportunities optimally. Factors that can be pursued include operational management optimization through sustained improvement, operating cost efficiency through cost optimization programs, as well as increased enterprise revenue through market expansion to third parties and expansion into the Asian Regional region.

Management's Evaluation and Assessment of Potential and Significant Factors Affecting the Company's Business Continuity

Management Evaluation and Assessment of Potential and Impacting Factors on the Survival of the Company Management has assessed the Company's ability to continue the survival of its business and is confident the Company has the resources to continue its business in the long run. Furthermore, the Management does not see any material uncertainty that could raise significant doubts about the Company's ability to continue its business. In measuring and evaluating the matters that potentially have a significant influence on the survival of the Company, the parameters used by the Management in carrying out such measurements and assessments are the Financial Aspects and the assessment of the Corporate Soundness Level. In addition to the financial aspects and soundness level of the Company, the Management also takes several factors into consideration

melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha. Perusahaan harus mampu untuk lebih adaptif dalam merespon perkembangan dan perubahan lingkungan perusahaan yang dinamis. Dalam hal ini, Perusahaan perlu melakukan pemetaan potensi pertumbuhan ke depan di kawasan dan senantiasa memperhatikan kondisi makroekonomi dunia agar keberlangsungan usaha tetap terjaga.

in performing assessments of the business survival. Companies must be able to be agile in responding to evolving and changing dynamic corporate environments. In this case, the Company needs to map the potential for future growth in the region and pay attention on the macroeconomic conditions of the world to keep the business sustainable.



0.5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATE GOVERNANCE





Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance

Perusahaan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kegiatan bisnisnya bertujuan untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan bagi *stakeholders* dan *shareholders*. Untuk mencapai tujuan tersebut Perusahaan senantiasa berkomitmen dalam menerapkan tata Kelola di lingkungan Perusahaan.

The Company implements Good Corporate Governance (GCG) in its business activities with the aim of enhancing value and sustainable business growth for stakeholders and shareholders. To achieve this goal, the Company is consistently committed to applying governance practices within its environment.

Dimana dalam melaksanakan komitmen tidak hanya sekedar pemenuhan aturan yang berlaku namun dalam praktik harus disadari kedarasan pentingnya GCG di dalam Perusahaan.

In fulfilling its commitment, it is not merely about complying with applicable regulations, but also about fostering an awareness of the importance of GCG within the Company.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Good Corporate Governance (GCG) principles are the foundational guidelines for processes and mechanisms in managing the Company, based on legal regulations and business ethics.

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam Menerapkan *Corporate Governance* dan *Governance Outcome* PET berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip GCG, yaitu *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness* (TARIF). Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci penting untuk meningkatkan kinerja dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Commitment and Policies for Implementing Corporate Governance and Governance Outcomes PET is committed to implementing the principles of GCG, which are Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness (TARIF). This commitment is driven by the awareness that good governance is crucial for improving performance and sustaining competitive advantage.

Prinsip Principle	Implementasi Implementation
Transparansi Transparency	PET mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku, meliputi: 1. Penyusunan dan penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan. 2. Pembuatan Laporan Tahunan. 3. Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, semester, dan triwulan. PET adheres to the prevailing regulations concerning information transparency, including: 1. Developing and explaining Annual Corporate Work Plan and Budget (RKAP). 2. Preparing Annual Report. 3. Preparing Financial Statements regularly: annually, semiannually, and quarterly.
Akuntabilitas Accountability	1. Pembagian tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing organ Perusahaan, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta kinerja yang baik secara kolektif maupun individual. 2. Memiliki standar kinerja untuk semua jajaran/level organisasi yang telah disepakati bersama, konsisten terhadap implementasi nilai-nilai Perusahaan (<i>corporate values</i>), sasaran usaha dan strategi Perusahaan, serta memiliki sistem <i>reward and punishment</i>. 3. Memiliki sistem pelaporan berkala dan senantiasa mengevaluasi pencapaian serta kinerja Perusahaan. 1. Distributing the roles and authorities clearly across the Corporate organs, including General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors, as well as their collegiate and individual performance. 2. Establishing performance standards across the organizational levels that are agreed by everyone, implementing the Corporate values, business objectives, and Corporate strategies consistently, and putting reward and punishment systems in place. 3. Establishing a regular reporting system and evaluating the Company's performance and achievement regularly.
Pertanggungjawaban Responsibility	1. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta regulasi lainnya di bidang pasar modal, industri, konstruksi, dan lingkungan yang relevan bagi Perusahaan. 2. Melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk melakukan wajib pungut dengan baik dan tepat waktu. 3. Menjalankan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>). 1. Adhering to the terms of the Articles of Association, the prevailing laws, and other relevant regulations concerning the capital market, industry, construction, and environment. 2. Fulfilling tax obligation, including paying the tax properly and timely. 3. Implementing Corporate Social Responsibility (CSR) programs.
Kemandirian Independence	1. Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan. 2. Pemegang saham maupun Dewan Komisaris Perusahaan tidak diperbolehkan untuk mengintervensi manajemen Perusahaan. 3. Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan di dalam setiap proses pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. 4. Menerapkan kebijakan dan sistem yang dapat meminimalisir terjadinya benturan kepentingan. 1. Respecting each other's rights, obligations, roles, authorities, and responsibilities across the Company's organs. 2. Prohibiting the shareholders and the Board of Commissioners from intervening in the management of the Company. 3. Avoiding conflict of interests in all decision-making processes by signing an integrity pact by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the employees. 4. Implementing the policy and system to minimize conflict of interests.

Dasar Penerapan GCG

Legal Basis of GCG Implementation

PET melaksanakan GCG berdasarkan sejumlah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

1. Undang-Undang:
 - a. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
 - b. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
 - c. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - d. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan/Keputusan Menteri:
 - a. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
 - b. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.
 - c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Referensi Hukum

Pedoman Pelaksanaan GCG: Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021.

PET implements GCG based on applicable provisions and regulations, including:

1. Laws:
 - a. Republic of Indonesia Law No. 8 of 1997 concerning Company Documents.
 - b. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.
 - c. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - d. Republic of Indonesia Law No. 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
2. Ministerial Regulations/Decrees:
 - a. Minister of SOE Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises
 - b. Minister of SOE Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning: Governance Guidelines and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises
 - c. Minister of SOE Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning: Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises

Legal References

Guidelines for GCG Implementation: General Guidelines for Corporate Governance in Indonesia (PUGKI) 2021.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Merujuk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, tercantum bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.
2. Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Dewan Komisaris adalah Organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Referring to Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, in Chapter I on General Provisions, Article 1 states the Company's organs consist of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors, and Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is the Company's organ with authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Law and/or Articles of Association.
2. The Board of Directors is the Company's organ authorized and fully responsible for managing the Company for the Company's interests, in accordance with the purpose and objectives of the Company, and represents the Company both inside and outside the court as stipulated in the Articles of Association.
3. The Board of Commissioners is the Company's organ responsible for general and/or specific supervision in accordance with the Articles of Association and provides advice to the Board of Directors.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur Perusahaan dengan wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar. Meskipun demikian, RUPS tidak dapat mengintervensi tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan atau kepengurusan Perusahaan. RUPS berperan sebagai wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan penanaman modal dalam Perusahaan. RUPS senantiasa melakukan pengambilan keputusan secara wajar dan transparan, serta didasarkan pada kepentingan jangka panjang Perusahaan.

Pemegang Saham

Saham PET dimiliki oleh PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental, dan PT Pertamina Port and Logistics. Hak-hak pemegang saham di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.
2. Memperoleh informasi material (termasuk hak bertanya), baik kepada Dewan Komisaris maupun Direksi.
3. Menyelenggarakan RUPS dalam hal Direksi dan/atau Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa bila dipandang perlu, misalnya apabila Perusahaan menghadapi penurunan kinerja yang signifikan.
4. Memperoleh penjelasan tentang penerapan GCG.

Kewenangan RUPS

RUPS maupun Pemegang Saham memiliki wewenang yang dibatasi oleh Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan, di antaranya adalah:

1. RUPS dapat mendelegasikan kepada Kuasa RUPS sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga independensi antar organ Perusahaan, Kuasa RUPS bukan Komisaris Perusahaan.
2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
4. Menetapkan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the company's structure with authority that is not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified by the Law and/or Articles of Association. However, the GMS can not intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out the management or administration of the company. The GMS serves as a forum for shareholders to make important decisions related to capital investment in the company. The GMS always makes decisions in a fair and transparent manner, based on the long-term interests of the Company.

Shareholders

PET's shares are owned by PT Pertamina International Shipping, PT Pertamina Trans Kontinental, and PT Pertamina Port and Logistics. Shareholders' rights include:

1. Attending and voting in the GMS.
2. Obtaining material information (including the right to ask questions) from both the Board of Commissioners and the Board of Directors.
3. Convening the GMS in the event of the Board of Directors and/or Board of Commissioners failing to hold the Annual GMS and Extraordinary GMS when deemed necessary, such as when the company faces significant performance decline.
4. Obtaining explanations regarding the implementation of GCG.

Authority of the GMS

Both the GMS and shareholders have authority limited by the Articles of Association and applicable regulations, including:

1. The GMS can delegate authority to a GMS Proxy in accordance with the provisions stated in the Articles of Association and applicable regulations. In maintaining the independence between company organs, the GMS Proxy is not a member of the Board of Commissioners.
2. Appointing and dismissing the Board of Directors and Board of Commissioners.
3. Approving the Long-Term Business Plan (RJPP) and the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
4. Determining the remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors, considering performance achievements.

5. Menetapkan kebijakan mengenai kemungkinan adanya konflik yang terkait dengan Dewan Komisaris.
6. Menetapkan jumlah maksimum jabatan Dewan Komisaris yang boleh dirangkap oleh seorang Dewan Komisaris dan Direksi.
7. Mendelegasikan kepada Dewan Komisaris tentang pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.

Ketentuan RUPS Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Ketentuan atau Agenda RUPS Tahunan antara lain:

1. Direksi wajib menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan untuk mendapat persetujuan dari RUPS.
 - b. Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan dari RUPS.
2. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan.
3. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP).
4. Mengangkat atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
5. Memutuskan hal-hal lain yang diajukan di dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Ketentuan RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan. Ketentuan RUPS Luar Biasa, antara lain:

1. Direksi atau Dewan Komisaris berwenang menyelenggarakan RUPSLB
2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
3. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan beserta alasannya.

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2023

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dalam 2 (dua) metode, yaitu RUPS dengan kehadiran (RUPS fisik) dan RUPS Sirkuler. Di tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2022.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2023

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 diselenggarakan pada hari Selasa, 06 Juni 2023 bertempat di Jakarta dan telah diaktakan dengan Akta Notaris No. 4 tanggal 06 Juni 2023 RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Pemegang Saham/perwakilan. Adapun agenda, hasil, dan realisasi RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 oleh Manajemen Perusahaan, sebagai berikut:

5. Setting policies regarding potential conflicts related to the Board of Commissioners.
6. Determining the maximum number of concurrent positions of a member of the Board of Commissioners and Board of Directors.
7. Delegating to the Board of Commissioners the division of duties and authorities among the members of the Board of Directors.

Annual GMS Provisions

The Annual GMS is held annually, no later than 6 (six) months after the end of the fiscal year. The provisions or agenda of the Annual GMS include:

1. The Board of Directors is required to present:
 - a. The Annual Report for approval by the GMS.
 - b. Financial Statements for ratification by the GMS.
2. Approving the use of the Company's net profit.
3. Appointing Public Accountant Firm (KAP).
4. Appointing or dismissing members of the Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Deciding on other matters presented in the GMS in accordance with the provisions of the Articles of Association.

Extraordinary GMS Provisions

An Extraordinary GMS can be held as needed or in the interest of the company. The provisions for an Extraordinary GMS include:

1. The Board of Directors or Board of Commissioners is authorized to convene an Extraordinary GMS.
2. The Board of Directors is required to call and convene an Extraordinary GMS upon written request from one or more Shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) of the total number of shares with valid voting rights.
3. The written request must state the matters to be discussed and the reasons behind.

GMS Implementation in 2023

The GMS can be conducted in two methods: in-person GMS (physical GMS) and Circular GMS. In 2023, the Company held one Annual GMS for the 2022 fiscal year.

GMS Resolution in 2023

The Annual GMS for the 2022 fiscal year was held on Tuesday, June 6, 2023, at Jakarta, and was notarized with Notary Deed No. 4 dated June 6, 2023. The Annual GMS for the 2022 fiscal year was attended by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Shareholders/representatives. The agenda, results, and the implementation of the resolutions of the Annual GMS for the 2022 fiscal year by the Company's Management are as follows:

Agenda RUPS GMS Agenda		Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2022			
Presentation of the Annual Report for the 2022 Fiscal Year			
Ikhtisar Utama	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) beserta penjelasannya yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor : 00907/2.1025/AU.1/10/11305/1/V/2023 tertanggal 19-05-2023 (sembilan belas Mei dua ribu dua puluh tiga) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>Volledig Acquit Et De Charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) sepanjang:	Telah ditindaklanjuti
	Approval of the Annual Report, including Ratification of the Company's Financial Statements accompanied by Full Discharge and Release of Responsibility (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company	Tindakantindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); 1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua); 2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kedua Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.	Has been implemented.
Profil Perusahaan		Approval of the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2022 (two thousands and twenty two) and ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022 (two thousands and twenty two), along with its explanations, which have been audited by the Public Accounting Firm TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN as stated in Report Number: 00907/2.1025/AU.1/10/11305/1/V/2023 dated May 19, 2023, with the opinion "Fair in All Material Respects." We grant full discharge and release (<i>Volledig Acquit et De Charge</i>) to the Board of Directors for management actions and the Board of Commissioners for supervisory actions conducted during the Fiscal Year ending December 31, 2022, provided that:	
Analisis dan Pembahasan Manajemen		1. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including Financial Statements) for the Fiscal Year ending December 31, 2022 (Thirty First December Two Thousands and Twenty Two) 2. These actions are not criminal acts and/or violations of law. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Second Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	
Tata Kelola Perusahaan			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2022 Proposal for the Allocation of Profits for the 2022 Fiscal Year	Menyetujui untuk tidak dilakukan pembagian Dividen oleh Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) kemudian menetapkan penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp13.172.603.047,00 (tiga belas miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus tiga ribu empat puluh tujuh rupiah) atau 100% (seratus persen) dari Laba bersih sebagai cadangan untuk memperkuat stuktur permodalan dan mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Ketiga Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agreement not to distribute dividends by the Company for the 2022 Fiscal Year and instead allocate the Company's Net Profit for the 2022 (two thousands and twenty two) Fiscal Year amounting to Rp13,172,603,047.00 (thirteen billion one hundred seventy-two million six hundred three thousand forty-seven Indonesian Rupiah), or 100% (one hundred percent) of the Net Profit, as reserves to strengthen the capital structure and support the sustainable growth of the Company. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Third Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.
Penunjukan Kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2023 Reappointment of Public Accountant Firm for the 2023 Fiscal Year	Menyetujui penetapan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN <i>Price Waterhouse Coopers</i> dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan hasil evaluasi dan usulan Dewan Komisaris Perseroan. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Keempat Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Agreement to reappoint the Public Accountant Firm (KAP) TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN <i>Price Waterhouse Coopers</i> to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2023, in accordance with the evaluation results and proposal of the Company's Board of Commissioners. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Fourth Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.

	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Ikhtisar Utama	Pengusulan Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022	Menyetujui pengusulan penetapan penghargaan atas kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Sesuai dengan tata tertib ketentuan Rapat, apabila ada pemegang saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara abstain, dipersilahkan untuk mengangkat tangan. Setelah dicatat, ternyata: Para Pemegang Saham yang menyatakan suara abstain tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada; Para Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 9.957.086 (sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam) saham. Sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kelima Rapat dengan suara bulat musyawarah mufakat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.
	Proposal for Performance Awards (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2022 Fiscal Year	Agreement to propose the determination of performance-based compensation (Tantiem) for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022 to be decided later and determined in a separate circular GMS. In accordance with the meeting rules, if there are any shareholders who disagree or wish to abstain, they are invited to raise their hands. After recording, it was noted that: No shareholders abstained; No shareholders disagreed; All shareholders agreed, totaling 9,957,086 (nine million nine hundred fifty-seven thousand eighty-six) shares. Therefore, based on the meeting decision quorum, the meeting hereby approves the proposal from the Fifth Meeting Agenda unanimously by consensus, thus making it a valid and binding resolution.	
Laporan Manajemen	Pengusulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2023	PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler.	Telah ditindaklanjuti Has been implemented.
	Proposal for Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 Fiscal Year	PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL selaku pemegang saham Perseroan, menyetujui remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 akan ditentukan kemudian dan ditetapkan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING, as the majority shareholder in the Company, agrees the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023 will be determined later and established in a separate circular GMS. PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL, as a shareholder of the Company, agrees the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2023 will be determined later and established in a separate circular GMS.	
Profil Perusahaan			
Analisis dan Pembahasan Manajemen			
Tata Kelola Perusahaan			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			

RUPS Sirkuler Tahun 2023

Di tahun 2023, Perusahaan melaksanakan RUPS Sirkuler sebanyak 1 (satu) kali, dengan rincian sebagai berikut:

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 9 November 2023 dan Tindak Lanjutnya.

Circular GMS in 2023

In 2023, the Company conducted Circular GMS a total of 1 (one) times, with the following details:

Results of the Circular Resolution of Shareholders on Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023

Results of the Circular GMS on November 9, 2023 and its Follow ups.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups																																																																																																
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023	1. Menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebagaimana dimaksud dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler ini, dengan ringkasan sebagai berikut:																																																																																																	
Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023	a. Laba (Rugi) (IDR 000) <table> <tr><td>Pendapatan</td><td>:</td><td>961.680.640</td></tr> <tr><td>Biaya Operasional</td><td>:</td><td>(719.540.910)</td></tr> <tr><td>Laba Operasi</td><td>:</td><td>242.139.731</td></tr> <tr><td>Beban <i>Overhead</i></td><td>:</td><td>(141.625.987)</td></tr> <tr><td>Laba Usaha</td><td>:</td><td>100.513.744</td></tr> <tr><td>Pendapatan/ (Beban) Lain-lain</td><td>:</td><td>(45.475.791)</td></tr> <tr><td>Laba Usaha Sebelum Pajak</td><td>:</td><td>55.037.744</td></tr> <tr><td>Pajak Penghasilan</td><td>:</td><td>(11.086.168)</td></tr> <tr><td>Laba Sebelum Hak Minoritas</td><td>:</td><td>43.951.786</td></tr> <tr><td>Hak Minoritas</td><td>:</td><td>-</td></tr> <tr><td>Laba Bersih</td><td>:</td><td>43.951.786</td></tr> <tr><td>EBIT</td><td>:</td><td>100.513.744</td></tr> <tr><td>Depresiasi</td><td>:</td><td>343.999.547</td></tr> </table> b. EBITDA (IDR 000) c. INVESTASI (USD 000) <table> <tr><td><i>Business Development</i> (BD)</td><td>:</td><td>49.525</td></tr> <tr><td><i>Non Business Development</i> (NBD)</td><td>:</td><td>19.489</td></tr> <tr><td>Total Investasi</td><td>:</td><td>69.014</td></tr> </table> Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) as stated in the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three), which is inseparable from this Circular Resolution of the Shareholders, summarized as follows: d. Profit (Loss) (IDR 000) <table> <tr><td>Revenue</td><td>:</td><td>961.680.640</td></tr> <tr><td>Operating Expenses</td><td>:</td><td>(719.540.910)</td></tr> <tr><td>Operating Profit</td><td>:</td><td>242.139.731</td></tr> <tr><td>Overhead Expenses</td><td>:</td><td>(141.625.987)</td></tr> <tr><td>Business Profit</td><td>:</td><td>100.513.744</td></tr> <tr><td>Other Income/ (Expenses)</td><td>:</td><td>(45.475.791)</td></tr> <tr><td>Operating Profit Before Tax</td><td>:</td><td>55.037.744</td></tr> <tr><td>Income Tax</td><td>:</td><td>(11.086.168)</td></tr> <tr><td>Profit Before Minority Interest</td><td>:</td><td>43.951.786</td></tr> <tr><td>Minority Interest</td><td>:</td><td>-</td></tr> <tr><td>Net Profit</td><td>:</td><td>43.951.786</td></tr> <tr><td>EBIT</td><td>:</td><td>100.513.744</td></tr> <tr><td>Depreciation</td><td>:</td><td>343.999.547</td></tr> </table> e. EBITDA (IDR 000) f. INVESTMENT (USD 000) <table> <tr><td>Business Development (BD)</td><td>:</td><td>49.525</td></tr> <tr><td>Non-Business Development (NBD)</td><td>:</td><td>19.489</td></tr> <tr><td>Total Investment</td><td>:</td><td>69.014</td></tr> </table>	Pendapatan	:	961.680.640	Biaya Operasional	:	(719.540.910)	Laba Operasi	:	242.139.731	Beban <i>Overhead</i>	:	(141.625.987)	Laba Usaha	:	100.513.744	Pendapatan/ (Beban) Lain-lain	:	(45.475.791)	Laba Usaha Sebelum Pajak	:	55.037.744	Pajak Penghasilan	:	(11.086.168)	Laba Sebelum Hak Minoritas	:	43.951.786	Hak Minoritas	:	-	Laba Bersih	:	43.951.786	EBIT	:	100.513.744	Depresiasi	:	343.999.547	<i>Business Development</i> (BD)	:	49.525	<i>Non Business Development</i> (NBD)	:	19.489	Total Investasi	:	69.014	Revenue	:	961.680.640	Operating Expenses	:	(719.540.910)	Operating Profit	:	242.139.731	Overhead Expenses	:	(141.625.987)	Business Profit	:	100.513.744	Other Income/ (Expenses)	:	(45.475.791)	Operating Profit Before Tax	:	55.037.744	Income Tax	:	(11.086.168)	Profit Before Minority Interest	:	43.951.786	Minority Interest	:	-	Net Profit	:	43.951.786	EBIT	:	100.513.744	Depreciation	:	343.999.547	Business Development (BD)	:	49.525	Non-Business Development (NBD)	:	19.489	Total Investment	:	69.014	
Pendapatan	:	961.680.640																																																																																																
Biaya Operasional	:	(719.540.910)																																																																																																
Laba Operasi	:	242.139.731																																																																																																
Beban <i>Overhead</i>	:	(141.625.987)																																																																																																
Laba Usaha	:	100.513.744																																																																																																
Pendapatan/ (Beban) Lain-lain	:	(45.475.791)																																																																																																
Laba Usaha Sebelum Pajak	:	55.037.744																																																																																																
Pajak Penghasilan	:	(11.086.168)																																																																																																
Laba Sebelum Hak Minoritas	:	43.951.786																																																																																																
Hak Minoritas	:	-																																																																																																
Laba Bersih	:	43.951.786																																																																																																
EBIT	:	100.513.744																																																																																																
Depresiasi	:	343.999.547																																																																																																
<i>Business Development</i> (BD)	:	49.525																																																																																																
<i>Non Business Development</i> (NBD)	:	19.489																																																																																																
Total Investasi	:	69.014																																																																																																
Revenue	:	961.680.640																																																																																																
Operating Expenses	:	(719.540.910)																																																																																																
Operating Profit	:	242.139.731																																																																																																
Overhead Expenses	:	(141.625.987)																																																																																																
Business Profit	:	100.513.744																																																																																																
Other Income/ (Expenses)	:	(45.475.791)																																																																																																
Operating Profit Before Tax	:	55.037.744																																																																																																
Income Tax	:	(11.086.168)																																																																																																
Profit Before Minority Interest	:	43.951.786																																																																																																
Minority Interest	:	-																																																																																																
Net Profit	:	43.951.786																																																																																																
EBIT	:	100.513.744																																																																																																
Depreciation	:	343.999.547																																																																																																
Business Development (BD)	:	49.525																																																																																																
Non-Business Development (NBD)	:	19.489																																																																																																
Total Investment	:	69.014																																																																																																

Agenda RUPS GMS Agenda		Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023	Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023	2. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP) Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar 63.41 (klasifikasi "Kurang Sehat BBB"> sebagaimana termuat: dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dengan keterangan sebagai berikut:	
		Nilai Kinerja Keuangan (NKK) : 33.41 (Kurang Sehat) Nilai Kinerja Operasional (NKO) : 20.00 (Sangat Baik) Nilai Kinerja Administrasi (NKA) : 10,00 (Tertib); Total (NKK+NKO+NKA) : 63.41 Klasifikasi : Kurang Sehat BBB	
		Approval of the Company's Soundness Level (TKP) for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) at 63.41 (classified as "Less Sound BBB") as stated in the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three), with the following details:	
		Financial Performance Value (FPV) : 33.41 (Less Sound) Operational Performance Value (OPV) : 20.00 (Very Good) Administrative Performance Value (APV) : 10.00 (Orderly) Total (FPV+OPV+APV) : 63.41 Classification : Less Healthy BBB	
		3. Menyetujui <i>Key Performance Indicator</i> ("KPI")/ Kesepakatan Kinerja Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) setelah ditetapkan dan disahkan oleh Direktur Utama PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	
		Approval of the Key Performance Indicator ("KPI")/ Performance Agreement of the Company for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) after being determined and ratified by the President Director of PT PERTAMINA INTERNATIONAL SHIPPING, which is an integral part of the Company's RKAP Book for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three).	
		4. Menyetujui rencana transformasi dan organisasi PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL Sebagai bagian dari rencana transformasi dan organisasi <i>Subholding Integrated Marine Logistics</i> yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Buku RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	
		Approval of the transformation and organizational plan of PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL as part of the transformation and organizational plan of the Integrated Marine Logistics Subholding, which is an integral part of the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) RKAP Book.	
		5. Direksi Perseroan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RKAP Perseroan Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab terhadap pengawasan pelaksanaan RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga).	
		The Board of Directors of the Company is responsible for the implementation of the Company's RKAP for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three), and the Board of Commissioners of the Company is responsible for overseeing the implementation of the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) RKAP.	
		6. Memberikan arahan-arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:	
		a. RKAP Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang disahkan merupakan pedoman kerja bagi . Direksi dalam pengelolaan Perseroan dan sebagai sarana pemantauan serta pengawasan bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk menyampaikan laporan berkala kepada Pemegang Saham secara tepat waktu atas pelaksanaan/pengawasan RKAP tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), yang meliputi laporan bulanan, laporan triwulanan, dan laporan lainnya secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
		b. Mengupayakan pencapaian target pada RKAP tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) secara optimal baik yang terkait dengan target operasional, investasi, maupun keuangan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan analisis sensitivitas secara berkala terhadap faktor faktor strategis dan material serta menyiapkan langkah antisipasinya (<i>contingency plan</i>) apabila terdapat kondisi di luar asumsi yang bersifat material.	

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023	c. Direksi agar terus melakukan efisiensi pada semua lini, dari hulu hingga hilir secara berkesinambungan termasuk menurunkan <i>losses</i>, menyelaraskan sinergi program antar Direktorat, dan fokus pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan. d. Target-target investasi yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) agar dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran, memberikan nilai tambah bagi perusahaan khususnya mendukung pencapaian target produksi dan penjualan. e. Mengupayakan pelaksanaan inisiatif strategis baik yang sudah tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020 (dua ribu dua puluh) sampai 2024 (dua ribu dua puluh empat) maupun berbagai <i>strategic mapping</i> yang telah disusun sesuai dengan target yang ditetapkan. Pelaksanaan berbagai inisiatif tersebut agar disertai dengan <i>project management</i> yang lebih baik dan juga dilaporkan secara berkala kepada Pemegang Saham. f. Meningkatkan <i>awareness</i> terhadap budaya <i>Health, Safety, Security</i>, dan <i>Environment</i> (HSSE) dalam seluruh kegiatan operasional maupun non operasional di tingkat korporat, <i>unit</i> operasi, anak perusahaan maupun mitra kerja perusahaan sehingga menciptakan situasi kerja yang aman dan kondusif. g. Kebijakan tentang kepegawaian agar mengarah pada upaya menghilangkan silo <i>mentality</i>, Kesiapan <i>talent pool</i>, dan <i>position successor</i>, rasio antara pekerja <i>outsource</i> dengan pekerja tetap yang ideal, serta menjadikan HSSE (<i>Health, Safety, Security and Environment</i>) sebagai bagian dari budaya kerja perusahaan. h. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris diminta untuk meningkatkan sinergi dan peran Perseroan dalam rangka mengoptimalkan peran dan kontribusi positif Perseroan terhadap peningkatan Kinerja Pertamina Group. i. Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal. Temuan-temuan tersebut agar tidak terulang kembali di kemudian hari. j. Direksi diminta agar meningkatkan penggunaan barang dan jasa dalam negeri dengan mengutamakan sinergi antar Badan Usaha Milik Negara, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha dan perekonomian, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. k. Direksi diminta untuk melakukan akselerasi transformasi digital perusahaan dengan teknologi informasi sebagai pendukung pengambilan keputusan strategis perusahaan serta menjadi penggerak kegiatan operasional perusahaan. l. Direksi dengan pengawasan Dewan Komisaris agar melakukan cascading KPI korporat sampai dengan tingkat individu dengan mengacu pada kontrak manajemen antara Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sebagai dasar penilaian kinerja tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). m. Penarikan pinjaman eksternal agar dilakukan dengan prudent dan selective dengan tetap mempertimbangkan aspek timing, sizing dan pricing, sehingga dapat dicapai terms & conditions yang paling optimal dan biaya yang paling efisien untuk kepentingan terbaik Perusahaan. n. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau kuasanya untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris dan melaksanakan tindakan hukum lainnya yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku. Akhirnya penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas sesuai dengan tanda pengenalnya/bukti identitasnya, demikian pula halnya dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterangan yang telah diberikan olehnya adalah lengkap dan benar sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, sehingga penghadap membebaskan saksi-saksi dan Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun, baik perdata, pidana, administrasi negara maupun lainnya, serta selanjutnya juga menyatakan telah mengerti, memahami dan menerima isi akta ini dengan segala akibat yang timbul di kemudian hari.	
Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023		

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) 2023	6. Providing guidance to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company as follows: - The approved RKAP for the Fiscal Year 2023 (twenty twenty-three) serves as a guideline for the Board of Directors in managing the Company and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Directors and the Board of Commissioners are requested to provide regular reports to the Shareholders in a timely manner on the implementation/supervision of the 2023 (twenty twenty-three) RKAP, including monthly reports, quarterly reports, and other reports in accordance with applicable regulations. - Strive for optimal achievement of targets in the 2023 (twenty twenty-three) RKAP, both related to operational, investment, and financial targets, while adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG) and professionalism in accordance with applicable laws and regulations, conducting periodic sensitivity analysis on strategic and material factors, and preparing contingency plans if there are conditions beyond the assumed material. - The Directors are required to continue efficiency measures across all areas, from upstream to downstream continuously, including reducing losses, aligning synergy programs between Directorates, and focusing on improving product quality and customer service. - Investment targets set in the 2023 (twenty twenty-three) RKAP should be implemented timely and accurately, providing added value to the company, especially supporting production and sales targets. - Strive for the implementation of strategic initiatives both outlined in the Company's Long-Term Plan (RJPP) for the years 2020 (twenty twenty) to 2024 (twenty twenty-four) and various strategic mappings prepared according to set targets. The implementation of these initiatives should be accompanied by better project management and reported regularly to the Shareholders. - Enhance awareness of the Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) culture in all operational and non-operational activities at the corporate level, operational units, subsidiaries, and company partners, thereby creating a safe and conducive working environment. - Employment policies should aim to eliminate silo mentality, readiness of the talent pool, and position successor. - The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, is requested to enhance synergy and the Company's role to optimize its positive contribution to improve Pertamina Group's performance. - The Board of Directors should follow up on and resolve the findings and recommendations from both internal and external auditors. These findings should not recur in the future. - The Board of Directors is requested to increase the use of domestic goods and services by prioritizing synergy between State-Owned Enterprises, subsidiaries, and/or affiliated companies to enhance business efficiency and the economy, while still adhering to the applicable laws and regulations. - The Board of Directors is requested to accelerate the company's digital transformation with information technology supporting strategic decision-making and driving the company's operational activities. - The Board of Directors, under the supervision of the Board of Commissioners, should cascade corporate KPIs down to the individual level, based on the management contract between the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Shareholders as the basis for performance evaluation in 2023. - The external borrowing should be carried out prudently and selectively, considering aspects of timing, sizing, and pricing, to achieve the most optimal terms and conditions and the most efficient costs for the best interest of the Company. - Authorize the Board of Directors or its proxy to make and declare this Circular Shareholder Decision in a notarial deed and carry out other legal actions deemed necessary in accordance with the prevailing regulations. Finally, the appearing party declares that the identity according to their identification card/evidence of identity is accurate, as well as all documents, data, and information provided by them are complete and true as submitted to me, the Notary, and fully responsible for it. Therefore, the appearing party releases the witnesses and the Notary from all claims and lawsuits of any kind, whether civil, criminal, state administration, or otherwise, and further declares that they have understood, comprehended, and accepted the content of this deed with all its subsequent consequences.	

Ikhtisar Utama
Laporan Manajemen
Profil Perusahaan
Analisis dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Perubahan Direksi

Results of the Circular Resolution of Shareholders on Changes to the Board of Directors

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler tanggal 07 Juli 2023 dan Tindak Lanjutnya.

Results of the Circular GMS on July 7, 2023 and its Follow ups.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Dismissal and Appointment of Director	1. Memberhentikan dengan hormat Tuan Hari Purnomo, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 29-10-1979 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di <i>Cluster Green Hill</i> Blok I/9 nomor 7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 35261828107930003, sebagai Direktur Perseroan dengan alasan penyegaran organisasi, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya terhadap Perseroan. 2. Mengangkat Tuan Bayu Protiyono tersebut sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung mulai tanggal 03-07-2023 (tiga juli dua ribu dua puluh tiga), untuk jangka waktu 1 (satu) periode jabatan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan atau sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan memutuskan lain. 3. Bagi anggota Direksi yang diangkat sebagaimana keputusan angka 2 (dua) di atas yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. 4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan (dengan hak substitusi) untuk membuat dan menyatakan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler ini dalam akta notaris serta melaksanakan tindakan hukum yang lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku. Resolution of GMS agenda take effect immediately.
	1. To honorably dismiss Mr. Hari Purnomo, born in Banyuwangi on October 29, 1979 (twenty-ninth of October, nineteen seventy-nine), an Indonesian citizen, employee of a State-Owned Enterprise (SOE), residing at Cluster Green Hill Block I/9 number 7, Neighborhood Association 001, Community Association 003, Sememi Village, Benowo District, Surabaya City, holder of an Identity Card with Population Identification Number 35261828107930003, as Director of the Company due to organizational restructuring, with gratitude for his services to the Company. 2. To appoint Mr. Bayu Protiyono as Director of the Company, effective from July 3, 2023 (third of July, two thousand and twenty-three), for a term of 1 (one) period as stipulated in the Company's Articles of Association or until the Company's General Meeting of Shareholders decides otherwise. 3. For the Director appointed as per decision number 2 (two) above, who currently holds another position prohibited by laws and regulations, the relevant authority, or internal regulations (including the Company's Articles of Association), he must resign or be dismissed from that position. 4. To authorize the Company's Board of Directors (with substitution rights) to draft and declare this Circular Resolution of Shareholders in a notarial deed and to undertake any other legal actions required according to applicable regulations.	

Penyelenggaraan RUPS di Tahun 2022

Di tahun 2023, Perusahaan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2021.

Hasil Keputusan RUPS Tahun 2022

Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 diselenggarakan pada 28 Juni 2022 dan Tindak Lanjutnya.

GMS Implementation in 2022

In 2023, the Company held one (1) GMS, which was the Annual GMS for the 2021 Fiscal Year.

Resolutions of the 2022 GMS

The resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 28, 2022, and their follow-ups.

	Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups
Ikhtisar Utama	Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan disertai Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Approval of the Annual Report, including the Ratification of the Company's Financial Statements, accompanied by the Granting of Full Release and Discharge (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Board of Commissioners.	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, sebagaimana termuat dalam Laporan Nomor: 01199/2.1025/AU.1/10/1130-4/1/VI/2022 tertanggal 21-06-2022 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh dua) dengan pendapat "Wajar Dalam Semua Hal Yang Material". Disertai pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu) sepanjang : 1. Tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan (termasuk Laporan Keuangan) Tahun Buku yang berakhir tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu); 2. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau perbuatan melawan hukum. Approved the Company's Annual Report for the Fiscal Year 2021, as well as the ratification of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2021, along with the accompanying explanations audited by the Public Accounting Firm TANUDIREDA, WIBISANA, RINTIS & REKAN, as stated in Report Number: 01199/2.1025/AU.1/10/1130-4/1/VI/2022 dated June 21st, 2022, with an opinion of "Fair in All Material Aspects." Additionally, granted full discharge and release (<i>volledig acquit et de charge</i>) to the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners for their supervisory actions during the Fiscal Year ending on December 31, 2021, as long as: 1. These actions are reflected in the Company's Annual Report (including the Financial Statements) for the Fiscal Year ending on December 31, 2021; 2. These actions do not constitute criminal offenses and/or unlawful acts.	Telah dilaksanakan Has been implemented.
Laporan Manajemen	Pengusulan Penetapan Penggunaan Laba Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) Proposal for the Allocation of Profits for the Fiscal Year 2021. (two thousand twenty one)	Memutuskan tidak ada Penetapan Penggunaan Laba karena Perseroan membukukan Rugi Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) serta untuk memperkuat struktur permodalan agar dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang berkelanjutan. Decided not to allocate the Use of Profits as the Company incurred a Loss in the Fiscal Year 2021, and to strengthen the capital structure to support the Company's sustainable growth.	
Profil Perusahaan	Pengusulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Proposal for the Appointment of Public Accounting Firm (KAP) for the Fiscal Year 2022 (two thousand twenty two)	Menyetujui pemberian kuasa dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh dua) berikut besaran nilai jasanya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa KAP yang ditunjuk Perseroan dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PT Pertamina International Shipping. Approved the granting of authority and delegation of power to the Board of Commissioners of the Company to determine the Public Accountant Firm (KAP) to conduct an examination of the Company's Financial Statements for the Fiscal Year ending on December 31, 2022, including the determination of their fees in accordance with applicable provisions and regulations, provided that the appointed KAP by the Company is consulted/coordinated first with PT Pertamina International Shipping.	
Analisis dan Pembahasan Manajemen	Pengusulan Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) Proposal for Performance Appreciation (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2021 (two thousand twenty one)	Menetapkan bahwa Penghargaan Atas Kinerja (Tantiem) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Decided the Performance Appreciation (Tantiem) to the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2021 would be determined at a later date and will be implemented in a separate circular GMS.	Telah dilaksanakan Has been implemented
Tata Kelola Perusahaan	Pengusulan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year 2022 (two thousand twenty two)	Menyetujui Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2022 (dua ribu dua puluh dua) akan ditentukan kemudian dan akan dilaksanakan dalam RUPS terpisah secara sirkuler. Approved the Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Fiscal Year 2022 would be determined at a later date and will be implemented in a separate circular GMS.	Telah dilaksanakan Has been implemented.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			

Hasil Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tentang Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2022

The Result of Shareholders' Circular Resolution on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2022.

Hasil Keputusan RUPS Sirkuler Tahun Buku 2020 Tanggal 16 Agustus 2022 dan Tindak Lanjutnya.

The Result of Circular GMS for the Fiscal Year 2020 held on August 16, 2022, and its Follow-up.

Agenda RUPS GMS Agenda	Keputusan Decision	Tindak lanjut Follow Ups																																	
Pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2022	1. Menyetujui Rencana dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perseroan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2022 yang tidak terpisahkan dari Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler, dengan ringkasan sebagai berikut:	Keputusan agenda RUPS, langsung berlaku.																																	
Proposal for the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2022.	a. Laba (Rugi) (IDR) <table><tr><td>Pendapatan Usaha</td><td>:</td><td>1.276.464</td></tr><tr><td>Beban Usaha</td><td>:</td><td>(1.044.467)</td></tr><tr><td>Laba Usaha</td><td>:</td><td>231.596</td></tr><tr><td>Beban <i>Overhead</i></td><td>:</td><td>5.749</td></tr><tr><td>Laba Usaha</td><td>:</td><td>225.847</td></tr><tr><td>Pendapatan Lain-Lain</td><td>:</td><td>(4.717)</td></tr><tr><td>Laba Usaha Sebelum Pajak</td><td>:</td><td>221.129</td></tr><tr><td>Pajak</td><td>:</td><td>(49.850)</td></tr><tr><td>Laba Bersih</td><td>:</td><td>171.279</td></tr></table> b. EBITDA c. Investasi (IDR) <table><tr><td><i>Business Development</i> (BD)</td><td>:</td><td>654.586</td></tr><tr><td><i>Non Business Development</i> (NBD)</td><td>:</td><td>844.148</td></tr></table>	Pendapatan Usaha	:	1.276.464	Beban Usaha	:	(1.044.467)	Laba Usaha	:	231.596	Beban <i>Overhead</i>	:	5.749	Laba Usaha	:	225.847	Pendapatan Lain-Lain	:	(4.717)	Laba Usaha Sebelum Pajak	:	221.129	Pajak	:	(49.850)	Laba Bersih	:	171.279	<i>Business Development</i> (BD)	:	654.586	<i>Non Business Development</i> (NBD)	:	844.148	The decisions of the GMS' meeting are immediately effective
Pendapatan Usaha	:	1.276.464																																	
Beban Usaha	:	(1.044.467)																																	
Laba Usaha	:	231.596																																	
Beban <i>Overhead</i>	:	5.749																																	
Laba Usaha	:	225.847																																	
Pendapatan Lain-Lain	:	(4.717)																																	
Laba Usaha Sebelum Pajak	:	221.129																																	
Pajak	:	(49.850)																																	
Laba Bersih	:	171.279																																	
<i>Business Development</i> (BD)	:	654.586																																	
<i>Non Business Development</i> (NBD)	:	844.148																																	
	2. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perusahaan (TKP) Perseroan dengan klasifikasi tingkat kinerja perusahaan sebesar 93,00 (kategori Sehat "AA") yang tercantum didalam Buku RKAP Perseroan Tahun 2022 dengan keterangan sebagai berikut:																																		
	a. Nilai Kinerja Keuangan (NKK): 37,00 b. Nilai Kinerja Pertumbuhan (NKP): 10,00 c. Nilai Kinerja Operasional (NKO): 10,00 d. Nilai Kinerja Administrasi (NKA): 9,00 e. Total (NKK+NKP+NKO+NKA): 66,00 (Sehat AA)																																		
	1. Approve the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2022 as stated in the Company's RKAP Book for the Year 2022, which is an integral part of the Circular Shareholders' Decision, with the following summary:																																		
	a. Profit (Loss) (IDR): <table><tr><td>Operating Revenue:</td><td>:</td><td>1.276.464</td></tr><tr><td>Operating Expenses:</td><td>:</td><td>(1.044.467)</td></tr><tr><td>Operating Profit:</td><td>:</td><td>231.596</td></tr><tr><td>Overhead Expenses:</td><td>:</td><td>5.749</td></tr><tr><td>Operating Profit:</td><td>:</td><td>225.847</td></tr><tr><td>Other Income:</td><td>:</td><td>(4.717)</td></tr><tr><td>Operating Profit Before Tax:</td><td>:</td><td>221.129</td></tr><tr><td>Tax:</td><td>:</td><td>(49.850)</td></tr><tr><td>Net Profit:</td><td>:</td><td>171.279</td></tr></table> b. EBITDA: c. Investments (IDR): <table><tr><td>Business Development (BD):</td><td>:</td><td>654.586</td></tr><tr><td>Non-Business Development (NBD):</td><td>:</td><td>844.148</td></tr></table>	Operating Revenue:	:	1.276.464	Operating Expenses:	:	(1.044.467)	Operating Profit:	:	231.596	Overhead Expenses:	:	5.749	Operating Profit:	:	225.847	Other Income:	:	(4.717)	Operating Profit Before Tax:	:	221.129	Tax:	:	(49.850)	Net Profit:	:	171.279	Business Development (BD):	:	654.586	Non-Business Development (NBD):	:	844.148	
Operating Revenue:	:	1.276.464																																	
Operating Expenses:	:	(1.044.467)																																	
Operating Profit:	:	231.596																																	
Overhead Expenses:	:	5.749																																	
Operating Profit:	:	225.847																																	
Other Income:	:	(4.717)																																	
Operating Profit Before Tax:	:	221.129																																	
Tax:	:	(49.850)																																	
Net Profit:	:	171.279																																	
Business Development (BD):	:	654.586																																	
Non-Business Development (NBD):	:	844.148																																	
	2. Approved the Company's Soundness Level (TKP) with a classification of company performance level of 93.00 (category Healthy "AA") as stated in the Company's 2022 RKAP Book with the following details:																																		
	a. Financial Performance Score (NKK): 37.00 b. Growth Performance Score (NKP): 10.00 c. Operational Performance Score (NKO): 10.00 d. Administrative Performance Score (NKA): 9.00 e. otal (NKK+NKP+NKO+NKA): 66.00 (Soundness AA)																																		

Direksi

Board of Directors

Direksi menjalankan pengelolaan bisnis dan operasional sehari-hari, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Setiap anggota Direksi menjalankan tugas sesuai dengan pembagian pada bidangnya masing-masing. Namun demikian, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap menjadi tanggung jawab bersama.

Pedoman Kerja Direksi

Direksi PET telah memiliki Pedoman Kerja yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-004/PET0000/2022-S0 tentang *Board Manual* PT Pertamina Energy Terminal.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- a. Direktur bertugas untuk
 1. Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perusahaan, dan
 2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas pengurusan Perusahaan, Direktur melakukan:

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Direktur Wajib Menyusun RKAP, dengan ketentuan:
 - a. RKAP disampaikan kepada Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan tata waktu dalam Anggaran Dasar sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - b. RKAP paling sedikit memuat:
 - i. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan Perusahaan, dan program kerja/kegiatan;
 - ii. Anggaran Perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan yang meliputi anggaran investasi dan anggaran operasi; dan
 - iii. Proyeksi keuangan Perusahaan;
 - c. Dalam hal terjadi:
 - i. Direktur tidak menyampaikan RKAP kepada Komisaris sesuai dengan tata waktu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan; dan
 - ii. RKAP belum mendapatkan persetujuan hingga dimulainya dimulainya tahun

The Board of Directors manages the day-to-day business and operations of the company, adhering to the applicable laws and regulations. Each member of the Board of Directors carries out their duties according to their respective areas of responsibility. However, the implementation of duties by each member of the Board of Directors remains a collective responsibility.

Board Manual

PET's Board of Directors has a Board Manual that serves as a guide for carrying out their duties and responsibilities, based on Decree No.Kpts-004/PET0000/2020-S0 regarding the Board Manual of PT Pertamina Energy Terminal.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

- a. The Board of Directors is responsible for:
 1. Leading and managing the Company in accordance with its purpose and objectives, and constantly striving to improve the efficiency and effectiveness of the company.
 2. Preserving and managing the company's assets.

In carrying out management duties, the Board of Directors performs the following:

1. Preparation of the Annual Work Plan
The Directors are required to prepare the Annual Company Work Plan and Budget (RKAP) with the following provisions:
 - a. The RKAP is submitted to the Board of Commissioners for approval according to the timeline specified in the Articles of Association prior to the start of the upcoming fiscal year.
 - b. The RKAP must include at least:
 - i. Mission, business objectives, business strategy, company policies, and work programs/activities.
 - ii. Detailed company budget for each work program/activity, including investment budget and operational budget.
 - iii. Company financial projections.
 - c. In the event that:
 - i. The Board of Directors fails to submit the RKAP to the Board of Commissioners according to the specified timeline in the Articles of Association, and
 - ii. The RKAP has not received approval until the start of the upcoming fiscal year, the

- buku yang akan datang Perusahaan menggunakan RKAP tahun sebelumnya.
2. Penyusunan Laporan Tahunan
- Direktur wajib Menyusun laporan tahunan dengan ketentuan;
- Laporan tahunan disampaikan kepada Komisaris untuk mendapat penelaahan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir;
 - Laporan tahunan paling sedikit memuat;
 - Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta paling sedikit terdiri atas neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - Laporan mengenai kegiatan Perusahaan;
 - Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
 - Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - Nama Direktur dan Komisaris;
 - Gaji dan tunjangan bagi Direktur dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Komisaris untuk tahun buku yang baru lampau; dan
 - Informasi mengenai rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris);
 - Laporan tahunan ditandatangani oleh Direktur dan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disampaikan oleh Direktur kepada RUPS paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham sebelum disahkan oleh RUPS;
 - Dalam hal Direktur atau Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan;
 - Yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang diletakan dalam laporan tahunan; dan
 - Jika tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan; dan
 - Direktur wajib menyerahkan laporan keuangan Perusahaan kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diaudit.

- Company will use the previous year's RKAP.
2. Preparation of the Annual Report
- The Board of Directors is required to prepare the annual report with the following provisions:
- The annual report is submitted to the Board of Commissioners for review no later than 6 (six) months after the end of the company's fiscal year.
 - The annual report must include at least:
 - Financial statements prepared in accordance with financial accounting standards, including at least the balance sheet for the latest fiscal year compared to the previous fiscal year, income statement for the relevant fiscal year, cash flow statement, and statement of changes in equity, along with notes to the financial statements.
 - Report on the company's activities.
 - Report on the implementation of social and environmental responsibilities.
 - Details of issues arose during the fiscal year affecting the company's business activities.
 - Report on the supervisory tasks carried out by the Board of Commissioners during the latest fiscal year.
 - Names of Directors and Commissioners.
 - Salaries and allowances for the Directors, and salaries or honorariums and allowances for the Commissioners for the latest fiscal year.
 - Information regarding meetings held during the fiscal year (both internal and joint meetings with the Board of Commissioners).
 - The annual report is signed by the Board of Directors and Board of Commissioners serving in the relevant fiscal year, and submitted by the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders (GMS) no later than 5 (five) months after the end of the fiscal year, taking into account the applicable provisions, to be examined by the Shareholders prior to being approved by the GMS.
 - In the event that a Director or Commissioner does not sign the annual report:
 - The reason must be stated in a separate written letter enclosed with the annual report.
 - If no written reason is provided, it is deemed the person approves the contents of the annual report.
 - The Board of Directors is required to submit the company's financial statements to the public accountant appointed by the GMS for auditing

Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahaan Laporan Keuangan dilakukan oleh RUPS tahunan dengan ketentuan:

- a. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada:
 - i. Direktur atas pengurusan Perusahaan; dan
 - ii. Komisaris atas pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan, yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan; dan
 - b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, Direktur dan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Direktur dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab dimaksud jika terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
3. Pertanggungjawaban Direktur diatur sebagai berikut:
- a. Direktur bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perusahaan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Direktur tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a jika dapat membuktikan;
 - i. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
 - iii. Tidak mempunyai Benturan Kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas Tindakan pengurusan Perusahaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. Telah mengambil Tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Approval of the annual report, including the ratification of the Financial Statements, is carried out by GMS according to the following provisions:

- a. The decision to ratify the financial statements and approve the annual report by the annual GMS implies granting full release of responsibility to:
 - i. The Board of Directors for the management of the company; and
 - ii. The Board of Commissioners for their supervisory duties over the company, that have been carried out during the previous fiscal year, as long as such actions are reflected in the annual report and financial statements; and
 - b. In the event the provided financial statements are found to be incorrect and/or misleading, the Board of Directors and Board of Commissioners are cooperatively responsible towards the affected parties. The Board of Directors and Board of Commissioners are exempt from such responsibility if it is proven the situation is not their fault.
3. The responsibilities of the Board Directors are regulated as follows:
- a. The Directors are personally liable for any losses incurred by the Company if found fault or negligent in carrying out their duties for the interests and business of the company, as stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations.
 - b. The Directors cannot be held accountable for losses incurred by the Company as mentioned in point (a) if they can prove:
 - i. The losses are not due to their fault or negligence.
 - ii. They have carried out their managerial duties in good faith and with prudence for the interests and in accordance with the purpose and objectives of the Company.
 - iii. They do not have any direct or indirect conflicts of interest regarding company management actions that result in losses.
 - iv. They have taken measures to prevent the occurrence or continuation of such losses.

Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi BUMN

1. RUPS/Menteri dapat menetapkan Kandidat yang diusulkan oleh Komite Suksesi menjadi anggota Direksi BUMN.
2. Bagi BUMN tertentu, penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan setelah dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
3. Dalam hal penetapan anggota Direksi BUMN dilakukan sebelum UKK sesuai ketentuan sektoral maka Direksi BUMN berwenang melakukan tindakan, tugas, dan fungsi sebagai anggota Direksi BUMN terhitung sejak dinyatakan lulus UKK sesuai ketentuan sektoral.
4. Anggota Direksi BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditetapkan oleh RUPS/Menteri.
5. Dalam hal anggota Direksi BUMN tertentu dinyatakan tidak lulus UKK sesuai dengan ketentuan sektoral, RUPS/Menteri dapat memberhentikan anggota Direksi BUMN tersebut dengan memperhatikan ketentuan sektoral.
6. Penetapan seseorang menjadi anggota Direksi BUMN dapat dilakukan melalui:
 - a. Keputusan Menteri selaku RUPS/pemilik modal apabila seluruh saham/modal BUMN dimiliki oleh Negara; atau
 - b. Keputusan RUPS atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler, apabila tidak seluruh saham dimiliki oleh Negara.
7. Bagi Persero Terbuka, daftar riwayat hidup (curriculum vitae) calon anggota Direksi BUMN yang akan diusulkan untuk diangkat dalam RUPS wajib tersedia dan diumumkan pada saat penyelenggaraan RUPS sebelum pengambilan keputusan mengenai pengangkatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi BUMN.
8. Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi BUMN, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi BUMN terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi BUMN.
9. Dalam hal yang bersangkutan tidak mengundurkan diri dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maka jabatannya sebagai anggota Direksi BUMN berakhir pada batas waktu tersebut.
10. Dalam hal keputusan pengangkatan dilakukan dengan Keputusan Menteri atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler maka Deputi memproses penyerahan Surat Keputusan kepada anggota Direksi BUMN terpilih setelah Keputusan ditetapkan.

Appointment of the Board of Directors

1. The General Meeting of Shareholders (GMS)/Minister can appoint a candidate proposed by the Succession Committee to become a member of the SOEs Board of Directors.
2. For certain SOEs, the appointment of someone as a member of the Board of Directors can be done after passing the Competency Fit and Proper Test (UKK) according to sectoral regulations.
3. In the event the appointment of a member of the Board of Directors is made prior to the UKK according to sectoral regulations, the SOEs Board of Directors is authorized to perform the duties and functions as a member of the Board of Directors from the moment they are declared to have passed the UKK according to sectoral regulations.
4. The term of office for a SOEs Board member as referred to in paragraph (3) is effective from the date of appointment by the GMS/Minister.
5. In the event the SOEs Board member is declared not to have passed the UKK according to sectoral regulations, the GMS/Minister may dismiss the Board member, taking into account the sectoral regulations.
6. The appointment of a person as a member of the SOEs Board of Directors can be done through:
 - a. A decision by the Minister as the GMS/shareholder if all shares/capital of the SOEs are owned by the State; or
 - b. A decision by the GMS or a circular resolution by all shareholders if not all shares are owned by the State.
7. For publicly listed companies, the curriculum vitae of candidates for the Board of Directors to be proposed for appointment at the GMS must be available and announced at the GMS before making a decision on their appointment as a member of the SOEs Board of Directors.
8. Prior to being appointed as a member of the SOEs Board of Directors, the candidate must sign a resignation letter from any other positions that are prohibited to be held concurrently with the SOEs Board of Directors position, effective from the date of their appointment.
9. If the candidate does not resign within the period stipulated by the relevant laws and regulations, their position as a member of the SOEs Board of Directors will be terminated at the end of that period.
10. In cases where the appointment decision is made by the Minister's Decision or a circular resolution by all shareholders, the Deputy processes the delivery of the Decision Letter to the selected member of the SOEs Board of Directors after the decision is made.

11. Dalam proses penyerahan Surat Keputusan, Deputi dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang hukum, Asisten Deputi dan Asisten Deputi Sektor.
12. Setelah penyerahan Surat Keputusan dilakukan, seluruh dokumen diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
13. Dalam hal pengangkatan akan ditetapkan dalam RUPS, penyampaian hasil UKK kepada Menteri disertai dengan surat penetapan calon dan surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS.
14. Setelah RUPS dilaksanakan, seluruh dokumen terkait dengan pengangkatan anggota Direksi BUMN diserahkan kepada Deputi untuk diadministrasikan.
15. Proses administrasi oleh Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (14) termasuk dokumentasi proses pengangkatan dan penilaian.
16. Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri/RUPS/seluruh pemegang saham secara sirkuler.
17. Format surat pernyataan yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Direksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
18. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.
19. Pengusulan calon Direksi Anak Perusahaan oleh Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pertamina dan disetujui oleh RUPS Pertamina sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.
20. Pengusulan calon Direksi Perusahaan Patungan yang berasal dari Pertamina, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pertamina dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pengusulan dan pengangkatan Direksi Perusahaan Patungan yang berlaku di Pertamina.
21. Pengusulan calon Direksi Perusahaan Patungan yang berasal dari luar Pertamina, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham.
22. Direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, perilaku serta dedikasi untuk mengembangkan usaha guna kemajuan perusahaan.
23. Rekrutmen Direksi dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*).
24. Jumlah anggota Direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan apabila anggota Direksi lebih dari 1 (satu) maka salah seorang anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur (mana yang relevan sesuai Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan).
25. Selain ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, masa jabatan Direksi Perusahaan

11. In the process of delivering the Decision Letter, the Deputy is assisted by senior primary leadership officials responsible for legal matters, Assistant Deputies, and Sector Assistant Deputies.
12. After the Decision Letter is handed over, all documents are submitted to the Deputy for administration.
13. If the appointment is to be decided at the GMS, the results of the UKK are submitted to the Minister along with the candidate appointment letter and a power of attorney to attend and make decisions at the GMS.
14. After the GMS is conducted, all documents related to the appointment of SOEs Board of Directors members are handed over to the Deputy for administration.
15. The administrative process by the Deputy as referred to in paragraphs (12) and (14) includes the documentation of the appointment and assessment process.
16. The members of the Board of Directors start their tenure effectively from the date specified in the Minister’s Decision/GMS/circular resolution by all shareholders.
17. The format of the statement letter regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors is as stipulated in Appendix IV, which is an integral part of this Ministerial Regulation.
18. The appointment and dismissal of the Board of Directors are carried out by the GMS.
19. The proposal for candidates for the Subsidiary’s Board of Directors by Pertamina’s Board of Directors as the Shareholder must obtain written approval from Pertamina’s Board of Commissioners and be approved by Pertamina’s SOEs prior to being decided in the Subsidiary’s GMS.
20. The proposal for candidates for the Joint Venture Company’s Board of Directors originating from Pertamina must obtain written approval from Pertamina’s Board of Directors and must comply with the rules and regulations regarding the proposal and appointment of Joint Venture Company’s Board of Directors applicable at Pertamina.
21. The proposal for candidates for the Joint Venture Company’s Board of Directors originating from outside Pertamina must obtain written approval from Pertamina’s Board of Directors as the Shareholder.
22. The appointment of the Board of Directors is based on considerations of expertise, integrity, leadership, experience, behavior, and dedication to developing the company for its progress.
23. Recruitment of the Board of Directors is carried out through a suitability and competence test (*fit and proper test*).
24. The number of Board members is adjusted to the needs, and if there is more than 1 (one) Board member, one of them is appointed as the President Director or CEO (whichever is relevant according to the Articles of Association of each Company).
25. In addition to being stipulated in the Articles of Association of the Company, the term of office of

adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan dengan persetujuan RUPS. 26. Anggota Direksi tidak diperkenankan memangku jabatan rangkap baik struktural maupun fungsional pada Perusahaan lain. 27. Apabila tidak dapat dihindari, anggota Direksi dapat merangkap jabatan di perusahaan lain setelah mendapat persetujuan RUPS. 28. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran dan perhatian secara penuh waktu pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan perusahaan. 29. Jabatan anggota Direksi berakhir jika: - Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; - Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; - Meninggal dunia; - Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS; dan - Selesai atau berakhirnya masa jabatan/masa kerja sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. 30. Pemberhentian Direktur sewaktu-waktu oleh RUPS Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentian, antara lain: - Tidak/kurang mampu memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; - Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direktur dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau peraturan perundang-undangan; - Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau negara; - Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; - Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur; dan - Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perusahaan. 31. Pemberhentian sementara waktu Direktur oleh Komisaris Direktur dapat diberhentikan sementara oleh Komisaris jika Direktur tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan: - Pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada Direktur disertai dengan alasannya; - Komisaris wajib melaksanakan pengurusan Perusahaan selama Direktur diberhentikan sementara;	the Company's Board of Directors is a maximum of 3 (three) years and can then be re-elected for 1 (one) more term with the approval of the GMS. 26. Board members are not allowed to hold concurrent positions, whether structural or functional, in other companies. 27. If unavoidable, Board members may hold concurrent positions in other companies after obtaining approval from the GMS. 28. In carrying out their duties, the Board of Directors must dedicate their time, thoughts, and attention full-time to the tasks, obligations, and goals of the company. 29. The position of a Board member ends if: - They resign from their position by notifying the Company in writing within a maximum period of 30 (thirty) days before the date of their resignation; - They no longer meet the requirements of the regulations; - They pass away; - They are dismissed based on a GMS decision; and - The expiration or termination of the term of office/employment according to the provisions of the Company's Articles of Association. 30. Termination of Directors at any time by the GMS Directors may be terminated at any time by the GMS based on a GMS decision stating the reasons for termination, including: - Failure or inadequacy to fulfill their obligations as agreed in the management contract; - Inability to perform their duties properly; - No longer meeting the requirements as a Director and/or violating the provisions of the Company's Articles of Association and/or regulations; - Involved in actions detrimental to the Company and/or the state; - Found guilty by a court judgment that has obtained legal force; - Engaging in actions that violate ethics and/or propriety that should be respected as a Director; and - Other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Company. 31. Temporary Suspension of Directors by the Board of Commissioners Directors may be temporarily suspended by the Board of Commissioners if the Director acts contrary to the Company's Articles of Association or legal regulations, subject to the following conditions: - The temporary suspension must be notified in writing to the Director along with the reasons; - The Board of Commissioners must manage the Company during the Director's temporary suspension;
---	---

- c. Direktur yang diberhentikan sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sejak menerima pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
- d. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS;
- e. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4, Direktur diberi kesempatan untuk membela diri;
- f. RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 akan memutuskan untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara Direktur;
- g. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 4 menguatkan keputusan pemberhentian sementara, Direktur diberhentikan untuk seterusnya; dan
- h. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah tanggal pemberhentian sementara tidak diadakan RUPS maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan Direktur yang diberhentikan sementara dimaksud dapat menjabat kembali.

Rapat Direksi

Kebijakan Rapat Direksi

Kebijakan rapat Direksi diatur berdasarkan Surat Keputusan No.Kpts-004/PET0000/2020-S0 tentang *Board Manual* PT Pertamina Energy Terminal.

Pelaksanaan Rapat Direksi

Direksi menyelenggarakan rapat untuk mengambil keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perusahaan. Direksi mengutamakan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat. Rapat Direksi terdiri atas rapat gabungan antara Komisaris dan Direksi, rapat dengan Pertamina sebagai *Holding*, rapat bersama PT Pertamina International Shipping, dan rapat dengan pihak eksternal dengan total 148 (seratus empat puluh delapan).

Rekapitulasi Tingkat Kehadiran Direksi dalam RUPS 2023

Pada tahun 2023, Direksi menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di tanggal 06 Juni 2023.

- c. The Director who is temporarily suspended is not authorized to manage the Company or represent the Company both in and out of court from the receipt of the notification of suspension as referred to in point 1.
- d. Within a maximum period of 30 (thirty) days after the temporary suspension, the Board of Commissioners must convene a GMS;
- e. In the GMS referred to in point 4, the Director is given the opportunity to defend themselves;
- f. The GMS referred to in point 4 will decide whether to revoke or uphold the decision of the temporary suspension of the Director;
- g. In the event the GMS as intended in number 4 confirms the decision to temporarily dismiss the Director, the Director will be dismissed permanently; and
- h. If, within a maximum period of 30 (thirty) days after the date of the temporary suspension, the GMS is not held, the temporary suspension shall be legally void, and the Director temporarily suspended may resume their duties.

Board of Directors Meeting

Board of Directors Meeting Policy

The policy for Board of Directors meetings is regulated based on Decree No. Kpts-004/PET0000/2020-S0 regarding the Board Manual of PT Pertamina Energy Terminal.

The Implementation of Board of Directors Meetings

The Board of Directors holds meetings to make important decisions related to the operational and business activities of the Company. The Board of Directors prioritizes decision-making through deliberation and consensus. Board of Directors meetings include joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, meetings with Pertamina as the Holding company, meetings with PT Pertamina International Shipping, and meeting with external parties in total of 148 (one hundred forty-eight) meetings.

Summary of Board of Directors’ Attendance in the 2023 GMS

In 2023, the Board of Directors attended the General Meeting of Shareholders held on June 6, 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Direksi

Training and/or Enhancement of Board of Directors' Competencies

Nama Name	Tanggal Date	Pelatihan Training	Penyelenggara Organizer
Bayu Prostiyo	11 Desember 2023 December 11, 2023	Sertifikasi CRP (<i>Cerified Risk Professional</i>) for Excutive CRP (Certified Risk Professional) Certification for Executive	IRBA

Penilaian atas Kinerja Komite-komite di Bawah Direksi

Assessment of Committees under the Board of Directors

Pada tahun 2023, belum terdapat Komite di bawah Direksi sehingga tidak terdapat informasi mengenai penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi beserta dasar penilaiannya.

In 2023, there were no committees under the Board of Directors, so there is no information available regarding the assessment of the performance of the committees under the Board of Directors and their assessment criteria.



Main Overview
Management Report
Company Profile
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang menjalankan fungsi pengawasan perusahaan, yakni *performance* dan *conformance level*. Pada *performance level*, Dewan Komisaris memberikan arahan dan petunjuk kepada Direksi, serta memberikan masukan kepada RUPS. Adapun pada *conformance level*, Dewan Komisaris memastikan bahwa seluruh masukan yang diberikan oleh Dewan Komisaris telah sepenuhnya dijalankan Direksi, serta mengawasi pemenuhan aspek kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dengan masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi etika jabatan anggota Dewan Komisaris, yakni etika terkait dengan keteladanan, kepatuhan terhadap regulasi, keterbukaan dan kerahasiaan informasi, peluang perusahaan, keuntungan pribadi, benturan kepentingan, etika berusaha dan anti korupsi, serta etika setelah berakhirnya masa jabatan. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris didukung oleh Sekretariat Dewan Komisaris dan Komite-Komite Dewan Komisaris.

Tugas, dan Wewenang Dewan Komisaris

Secara umum, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi terkait pengelolaan perusahaan. Dewan Komisaris bertindak untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, pelaksanaan RJPP, RKAP, ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan RUPS, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku.

Adapun aspek-aspek yang menjadi pokok pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain

1. Manajemen risiko, sistem teknologi informasi, sistem pengendalian intern, termasuk efektivitas pelaksanaan audit eksternal maupun audit internal;
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia khusus tentang manajemen karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan demosi;
3. Akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK);

The Board of Commissioners is a corporate organ responsible for overseeing, particularly performance and conformance levels. At the performance level, the Board of Commissioners provides guidance and instructions to the Board of Directors, as well as feedback to the GMS. Meanwhile, at the conformance level, the Board of Commissioners ensures all inputs provided by the Board of Directors have been fully implemented by the Board of Directors, and supervise the Company's compliance with legal provisions and the Company's Articles of Association.

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS, with a term of 5 (five) years, and may be reappointed for one additional term without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time. Each member of the Board of Commissioners is required to adhere to the ethical standards of their position, which include ethics related to leadership, compliance with regulations, transparency and confidentiality of information, company opportunities, personal gain, conflict of interest, business ethics and anti-corruption, as well as ethics after their term ends. In performing its functions, the Board of Commissioners is supported by the Secretariat of the Board of Commissioners and the Committees of the Board of Commissioners.

Duties and Authorities of the Board of Commissioners

In general, the duties and responsibilities of the Board of Commissioners are to supervise and provide advice to the Board of Directors regarding the management of the Company. The Board of Commissioners acts in the interest of the company, in line with the purpose and objectives of the Company. The Board of Commissioners oversees company policies, the implementation of RJPP, RKAP, provisions of the Articles of Association, GMS resolutions, and ensures the Company's compliance with applicable regulations.

The main aspects of oversight and advice provided by the Board of Commissioners to the Board of Directors include:

1. Risk management, information technology systems, internal control systems, including the effectiveness of external and internal audits;
2. Human Resources management, particularly regarding career management within the company, promotion, transfer, and demotion systems and procedures;
3. Accounting and preparation of Financial Statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK);

4. Kebijakan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, terkait pengadaan, mutu dan layanan;
5. Kepatuhan pada regulasi yang berlaku maupun perjanjian dengan pihak ketiga;
6. Pelaksanaan dan kepatuhan pada RKAP dan RJPP, proses bisnis perusahaan, termasuk apabila terjadi penurunan kinerja perusahaan;
7. Penerapan GCG, termasuk mekanisme pengungkapan dan penyampaian informasi strategis oleh Direksi kepada publik, serta hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya;
8. Mengkaji, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direksi berkaitan dengan penyusunan visi, misi, perubahan Anggaran Dasar, dan rencana-rencana strategis perusahaan lainnya, seperti diatur dalam Anggaran Dasar.

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
2. Pengusulan calon Komisaris Anak Perusahaan oleh Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Pertamina dan disetujui oleh RUPS Pertamina sebelum ditetapkan dalam RUPS Anak Perusahaan.
3. Pengusulan calon Komisaris Perusahaan Patungan yang berasal dari Pertamina, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direksi Pertamina dan harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pengusulan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang berlaku di Pertamina.
4. Pengusulan calon Komisaris Perusahaan Patungan yang berasal dari luar Pertamina oleh Direksi Pertamina selaku Pemegang Saham, harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai pengusulan dan pengangkatan Dewan Komisaris Perusahaan Patungan yang berlaku di Pertamina.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat dari tenaga yang memiliki integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha tersebut serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
6. Apabila dipandang perlu, RUPS dapat menetapkan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris Independen dengan pertimbangan integritas dan kompetensi.
7. Masa jabatan Dewan Komisaris adalah paling lama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan dengan persetujuan RUPS.
8. Dewan Komisaris berhenti karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia
 - d. Meninggal dunia
 - e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS
9. RUPS dapat memberhentikan Dewan Komisaris sebelum habis masa jabatannya, apabila:

4. Policies and their implementation, related to procurement, quality, and services;
5. Compliance with applicable regulations and agreements with third parties;
6. Implementation and compliance with RKAP and RJPP, business processes of the Company, including in the event of declining company performance;
7. Implementation of GCG, including disclosure mechanisms and dissemination of strategic information by the Board of Directors to the public, as well as important matters related to changes in the business environment and its issues;
8. Reviewing, evaluating, and providing recommendations to the Board of Directors regarding the formulation of vision, mission, changes to the Articles of Association, and other strategic plans of the Company, as regulated in the Articles of Association.

Appointment and Termination of the Board of Commissioners

1. The appointment and termination of members of the Board of Commissioners are carried out by the GMS.
2. The nomination of Commissioners for Pertamina Subsidiary as the Shareholder must obtain written approval from the Pertamina Board of Commissioners and be approved by the Pertamina GMS prior to being determined in the Subsidiary GMS.
3. The nomination of Joint Venture Commissioners originating from Pertamina must obtain written approval from the Pertamina Board of Directors and must comply with the regulations and provisions regarding the nomination and appointment of Joint Venture Commissioners applicable in Pertamina.
4. The nomination of Joint Venture Commissioners originating from outside Pertamina by Pertamina as the Shareholder must comply with the regulations and provisions regarding the nomination and appointment of Joint Venture Commissioners applicable in Pertamina.
5. Members of the Board of Commissioners are appointed from individuals who have integrity, dedication, understanding of the Company's management issues, and adequate knowledge in the relevant business field, and can provide sufficient time to perform their duties.
6. If deemed necessary, the GMS may appoint Independent Commissioners considering their integrity and competence.
7. The term of office of the Board of Commissioners is a maximum of 5 (five) years and can be reelected for 1 (one) additional term with the approval of the GMS.
8. The Board of Commissioners ceases due to:
 - a. Expiration of their term of office
 - b. Resignation
 - c. Loss of Indonesian citizenship
 - d. Death
 - e. Dismissal based on GMS resolution
9. The GMS may dismiss the Board of Commissioners before the end of their term of office, when:

- a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan dan/ atau Negara, atau terlibat dalam tindakan lainnya yang merugikan Perusahaan dan/atau Negara
 - d. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - e. Karena adanya penugasan dari Pertamina di tempat lain bagi Komisaris yang berasal dari Pertamina
 - f. Alasan lainnya yang ditetapkan oleh RUPS
10. Untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris wajib membentuk organ pendukung Dewan Komisaris paling sedikit:
- a. Sekretariat Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit;
 - c. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
 - d. Komite Lain, jika diperlukan.
11. Segala biaya yang diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya menjadi beban Perusahaan dan secara jelas dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan kebutuhan dimana paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dan apabila anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) maka salah seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.

Chater Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki *Charter* Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pedoman kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. *Charter* Dewan Komisaris merupakan salah satu *soft structure* GCG, yang bertujuan untuk menjelaskan pola hubungan kerja yang baku antara Direksi dan Dewan Komisaris, agar tercipta pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, efektif, dan efisien, dengan menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Adapun *Charter* Dewan Komisaris Dewan Komisaris mengatur tentang:

1. Ketentuan umum jabatan, termasuk di dalamnya adalah persyaratan penetapan anggota, kedudukan, rangkap jabatan, masa jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pengunduran diri, pengisian anggota yang lowong, honorarium/remunerasi, serta penilaian kinerja;
2. Tugas, kewajiban, hak, wewenang, tanggung jawab serta mekanisme kerja;
3. Pengambilan keputusan, rapat Dewan Komisaris, pelaporan, rencana kerja, dan anggaran;
4. Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa Komite Audit dan Sekretaris Dewan Komisaris; dan

- a. Are unable to perform their duties properly
 - b. No longer meet the requirements and/or violate the provisions of the Articles of Association and/ or applicable laws and regulations
 - c. Engage in actions detrimental to the Company and/or the State or are involved in other actions detrimental to the Company and/or the State
 - d. Are found guilty by a court decision that has legal force
 - e. Are assigned by Pertamina to other locations for Commissioners originating from Pertamina
 - f. Other reasons determined by the GMS
10. In assisting the implementation of their duties, the Board of Commissioners is required to form supporting organ of the Board of Commissioners, consists of:
- a. Secretary of the Board of Commissioners
 - b. Audit Committee
 - c. Nomination and Remuneration Committee; and
 - d. One other committee (if necessary)
11. All expenses required by the Board of Commissioners to carry out their duties and obligations are at the expense of the Company and are clearly stated in the Company Work Plan and Budget.

Composition of the Board of Commissioners

The number of members of the Board of Commissioners is adjusted according to the needs, with a minimum of 1 (one) member of the Board of Commissioners. If there are more than 1 (one) member of the Board of Commissioners, one of them is appointed as the Chairman of the Board or President Commissioner

Board of Commissioners Charter

The Board of Commissioners has a Board of Commissioners Charter that serves as a guideline for carrying out its duties and responsibilities. The Board of Commissioners Charter is one of the soft structures of GCG, aimed at explaining the standard pattern of working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, to create professional, transparent, effective, and efficient management of the Company, while upholding integrity and honesty. The Board of Commissioners Charter regulates:

1. General provisions of positions, including requirements for appointing members, positions, concurrent positions, term of office, appointment and dismissal, resignation, filling vacant positions, honorarium/remuneration, and performance appraisal;
2. Duties, obligations, rights, authorities, responsibilities, and working mechanisms;
3. Decision-making, Board of Commissioners meetings, reporting, work plans, and budgets;
4. Supporting bodies of the Board of Commissioners such as the Audit Committee and the Secretary of the Board of Commissioners; and

5. Prinsip dasar tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Charter Dewan Komisaris dievaluasi dan diperbarui secara berkala, agar selaras dengan kebutuhan bisnis PET maupun perubahan regulasi.

Rapat Dewan Komisaris

Salah satu mekanisme pelaksanaan tugas Dewan Komisaris adalah melalui penyelenggaraan rapat. Dewan Komisaris memberikan pandangan, pendapat, rekomendasi, dan pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris. Adapun rapat Dewan Komisaris terdiri atas rapat internal Dewan Komisaris, rapat bersama Direksi/Manajemen, dan rapat Komite Dewan Komisaris. Tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam *board manual* PET dan *Charter* Dewan Komisaris.

Selain mekanisme rapat, Dewan Komisaris memberikan tanggapan, rekomendasi, telaah, arahan, dan pengambilan keputusan melalui Surat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menerbitkan 10 (sepuluh) tanggapan, rekomendasi, telaah, arahan, dan pengambilan keputusan melalui Surat Dewan Komisaris yakni terkait dengan persetujuan pengajuan pinjaman dalam bentuk shareholder loan kepada PT Pertamina International Shipping, persetujuan penetapan penggunaan laba tahun buku 2022, rekomendasi penetapan Kantor Akuntan Publik Periode 2023, telaah terhadap Laporan Tahunan PET Periode 2022, arahan untuk hasil assessment GCG PET Tahun 2022, telaah terhadap RKAP PET Tahun 2023, persetujuan revisi buku RKAP 2023 PET, persetujuan perubahan ABI dan penghapusan dan pelepasan aset pada Buku RKAP PET Tahun 2023, arahan untuk pengukuran GCG PET Tahun 2023, dan persetujuan penambahan KBLI serta perubahan Akta Anggaran Dasar PET.

Dewan Komisaris juga menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris melakukan kunjungan kerja ke Terminal Bahan Bakar Minyak Pulau Sambu Batam, *courtesy* ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, dan *Terminal Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tanjung Sekong, fasilitas *Fresh Water Supply* Ciwandan.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat gabungan dengan Direksi/Manajemen sebanyak 12 (dua belas) kali dengan tingkat kehadiran Komisaris sebanyak 100% (seratus persen) serta Komisaris telah pula menghadiri RUPS Tahunan pada tanggal 6 Juni 2023.

5. Basic principles of the working relationship between the Board of Commissioners, the Board of Directors, and the Shareholders.

The Board of Commissioners Charter is periodically evaluated and updated to align with the business needs of PET and regulatory changes.

Board of Commissioners Meetings

One of the mechanisms for carrying out the duties of the Board of Commissioners is through the organization of meetings. The Board of Commissioners provides views, opinions, recommendations, and decision-making during Board of Commissioners meetings. The Board of Commissioners meetings consist of internal Board of Commissioners meetings, joint meetings with the Board of Directors/Management, and Board of Commissioners Committee meetings. The procedures for organizing Board of Commissioners meetings have been regulated in PET's board manual and the Board of Commissioners Charter.

In addition to meeting mechanisms, the Board of Commissioners provides responses, recommendations, reviews, guidance, and decision-making through Board of Commissioners Letters. The Board of Commissioners has issued 10 (ten) response, recommendations, analysis, guidance, and decision-making through the Board of Commissioners' correspondence related to the approval of loan applications in the form of shareholder loans to PT Pertamina International Shipping, approval of the allocation of profits for the 2022 fiscal year, recommendation for the appointment of Public Accountant Firm for the 2023 period, review of PET's 2022 Annual Report, guidance for the 2022 GCG assessment results for PET, review of PET's 2023 RKAP, approval of revisions to PET's 2023 RKAP book, approval of changes to ABI and disposal and release of assets in PET's 2023 RKP Book, guidance for the measurement of PET's 2023 GCG, and approval of additions to KBLI and changes to PET's Articles of Association.

The Board of Commissioners also carries out supervisory functions by conducting field visits. Throughout 2023, the Board of Commissioners conducted working visits to the Fuel Terminal of Pulau Sambu Batam, courtesy visits to the Main Office of Customs and Excise Services in Batam, and the Liquefied Petroleum Gas (LPG) Terminal in Tanjung Sekong, Ciwandan Fresh Water Supply facilities.

Frequency and Attendance Rate of Board of Commissioners and Board of Directors Meetings

The Board of Commissioners has conducted joint meetings with the Board of Directors/Management a total of 12 (twelve) times with a Commissioner attendance rate of 100% (one hundred percent), and the Commissioners also attended the GMS on June 6, 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, Dewan Komisaris tidak Dewan Komisaris tidak belum mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi.

Training and/or Enhancement of Board of Commissioner' Competencies

In 2023, the Board of Commissioners did not participate in any training.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur dan Mekanisme Penilaian Kinerja

PET telah memiliki pendekatan dan prosedur penilaian terhadap kinerja Direksi dan Dewan dalam pengelolaan PET Komisaris dalam pengelolaan PET. Perusahaan melakukan penilaian secara objektif dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh regulasi yang mengatur institusi BUMN, dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan dari PT Pertamina (Persero) yakni Pedoman Nomor A05-002/K20000/2022-S9 tentang Penilaian Kinerja Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Penunjang Dewan Komisaris di Subholding dan Anak Perusahaan Pertamina.

Performance Assessment of the Board of Directors and Board of Commissioners

Performance Assessment Procedure and Mechanism

PET has established an approach and procedure for assessing the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing PET. The Company conducts objective assessments based on regulations and legislation issued by the governing body regulating SOEs and the Company's Articles of Association.

Board of Commissioners' Performance Assessment

The performance assessment of the Board of Commissioners refers to the provisions of PT Pertamina (Persero), specifically Guideline Number A05-002/K20000/2022-S9 regarding the Performance Evaluation of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Committees Supporting the Board of Commissioners in Pertamina's Sub-holdings and Subsidiaries.

No.	KPI	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Nilai Value
I.	KPI Internal Internal KPI	20			20
1.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting	10	Minimal 1 (satu) kali setiap bulan At least 1 (one) time monthly	12 (dua belas) kali 12 (twelve) times	10
2.	Penunjukkan Asesor GCG Appointment GCG Assessor	10	Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum akhir tahun At the latest 1 (one) month before the end of the year	Di Bulan November 2022 telah memberikan arahan kepada Direktur untuk dilakukan Self Assessment GCG Tahun 2023 mengingat terdapat pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S. MBU/2012	10
	Penunjukkan Asesor GCG Appointment GCG Assessor			In November 2022, instructions were given to the Director to conduct the Self Assessment of GCG for the year 2023, considering the revocation of the Decision of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012.	

No.	KPI	Bobot Weight	Target	Realisasi Realization	Nilai Value
II.	KPI Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners KPI to Board of Directors	40			40
3.	Tanggapan terhadap Rancangan RJPP/ RKAP Response to Draft RJPP/RKAP	10	Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rancangan RJPP/RKAP diterima Maximum of 30 (thirty) working days after the Draft RJPP/RKAP is received	Tanggapan atas persetujuan RKAP diselesaikan sebelum 30 (tiga puluh) hari kerja Response to the approval of the RKAP is completed within 30 (thirty) working days	10
4.	Keputusan Pemberian Persetujuan/ Tanggapan Tertulis atas Surat Direksi Decision on Granting Approval/Written Response to Director's Letter	10	Maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Surat Direksi/Dokumen diterima secara lengkap Maximum of 30 (thirty) working days after the Director's Letter/ Documents are received in full	Realisasi waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja Realization of completion time within 3 (three) working days	10
5.	Pemberian Nasehat/Saran/Arahan secara Tertulis Provision of Advice/Recommendation/ Guidance in Writing	10	Minimal 3 (tiga) surat setiap tahun Minimum of 3 (three) letters per year	10 (sepuluh) surat 10 (ten) letters	10
6.	Pemberian Telaah/Rekomendasi secara Tertulis Provision of Review/Recommendation in Writing	10	Minimal 3 (tiga) surat setiap tahun Minimum of 3 (three) letters per year	3 (tiga) surat 3 (three) letters	10
III.	KPI Dewan Komisaris dengan RUPS Board of Commissioners KPI to GMS	40			40
7.	Kehadiran Dewan Komisaris dalam RUPS Attendance of the Board of Commissioners in the GMS	10	Minimal 1 (satu) kali setiap tahun Minimum 1 (one) time per year	Dilaksanakan pada 6 Juni 2023 Implemented on June 6, 2023	10
8.	Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Annual Report on Supervisory Duties	10	Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Laporan keuangan Audited diterima Dewan Komisaris No later than 30 (thirty) working days after the Audited Financial Report is received by the Board of Commissioners	Dilampirkan dalam <i>annual report</i> PET tahun 2023 Attached in the PET's annual report for the year 2023	10
9.	Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik sebelum pelaksanaan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Proposal for the Appointment of Public Accounting Firm before the GMS for the Approval of the Annual Report	10	Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum RUPS tahunan berlangsung No later than 7 (seven) working days before the annual GMS takes place	Telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2023 Has been conducted on May 29, 2023	10
10.	Kontribusi Pemenuhan <i>Area of Improvement</i> Dewan Komisaris dalam Penilaian GCG Contribution to Fulfillment of the Area of Improvement for the Board of Commissioners in GCG Assessment	10	Minimal memenuhi 50% dari <i>Total Area of Improvement</i> yang harus dipenuhi Minimum compliance with 50% of the Total Area of Improvement that must be fulfilled	50% <i>Area of Improvement</i> telah dipenuhi 50% of the Area of Improvement has been fulfilled	10
Total		100			100

Penilaian Kinerja Direksi

Hasil Penilaian Kinerja Direksi sesuai KPI Tahun 2023.

Board of Directors' Performance Assessment

The results of the Board of Directors' performance assessment are in line with the KPI for the year 2023.

Kesepakatan Kinerja Subholding Integrated Marine Logistics Tahun: 2023 Posisi: Direktur Pertamina Energy Terminal

Performance Agreement of Integrated Marine Logistics Subholding Year: 2023 Position: Director of Pertamina Energy Terminal

No	KPI	Perspektif BSC BSC Perspective	Unit	Target 2023 2023 Target	Polaritas Polarity	Bobot (%) Weight (%)		Realisasi YTD TW IV 2023 Realization of Q4 YTD in 2023			
						Sub	Total	Target	Real	Perf.	%WP
A. Financial						35		33,68			
1	Terminal Gross Profit	Financial	Miliar IDR Billion IDR	238,01	Maximize	6	35	238,01	89,05	37%	2,24
2	Fresh Water Gross Profit	Financial	Miliar IDR Billion IDR	4,13	Maximize	6		4,13	38,72	110%	6,60
3	EBITDA PET	Financial	Miliar IDR Billion IDR	444,51	Maximize	7		444,51	489,72	110%	7,70
4	ROIC> WACC Subholding*	Financial	%	4,91	Maximize	6		4,91	7,46	110%	6,60
5	Net Profit Margin	Financial	%	4,57	Maximize	5		4,57	12,59	110%	5,50
6	Realisasi Investasi ABI Realization of ABI Investment	Financial	%	85-100	In-Range	5		85,00	85,65	101%	5,04
B. Customer Focus						15		15,60			
1	Customer Satisfaction Index*	Customer Focus	Skala Likert Likert Scale	4	Maximize	5	15	4,00	4,00	100%	5,00
2	%Non-Captive Market	Customer Focus	%	8	Maximize	5		8,00	12,92	110%	5,50
3	% SLA Achievement	Customer Focus	%	95	Maximize	5		95,00	96,81	102%	5,10
C. Internal Process						35		37,45			
1	Optimal Pencapaian Program <i>Unlock Value</i> *	Internal Process	%	100	Maximize	3	35	100,00	100,00	100%	3,00
2	Mendapatkan Mitra Kerjasama PET yang Strategis Acquiring Strategic PET Partnership	Internal Process	%	100	Maximize	5		100,00	110,00	110%	5,50
3	Realisasi Investasi Progress Fisik Realization of Physical Progress Investment	Internal Process	%	90	Maximize	5	35	90,00	95,62	106%	5,31
4	Penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Utilization of Local Content Level (TKDN)	Internal Process	%	30	Maximize	3		30,00	65,83	110%	3,30
5	<i>Integrated Marine Logistic Asset Optimization</i>	Internal Process	%	100	Maximize	4		100,00	102,84	103%	4,11
6	Implementasi Asset Integrity Management*	Internal Process	%	100	Maximize	3		100,00	110,00	110%	3,30
7	<i>Working Loss</i>	Internal Process	Skor	100	Maximize	6		100,00	108,30	108%	6,50
8	% <i>Integrated Port Time</i>	Internal Process	%	100	Maximize	6		100,00	107,06	107%	6,42

No	KPI	Perspektif BSC BSC Perspective	Unit	Target 2023 2023 Target	Polaritas Polarity	Bobot (%) Weight (%)		Realisasi YTD TW IV 2023 Realization of Q4 YTD in 2023			
						Sub	Total	Target	Real	Perf.	%WP
D. Learning & Growth						15		16,38			
1	Pencapaian Program ESG & Dekarbonisasi ESG & Decarbonization Program Achievements	Learning & Growth					15				
	Perbaikan Skor Rating ESG* Improvement in ESG Rating Score*	Learning & Growth	Skor	30	Minimize	3		30,00	27,30	110%	3,30
	Reduksi Emisi CO2 CO2 Emissions Reduction	Learning & Growth	Ton CO2E	186	Maximize	4		186,00	876,00	110%	4,40
2	Pencapaian Program Digitalisasi Digitalization Program Achievements	Learning & Growth	%	100	Maximize	4	15	100,00	110,00	110%	4,40
3	Program Strategic Initiative Strategic Initiative Program	Learning & Growth	%	100	Maximize	4		100,00	107,00	107%	4,28
Subtotal						100		103,10			
Boundary KPI								-1,50			
1	Number of Accident (NoA)	Boundary	Σ Event	0,00	Minimize	3		0,00	4,00		-4,00
2	GCG Implementation Compliance	Boundary	%	100,00	Maximize	3		100,00	97,44		0,00
3	Optimalisasi Pelaksanaan Sinergi Pertamina Group Optimization of Pertamina Group Synergy Implementation	Boundary	%	100,00	Maximize	4		100,00	109,40		2,50
4	Pengelolaan Risiko Risk Management	Boundary	%	100,00	Maximize	3		100,00	100,00		0,00
5	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Internal & Eksternal Follow-Up on Internal & External Audit Recommendations	Boundary	%	100,00	Maximize	3		100,00	100,00		0,00
								101,60			

Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan/tindakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan, surat, dan alat bukti lain yang terkait dengan pengurusan Perusahaan serta pemeriksaan terhadap keuangan Perusahaan; dan
2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan termasuk memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran Perusahaan, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Description of the Board of Commissioners' Duties

The Board of Commissioners carries out the following tasks:

1. Conducting supervision over the policies/actions of the Board of Directors in managing the Company, including examining the books, letters, and other evidence related to the Company's management, as well as examining the Company's finances.
2. Providing advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company, including providing advice on the implementation of the Company's long-term plans, work plans and budgets, resolutions of the GMS, and relevant laws and regulations.

- Dewan Komisaris memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana jangka panjang Perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perusahaan, serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan;
 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan serta memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;
 3. Melaporkan kepada RUPS jika terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;
 4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
 5. Membuat risalah/notula rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
 6. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan perusahaan lain;
 7. Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
 8. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
 9. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal sesuai ketentuan dan standar yang berlaku;
 10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan/atau keputusan RUPS; dan
 11. Mematuhi ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di induk Perusahaan.

- Dewan Komisaris memiliki hak sebagai berikut:
1. Mendapatkan honorarium dan tunjangan/fasilitas yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perusahaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- Dewan Komisaris memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan kepada Direksi;
 2. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
 3. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perusahaan;

- The duties of the Board of Commissioners are as follows:
1. Provide opinions and recommendations to the GMS regarding the Company’s long-term plans, annual work plans and budgets, and other work plans prepared by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association.
 2. Monitor the Company’s activities and provide opinions and recommendations to the GMS on any issues deemed important to the management of the Company.
 3. Report to the GMS in case of indications of declining Company performance.
 4. Review and examine periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
 5. Prepare minutes of the Board of Commissioners’ meetings and keep copies.
 6. Report to the Company regarding their share ownership and/or that of their family in the Company and other companies.
 7. Provide a report on the supervisory tasks performed during the past fiscal year to the GMS.
 8. Monitor and ensure that GCG is effectively and sustainably implemented.
 9. Evaluate the performance of the External Auditor according to applicable regulations and standards.
 10. Fulfill other obligations in the context of supervision and advisory duties, as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, the Company’s Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.
 11. Comply with other applicable provisions in the parent Company.

- The Board of Commissioners has the following rights:
1. Receive remuneration and allowances/facilities, the amount of which is determined by the GMS in accordance with the provisions of laws and regulations.
 2. Resign from their position by providing written notice of their intention to the Company no later than 30 (thirty) calendar days before the date of their resignation.

- The Board of Commissioners has the following authorities:
1. Inquire about and request explanations regarding any matters related to the management of the Company from the Board of Directors.
 2. Be informed about all policies and actions that have been or will be undertaken by the Board of Directors.
 3. Enter the premises, buildings, offices, or other places used or controlled by the Company.

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Memeriksa pembukuan, surat, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan pengurusan Perusahaan serta memeriksa keuangan Perusahaan termasuk memeriksa surat berharga yang terkait dengan Perusahaan; 5. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan serta dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 7. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; 8. Memberikan persetujuan tertulis atau rekomendasi tertulis atas tindakan Direksi sesuai ketentuan dan kewenangan dalam Anggaran Dasar Perusahaan; 9. Mengusulkan calon anggota Direksi kepada Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan; 10. Menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham; 11. Mengusulkan remunerasi Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi; 12. Memberhentikan untuk sementara anggota Direksi jika anggota Direksi bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, pemberhentian dimaksud harus disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 13. Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu; 14. Membentuk Komite Audit; 15. Membentuk komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan; 16. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu; 17. Mempekerjakan tenaga ahli baik yang bekerja sendiri-sendiri maupun dalam kelompok untuk jangka waktu terbatas atas beban Perusahaan; dan 18. Melaksanakan kewajiban pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perusahaan, dan/atau keputusan RUPS. | <ol style="list-style-type: none"> 4. Examine the books, letters, and other documents related to the management of the Company and inspect the Company's finances, including examining securities related to the company. 5. Undertake management actions of the Company under certain circumstances for a specific period according to the provisions of the Company's Articles of Association and in compliance with applicable laws and regulations. 6. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors, with the knowledge of the Board of Directors, to attend Board of Commissioners meetings. 7. Attend Board of Directors meetings and provide opinions on the matters discussed. 8. Provide written approval or recommendations for the actions of the Board of Directors according to the provisions and authorities in the Company's Articles of Association. 9. Propose candidates for the Board of Directors to the Shareholders in accordance with established policies and selection criteria. 10. Evaluate the Board of Directors and report the results of the evaluation to the Shareholders. 11. Propose remuneration for the Board of Directors in accordance with applicable regulations and the performance evaluation of the Board of Directors. 12. Temporarily suspend a member of the Board of Directors if they act in violation of the Company's Articles of Association and/or applicable laws and regulations, with such suspension being justified within the framework of applicable laws and regulations. 13. Provide approval or assistance to the Board of Directors to carry out specific legal actions. 14. Establish an Audit Committee. 15. Establish other committees besides the Audit Committee if deemed necessary, considering the Company's capabilities. 16. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners if deemed necessary. 17. Employ experts, both individual and in groups, for a limited period at the expense of the Company. 18. Fulfill other supervisory obligations as long as they do not conflict with the provisions of laws and regulations, the Company's Articles of Association, and/or resolutions of the GMS. |
|--|---|

Sekretaris Dewan Komisaris

Board of Commissioners Secretary

PET telah menunjuk seorang Sekretaris Dewan Komisaris untuk menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi dan kesekretariatan di lingkup tugas pengawasan Dewan Komisaris. Sekretaris Dewan Komisaris juga berperan memastikan pelaksanaan seluruh aspek kepatuhan Dewan Komisaris terhadap prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *best practices* yang berlaku umum.

Sekretaris Dewan Komisaris melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) sekaligus membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar perusahaan;
2. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, serta mengadministrasikan seluruh dokumen Dewan Komisaris;
3. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran, serta rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
4. Menjaga pemenuhan aspek GCG dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Dewan Komisaris;
5. Mengatur perjalanan dinas untuk Dewan Komisaris, meliputi surat menyurat dan dokumen perjalanan, pengaturan transportasi dan akomodasi serta penyelesaian administrasi seluruh pengeluaran yang terjadi selama perjalanan dinas.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki latar belakang bidang pendidikan formal maupun pengalaman kerja yang beragam, sehingga dapat saling melengkapi satu sama lain. Melalui kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi, PET memiliki keberagaman sudut pandang, pengetahuan, dan pengalaman, sehingga proses pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan dapat memitigasi

PET has appointed a Secretary to the Board of Commissioners to support the implementation of the functions and effectiveness of the Board of Commissioners. The Secretary to the Board of Commissioners reports directly to the Board of Commissioners. She is responsible for the administrative and secretarial activities within the scope of the Board of Commissioners' supervisory duties. The Secretary to the Board of Commissioners also ensures the compliance of the Board of Commissioners with GCG principles in accordance with applicable laws and generally accepted best practices.

The Board of Commissioners Secretary carries out the following tasks:

1. Preparing meetings, including meeting materials (*briefing sheets*), and creating minutes of the Board of Commissioners meeting in accordance with the company's Articles of Association;
2. Gathering relevant materials and information for the execution of the Board of Commissioners' tasks and administering all Board of Commissioners documents;
3. Drafting the Work Plan and Budget, as well as draft reports of the Board of Commissioners;
4. Ensuring compliance with GCG aspects in the execution of all Board of Commissioners' activities;
5. Arranging business trips for the Board of Commissioners, including correspondence and travel documents, transportation and accommodation arrangements, as well as completing administrative tasks for all expenses incurred during the business trip.

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Board of Commissioners and Board of Directors have diverse backgrounds in formal education and work experience, enabling them to complement each other. Through the policy of diversity in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, PET benefits from diverse perspectives, knowledge, and experience, facilitating objective decision-making and risk mitigation. The diversity in composition is

risiko. Keberagaman komposisi diharapkan mampu memberikan nilai tambah terhadap aspek operasional dan bisnis PET, serta meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkup PET.

expected to provide added value to the operational and business aspects of PET, as well as enhance the quality of corporate governance implementation within PET's scope.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi:

Diversity in Composition of Board of Commissioners and Board of Directors

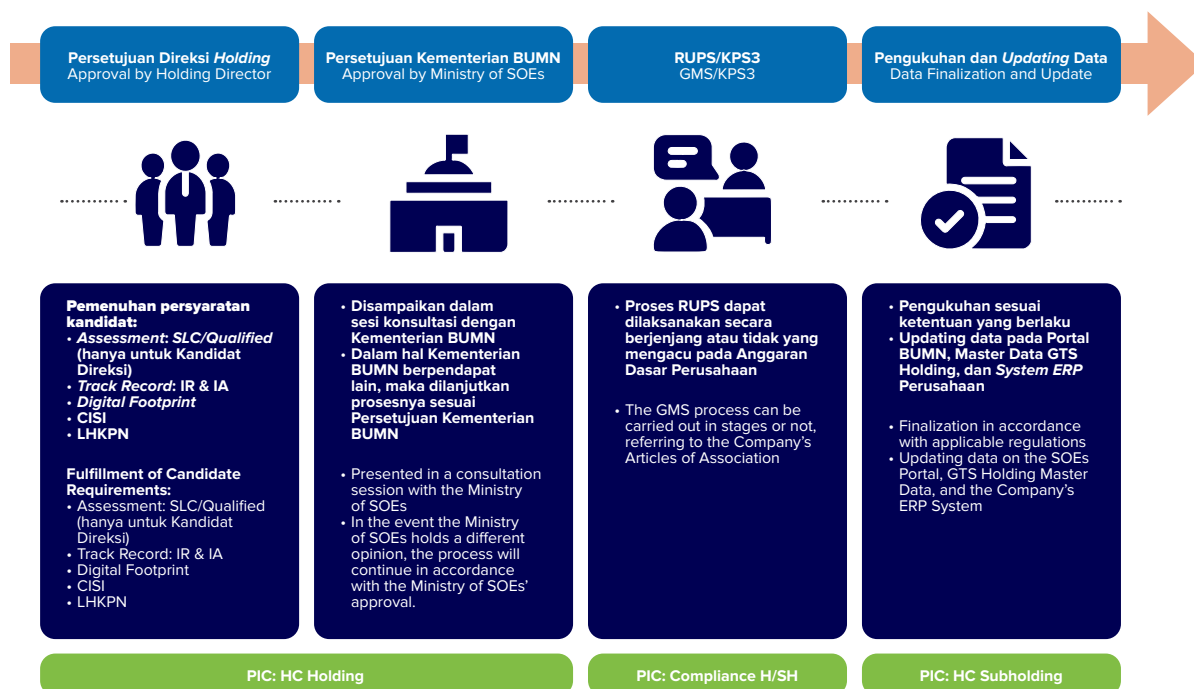
Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification & Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Hufron Asrofi	Komisaris Commissioner	- Magister Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" (2000) - Sarjana Hukum Keperdataan, Universitas Islam Jakarta (1985) - Master of Law, College of Law "IBLAM" (2000) - Bachelor of Civil Law, Jakarta Islamic University (1985)	62 Tahun 62 Years old	Laki-Laki Male
Direksi Board of Directors				
Bayu Protiyono (03 Juli 2023-31 Desember 2023) (July 03, 2023 - December 31, 2023)	Direktur Director	- Profesi Insinyur Universitas Gajah Mada (2023) - Magister Teknik Universitas Indonesia (2009) - Sarjana Teknik institut Teknologi Sepuluh Nopember (1996) - Engineering Profession, Gadjah Mada University (2023) - Master of Engineering, University of Indonesia (1996) - Bachelor of Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology (1996)	47 Tahun 47 Years Old	Laki-Laki Male
Hari Purnomo (01 Januari 2023-03 Juli 2023) (January 01, 2023- July 03, 2023)	Direktur Director	- Doktor Ilmu Manajemen Universitas Padjadjaran (2021) - Magister Administrasi Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2015) - Sarjana Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya (2002) - Doctor in Management Science, Padjadjaran University (2021) - Master of Business Administration, Gadjah Mada University, Yogyakarta (2015) - Bachelor of Marine Engineering, Sepuluh Nopember Institute of Technology, Surabaya (2002)	44 Tahun 44 Years Old	Laki-Laki Male

Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

Nomination of the Board of Commissioners and Board of Directors

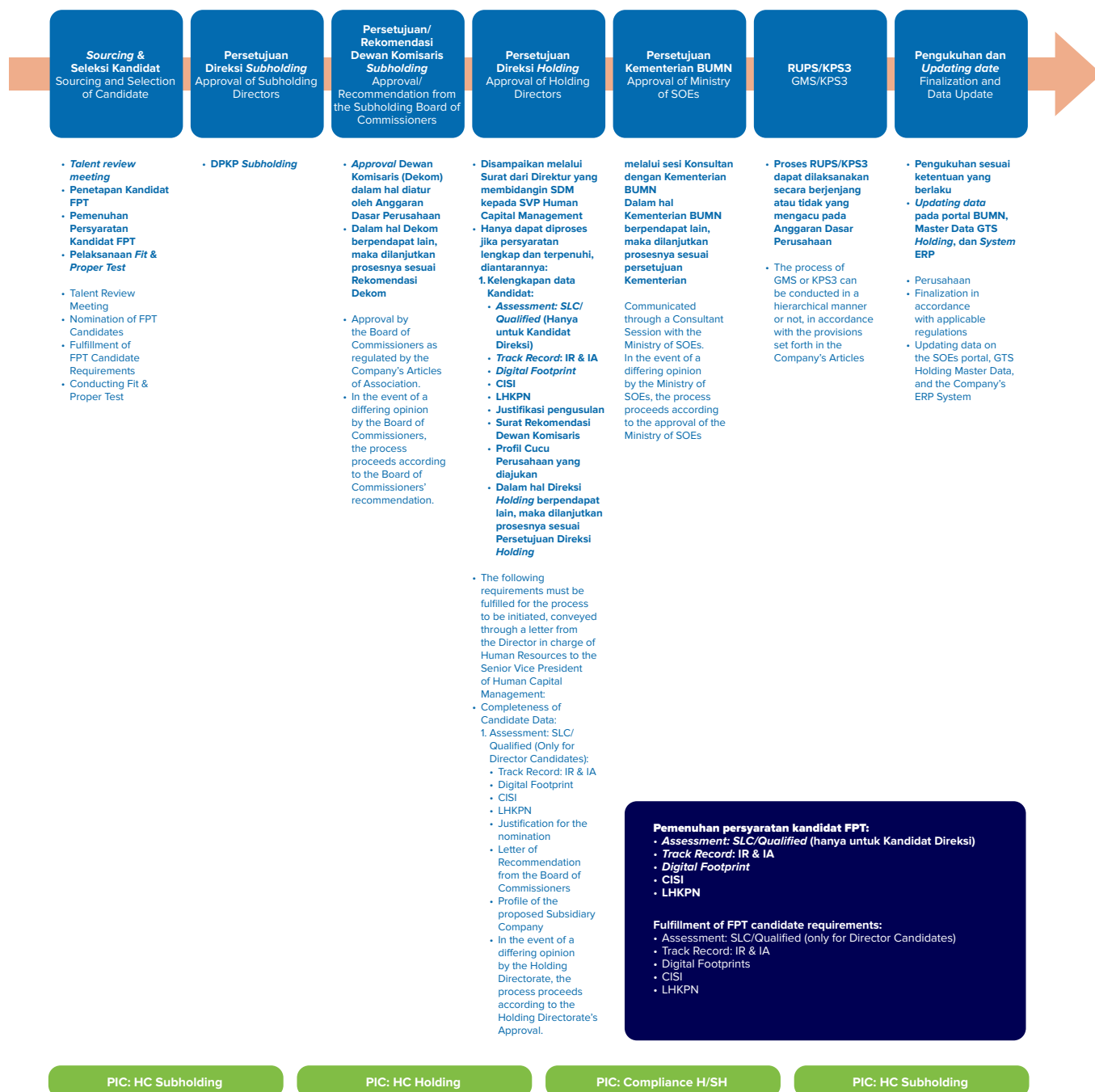
Prosedur Penetapan Calon Direksi / Komisaris Cucu Perusahaan - Top Down Holding

Procedure for Determining Candidate of Board of Directors / Commissioners of Second Tier Subsidiary Companies - Top Down Holding



Prosedur Penetapan Calon Direksi / Komisaris Cucu Perusahaan - Bottop Up

Procedure for Determining Candidate of Board of Directors / Commissioners of Second Tier Subsidiary Companies - Bottom Up



Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Remunerasi Dewan Komisaris Perusahaan diusulkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

The remuneration of the Company's Board of Commissioners is proposed by the Board of Directors after receiving recommendations from the Board of Commissioners, to be determined and approved by the GMS.

Ketentuan dan perhitungan remunerasi Dewan Komisaris Anak Perusahaan ditetapkan berdasarkan Pedoman yang berlaku di Pertamina.

The provisions and calculation of remuneration for the Subsidiary's Board of Commissioners are determined based on the applicable guidelines in Pertamina.

Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi perusahaan diusulkan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disetujui oleh RUPS.

Remuneration of the Board of Directors

The remuneration of the Company's Board of Directors is proposed by the Board of Directors after receiving recommendations from the Board of Commissioners, to be determined and approved by the GMS.

Ketentuan dan dasar perhitungan remunerasi Direksi Anak Perusahaan ditetapkan berdasarkan Pedoman yang berlaku di Pertamina.

The provisions and basis for calculating the remuneration of the Subsidiary's Board of Directors are determined based on the applicable guidelines in Pertamina.

Dalam pemberian remunerasi PET berpedoman pada Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler PT Pertamina Energy Terminal sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 5 Dan 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Penetapan Penghargaan atas Kinerja Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 06 Juni 2023.

In granting remuneration, PET follows the guidelines stated in the Circular Shareholders' Decision of PT Pertamina Energy Terminal, in accordance with Article 10, Paragraphs 5 and 6 of the Company's Articles of Association regarding the Determination of Performance Awards for the 2022 Fiscal Year and Remuneration for the 2023 Fiscal Year of the Directors and Board of Commissioners of the Company, dated November June 6, 2023.

Tunjangan/Fasilitas Allowances/Facilities	Direktur The Board of Directors	Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Gaji/Honorarium	100%	45% dari Gaji Direktur 45% of Director Salary
Tunjangan Perumahan* diberikan apabila Perusahaan tidak menyediakan fasilitas Rumah Jabatan Direksi Housing Allowance* given if the company does not provide facilities for the Board of Directors	Besaran Tunjangan Perumahan termasuk biaya utilitas) bagi anggota Direksi diberikan secara bulanan sebesar 40% dari gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp27.500.000. The amount of Housing Allowance (including utility costs) for members of the Board of Directors is given monthly at 40% of salary, with the maximum provision is Rp. 27,500,000	
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance		20% dari Honorarium 20% of honorarium.
THRK Religious Holiday Allowance	1 x Gaji 1x Salary	1 x Honorarium
Asuransi Purna Jabatan Retirement Insurance	Maksimum 25% dari gaji dalam satu tahun. Maximum 25% of one year salary	Maksimum 25% dari honorarium dalam satu tahun. Maximum 25% of one year honorarium.

Aktual Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi yang diberikan Perusahaan kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun 2023 adalah sebesar sebesar Rp1.521.316.800.

Actual Remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors

The actual remuneration given by the Company to the Board of Directors and Board of Commissioners serving during the year 2023 amounted to Rp1,521,316,800.

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komite Audit mendukung fungsi pengawasan Dewan Komisaris, terutama dalam kaitannya dengan aspek audit. Komite Audit bekerja secara kolektif, bersifat mandiri dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit berperan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit di antaranya:

1. Melakukan penelaahan atas kewajaran dan keandalan informasi serta laporan keuangan yang akan dikeluarkan PET, termasuk kepada laporan keuangan interim, laporan keuangan tahunan, anggaran dan proyek, serta laporan-laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan;
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan aspek-aspek operasional dan investasi, diukur dari kepatuhan terhadap aspek-aspek perencanaan, termasuk dan tidak terbatas kepada peruntukan, spesifikasi, anggaran, tenggang waktu, risiko, dan hasil;
3. Melakukan kajian berkala untuk mengevaluasi kekinian dan efektivitas kebijakan/pedoman yang telah ditetapkan terkait aspek operasional dan investasi PET;
4. Memberikan pendapat independen jika terjadi perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
6. Melakukan penelaahan atas Piagam Komite, rencana kerja, kualitas, kepatuhan, dan independensi pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal, serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan Auditor Internal.

Piagam, Komposisi, dan Independensi Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini mengatur struktur komite, persyaratan keanggotaan, tugas, tanggung jawab dan wewenang, frekuensi rapat, tanggung jawab pelaporan, serta masa tugas Komite Audit. Periode dan masa jabatan anggota Komite Audit selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang hingga 2 (dua) tahun, dengan total masa

The Audit Committee is a supporting organ of the Board of Commissioners that supports the supervisory function, especially concerning audit aspects. The Audit Committee works collectively, independently in carrying out tasks and reporting, and reports directly to the Board of Commissioners. The Audit Committee plays a role in ensuring the effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the external and internal auditor's tasks.

Tasks and Responsibilities of the Audit Committee

The tasks and responsibilities of the Audit Committee include:

1. Reviewing the reasonableness and reliability of information and financial reports to be issued by PET, including interim financial statements, annual financial statements, budgets and projects, and other reports related to financial information;
2. Overseeing the implementation of operational and investment aspects, measured by compliance with planning aspects, including but not limited to allocation, specifications, budgets, timelines, risks, and outcomes;
3. Conducting periodic reviews to evaluate the currency and effectiveness of policies/guidelines established regarding PET's operational and investment aspects;
4. Providing independent opinions in case of differences of opinion between the Board of Directors and the Public Accountant regarding the services provided;
5. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Public Accountants based on independence, scope of assignment, and remuneration;
6. Reviewing the Committee Charter, work plan, quality, compliance, and independence of the internal audit implementation by the Internal Auditor, and overseeing the implementation of follow-up actions by the Board of Directors on internal audit findings.

Charter, Composition, and Independence of the Audit Committee

The Audit Committee has a Charter that serves as a guideline in carrying out its duties and responsibilities. This Charter regulates the committee's structure, membership requirements, duties, responsibilities, and authorities, meeting frequency, reporting responsibilities, and the tenure of the Audit Committee. The tenure and term of office for Audit Committee members are for 3 (three) years and can be extended for up to 2 (two) years, with

jabatan selama lima tahun, dengan tidak mengurangi hak Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Komite Audit terdiri atas ketua yang merupakan Komisaris, serta 1 (satu) orang anggota independen yang berasal dari luar PET. Anggota independen Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga, baik dengan Pemegang Saham Utama, Dewan Komisaris, maupun Direksi, serta telah memenuhi persyaratan keanggotaan Komite Audit sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri BUMN No. Per-12/MBU/2012.

Pernyataan Independensi Komite Audit

Anggota Komite Audit secara pribadi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan Komite Audit untuk bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait GCG

Rapat Komite Audit

Kebijakan dan ketentuan pelaksanaan Rapat Komite Audit diatur dalam Piagam Komite Audit, di antaranya:

1. Rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan (sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris) dengan agenda rapat yang telah disepakati sebelumnya.
2. Ketua Komite Audit dapat mengundang Direksi, Manajemen, dan Pekerja Perusahaan lainnya serta Auditor Eksternal untuk hadir dalam rapat.
3. Pengambilan keputusan dalam Rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Seluruh proses dan hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
5. Komite Audit dapat hadir dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris apabila diundang.

a total tenure of up to five years, without prejudice to the Commissioner's right to dismiss them at any time.

The Audit Committee consists of a chairman who is a Commissioner, and 1 (one) independent member from outside PET. The independent member of the Audit Committee does not have any financial or family relationships with the Major Shareholders, the Board of Commissioners, or the Directors, and has met the membership requirements of the Audit Committee as stipulated in Article 15 of Minister of SOEs Regulation No. Per-12/MBU/2012.

Statement of Independence of the Audit Committee

Members of the Audit Committee personally do not have financial relationships, management relationships, share ownership, and/or family relationships with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Shareholders or relationships with the Company that could affect the Audit Committee's ability to act independently in carrying out its duties and responsibilities as regulated in the relevant GCG provisions.

Audit Committee Meetings

Policies and procedures for conducting Audit Committee meetings are regulated in the Audit Committee Charter, including:

1. Audit Committee meetings are held regularly, at least once a month (consistent with the minimum requirement for Board of Commissioners meetings), with pre-agreed meeting agendas.
2. The Chairman of the Audit Committee may invite Directors, Management, other Company Employees, and External Auditors to attend the meetings.
3. Decision-making in Audit Committee meetings is based on consensus.
4. All processes and outcomes of Audit Committee meetings are documented in meeting minutes and communicated to the Board of Commissioners.
5. The Audit Committee may attend Board of Commissioners meetings or joint meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners if invited.

Komite Nominasi & Remunerasi

Nomination & Remuneration Committee

Sampai dengan 31 Desember 2023 PET belum memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi.

Sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan remunerasi
2. Independensi anggota komite nominasi dan remunerasi
3. Uraian tugas dan tanggung jawab
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan remunerasi
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan remunerasi

PET did have a Nomination and Remuneration Committee until December 31, 2023.

Therefore, there is no information regarding:

1. Names, positions, and brief biographies of the members of the Nomination and Remuneration Committee.
2. Independence of the members of the Nomination and Remuneration Committee.
3. Description of tasks and responsibilities.
4. Description of the implementation of the Nomination and Remuneration Committee activities.
5. Frequency of meetings and attendance rate of the Nomination and Remuneration Committee.

Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee

PET belum memiliki Komite Manajemen Risiko sampai dengan 31 Desember 2023. Sehingga tidak terdapat informasi terkait:

1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite pemantauan risiko
2. Independensi anggota komite pemantauan risiko
3. Uraian tugas dan tanggung jawab
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite pemantauan risiko
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite pemantauan risiko

PET did not have a Risk Management Committee until December 31, 2023. Therefore, there is no information regarding:

1. Names, positions, and brief biographies of the risk monitoring committee members.
2. Independence of the risk monitoring committee members.
3. Description of tasks and responsibilities.
4. Description of the implementation of the risk monitoring committee activities.
5. Frequency of meetings and attendance rate of the risk monitoring committee.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan bertugas sebagai penghubung (*liaison officer*) antara Perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik eksternal maupun internal. Sekretaris Perusahaan dipilih dan diangkat oleh Direksi dan bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi, tetapi dalam mengambil tindakan dengan mempertimbangkan saran-saran dari Dewan Komisaris. Sekretaris Perusahaan harus memiliki semua informasi yang penting mengenai Perusahaan melalui sistem informasi yang layak yang ditetapkan oleh Direksi. Mengkoordinasikan pengembangan dan penerapan praktek-praktek GCG dan memastikan bahwa Laporan Tahunan Perusahaan telah mencantumkan penerapan GCG.

Profil Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2023, tidak ada Sekretaris Perusahaan, sehingga tidak ada informasi mengenai sekretaris perusahaan.

Sekretaris Perusahaan bertugas:

1. Memastikan bahwa Direktur dan Perusahaan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Melaksanakan kegiatan untuk mendukung penerapan GCG;
3. Penghubung (*liaison officer*) antara Direktur dengan Komisaris, (*Stakeholders*), serta mewakili Perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
4. Menyediakan informasi untuk kebutuhan Direktur dalam rangka pengambilan keputusan;
5. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan jadwal kegiatan Direktur dalam melaksanakan fungsi-fungsi serta kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
6. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan berkaitan dengan laporan-laporan/kegiatan rutin Direktur yang akan disampaikan kepada pihak luar;
7. Mempersiapkan bahan-bahan/materi yang diperlukan berkaitan dengan hal-hal yang harus didapatkan keputusan Direktur berkaitan dengan pengurusan Perusahaan;
8. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direktur berkaitan dengan laporan-laporan rutin Direktur dalam mengelola Perusahaan antara lain RKAP, laporan tahunan, laporan triwulan, laporan hasil pemeriksaan internal audit, dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan;
9. Mempersiapkan rapat dalam lingkungan Direksi, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*);

The Corporate Secretary serves as the liaison officer between the Company and external and internal stakeholders. The Corporate Secretary is selected and appointed by the Board of Directors and reports directly to the Board of Directors, but takes actions considering the advice from the Board of Commissioners. The Corporate Secretary must have all important information about the Company through a proper information system established by the Board of Directors. The Corporate Secretary coordinates the development and implementation of corporate governance practices and ensures the Company's Annual Report includes the implementation of corporate governance.

Corporate Secretary Profile

In 2023, there was no Corporate Secretary, therefore there is no information available about the Corporate Secretary.

Duties of the Corporate Secretary:

1. Ensures the Board of Directors and the Company comply with legal regulations and apply GCG principles;
2. Conducts activities to support the implementation of corporate governance.
3. Serves as a liaison officer between the Board of Directors, Board of Commissioners, stakeholders, and represents the Company in communicating with the public.
4. Provides information for the Directors' decision-making needs.
5. Coordinates and organizes the Board of Directors' schedule in carrying out their functions and necessary equipment for activities.
6. Prepares materials related to routine reports/activities of the Board of Directors to be presented to external parties.
7. Prepares materials/information related to matters requiring the Directors' decisions regarding Company management.
8. Prepares materials required for the Board of Directors' duties related to routine reports on managing the Company, including RKAP, the annual Report, quarterly reports, internal audit findings, and other necessary reports.
9. Prepares meetings within the Board of Directors, including meeting briefings.

10. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang diundang;
11. Menyiapkan dan mengoordinasikan agenda rapat dengan pihak-pihak yang diundang;
12. Menyiapkan dan mengirimkan undangan rapat kepada pihak-pihak yang diundang dalam rapat;
13. Melakukan konfirmasi mengenai waktu, tempat, kehadiran serta hal-hal lain yang dipandang perlu demi kelancaran rapat;
14. Menghadirkan rapat Direksi dan membuat risalah rapat Direksi;
15. Memberikan pelayanan kepada Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) atas setiap permintaan informasi yang berkaitan dengan kondisi Perusahaan;
16. Membuat dan memperbarui secara berkala daftar khusus dan daftar Pemegang Saham;
17. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan RUPS;
18. Menindaklanjuti setiap keputusan Direktur dengan jalan mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum- forum pengambilan keputusan beserta penanggung jawabnya dan memantau serta mengecek tahap kemajuan pelaksanaan hasil rapat; dan
19. Menyelenggarakan kegiatan di bidang kesekretariatan dalam lingkungan Direksi dan Perusahaan serta pengadministrasiannya.

Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2023, tidak ada Sekretaris Perusahaan, sehingga tidak ada informasi mengenai pelatihan Sekretaris Perusahaan.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Pada tahun 2023, tidak ada Sekretaris Perusahaan, sehingga tidak ada informasi mengenai tugas Sekretaris Perusahaan.

10. Prepares and sends meeting invitations to invited parties.
11. Prepares and coordinates meeting agendas with the invited parties.
12. Prepares and sends meeting invitations to the invited parties
13. Confirms the meeting time, venue, attendance, and other necessary details for smooth meetings.
14. Attends Board of Directors meetings and prepares minutes of meetings.
15. Provides services to stakeholders regarding any requests for information related to the Company's condition.
16. Creates and periodically updates special lists and lists of shareholders.
17. Responsible for organizing General Meetings of Shareholders (GMS).
18. Follow up on every decision made by the Board of Directors by recording each decision made in decision-making forums along with the responsible parties, and monitor and check the progress of implementing meeting outcomes; and
19. Carries out secretarial activities within the Board of Directors and the Company and handles administrative tasks.

Training and/or improvement of the Corporate Secretary's competence

In 2023, there was no Corporate Secretary, thus there is no information regarding training of Corporate Secretary

Implementation of Corporate Secretary's duties

In 2023, there was no Corporate Secretary, thus there is no information regarding duties of Corporate Secretary

Internal Audit

Internal Audit

Internal Audit adalah fungsi yang memberikan jasa *assurance* dan *consulting* secara independen dan objektif dengan melakukan pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola Perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal untuk memberikan nilai tambah kepada Perusahaan.

Fungsi Internal Audit memiliki tanggung jawab salah satunya adalah terkait dengan aktivitas pengendalian internal Perusahaan, dibentuk dengan mengacu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Di dalam Perusahaan, kedudukan Fungsi Internal Audit bertujuan untuk membantu Perusahaan untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien dengan cara melakukan evaluasi dan merekomendasikan perbaikan efektivitas tata kelola Perusahaan, manajemen risiko, dan pengendalian internal dan membantu manajemen Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan *advice*, *insight*, dan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Perusahaan.

Merujuk kepada SK no. Kpts-002/PKT0000/2022-S8 tanggal 28 April 2022 PET memiliki organisasi Internal Audit yang melapor langsung kepada Direktur PT PET. Namun posisi tersebut sepanjang tahun 2023 belum terisi, sehingga dalam prosesnya tugas Internal Audit PET dilaksanakan oleh fungsi Internal Audit dari PT Pertamina International Shipping (PIS), selaku induk Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya Internal Audit PIS yang melakukan tugas untuk Internal Audit PET menjalankan kegiatan sesuai Piagam Internal Audit PIS dengan lingkup PET sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* di seluruh unit kerja Perusahaan.
2. Memastikan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi diterapkan secara memadai.
3. Menyusun dan mengusulkan program kerja pengawasan tahunan/*Annual Audit Plan* (AAP) yang mencakup antara lain objek penugasan, jadwal penugasan, anggaran, dan resources yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan Direktur Utama dan Komisaris Utama (termasuk PT PET sebagai lingkup).
4. Melakukan *review* AAP yang sedang berjalan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan proses bisnis dan risiko perusahaan, serta lingkup dan tujuan penugasan.

Internal Audit is a function that provides independent and objective assurance and consulting services by taking a systematic and disciplined approach to evaluate and improve corporate governance, risk management, and internal controls to add value to the Company.

Internal Audit Function has responsibilities, one of which is related to the Company's internal control activities, established in accordance with Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Minister of SOEs Minister's Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on the Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities. The position of Internal Audit aims to assist the Company in achieving its objectives effectively and efficiently by evaluating and recommending improvements to the effectiveness of the Company's corporate governance, risk management, and internal control. It also assists the Company's management and other stakeholders by providing advice, insights, and useful recommendations to enhance the effectiveness and efficiency of the Company.

Referring to Decree Kpts-002/PKT0000/2022-S8 dated April 28, 2022 PET has an Internal Audit organization that reports directly to the Director of PT PET. However, the position has not been filled throughout 2023, so in the process the internal audit function performed by Internal Audit Function PT Pertamina International Shipping (PIS).

In its implementation Internal audit PIS performing the tasks of Internal auditing PET carries out activities in accordance with the Charter of internal auditing PIS with the scope of PET as follows:

1. Implementation of supervisory activities through assurance and consulting in the entire unit of work of the Company.
2. Ensure the aspects of integrity, objectivity, confidentiality, and competence are properly implemented.
3. Preparation and proposal of the annual supervision programs/*Annual Audit Plan* (AAP) which includes, assignment objects, regulatory schedules, budgets and resources, resources required to obtain approval for the purposes of the President Director and President Commissioner (including PT PET as a scope)
4. Conduct an ongoing AAP review, to ensure its compatibility with business processes and corporate risks, as well as the scope and objectives of the assignment

5. Mengkomunikasikan keterbatasan sumber daya pelaksanaan penugasan, perubahan AAP, dan perubahan arah kebijakan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama PIS.	5. Communicate the resource constraints of the execution of assignments, changes in the AAP, and changes in policy direction to the President Director and President Commissioner of PIS.
6. Memastikan setiap penugasan dilakukan dengan supervisi yang memadai, didukung dengan kertas kerja yang memadai, dan rekomendasi, advice, serta insight yang disampaikan dapat diaplikasikan oleh <i>Auditee</i> .	6. Ensure each assignment is carried out with adequate supervision, supported by adequate working papers, and the recommendations, advice, and insights submitted can be applied by the Auditee.
7. Memastikan Fungsi Internal Audit secara kolektif memiliki/memperoleh pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang memadai.	7. Ensure the Internal Audit Function collectively has/acquires adequate knowledge, skills and competence.
8. Melaksanakan koordinasi pengelolaan kegiatan Internal Audit yang tidak terbatas pada kegiatan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> dengan Internal Subholding, Anak Perusahaan Anggota Subholding, dan Anak Perusahaan Services (termasuk PET).	8. Coordinate the management of Internal audits activities not limited to assurance and consulting activities with Internal Subholding, Sub-holding member subsidiaries, and subsidiary services (including PET).
9. Menguji dan mengevaluasi efektivitas pengendalian dan manajemen risiko.	9. Test and evaluate the effectiveness of control and risk management.
10. Melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait.	10. Implement compliance checks with relevant legal regulations.
11. Mengidentifikasi alternatif perbaikan dan peningkatan efisiensi operasional perusahaan.	11. Identify alternative improvements and increases in the company's operational efficiency.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Komite Audit.	12. Implement coordination with the Audit Committee.
13. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direktur Utama dan Direktur lainnya yang relevan di PIS, termasuk Direktur PET.	13. Report the results of the supervision to the President Director and other relevant directors in the PIS, including the PET Director.
14. <i>Monitoring</i> pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal, eksternal dan institusi pengawasan lainnya dan melaporkan secara periodik kepada Direktur Utama dan Komite Audit PIS dan Direktur PET.	14. Monitor the implementation of audit results follow-up to internal, external and other supervisory audits and report periodically to the President Director and the PIS Audit Committee and the PET Director.
15. Melaksanakan koordinasi kegiatan pengawasan dengan auditor eksternal.	15. Coordinate the monitoring activities with external auditors.
16. Melaksanakan koordinasi dengan Fungsi Pengawas Perusahaan dalam melakukan tindak lanjut atas pengaduan/penyungkapan melalui <i>Whistleblowing System</i> (WBS) dan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	16. Coordinate with the Corporate Supervisory Functions in carrying out follow up on complaints/disclosures through the Whistleblowing System (WBS) and public or other parties complaint in accordance with the prevailing provisions.
17. Membantu pelaksanaan audit investigasi terhadap masalah yang dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan di PT Pertamina International Shipping dan Anak Perusahaan/Anggota Subholding Integrated Marine Logistics.	17. Assist in the auditing activities of investigations into issues that could cause losses to the Company at the PT Pertamina Shipping and Subsidiaries/Members of Integrated Marine Logistics.
18. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan peningkatan mutu (<i>improvement program</i>) kegiatan Internal Audit.	18. Implement evaluation and improvement of quality (improvement program) activities of Internal Audit.
19. Melaporkan hasil kegiatan pengawasan kepada Dewan Komisaris cq Komite Audit PIS.	19. Report the results of supervisory activities to the Board of Commissioners and the PIS Audit Committee.
20. Melaksanakan penugasan lain yang diamanatkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	20. Implements other assignments mandated by the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
21. Berkoordinasi dengan <i>Chief Audit Executive</i> PT Pertamina (Persero) dalam pelaksanaan kegiatan Internal Audit yang dikelola secara tersentralisasi di Holding sesuai dengan Pengelolaan Interaksi Korporasi antara PT Pertamina (Persero) dengan Subholding dan Anggota Sub Holding Integrated Marine Logistics.	21. Coordinate with the Chief Executive Audit of PT Pertamina (Persero) in the implementation of internal audit activities managed centrally in the Holding in accordance with the Management of Corporate Interaction between PT Pertamina (Persero) with the Subholding and the Members of the Sub Holding Integrated Marine Logistics.

Pelaksanaan kegiatan Internal Audit

Tahun 2023 kegiatan Internal Audit PET yang dilaksanakan oleh Internal Audit PIS meliputi kegiatan *Assurance* dan *Consulting* baik dalam AAP (*Audit Annual Plan*) maupun Non-AAP, sebagai berikut:

Audit Annual Plan:

1. Konsultasi Sinergi *Core Business* Anak Perusahaan Pertamina Group (d/h PET)
2. Audit atas Implementasi TKDN (PET masuk ke dalam lingkup Audit)

Non-AAP:

Audit Kinerja *Losses* di Terminal LPG Tanjung Sekong PT Pertamina Energy Terminal

Implementation of Internal Audit Activities

In 2023 Internal PET Audit activities carried out by Internal Audit PIS include *Assurance* and *Consulting* activities in both AAP (*Annual Plan Audit*) and Non-AAP, as follows:

Annual Audit Plan:

1. Consultation on Synergy *Core Business* of First-tier Subsidiary Company (d/h PET)
2. Audit on Implementation of TKDN (PET falls into the scope of audit)

Non-AAP:

Audit of *Losses* Performance in LPG Terminal Tanjung Sekong PT Pertamina Energy Terminal



Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Direksi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern secara efektif yang bertujuan untuk:

1. Menjaga dan mengamankan aset;
2. Menjamin tersedianya informasi dan laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;
3. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan dan ketentuan intern;
4. Mengurangi dampak keuangan atau dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan (*fraud*), dan pelanggaran aspek kehati-hatian;
5. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya; dan
6. Meningkatkan efektivitas budaya Risiko pada organisasi BUMN secara menyeluruh.

SPI pada PET dirancang dan diselenggarakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan anggota manajemen lainnya serta wajib dilaksanakan oleh seluruh perwira PET.

Implementasi SPI merupakan proses penyatuan tindakan dan kegiatan secara berkesinambungan untuk memberi keyakinan bahwa tujuan Perusahaan telah terealisasi melalui kinerja yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Pengendalian Internal

Penerapan SPI di Perusahaan dimaksudkan untuk memberi keyakinan fokus tujuan dan sasaran kegiatan Perusahaan atas:

1. Operasi, yaitu kegiatan operasi dilaksanakan sesuai prinsip efektif dan efisien dengan menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan.
2. Pelaporan, yaitu membuat dan menyajikan laporan keuangan yang bersifat andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Based on the Regulation of the Minister of SOEs Number PER-2/MBU/03/2023 regarding Guidelines for Corporate Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the Board of Directors is required to implement an effective Internal Control System with the following objectives:

1. Safeguarding and securing assets;
2. Ensuring the availability of accurate, complete, functional, and timely financial and management information and reports;
3. Enhancing compliance with laws and regulations, as well as internal policies and provisions;
4. Reducing financial impacts or losses, deviations including fraud, and violations of prudence aspects;
5. Increasing organizational effectiveness and improving cost efficiency; and
6. Enhancing the effectiveness of the Risk culture within the SOEs organization as a whole.

The Internal Control System (SPI) at PET is designed and organized by the Board of Commissioners, the Board of Directors, and other management members, and must be implemented by all PET officers.

The implementation of SPI is a continuous integration process of actions and activities to provide assurance that the Company's objectives have been realized through effective and efficient performance, the reliability of financial reporting, asset safeguarding, and compliance with laws and regulations.

Objectives of Internal Control

The implementation of the ICS in the Company aims to provide assurance regarding the focus on the Company's goals and objectives in:

1. Operations, ensuring the operational activities are carried out effectively and efficiently, utilizing all resources available to the company.
2. Reporting, creating and presenting financial reports that are reliable, transparent, and accountable.

Pengendalian Keuangan dan Operasional

SPI yang diterapkan di Perusahaan mencakup:

- 1. Pengendalian Keuangan
Sistem Pengendalian internal dalam hal keuangan dilakukan guna memberikan jaminan kebenaran informasi keuangan, efektivitas, dan efisiensi proses pengelolaan Perusahaan, serta aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.
- 2. Pengendalian Operasional

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan COSO

Pengendalian dalam kegiatan operasional yang meliputi kegiatan operasi maupun investasi agar tercapainya target Perusahaan yang terbebas dari kecurangan dan sesuai dengan peraturan di dalam Perusahaan.

Penerapan Sistem Pengendalian Internal PET telah merujuk pada aspek-aspek yang disyaratkan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) IC-Integrated Framework* melalui kerangka COSO. PET telah mengadaptasi 5 komponen dan 17 prinsip yang ditentukan dalam kerangka COSO serta menyesuaikan penerapan Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka COSO. Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan kerangka COSO bertujuan agar PET mampu menentukan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perusahaan, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, mengutamakan kepercayaan pelaporan, dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.

Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Tahun 2023

Pada tahun 2023, belum ada informasi terkait efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal.

Financial and Operational Controls

The ICS implemented in the company includes:

- 1. Financial Controls
Internal control systems in financial matters are implemented to provide assurance regarding the accuracy of financial information, the effectiveness and efficiency of the company’s management processes, and compliance with relevant laws and regulations.
- 2. Operational Controls

Alignment of Internal Control System with COSO

Controls in operational activities, including operational and investment activities, are implemented to achieve the Company’s targets, free from fraud, and in compliance with internal company regulations.

The implementation of the PET Internal Control System has referred to the aspects required by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) IC-Integrated Framework through the COSO framework. PET has adopted the 5 components and 17 principles defined in the COSO framework and adjusted the implementation of the Internal Control System accordingly. The alignment of the Internal Control System with the COSO framework aims to enable PET to determine objectives aligned with the company’s vision and mission, ensure the effectiveness and efficiency of resource utilization, prioritize trustworthy reporting, and comply with applicable laws and regulations.

Effectiveness of the Implementation of the Internal Control System in 2023

In 2023, there was no information regarding effectiveness of the implementation of internal control system.

Manajemen Risiko

Risk Management

Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur, sistem dan metodologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis/ mengevaluasi, mengelola dan mengkaji ulang risiko yang timbul dari aktivitas bisnis Perusahaan. Pengelolaan manajemen risiko Perusahaan bertujuan untuk menghindari atau meminimalkan potensi kerugian (*potential loss*), mengoptimalkan peluang (*opportunity*), mempertahankan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang sehat, mengantisipasi perubahan lingkungan yang pesat, dan mengintegrasikan strategi korporat. Manajemen Risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan dilakukan oleh Direksi dan Manajemen perusahaan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan *memonitor* risiko usaha yang dihadapi perusahaan dimasa yang akan datang.

Manajemen risiko yang diterapkan mencakup pada risiko yang dihadapi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Risiko utama yang dihadapi timbul dari instrumen operasional, seperti kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, kebocoran dan tumpahan minyak di lokasi kerja, menurunnya kualitas baku mutu *fresh water*, *losses volume* produk melebihi toleransi yang ditetapkan di sepanjang jalur suplai dan distribusi, ketidakhandalan sarfas saat melakukan operasional *discharge* di terminal, menurunnya penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dan Risiko Bisnis dengan *Freepoint* tidak jalan.

Fungsi utama dari manajemen risiko yang dijalankan Perusahaan merupakan mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan tata cara Perusahaan. Secara rutin, Perusahaan menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan dinamika bisnis Perusahaan dan praktik pasar terbaik.

Pedoman berlaku untuk aktivitas atau kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dan menjadi acuan Anak Perusahaan. Pedoman ini mencakup antara lain:

1. Kebijakan Manajemen Risiko.
2. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi terkait.
3. Prinsip Manajemen Risiko.
4. Kerangka Manajemen Risiko.
5. Proses Manajemen Risiko.
6. Penerapan Kebijakan Manajemen Risiko

Risk Management is a series of procedures, systems, and methodologies implemented to identify, analyze/ evaluate, manage, and review risks arising from the Company's business activities. The Company's risk management aims to avoid or minimize potential losses, optimize opportunities, maintain a conducive work environment, enhance shareholder value, improve sound Corporate Governance (GCG), anticipate rapid environmental changes, and integrate corporate strategies. Risk Management is an integral part of good corporate governance and is carried out by the Board of Directors and Company Management to identify, evaluate, manage, and monitor business risks the Company may face in the future.

The applied risk management covers risks encountered in executing business activities. Major risks faced include operational incidents such as work accidents, fires, explosions, leaks, and oil spills at work sites; deterioration in the quality of fresh water standards; product volume losses exceeding the set tolerance levels along the supply and distribution chain; unreliability of infrastructure during operational discharge at terminals; declining sales of bottled drinking water (AMDK); and business risks with *Freepoint* becoming non-operational.

The primary function of the Company's risk management is to identify all key risks, measure these risks, and manage risk positions according to the Company's policies and procedures. The Company regularly reviews its risk management policies and systems to align with business dynamics and best market practices.

The guidelines apply to activities or business operations related to the Company's interests and serve as a reference for Subsidiaries. These guidelines include, among others:

1. Risk Management Policies.
2. Duties and Responsibilities of Related Functions.
3. Risk Management Principles.
4. Risk Management Framework.
5. Risk Management Processes.
6. Implementation of Risk Management Policies.

Kebijakan Manajemen Risiko

Dasar pelaksanaan atau pengelolaan risiko perusahaan tertuang dalam Pedoman Manajemen Risiko PT Pertamina Energy Terminal No. A11-001/PET0600/2023-S9 tanggal 07 Oktober 2023. Pedoman manajemen risiko senantiasa ditinjau dan diperbaharui.

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Fungsi manajemen risiko secara terintegrasi dikelola oleh Fungsi *Finance & Asset* yang disupervisi Direktur. Secara spesifik pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab dari *Manager Finance & Asset*. Fungsi *Finance & Asset* dikelola oleh pimpinan tertinggi fungsi dengan jabatan Manager dan terbagi atas 3 sub-fungsi yang terdiri dari *Controller*, *Treasury* dan *Asset Management*, dan dalam hal ini pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab sub-fungsi *Controller*.

Strategi Penerapan Manajemen Risiko

Strategi penerapan manajemen risiko yang diterapkan Perusahaan mencakup:

1. Penetapan Batas Toleransi Risiko.
2. Penyusunan Risk Profile termasuk di dalamnya pembuatan skala prioritas dan penetapan rencana Risk Treatment (Penanganan Risiko).
3. Pemantauan dan pelaporan pengelolaan risiko.
4. Pengembangan budaya risiko.
5. Penyediaan infrastruktur Manajemen Risiko.

Mekanisme Manajemen Risiko

Dalam rangka membangun kapabilitas pengelolaan risiko pada proses bisnis, Perusahaan menggunakan pendekatan 3LOD (*Three Lines of Defence*), dengan menerapkan mekanisme pertahanan secara berlapis dalam mengelola risiko. Lini pertahanan yang pertama terletak pada setiap fungsi sebagai *Risk Owner*. Lini pertahanan kedua adalah pada unit manajemen risiko dan lini pertahanan ketiga berada pada fungsi Internal Audit. Berikut merupakan gambar penerapan konsep 3LOD.

Risk Management Policies

The basis for implementing or managing the company's risks is outlined in the Risk Management Guidelines of PT Pertamina Energy Terminal No. A11-001/PET0600/2023-S9 dated October 7, 2023. These risk management guidelines are continuously reviewed and updated.

Risk Management Working Unit

The integrated risk management function is managed by the Finance & Asset Function supervised by the Director. Specifically, risk management is the responsibility of the Manager of Finance & Asset. The Finance & Asset Function is led by the highest function leader with the position of Manager and is divided into three sub-functions consisting of Controller, Treasury, and Asset Management, with risk management being the responsibility of the Controller sub-function.

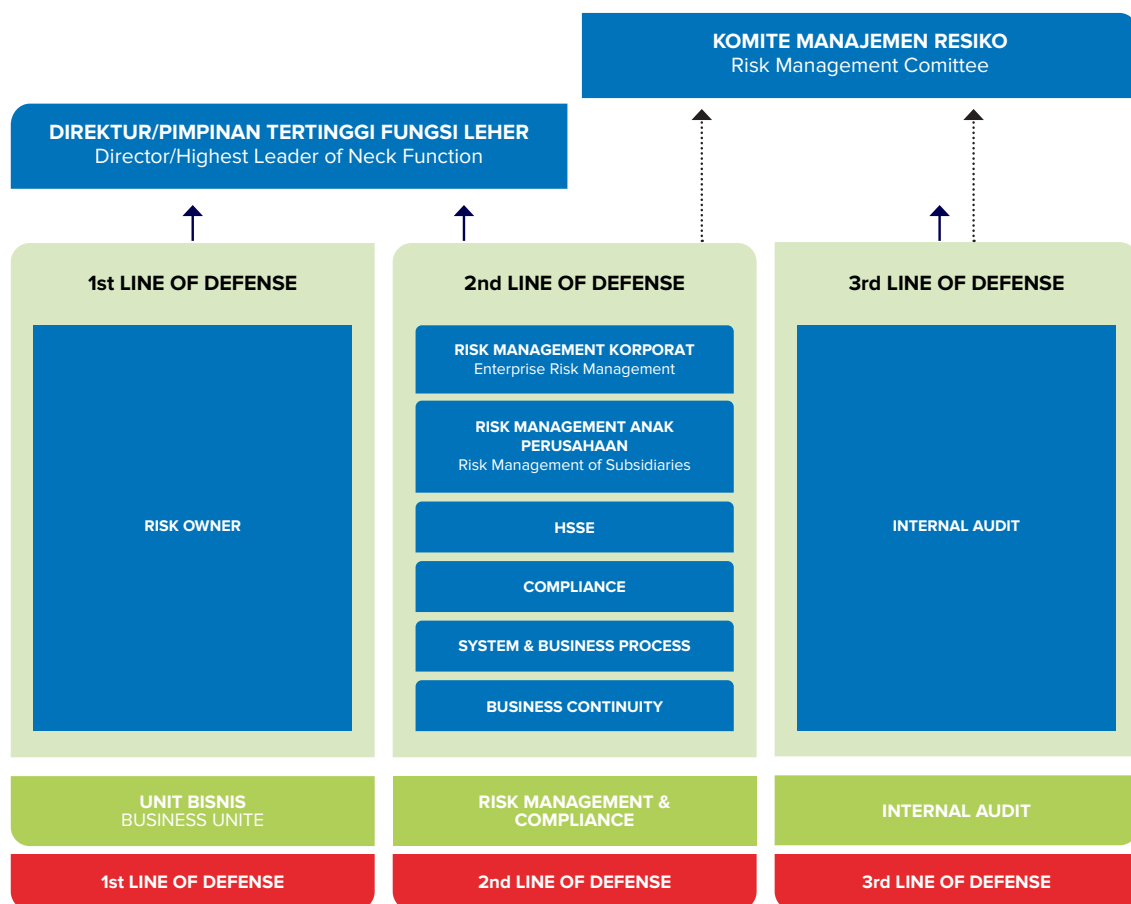
Risk Management Implementation Strategy

The Company's risk management implementation strategy includes:

1. Setting Risk Tolerance Limits.
2. Developing a Risk Profile, including creating a priority scale and establishing a Risk Treatment Plan.
3. Monitoring and reporting risk management.
4. Developing a risk culture.
5. Providing Risk Management infrastructure.

Risk Management Mechanism

In building risk management capabilities in business processes, the Company uses the 3LOD (Three Lines of Defence) approach, implementing layered defense mechanisms in managing risks. The first line of defense lies with each function as the Risk Owner. The second line of defense is the risk management unit, and the third line of defense is the Internal Audit function. Below is an illustration of the implementation of the 3LOD concept



Proses manajemen risiko bertujuan untuk melindungi Perusahaan pada setiap kegiatan dan atau transaksi usaha, baik itu aktivitas *ongoing business* ataupun aktivitas investasi. Aktivitas *ongoing business* merupakan serangkaian kegiatan PET yang telah berjalan secara rutin sesuai dengan proses bisnis Perusahaan berdasarkan prinsip kelangsungan usaha. Sedangkan aktivitas investasi adalah serangkaian kegiatan penggunaan sumber daya dalam rangka meningkatkan nilai Perusahaan. Proses manajemen risiko *Ongoing Business* maupun Investasi sesuai aktivitas usaha PET yaitu:

1. *Scope, Context & Criteria* (Ruang Lingkup, Konteks dan Kriteria).
2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko).
3. *Risk Treatment* (Penanganan Risiko).
4. *Communication & Consultation* (Komunikasi dan Konsultasi).
5. *Monitoring & Review* (Pemantauan dan Tinjauan).
6. *Recording & Reporting* (Pencatatan dan Pelaporan)

Peningkatan Kesadaran Risiko Melalui Pengembangan Kompetensi Manajemen Risiko

Perusahaan berupaya meningkatkan kompetensi serta sertifikasi profesional di bidang Manajemen Risiko guna meningkatkan pengembangan budaya sadar risiko (*risk consciousness*) dan berbagi pengetahuan (*sharing knowledge*). Kegiatan pelatihan terkait manajemen risiko yang dilaksanakan tahun 2023 diantaranya:

The risk management process aims to protect the Company in every business activity and transaction, whether it involves ongoing business activities or investment activities. Ongoing business activities are a series of routine PET activities conducted in accordance with the Company's business processes based on the principle of business continuity. Investment activities, on the other hand, involve the use of resources to increase the Company's value. The risk management process for both ongoing business and investment activities aligns with PET's business activities and includes the following steps:

1. *Scope, Context & Criteria* (scope, context, and criteria for risk management).
2. *Risk Assessment*
3. *Risk Treatment*
4. *Communication & Consultation*
5. *Monitoring & Review*
6. *Recording & Reporting*

Enhancing Risk Awareness Through Risk Management Competency Development

The Company strives to enhance competency and professional certification in Risk Management to foster a culture of risk awareness and knowledge sharing. The risk management training activities conducted in 2023 include:

Pelatihan Terkait Manajemen Risiko Tahun 2023
Risk Management Training in 2023

Materi Pendidikan dan Pelatihan Educational and Training Materials	Tempat/Tanggal Location/Date	Sasaran Peserta Target Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Kesimpulan Agenda Agenda Summary
<i>Certified Risk Profesional (CRP) Batch I</i>	Cirebon, 13 – 15 Maret 2023 Cirebon, March 13-15, 2023	PWTT PET	5	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>
<i>Certified Risk Profesional (CRP) Batch II</i>	Bandung, 08 – 10 Mei 2023 Bandung, May 8-10, 2023	PWTT PET	6	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>
<i>Certified Risk Profesional (CRP) Batch III</i>	Cirebon, 12 – 14 Juni 2023 Cirebon, June 12-14, 2023	PWTT PET	5	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>
<i>Certified Risk Profesional (CRP) Batch IV</i>	Jakarta, 04 – 07 September 2023 Jakarta, September 04-07, 2023	PWTT PET	6	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>
<i>Certified Risk Profesional (CRP) Batch V</i>	Jakarta, 11 – 14 September 2023 Jakarta, September 11-14, 2023	PWTT PET	10	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>
<i>Certified Risk Profesional (CRP) Batch VI</i>	Jakarta, 07 – 10 November 2023 Jakarta, November 07-10, 2023	PWTT PET	7	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>
<i>Certified Risk Profesional (CRP) BOD BOC SH IML</i>	Jakarta, 11 Desember 2023 Jakarta, December 11, 2023	BOD PET	1	<i>Upskilling Enterprise Risk Management</i>

Profil Risiko Perusahaan dan Mitigasi Risiko

Perusahaan melakukan pengelolaan terhadap risiko-risiko yang diklasifikasikan menjadi beberapa risiko, yaitu *Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk*, serta *Reporting Risk*. Berikut uraian terkait jenis dan mitigasi risiko :

Company Risk Profile and Risk Mitigation

The Company manages various risks classified into several categories: Governance Risk, Strategy and Planning Risk, Finance Risk, Operational/Infrastructure Risk, Compliance Risk, and Reporting Risk. Below is an overview of the types of risks and their mitigations:

Jenis Risiko Perusahaan dan Mitigasinya

Company Risk Type and Mitigation

Jenis Risiko Risk Type	Operational-Sales & Marketing-Sales Strategy
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Explanation	Risiko Bisnis dengan <i>Freepoint</i> tidak jalan Business Risk with <i>Freepoint</i> becoming non-operational.
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	- Melakukan Negosiasi dengan <i>Freepoint</i>; - Melanjutkan kontrak/bisnis dengan <i>Freepoint</i> <i>Negotiate with Freepoint</i> <i>Continue Contract/Business with Freepoint</i>

Jenis Risiko Risk Type	Operational-HSSE-Safety
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Explanation	Kecelakaan kerja, kebakaran, ledakan, kebocoran dan tumpahan minyak di lokasi kerja Work Accidents, Fires, Explosions, Leaks, and Oil Spills at Work Sites
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	- Meningkatkan budaya HSSE dan kompetensi pekerja, Kontraktor dan Sub kontraktor terhadap pengelolaan aspek HSSE; - Melakukan improvement pada sistem manajemen HSSE dan implementasinya; <i>Monitoring</i> pengelolaan <i>major accident barrier management</i>; <i>Monitoring, Audit & Evaluasi full cycle Contractor Safety Management System (CSMS)</i> terhadap setiap pekerjaan <i>medium to high risk</i>; <i>Maintenance</i> rutin atas sarfas terminal BBM & LPG; <i>Maintenance</i> dan <i>Performance</i> peralatan penanggulangan pencemaran minyak. - Enhance HSSE Culture and Competence of employees, contractors, and subcontractors in managing HSSE aspects. - Improve HSSE Management Systems and their implementation. - Monitor Major Accident Barrier Management. - Conduct Full Cycle Monitoring, Auditing, and Evaluation of the Contractor Safety Management System (CSMS) for all medium to high-risk jobs. - Routine Maintenance of Fuel & LPG Terminal Facilities - Maintain and Monitor the Performance of Oil Spill Response Equipment.

Jenis Risiko Risk Type	Operational-Operational Excellence-Operational Performance
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Explanation	Menurunnya kualitas baku mutu <i>fresh water</i> <i>Decline in Fresh Water Quality Standards</i>

Jenis Risiko Risk Type	Operational-Operational Excellence-Operational Performance
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	- Usulan revitalisasi sarfas <i>supply fresh water</i>; - Usulan penambahan jalur pipa; - Melakukan reporting uji mutu baku <i>fresh water</i>. <i>Propose Revitalization of Fresh Water Supply Facilities.</i> <i>Propose Addition of Pipeline Routes.</i> <i>Conduct and Report Fresh Water Quality Testing.</i>

Jenis Risiko Risk Type	Operational-Operational Excellence-Operational Performance
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Explanation	<i>Losses volume</i> produk melebihi toleransi yang ditetapkan di sepanjang jalur suplai dan distribusi Product Volume Losses Exceeding Tolerance Levels Along the Supply and Distribution Chain
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	<i>Maintenance</i> rutin atas sarfas terminal BBM & LPG; - Koordinasi dengan Dinas Metrologi untuk kalibrasi alat ukur di tangki timbun dan perbaikan alat ukur; <i>Upskilling</i> Petugas Pelaksana (<i>Quantity</i>); - Penyusunan SOP/STK tentang Pengendalian Susut Minyak dan Arus Minyak Korporat - Routine Maintenance of Fuel and LPG Terminal Facilities. - Coordinate with the Metrology Department for Calibration of Measurement Instruments in Storage Tanks and Repair of Measurement Instruments. - Upskilling of Implementation Officers (Quantity). - Develop SOP/STK on Oil Loss Control and Corporate Oil Flow.

Jenis Risiko Risk Type	Operational-Operational Excellence-Operational Performance
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Explanation	Ketidakhandalan Sarfas saat melakukan <i>Operational Discharge</i> di Terminal Unreliability of Facilities During Operational Discharge at the Terminal
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	<i>Maintenance</i> atas sarfas terminal BBM & LPG sesuai prosedur; - Meningkatkan kompetensi pekerja, Kontraktor dan Sub kontraktor terhadap pengelolaan aspek HSSE; - Maintenance of Fuel and LPG Terminal Facilities According to Procedures. - Enhance Competency of Employees, Contractors, and Subcontractors in Managing HSSE Aspects.

Jenis Risiko Risk Type	Operational-Sales & Marketing-Marketing Strategy
Penjelasan Jenis Risiko Risk Type Explanation	Menurunnya penjualan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Decline in Sales of Bottled Drinking Water (AMDK)
Mitigasi Risiko Risk Mitigation	- Bekerjasama dengan partner untuk wilayah kalimantan, jawa dan sulawesi; - Menjalin kerjasama dengan Pertamina Group. - Collaborate with partners in the regions of Kalimantan, Java, and Sulawesi. - Establish cooperation with the Pertamina Group.

Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Perusahaan Tahun 2023

Dari realisasi atas mitigasi risiko (tindak lanjut) terhadap 6 (enam) risiko korporat berbasis RKAP di tahun 2023, Perusahaan telah melakukan penanganan risiko dengan langkah-langkah sebagaimana yang terdapat dalam mitigasi tersebut diatas, yang dapat disimpulkan bahwa realisasi atas mitigasi risiko tersebut telah dilakukan dengan baik. Monitoring risiko di tahun 2023 disusun dan dilakukan secara menyeluruh pada proses bisnis di setiap unit kerja melalui tahapan proses pemantauan (*monitoring*) risiko yang diikuti dengan proses komunikasi dan koordinasi secara berkesinambungan di tahun 2023, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan atas mitigasi risiko (tindak lanjut) yang telah di susun oleh unit kerja telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan potensi risiko dapat diminimalisir dan dikendalikan. *Monitoring* realisasi mitigasi risiko dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada PT Pertamina International Shipping selaku *Subholding Integrated Marine Logistics* melalui sistem ERMS.

Monitoring of Risk Mitigation Realization in 2023

From the realization of risk mitigation (follow-up actions) for six corporate risks based on the 2023 RKAP, the Company has managed risks through the steps outlined in the aforementioned mitigations. It can be concluded that the realization of these risk mitigations has been well-executed. Risk monitoring in 2023 was comprehensively structured and carried out across all business processes in each work unit through stages of risk monitoring, followed by continuous communication and coordination throughout the year. It ensured the effectiveness of the risk mitigations (follow-up actions) planned by the work units was properly implemented and aligned with the established plans. Consequently, potential risks were expected to be minimized and controlled. The monitoring of risk mitigation realization was conducted monthly and reported to PT Pertamina International Shipping as the Subholding Integrated Marine Logistics through the ERMS system.

Kantor Akuntan Publik

Public Accounting Firm

Perusahaan menyadari bahwa akuntabilitas informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan Audit sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Untuk memberikan keyakinan yang memadai akan laporan keuangan dan operasional Perusahaan, PET secara rutin menunjuk pihak eksternal (*independen*) untuk melakukan audit terkait laporan tersebut. Upaya tersebut dilakukan Perusahaan dalam rangka menunjang sistem pengendalian internal Perusahaan dan untuk memperoleh informasi yang memadai sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi pengembangan Perusahaan ke depan.

Perusahaan secara rutin melakukan penunjukan auditor eksternal untuk melakukan audit pada Perusahaan. Auditor eksternal Perusahaan periode 2018 sampai dengan 2023 antara lain sebagai berikut:

The Company recognizes the accountability of the information generated from the implementation of audits is crucial for business sustainability. In order to provide adequate assurance regarding the company's financial and operational reports, PET regularly appoints external (*independent*) parties to conduct audits related to those reports. The company undertakes these efforts to support the internal control system of the company and to obtain sufficient information for consideration in formulating the Company's future development strategies.

The Company routinely appoints external auditors to conduct audits of the company. The external auditors of the company for the period 2018 to 2022 are as follows:

Tahun Buku Book Year	Nama Akuntan Accountant Name	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Ruang Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Audit Audit Insight	Biaya Audit Cost of Audit
2023	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>PricewaterhouseCoopers</i>) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partners (<i>PricewaterhouseCoopers</i>)	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Preparation of Financial Statements for the Fiscal Year 2023	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material The financial statements are presented fairly, in all material respects	Rp436.000.000,-
2022	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>PricewaterhouseCoopers</i>) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partners (<i>PricewaterhouseCoopers</i>)	Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 Preparation of Financial Statements for the Fiscal Year 2022	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material The financial statements are presented fairly, in all material respects	Rp436.000.000,-
2021	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>PricewaterhouseCoopers</i>) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partners (<i>PricewaterhouseCoopers</i>)	1. Pengendalian internal 2. Evaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen 3. Evaluasi penyajian laporan keuangan 1. Internal control 2. Evaluation of the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates made by management 3. Evaluation of financial statement presentation	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material The financial statements are presented fairly, in all material respects	Rp379.388.240,-

Tahun Buku Book Year	Nama Akuntan Accountant Name	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Ruang Lingkup Audit Scope of Audit	Opini Audit Audit Insight	Biaya Audit Cost of Audit
2020	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja (Ernst & Young)	- Pengendalian internal - Evaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen - Evaluasi penyajian laporan keuangan - Internal control - Evaluation of the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates made by management - Evaluation of financial statement presentation	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material The financial statements are presented fairly, in all material respects	Biaya dibebankan kepada induk Fees charged to Parent Company
2019	Daniel Kohar, S.E., CPA	KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (<i>PricewaterhouseCoopers</i>) KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Partners (<i>PricewaterhouseCoopers</i>)	- Pengendalian internal - Evaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen - Evaluasi penyajian laporan keuangan - Internal control - Evaluation of the appropriateness of accounting policies used and reasonableness of accounting estimates made by management - Evaluation of financial statement presentation	Laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material The financial statements are presented fairly, in all material respects	Biaya dibebankan kepada induk Fees charged to Parent Company

Jasa Selain Audit Keuangan

Pada tahun 2023, tidak terdapat jasa selain audit keuangan.

Other Services in Addition to Financial Audit

In 2023, there were no services other than financial audit services.

Perkara Hukum Tahun 2023

Legal Cases in 2023

Pada tahun 2023, PET tidak menerima laporan pengaduan Perkara Hukum. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi perkara hukum dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana sepanjang tahun 2023.

In 2023, PET did not receive any reports of legal complaints. All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors did not face any legal matters, whether civil or criminal, throughout 2023.

Sanksi Administratif 2023

Administrative Sanctions in 2023

Pada tahun 2023, PET tidak menerima sanksi administratif dari pihak regulator maupun laporan pengaduan dalam hal pencemaran lingkungan pada tahun 2023. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak menghadapi perkara hukum dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana sepanjang tahun 2023.

In 2023, PET did not receive any administrative sanctions from regulators nor any reports of complaints regarding environmental pollution. Throughout the year 2023, all members of the Board of Commissioners and Directors did not face any legal issues, either civil or criminal.

Kode Etik Perusahaan

Code of Conduct

Kode etik Perusahaan berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi seluruh Perwira PET dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Kode etik Perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha jangka panjang Perusahaan. Dalam menjalankan seluruh kegiatan bisnisnya secara profesional, PET mengacu kepada Pedoman Perilaku *Code of Conduct* (CoC) PT Pertamina Energy Terminal tanggal 29 Desember 2022.

The company's Code of Conduct serves as a guide for the conduct of all PET officers in their interactions with both internal and external parties. The Code of Conduct is one of the factors that influence the long-term sustainability of the company's operations. In carrying out all business activities professionally, PET adheres to the Code of Conduct Guidelines (CoC) of PT Pertamina Energy Terminal dated December 29, 2022.

COC memuat tentang:

BAB I UMUM

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PENGERTIAN
4. REFERENSI

Code of Conduct includes:

CHAPTER I GENERAL

1. OBJECTIVES
2. SCOPE
3. DEFINITIONS
4. REFERENCES

BAB II VISI, MISI DAN TATA NILAI UNGGULAN PERUSAHAAN

1. Visi dan Misi
2. Tata Nilai Unggulan Perusahaan

BAB III PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Prinsip-prinsip GCG Perusahaan yang menjadi prinsip Insan PET
2. Perilaku Integritas Insan PET

BAB IV PERSAINGAN SEHAT

1. Persaingan Usaha yang Sehat
2. Proses Pengadaan Penyedia Barang/Jasa
3. Informasi Penting

BAB V KERAHASIAAN DATA DAN TRANSPARANSI

1. Kerahasiaan Data dan Informasi
2. Pelaporan Akuntansi dan Keuangan
3. Pengelolaan Arsip

BAB VI SIKAP PROFESIONAL

1. Sikap Kerja Profesional
2. Berani Mengungkapkan Masalah
3. Pengambilan Keputusan
4. Hak Kekayaan Intelektual
5. Menghindari Diskriminasi
6. Kesempatan Karir yang Sama
7. Standar Ketenagakerjaan
8. Bebas Narkoba dan Minuman Keras
9. Aktivitas Politik
10. Media Massa
11. Organisasi Profesi
12. Media Massa
13. Organisasi Profesi

BAB VII KOMITMEN TERHADAP PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA

1. Komitmen Terhadap Pemegang Saham (*Shareholders*)
2. Komitmen Terhadap Pekerja
3. Komitmen Terhadap Serikat Pekerja
4. Komitmen Terhadap Barang/Jasa
5. Komitmen Terhadap Pemerintah sebagai Regulator
6. Komitmen Terhadap Legislatif
7. Komitmen Terhadap Investor, Kreditur, dan Bank
8. Komitmen Terhadap Mitra Usaha, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi
9. Komitmen Terhadap Kesehatan, Keselamatan, Keamanan (K3) dan Lindungan Lingkungan
10. Komitmen Terhadap Masyarakat Sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

CHAPTER II VISION, MISSION, AND COMPANY'S CORE VALUES

1. Vision and Mission
2. Company's Core Values

CHAPTER III PRINCIPLES OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

1. Company's Principles of GCG as Principles of PET Individuals
2. Integrity Behavior of PET Individuals

CHAPTER IV FAIR COMPETITION

1. Fair Business Competition
2. Procurement Process for Goods/Services
3. Important Information

CHAPTER V DATA CONFIDENTIALITY AND TRANSPARENCY

1. Data and Information Confidentiality
2. Accounting and Financial Reporting
3. Records Management

CHAPTER VI PROFESSIONAL ATTITUDE

1. Professional Work Attitude
2. Courage to Raise Issues
3. Decision Making
4. Intellectual Property Rights
5. Avoiding Discrimination
6. Equal Career Opportunities
7. Employment Standards
8. Drug-Free and Alcohol-Free Environment
9. Political Activities
10. Mass Media
11. Professional Organizations
12. Mass Media
13. Professional Organizations

CHAPTER VII COMMITMENT TO OTHER STAKEHOLDERS

1. Commitment to Shareholders
2. Commitment to Employees
3. Commitment to Labor Unions
4. Commitment to Goods/Services
5. Commitment to Government as a Regulator
6. Commitment to the Legislative
7. Commitment to Investors, Creditors, and Banks
8. Commitment to Business Partners, Research Institutions, and Universities
9. Commitment to Health, Safety, Security (HSS), and Environmental Protection
10. Commitment to the Surrounding Community and Social Responsibility

BAB VIII WHISTLE BLOWING SYSTEM

CHAPTER VIII WHISTLEBLOWING SYSTEM

BAB IX KONSEKUENSI PELANGGARAN

CHAPTER IX CONSEQUENCES OF VIOLATING THE CODE OF CONDUCT

PEDOMAN PERILAKU BAB X KOMITMEN INSAN PET

CHAPTER X PET INDIVIDUALS' COMMITMENT

Pemberlakuan Kode Etik

COC berlaku dan wajib dipatuhi oleh seluruh insan Perusahaan, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, organ penunjang, dan seluruh karyawan baik di level kantor pusat, unit kerja, maupun entitas anak serta afiliasi lainnya yang berada di bawah pengendalian Perusahaan.

Implementation of the Code of Conduct

The Code of Conduct is applicable and mandatory for all individuals within the Company, including the Board of Commissioners, Board of Directors, supporting organs, and all employees at the head office, work units, as well as subsidiary entities and other affiliated entities under the Company's control.

Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Seluruh karyawan telah mengikuti sosialisasi kode etik Perusahaan.

Socialization of the Company's Code of Conduct

All employees have participated in the socialization of the Company's code of conduct.

Sanksi Pelanggaran Kode Etik

PET memberikan sanksi kepada karyawan yang terbukti melanggar standar kode etik Perusahaan. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelanggaran kode etik.

Sanctions for Violating the Code of Conduct

PET imposes sanctions on employees who are proven to have violated the standards of the Company's code of conduct. Throughout 2023, there was no violations on code of conduct.

Akses dan Transparansi Informasi

Access and Information Transparency

Salah satu prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan secara terbuka. PET senantiasa menerapkan prinsip transparansi dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasionalnya. Hal ini sebagai bagian dari upaya implementasi GCG demi terjaminnya hak pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Transparency is one of the principles of implementing Good Corporate Governance (GCG). The Company has an obligation to disclose material and relevant information about the Company publicly. PET consistently applies the principle of transparency in conducting its business and operations. It is part of the efforts to implement GCG to ensure the rights of shareholders and other stakeholders.

PET memiliki situs web resmi Perusahaan <https://pertamina-pet.com> dalam Bahasa Indonesia dan Inggris yang dapat diakses oleh segenap pemangku kepentingan. Situs ini secara berkala terus diperbarui sehingga senantiasa dapat memberikan informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

PET has an official website for the Company, <https://pertamina-pet.com>, available in both Indonesian and English, accessible to all stakeholders. The website is regularly updated to provide necessary information to stakeholders.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan maraknya pemanfaatan media sosial, PET secara aktif membagikan kegiatan dan peristiwa-peristiwa penting melalui media sosial perusahaan. Melalui media sosial, PET dapat menyampaikan informasi secara menarik, variatif dan inovatif kepada seluruh pemangku kepentingan. PET juga membuka diri kepada semua pihak atau pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menghubungi kantor pusat PET.

PT Pertamina Energy Terminal (PET)

Kantor Pusat

Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari Kec. Ciwandan Kota Cilegon, Provinsi Banten 42446
 Fax: (0254) 601148
 Telp: (0254) 601146/601147
 Email: corsec.pet@pertamina.com
 Instagram: pet.pertamina
 Youtube: Pertamina Energy Terminal
 Website: <https://pertamina-pet.com>

Kantor Bisnis

Jl. Yos Sudarso No.205, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/ MSOP)

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris Pada tahun 2023, PET tidak program kepemilikan untuk pekerja dan/atau manajemen yang dilakukan melalui penawaran atau opsi penawaran saham. Dengan demikian laporan tahunan tidak menyajikan informasi mengenai *stock option* yang dimiliki oleh perwira dan manajemen, baik jumlah saham dan harga exercise, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/ atau manajemen yang berhak.

Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham di Perusahaan.

With the advancement of information technology and the widespread use of social media, PET actively shares important events and activities through the Company's social media. Through social media, PET can deliver information in an interesting, diverse, and innovative manner to all stakeholders. PET is also open to all parties or stakeholders who wish to obtain information directly by contacting the PET head office.

PT Pertamina Energy Terminal (PET)

Head Office

Jalan Raya Anyer Km. 119 Randakari, Ciwandan District, Cilegon City, Banten Province 42446
 Fax: (0254) 601148
 Phone: (0254) 601146/601147
 Email: corsec.pet@pertamina.com
 Instagram: pet.pertamina
 YouTube: Pertamina Energy Terminal
 Website: <https://pertamina-pet.com>

Business Office

Jl. Yos Sudarso Kav 85 No.205, RT.10/RW.11, Sunter Jaya, North Jakarta, Jakarta Capital Special Region 14360

Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP)

Stock Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners In 2023, PET did not have a stock ownership program for employees and/or management conducted through stock offerings or options. Consequently, the annual report does not present information regarding stock options held by officers and management, including the number of shares, exercise prices, terms, or eligibility criteria for employees and/or management.

Stock Ownership by the Board of Directors and Board of Commissioners

In 2023, the Board of Directors and Board of Commissioners did not own any shares in the Company.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Whistleblowing System

Sebagai bagian dari PT Pertamina (Persero), saluran WBS yang digunakan oleh PET telah terintegrasi dengan induk Perusahaan. Sistem ini berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran atau tindak kecurangan yang terjadi di lingkungan internal Perusahaan. PET memiliki Tata Kerja Organisasi *Whistle Blowing System* (WBS) No. B 11-001/PET0500/2022-S9 tanggal 18 Desember 2022.

Penyampaian Laporan Pelanggaran dan Penanganan Pengaduan

Pelapor menyampaikan laporan pelanggaran dengan mengikuti prosedur sesuai TKO *Whistleblowing System* Pertamina, yaitu:

1. Pelapor membuat pengaduan/penyingkapan dan mengirimkannya kepada Konsultan WBS melalui saluran sebagai berikut:
 - a. Telepon: +62 21 3815909, 3815910 dan 3815911
 - b. Website : www.pertaminaclean.tipoffs.info/
 - c. Email: pertaminaclean@tipoffs.com.sg
 - d. Fax: +62 213815912
 - e. SMS/Whatsapp : +62 8111750612
 - f. Kotak Surat : Tip-Offs Anonymous Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026
 - g. Drop box : Kantor Pusat Pertamina
2. Konsultan WBS menerima seluruh pengaduan/penyingkapan, mencatat, dan menuangkan ke dalam format standar yang menghasilkan:
 - a. Laporan penerimaan kontak.
 - b. Laporan sesuai kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
 - c. Laporan diluar kategori lingkup pengaduan/penyingkapan.
 - d. Laporan pengungkapan (*disclosure report*).
3. Konsultan WBS menyampaikan laporan pengungkapan (*disclosure report*) dalam format web ke dalam *e-room*, yang akan diakses secara *online* oleh Fungsi *Corporate Secretary* dan Komisaris Utama dalam hal terlapor adalah Direktur. Untuk mengetahui dan memastikan bahwa pengaduannya diterima dan ditindaklanjuti Pelapor setiap saat dapat menghubungi konsultan WBS melalui sarana yang telah Pelapor gunakan sebelumnya.
4. Dalam hal terlapor adalah Pekerja, Fungsi *Corporate Secretary* melakukan Pulbaket dan membuat resumennya kemudian mempresentasikan kepada CCO. Berdasarkan hasil presentasi tersebut, CCO memutuskan tindak lanjut:
 - a. Diteruskan kepada Fungsi terkait, jika pengaduan bukan termasuk kecurangan (*fraud*)

As part of PT Pertamina (Persero), PET's whistleblowing system (WBS) channel is integrated with the parent company. This system serves as a means to disclose allegations of violations or fraudulent acts that occur within the Company's internal environment. PET has the Whistleblowing System (WBS) Organization Work Procedures No. B 11-001/PET0500/2022-S9 dated December 18, 2022.

Reporting Violations and Complaint Handling

The reporter submits a violation report by following the procedures in accordance with Pertamina's Whistleblowing System (WBS) OWP, which are as follows:

1. The reporter makes a complaint/disclosure and sends it to the WBS Consultant through the following channels:
 - a. Telephone: +62 21 3815909, 3815910, and 3815911
 - b. Website: www.pertaminaclean.tipoffs.info/
 - c. Email: pertaminaclean@tipoffs.com.sg
 - d. Fax: +62 213815912
 - e. SMS/WhatsApp: +62 8111750612
 - f. Mailbox: Tip-Offs Anonymous Pertamina Clean, PO BOX 2600 JKP 10026
 - g. Drop box: Pertamina Head Office
2. The WBS Consultant receives all complaints/disclosures, records them, and documents them in a standard format that produces:
 - a. Contact acceptance report
 - b. Reports according to the category of the complaint/disclosure
 - c. Reports outside the category of the complaint/disclosure
 - d. Disclosure report
3. The WBS Consultant submits the disclosure report in web format to the *e-room*, which will be accessed online by the Corporate Secretary Function and the President Commissioner, in the case where the reported party is a Director. In order to know and ensure their complaint is received and followed up on, the reporter can contact the WBS consultant through the channel they have previously used.
4. In the case where the reported party is an Employee, the Corporate Secretary Function conducts an initial investigation and creates a summary, then presents it to the CCO. Based on the results of this presentation, the CCO decides on the follow-up actions:
 - a. Forwarded to the relevant Function if the complaint does not involve fraud.

- b. Tindak lanjut atas laporan pengaduan WBS:
 - Ditutup, jika pengaduan tidak memenuhi unsur 3W (*what, where, dan when*).
 - Ditutup, jika kesimpulan penelaahan awal/ klarifikasi tidak mengandung unsur kebenaran.
 - Disampaikan kepada Direktorat teknis terkait dan Fungsi *Human Capital* untuk pemberian sanksinya jika kesimpulan penelaahan awal/ klarifikasi mengandung unsur kebenaran.
- c. Jika laporan pengaduan termasuk kecurangan:
 - Disampaikan kepada Fungsi Internal Audit. Untuk proses pendalaman setelah dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi *Corporate Secretary* dan mengandung unsur kebenaran.
 - Tanpa dilakukan penelaahan awal oleh Fungsi *Corporate Secretary* apabila Fungsi Internal Audit sedang melakukan penelaahan awal.
 - Fungsi *Compliance* dapat meminta bantuan namun tidak terbatas kepada Fungsi *Security, Bunker & Operation Compliance* (BOC) dan Internal Audit dalam proses tindak lanjut laporan pengaduan.
 - Fungsi *Corporate Secretary* dapat bekerja sama dengan eksternal investigator jika substansi pengaduan/penyingkapan terkait dengan citra/ reputasi Perusahaan dan/ tau menimbulkan kerugian yang besar. CCO memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil investigasi WBS yang dilakukan oleh Fungsi terkait.

- b. Follow-up on the WBS complaint:
 - Closed if the complaint does not meet the 3W elements (*what, where, and when*).
 - Closed if the initial review/clarification conclusion does not contain elements of truth.
 - Forwarded to the relevant technical directorate and the Human Capital Function for imposing sanctions if the initial review/clarification conclusion contains elements of truth.
- c. If the complaint involves fraud:
 - It is forwarded to the Internal Audit Function. For further investigation after an initial review by the Corporate Secretary Function and contains elements of truth.
 - Without an initial review by the Corporate Secretary Function if the Internal Audit Function is conducting an initial review.
 - The Compliance Function can seek assistance, including but not limited to the Security Function, Bunker & Operation Compliance (BOC), and Internal Audit, in the follow-up process of the complaint.
 - The Corporate Secretary Function can collaborate with external investigators if the substance of the complaint/disclosure is related to the Company's image/reputation or causes significant losses. The CCO monitors the implementation of the follow-up actions resulting from the WBS investigation carried out by the relevant Functions.

Perlindungan bagi Pelapor

PET memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor sebagaimana diatur dalam perundang-undangan dan *best practices* penyelenggaraan WBS yang berlaku. PET memberikan perlindungan kepada pelapor dalam bentuk:

1. Dalam melakukan proses tindak lanjut atas setiap pengaduan/penyikapan wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tidak bersalah dan profesionalisme.
2. Identitas Pelapor dijamin kerahasiannya oleh Perusahaan.
3. Perusahaan menjamin perlindungan terhadap pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan kasus yang diajukan kepada pihak manapun.
4. Perlindungan ini juga berlaku bagi pekerja yang melaksanakan penelaahan awal/klarifikasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pengaduan/ penyingkapan.
5. Dalam memberikan perlindungan, Perusahaan dapat bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Protection for Reporters

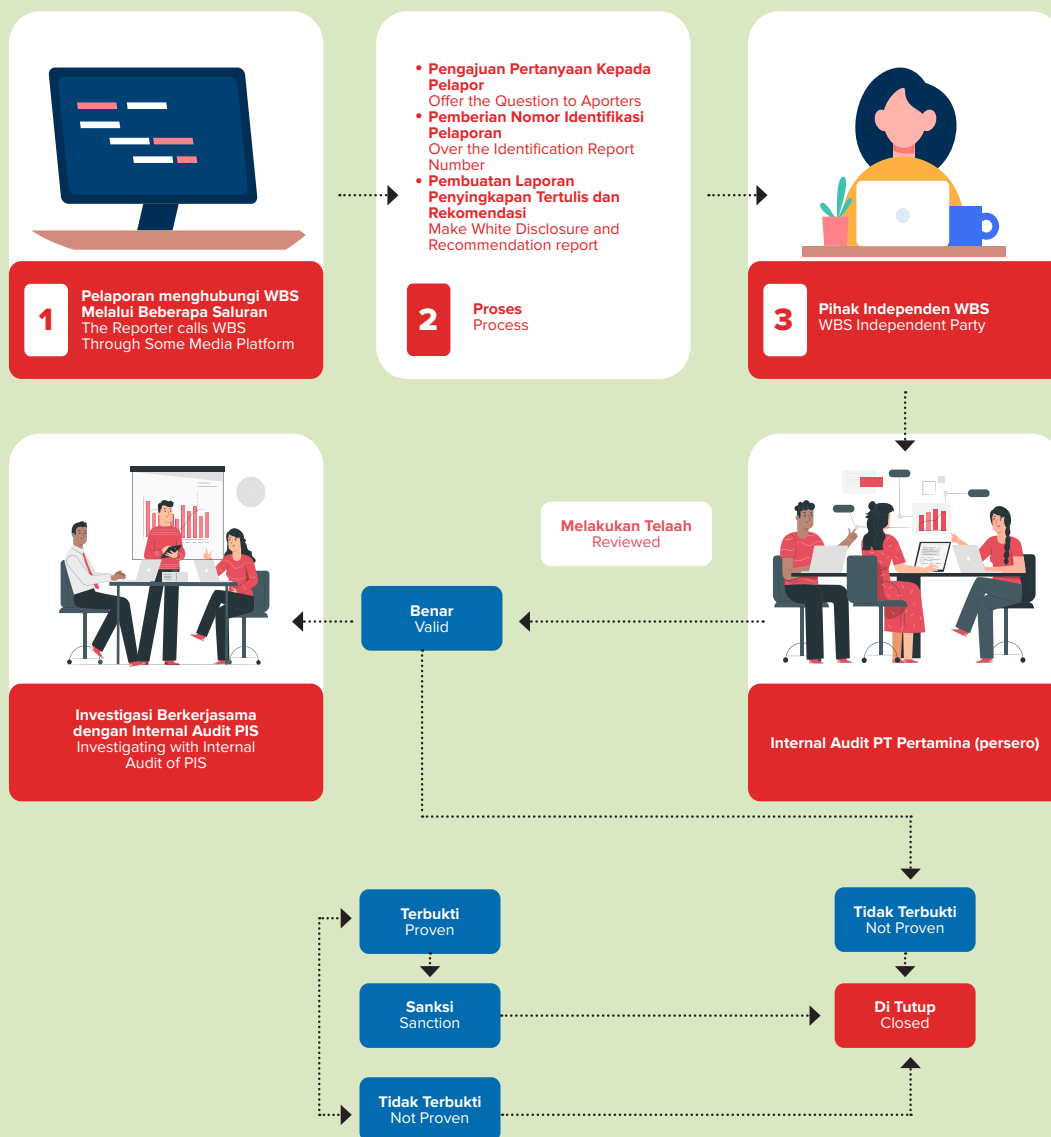
PET provides assurance of protection to the reporter as regulated by laws and applicable best practices in implementing WBS. PET provides protection to the reporter in the following forms:

1. In the process of following up on each complaint/disclosure, PET is obliged to prioritize confidentiality, the principle of presumption of innocence, and professionalism.
2. The identity of the reporter is guaranteed confidentiality by the Company.
3. The Company ensures protection for the reporter from any form of threat, intimidation, punishment, or unpleasant actions from any party, as long as the reporter maintains the confidentiality of the reported case to any party.
4. This protection also applies to employees conducting initial investigations/clarifications and individuals providing information related to the complaint/disclosure.
5. In providing protection, the Company may collaborate with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK).

6. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

6. Those who violate the principle of confidentiality will be subjected to severe sanctions in accordance with the applicable provisions within the Company.

Alur Laporan Whistleblowing System Flow of Whistleblowing System Report



Pihak yang Mengelola Pengaduan

Para pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan pengaduan/penyingkapan berdasarkan kategori Terlapor adalah:

1. CCO: Jika Terlapor adalah Insan Pertamina *Energy Terminal* selain CCO, pekerja Fungsi *Corporate Secretary*, Dewan Komisaris, dan Direksi.
2. Dewan Komisaris: jika Terlapor adalah Direksi.

Parties Responsible for Handling Complaints

The parties authorized to follow up on complaints/disclosures based on the categories of the Reported are:

1. CCO: If Reported is any individual within Pertamina *Energy Terminal*, except for the CCO, employees of the Corporate Secretary Function, Board of Commissioners, and Board of Directors.
2. Board of Commissioners: If the Reported is the Board of Directors.

3. Direktur: jika CCO dan pekerja Fungsi *Corporate Secretary*.
4. Pemegang Saham: jika terlapor adalah Dewan Komisaris.

Pengaduan yang masuk ke saluran WBS akan dikelola oleh:

1. Konsultan WBS
Konsultan WBS merupakan konsultan independen yang profesional dengan reputasi baik, bersifat perseorangan maupun badan usaha yang ditunjuk oleh Perusahaan. Konsultan WBS menerima dan mengelola semua pengaduan yang berhubungan dan terkait dengan WBS. Konsultan WBS memberikan hasil laporan pengungkapan (*disclosure report*) melalui sarana *e-room* untuk diteruskan kepada Fungsi Internal Audit.
2. *Chief Audit Executive* (CAE) PT Pertamina (Persero)
CAE adalah pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Utama yang bertanggung jawab atas program kepatuhan Perusahaan dan memastikan bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan pekerja mematuhi peraturan dan ketentuan baik pemerintah, Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku serta perilaku organisasi sesuai dengan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perusahaan.

Jumlah Pengaduan dan Tindak Lanjut

Pada tahun 2023, pengaduan dan tindak lanjut terpusat di PT Pertamina (Persero).

3. Director: If it involves the CCO and employees of the *Corporate Secretary Function*.
4. Shareholders: If the Reported is the Board of Commissioners.

Complaints received through the WBS channel will be managed by:

1. WBS Consultant
The WBS Consultant is an independent consultant who is professional and with good reputation, either an individual or a corporate entity, appointed by the Company. The WBS Consultant receives and manages all complaints related to and associated with WBS. The WBS Consultant provides the disclosure report through the *e-room* platform to be forwarded to the Internal Audit Function.
2. Chief Audit Executive (CAE) of PT Pertamina (Persero)
The CAE is an official appointed by the President Director responsible for the Company's compliance program, ensuring the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees comply with government regulations, Company policies, and other applicable provisions, as well as ensuring organizational behavior in accordance with the Company's Code of Conduct.

Number of Complaints and Follow-up Actions

In 2023, complaints and follow ups centralized in PT Pertamina (Persero).

Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki Pedoman Gratifikasi, Penolakan, Penerimaan, Pemberian Hadiah/ Cinderamata dan Hiburan (*Entertainment*) No. A 11-001/PET0500/2022-S9. Perusahaan berkomitmen dalam mencegah praktik korupsi telah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan iklim bisnis yang bersih dan transparan. Pencegahan praktik korupsi pada Perusahaan juga mencakup pelarangan praktik suap, pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain.

In 2023, the Company had the Guidelines on Gratuities, Refusals, Acceptance, Gifts/Souvenirs, and Entertainment (*Entertainment*) No. A 11-001/PET0500/2022-S9. The Company is committed to preventing corrupt practices and aligns with the government's goal of fostering a clean and transparent business climate. The prevention of corrupt practices within the Company includes the prohibition of bribery, money laundering, gratuities, and others.

Penilaian Penerapan GCG

Assessment of GCG Implementation

SK-16 dijadikan acuan oleh PET dalam melakukan penilaian penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Pada tahun 2023, pelaksanaan penilaian dan evaluasi GCG berdasarkan salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2023 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Agustus 2023 dihentikan dahulu sampai dengan terbitnya keputusan dari Kementerian BUMN.

Tujuan Penilaian GCG

Tujuan pelaksanaan asesmen GCG di lingkungan PET adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG melalui penilaian/evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan di PET, melalui pemberian skor/ nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG di PET, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan GCG di PET yang bersangkutan.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG di PET dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *Corporate Governance* di lingkungan PET.
4. Melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen, *infrastructure* dan *soft structure* terkait GCG serta memberikan penilaian *scoring* berdasarkan parameter alat uji Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK16/S.MBU/2012 terhadap praktik GCG di PET dan memberikan hasil evaluasi dan analisis.
5. Memberikan rekomendasi penyempurnaan terhadap kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi GCG di PET sejalan dengan *best practices*.

Kriteria yang Digunakan

Aspek dan indikator penilaian dalam Asesmen GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan
2. Pemegang Saham dan RUPS
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
6. Aspek Lainnya

SK-16 was a reference by PET in assessing the implementation of Good Corporate Governance (GCG). In 2023, the implementation of GCG assessment and evaluation was suspended based on the Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number SK-12/S.MBU/08/2023 concerning the Revocation of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises Decree Number: SK-16/S.MBU/2023 regarding the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises dated August 16, 2023, until a new decision is issued by the Ministry of SOEs.

Objectives of GCG Assessment

The objectives of conducting GCG assessments in the PET environment are as follows:

1. Measure the quality of GCG implementation through the assessment/evaluation of the level of compliance with GCG criteria based on the actual conditions applied in PET, by assigning scores/values to GCG implementation and categorizing its quality.
2. Identify the strengths and weaknesses of GCG implementation in PET and propose improvement recommendations to reduce the gap between GCG criteria and GCG implementation in the respective PET.
3. Monitor the consistency of GCG implementation in PET and obtain input for the improvement and development of Corporate Governance policies in the PET environment.
4. Map and evaluate the completeness of documents, infrastructure, and soft structures related to GCG, provide scoring assessments based on the parameters of the Ministry of State-Owned Enterprises Secretary's Decision Number: SK16/S.MBU/2012 on GCG practices in PET, and provide evaluation and analysis results.
5. Provide recommendations for improvement to address gaps found in the implementation of GCG in PET in line with best practices.

Criteria Used

The assessment aspects and indicators in the Company's GCG Assessment in 2022 are as follows:

1. Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation
2. Shareholders and GMS
3. Board of Commissioners
4. Board of Directors
5. Information Disclosure and Transparency
6. Other Aspects

Tabel Capaian Skor Assessment Penerapan GCG PET 2021-2022

Table of Assessment Score Achievement in GCG Implementation of PET in 2021-2022

No.	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Aspect of Assessment/Indicator/Parameter	Bobot Weight	Capaian Tahun 2022 Achievement in 2022		Kualifikasi Qualification	Capaian Tahun 2021 Achievement in 2021		Kualifikasi Qualification
			Skor Score	% Capaian % Achievement		Skor Score	% Capaian % Achievement	
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance	7,000	5,28	75,37%	Baik Good	4,47	63,90%	Cukup Baik Fair
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,000	6,28	69,75%	Cukup Baik Fair	6,10	67,79%	Cukup Baik Fair
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,000	21,40	61,13%	Cukup Baik Fair	16,06	45,87%	Tidak Baik Bad
IV	Direksi Board of Directors	35,000	24,12	68,93%	Cukup Baik Fair	20,38	58,23%	Kurang Baik Poor
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and transparency	9,000	6,49	72,15%	Cukup Baik Fair	1,09	12,06%	Tidak Baik Bad
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,00	0,00%	-	0,00	0,00%	-
SKOR KESELURUHAN Total Scores		100,000	48,09	63,75	Cukup Baik Fair	48,09	48,09%	Tidak Baik Bad
			KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG DI PET = "CUKUP BAIK" CLASSIFICATION OF THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION IN PET = "FAIR"		KLASIFIKASI KUALITAS PENERAPAN GCG DI PET = "TIDAK BAIK" CLASSIFICATION OF THE QUALITY OF GCG IMPLEMENTATION IN PET = "POOR"			

Keterangan: 0-50: Tidak Baik | 50-60: Kurang Baik | 60-75: Cukup Baik | 75-85: Baik | 85-100: Sangat Baik
Notes : 0-50 Bad | 50-60 : Poor | 60-75 : Fair | 75-85 : Good | 85-100: Very Good

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian Penerapan GCG

Dari evaluasi terhadap 6 (enam) aspek pokok pengukuran di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Recommendations and Follow-up Actions from the GCG Implementation Assessment

From the evaluation of the 6 (six) main aspects of measurement above, the following can be concluded:

No.	Aspek Pengujian/Indikator/Parameter Aspect of Assessment/Indicator/Parameter	Total AOI	Sudah ditindaklanjuti Followed up	Belum ditindaklanjuti Not Followed Up
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance	14	13	1
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	19	13	6
III	Dewan Komisaris Board of Commissioners	65	38	27
IV	Direksi Board of Directors	47	35	12
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and transparency	7	7	-
Total Total		152	106	46

Terhadap 152 (seratus lima puluh dua) AOI yang kami evaluasi, terdapat 106 AOI yang sudah ditindaklanjuti. Hal ini menggambarkan peningkatan atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di seluruh Organ Perusahaan di PET pada tahun 2023, sekaligus juga merupakan perwujudan upaya PET untuk terus tumbuh secara berkesinambungan.

Out of the 152 (one hundred fifty-two) Areas of Improvement (AOI) that we evaluated, 106 AOIs have been followed up on. It indicates an improvement in the implementation of good Corporate Governance throughout the Company's organs in PET in 2023, and it also signifies PET's efforts towards continuous growth.





0.6

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY





Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Corporate Social Responsibility

Perusahaan telah merancang strategi keberlanjutan yang komprehensif untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan program Program Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perusahaan.

The Company has designed a comprehensive sustainability strategy to support the achievement of sustainable development goals through the implementation of integrated, directed, measurable, and accountable Corporate Social Responsibility (CSR) programs, which are an integral part of the Company's business approach.

Perusahaan senantiasa menyusun dan mengimplementasikan program-program CSR yang mampu membawa manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. PET akan terus meningkatkan kinerja CSR dengan melaksanakan evaluasi yang berkesinambungan serta tetap mengamati perkembangan dan faktor yang mempengaruhi usaha.

The Company consistently develops and implements CSR programs to provide optimal benefits to all stakeholders. PET aims to continually enhance CSR performance by conducting ongoing evaluations and monitoring developments and factors influencing business operations.

Pelaksanaan CSR PET merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial, diantaranya:

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

The implementation of PET's CSR refers to regulations governing social responsibility, including:

1. Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
3. Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management.
4. Law No. 13 of 2003 on Manpower.
5. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies.
6. Ministerial Regulation of State-Owned Enterprises Number PER-1/MBU/03/2023 of 2023 concerning Special Assignments and Corporate Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises

Perusahaan memiliki komitmen atas aspek ESG yang dituangkan dalam Kebijakan Keberlanjutan untuk menjadi:

1. *Environmentally Friendly Company*
2. *Social Responsible Company*
3. *Good Governance Company*
4. *Green Energy Business*

The Company is committed to ESG aspects, as outlined in the Sustainability Policy, to become:

1. Environmentally Friendly Company
2. Socially Responsible Company
3. Good Governance Company
4. Green Energy Business

Perusahaan memiliki inisiatif keberlanjutan Perusahaan, diantaranya:

The Company has several sustainability initiatives, including:

Inisiatif Aspek Keberlanjutan Perusahaan
Company Sustainability Aspect Initiatives

No	Initiatives	Scope
1	Decarbonization & 4R Program	- Reduce, Reuse, Recycle Recovery Program - Low Carbon Power & Heat
2	Beyond Proper (Waste and Water)	Magement system to manage efficient, water & waste, baseline & roadmap. Pilot project implementation to comply with ESG Rating requirement
3	Enhancement of Safety Aspect	Strengten SUPREME, Establish long term target (zero injuries, LTIR, TRIR)
4	Enhancement of Health Aspect	Health Monitoring, Fit to Work (MCU) Medical Emergency Response
5	Process Safety Management	Process Safety Management & Culture across Pertamina Grup including Process Safety Asset Integrity. Captur incident data on all Tier 1 and Tier 2, etc

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Social and Environmental Responsibility

Komitmen dan Kebijakan CSR

Perusahaan berusaha untuk dapat memastikan bahwa kegiatan usahanya senantiasa berpegang teguh kepada prinsip-prinsip bisnis berkelanjutan. Berangkat dari pemahaman tersebut, Perusahaan memandang tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*) sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kewajiban untuk menyediakan tempat yang nyaman dan hubungan kerja yang baik dengan karyawan, mengutamakan terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja, dan ikut serta mengembangkan ekonomi dan komunitas lokal.

Melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Perusahaan mendukung perkembangan masyarakat dan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan yang menyentuh 3 (tiga) aspek CSR yakni Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan secara konsisten dan berkesinambungan.

Perusahaan juga berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/3/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Due Diligence Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan dari Aktivitas Perusahaan

Uji tuntas kegiatan operasional Perusahaan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial dipetakan berdasarkan tingkatan materialitas suatu subyek serta matriks risiko negatif yang mungkin muncul.

Dalam aspek ekonomi, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Perusahaan melaksanakan kajian risiko lingkungan hidup untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya.

Sementara pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Detail informasi aspek, topik maupun isu yang mempengaruhi Perusahaan serta Pembangunan berkelanjutan tersaji pada sub bab isu-isu penting ekonomi, lingkungan dan sosial terkait dampak kegiatan perusahaan.

CSR Commitment and Policy

The Company strives to ensure its business activities constantly adhere to the principles of sustainable business. From this understanding, the Company views Corporate Social Responsibility (CSR) as an expression of its concern toward the environment, respect for human rights, obligation to provide a comfortable workplace and good working relationships with employees, prioritization of health and safety, and participation in the development of the local economy and community.

Through its Social Responsibility Program, the Company supports the development of society and environmentally sustainable development, consistently addressing three aspects of CSR: Economic, Social, and Environmental.

The Company also adheres to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-1/MBU/3/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises, and is committed to fulfilling these obligations.

Social, Economic, and Environmental Impact Due Diligence of Company Activities

The thorough examination of the Company's operational activities and their impact on the economy, environment, and society is mapped based on the materiality level of a subject and a matrix of potential negative risks that may arise.

Based on this matrix, the Company maps the subjects in the economy, the company has a responsibility to ensure sustainable economic performance, free from corrupt practices, and beneficial to other stakeholders. In the environment aspect, the Company conducts environmental risk assessments to determine the environmental risks of operational activities and their control measures.

As for the social aspect, the Company's concerns on internal and external stakeholders.

Detailed information on aspects, topics, and issues affecting the Company and sustainable development is presented in sub-sections of important economic, environmental, and social issues related to the Company's activities.

Stakeholder Penting yang Terdampak/ Berdampak

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan berinteraksi dengan berbagai *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan. Pemangku Kepentingan Perusahaan diidentifikasi berdasarkan tingkat kepentingan hubungan yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, demikian juga sebaliknya. Perusahaan selalu berupaya untuk mengelola pelibatan para Pemangku Kepentingan guna meningkatkan nilai Perusahaan. Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Significant Stakeholders Affected/ Impacted

In its business activities, the Company interacts with various stakeholders, both directly and indirectly, who are influenced by or impacted by the Company's activities. Stakeholders of the Company are identified based on the level of interest in relationships that affect the Company's performance, and vice versa. The Company always strives to manage the involvement of stakeholders to enhance the Company's value. Stakeholders who are influenced by or impacted by the Company's activities can be described as follows:

Pemangku Stakeholders	Topik Dan Isu Utama Topic And Main Issue	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Involvement Frequency
Pemegang Saham Shareholders	- Kinerja Perusahaan yang baik dan <i>sustain</i>. Dapat tercermin dari hasil kinerja akhir tahun dan harga saham. - Pemenuhan GCG yang baik. - Kemudahan dalam mendapatkan informasi Perusahaan. - Good and sustainable company performance is reflected in the year-end performance results and stock prices. - GCG compliance. - Ease of access to company information.	RUPS General Meeting of Shareholders (GMS)	Minimal setahun sekali At least once a year
Pegawai Employees	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja dalam jangka panjang The sustainability of the Company has an impact on the long-term wellbeing of employees.	Serikat pekerja dan Perjanjian Kerja Bersama Labor unions and Collective Labor Agreements	setahun sekali Once a year
Pelanggan Customers	Pelayanan jasa terbaik Providing the best service.	Rapat Koordinasi Coordination meetings	Sesuai Kebutuhan As needed
	Harga jasa yang bersaing dan efisien Competitive and efficient service prices.	Komunikasi melalui media yang tersedia Communication through available media	Sesuai Kebutuhan As needed
Pemasok Suppliers	- Layanan informasi Pendaftaran Rekanan - Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan perusahaan - Penilaian Hasil Kinerja Penyedia Barang/ Jasa <i>Monitoring</i> evaluasi masukan dan saran dari Penyedia Barang dan Jasa - Vendor Registration Information Service - Procurement of Goods/Services according to company needs - Evaluation of Supplier Performance - Monitoring and evaluation of feedback and suggestions from Goods and Services Vendors	Kontrak dan perjanjian Contracts and agreements	Sesuai Kebutuhan As needed
Regulator Regulator	- Kepatuhan lingkungan. - Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak yang diserahkan kepada pemerintah sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk modal pembangunan - Environmental compliance. - The Company's financial performance will impact the amount of tax payments distributed to the government as state revenue used for development capital.	- Kepatuhan terhadap peraturan - Kontribusi ekonomi pada pemerintah (pajak dan penggunaan subsidi) - Compliance with regulations - Economic contribution to the government (taxes and subsidy utilization)	Setiap saat Anytime

Pemangku Stakeholders	Topik Dan Isu Utama Topic And Main Issue	Pendekatan Approach	Frekuensi Pelibatan Involvement Frequency
Masyarakat Communities	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup Masyarakat baik melalui produk dan layanan maupun atas keberadaan Perusahaan yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. The Company's business activities have an impact on improving the quality of life of the community, both through products and services and through the presence of the Company, which can have a positive impact on the local economy.	Kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> Corporate Social Responsibility activities	Sesuai kebutuhan/ mengikuti ketentuan Pemegang Saham As needed/according to Shareholders' requirements

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Program dan Inisiatif Keberlanjutan Programs and Sustainability Initiatives
Lingkungan Environment			
1.	Mengatasi Perubahan Iklim Climate Action		- Program Kampung Iklim (Tanaman Hidroponik) - Program rehabilitasi terumbu karang melalui upaya transplantasi - Pertamina Lestari berupa penanaman 1.000 mangrove - Peduli Sampah Kita sebuah program bank sampah
Sosial Social			
2.	Ekosistem Laut Life Below Water		Program Transplantasi terumbu karang di <i>Fuel</i> Terminal Baubau. Coral Reef Transplantation Program at Baubau Fuel Terminal.
3.	Ekosistem Daratan Life on Land		Program Kehati Taman Nasional Ujung Kulon sebagai salah satu program berkelanjutan melestarikan badak di Taman Nasional Ujung Kulon. The Kehati Ujung Kulon National Park Program, as one of the sustainable programs for conserving rhinoceroses in the Ujung Kulon National Park.
Ekonomi Economy			
4.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Decent Work and Economic Growth		Program pelatihan sertifikasi K3 (<i>Training and Certification</i>) kepada masyarakat sekitar untuk menunjang kemampuan dan ekonomi yang lebih baik. OHS Training and Certification Program for the local community to support improved skills and economic opportunities.

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)	Program dan Inisiatif Keberlanjutan Programs and Sustainability Initiatives
5.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Decent Work and Economic Growth		Program sosialisasi & bantuan kepada Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia sebagai salah satu penunjang ekonomi para anggotanya Socialization and assistance program for Traditional Fishermen Groups in Indonesia as one of the supports for the economic wellbeing of its members.
6.	Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Decent Work and Economic Growth		Pemberdayaan Yayasan Lentera Difabel dengan menunjang peralatan dan skill para pembatik. Empowerment of Lentera Difabel Foundation by supporting equipment and skills for batik makers.
Pendidikan Education			
7.	Pendidikan Berkualitas Quality Education		Program <i>Ocean Literacy</i> memajukan Pendidikan melalui pembangunan infrastruktur dan buku tentang kemaritiman. The Ocean Literacy Program advances education through the development of infrastructure and books on maritime topics.
Tata Kelola Governance			
8.	Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance		Pengembangan program <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) khususnya kepatuhan atas peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
9.	Pengelolaan Etika Bisnis Business Ethics Management		Implementasi Antikorupsi (SMAP) Anticorruption Implementation (SMAP)
10.	Kinerja Keuangan Financial Performance		Kinerja Ekonomi/Keuangan (Pendapatan, Laba, EBITDA) Economic/Financial performance (Revenue, Profit, EBITDA)
Sosial Social			
11.	Kepegawaian Employment	 	Keberagaman, kesetaraan gender dan kesempatan kerja diimplementasikan sejak proses rekrutmen, penyediaan skema remunerasi, pengembangan kompetensi, kebijakan cuti dan sebagainya. Diversity, gender equality, and job opportunities are implemented starting from the recruitment process, provision of remuneration schemes, competency development, leave policies, etc.
12.	Pembelajaran dan Pengembangan bagi Karyawan Employee Training and Development		Program dan waktu pelatihan, <i>Pertamina Safety</i> . Program and Schedule of Pertamina Safety Training.

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Sustainable Development Goals (SDGs)		Program dan Inisiatif Keberlanjutan Programs and Sustainability Initiatives
13.	Pelibatan Masyarakat Lokal dalam Operasi dan Bisnis yang Dikembangkan. Involvement of the Local Community in Developed Operations and Business.	4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Operasi dan rekrutmen yang melibatkan masyarakat lokal, Program bantuan literasi dan perbaikan perpustakaan SDIT Bahtera Insani, pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah, program bantuan kepada kesatuan nelayan tradisional Indonesia DPC Kecamatan Bintan Utara, program bantuan kepada Yayasan Cahaya Lentera Difa, pengembangan pemuda berbasis sertifikasi, Rhino goes to school, Pertamina Ocean Literacy. Operations and recruitment involving the local community, Literacy assistance program and library improvement for SDIT Bahtera Insani, community empowerment through waste bank initiative, assistance program for traditional Indonesian fishermen union in North Bintan District, assistance program for Cahaya Lentera Difa Foundation, youth development based on certification, Rhino goes to school, Pertamina Ocean Literacy program.

No	Fokus Keberlanjutan Sustainability Focus	Topik Material Scope of Stakeholders	Batasan Pemangku Kepentingan Sustainable Development Goals (SDGs)	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Material Topics	
1.	Mengelola Keberlanjutan Managing Business Continuity	- Strategi Keberlanjutan - Pengelolaan risiko dan krisis (keamanan siber) - Sustainability strategy - Risk & crisis management (cyber security)	Pekerja, Mitra Kerja, Masyarakat, Investor, Pemegang Saham, Pelanggan Employees, Business Partners, Community, Investors, Shareholders, Customers	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI
2.	Meningkatkan Kinerja Usaha Increasing Business Bottom Lines	Kinerja Ekonomi Economic Performance	Investor, Pemegang Saham, Pekerja, Mitra Kerja, Pelanggan Investors, Shareholders, Employees, Business Partners, Customers	8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	
3.	Mendorong Inovasi Encouraging Innovation	Inovasi dalam operasional yang efisien dan dekarbonasi Business Innovation on operational efficiency and decarbonization	Mitra Kerja, Pekerja, Investor, Pelanggan Business Partners, Employees, Investors, Customers	9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN
4.	Menjalankan Bisnis yang Beretika Performing Our Business Ethically	- Antikorupsi - Manajemen Rantai Pasok - Anti-Corruption - Supply Chain Management	Pekerja, Mitra Kerja, Regulator, Investor, Pelanggan Employees, Business Partners, Regulators, Investors, Customers	16 PEREMAJIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
5.	Dekarbonisasi Bisnis Decarbonizing Our Business	Emisi Emission	Pekerja, Mitra Kerja, Regulator, Investor Employees, Business Partners, Regulator	7 ENERGI BERSIH DAN TERAWAKAN	13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
6.	Meningkatkan Efisiensi Energi Improving Energy Efficiency	Energi Energy	Pekerja, Mitra Kerja, Regulator, Investor Employees, Business Partners, Regulator	7 ENERGI BERSIH DAN TERAWAKAN	12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN
				12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERKELANJUTAN	13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Tanggung Jawab Sosial terkait Operasi yang Adil

Social Responsibility Related to Fair Operations

Pada dasarnya tanggung jawab Perusahaan pada praktik operasi yang adil mencakup pada perilaku etis dalam transaksi Perusahaan dengan perusahaan atau organisasi lainnya. Sebagai entitas yang dikelola secara profesional, perilaku bisnis yang etis menjadi sebuah keharusan demi menunjang hubungan yang baik kepada para pemangku kepentingan terkait.

Komitmen Perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang berlandaskan etika ditunjukkan melalui adanya kebijakan pengendalian internal, *Whistleblowing System* (WBS), *Code of Conduct*, dan kebijakan gratifikasi.

Perusahaan berkomitmen menjalankan praktik bisnis dengan integritas dan profesional, menghindari benturan kepentingan, menghindari bentuk-bentuk kecurangan (*fraud*), tidak mentoleransi suap, termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Antikorupsi

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi fokus utama pemerintah. Perusahaan mendukung penuh upaya pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Perusahaan termasuk interaksi Perwira PET dengan para pemangku kepentingan.

Komitmen PET dalam mencegah praktik korupsi telah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam menyelenggarakan iklim bisnis yang bersih dan transparan. Pencegahan praktik korupsi pada Perusahaan juga mencakup larangan praktik suap, pencucian uang, gratifikasi dan lain-lain.

Praktik Pengadaan Barang dan Jasa yang Transparan

Perusahaan telah menetapkan kebijakan praktik pengadaan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa No. A-001/ PKT0800/2022-S9 tanggal 1 Juli 2022. Dalam merespon kepentingan dan harapan dari para pemasok, Perusahaan melakukan pendekatan melalui survei kepuasan pemasok, dan proses pemilihan pemasok secara transparan serta adil melalui *e-procurement*.

Perusahaan berupaya untuk terus mendorong keterlibatan pemasok lokal/nasional pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan. Diharapkan keterlibatan pemasok lokal/nasional dalam rantai nilai

Fundamentally, the Company's responsibility in fair operating practices involves ethical behavior in its transactions with other companies or organizations. As a professionally managed entity, ethical business conduct is essential for maintaining good relationships with relevant stakeholders.

The Company's commitment to ethical business practices is demonstrated through the implementation of internal control policies, a Whistleblowing System (WBS), a Code of Conduct, and a gratuity policy.

The Company is committed to conducting business with integrity and professionalism, avoiding conflicts of interest, preventing fraud, and not tolerating bribery, including corruption, collusion, and nepotism (KKN).

Anti-Corruption

Efforts to prevent and eradicate corruption have become the government's main focus. The Company fully supports the government's efforts to prevent and eradicate corruption within the Company's environment, including the interaction of PET Officers with stakeholders.

PET's commitment to preventing corrupt practices aligns with the government's goal of creating a clean and transparent business climate. The prevention of corrupt practices within the Company also includes prohibiting practices such as bribery, money laundering, gratuities, and others.

Transparent Procurement of Goods and Services Practices

The Company has established a procurement practice policy through the Procurement Guidelines for Goods and Services No. A-001/PKT0800/2022-S9 dated July 1, 2022. In response to the interests and expectations of suppliers, the Company conducts supplier satisfaction surveys, and the supplier selection process is carried out transparently and fairly through *e-procurement*.

The Company strives to continually encourage the involvement of local/national suppliers in the procurement of goods and services within the Company's environment.

Perusahaan dapat meningkatkan mutu produk dan layanan mereka saat bersaing di tingkat regional/ internasional.

It is aimed the involvement of local/national suppliers in the Company's value chain can enhance the quality of their products and services as they compete at the regional/international level.

Keterlibatan Politik Yang Bertanggung Jawab

Perwira PET, selaku warga Negara, memiliki hak asasi untuk berkumpul, berserikat, berorganisasi dan menyalurkan aspirasi politik dan sosialnya. Perusahaan tidak memaksa, mempengaruhi atau mengarahkan partisipasi individu dalam berkontribusi di bidang politik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas karyawan dalam politik ditanggung oleh yang bersangkutan.

Responsible Political Engagement

PET Officers, as citizens, have the fundamental rights to assemble, associate, organize, and express their political and social aspirations. The Company does not coerce, influence, or direct individual participation in political contributions. Any consequences arising from employees' political activities are the responsibility of the individuals involved.

Bagi Perwira PET yang mencalonkan diri menjadi pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif maka yang bersangkutan harus non-aktif selama pencalonannya. Jika yang bersangkutan telah menjadi pengurus partai politik dan/atau menjadi anggota legislative maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Perusahaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

For PET Officers who nominate themselves as officials of political parties and/or legislative members, they must take a leave of absence during their candidacy. If they have already held positions within political parties and/or legislative bodies, they must resign from the Company in accordance with applicable laws and regulations.

Persaingan Sehat

Perusahaan menjunjung tinggi etika bisnis dan berkompetisi secara sehat, jujur dan *fair* dengan para pesaing. Perkembangan bisnis ke depan yang semakin ketat dan terbuka menuntut Perusahaan untuk terus berinovasi. Oleh karenanya Perusahaan memandang dan menempatkan pesaing sebagai pemacu untuk terus meningkatkan diri sehingga mampu bersaing dalam kompetisi bisnis. Perusahaan menghindari melakukan kesepakatan yang tidak wajar dengan pelaku industri lainnya, untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan pelanggan.

Healthy Competition

The Company upholds business ethics and competes fairly, honestly, and equitably with competitors. The increasingly fierce and open business landscape demands continuous innovation from the Company. Therefore, the Company views and positions competitors as drivers for self-improvement to remain competitive in the business arena. The Company avoids entering into unreasonable agreements with other industry players to gain profits at the expense of customer interests.

Tanggung Jawab Sosial dalam Penerapan HAM

Social Responsibility in the Implementation of Human Rights

Perlindungan Hak Adat Istiadat, Budaya dan Agama

Lokasi operasi Perusahaan yang tersebar di wilayah Indonesia menjadi sebuah keuntungan sekaligus tantangan bagi Perusahaan. Perbedaan wilayah ini memungkinkan adanya perbedaan budaya, suku, ras, dan agama. Kaya nilai perbedaan di setiap wilayah Indonesia menjadi sebuah nilai tambah keberagaman akan SDM baik di dalam Perusahaan maupun diluar Perusahaan.

Untuk menjaga harmonisasi pada insan di luar Perusahaan khususnya masyarakat lokal, Perusahaan senantiasa menjaga komunikasi dan interaksi serta melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan pemangku kepentingan. Pendekatan yang dilakukan juga selalu dilandasi dengan prinsip toleransi terhadap adat budaya tanpa harus bertentangan dengan adat dan budaya setempat.

Selain pada adat dan budaya, Perusahaan juga selalu memperhatikan hak asasi dalam menganut kepercayaan. Perusahaan memberikan toleransi untuk menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, Perusahaan juga berupaya memastikan kesetaraan hak serta kesempatan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam praktik bisnis yang dijalankan Perusahaan.

Landasan dasar kebijakan pengelolaan hak asasi manusia bisa mengacu pada ISO 26000 Tanggung Jawab Sosial. Hal ini meliputi praktik nondiskriminasi dan perhatian pada kelompok rentan; termasuk di dalamnya masyarakat lokal, perempuan, orang dengan disabilitas dan lain-lain.

Perusahaan memiliki komitmen untuk tidak mempekerjakan anak sejalan dengan Konvensi ILO No. 138/1973 tentang Batas Usia Minimum untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*), dan Konvensi ILO No. 182/1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (*Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Sedangkan komitmen untuk tidak melakukan kerja paksa selaras dengan Konvensi ILO No. 29/1930 tentang Kerja Paksa atau Kerja Wajib (*Forced or Compulsory Labour*), dan Konvensi ILO No. 105/1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*).

Protection of Customary Rights, Culture, and Religion

The Company's operations spread across various regions in Indonesia present both advantages and challenges. The diversity of these regions allows for differences in culture, ethnicity, race, and religion. The richness of these differences in each Indonesian region adds value to the diversity of human resources both within and outside the Company.

To maintain harmony with individuals outside the Company, especially the local community, the Company consistently fosters communication and interaction, engaging in activities involving stakeholders. The approach taken is always grounded in the principle of tolerance towards cultural customs without conflicting with local customs and culture.

In addition to customs and culture, the Company also prioritizes the fundamental rights to practice beliefs. The Company tolerates individuals to practice their respective beliefs freely. Furthermore, the Company strives to ensure equal rights and opportunities to participate and contribute to the business practices conducted by the Company.

The fundamental basis for human rights management policies can refer to ISO 26000 Social Responsibility. It includes non-discrimination practices and attention to vulnerable groups, including local communities, women, persons with disabilities, and others.

The Company is committed to not employing children in line with the ILO Convention No. 138/1973 concerning the Minimum Age for Admission to Employment and ILO Convention No. 182/1999 concerning the Elimination of the Worst Forms of Child Labor. Additionally, the commitment to refrain from engaging in forced labor is in line with ILO Convention No. 29/1930 on Forced or Compulsory Labor and ILO Convention No. 105/1957 on the Abolition of Forced Labor.

Tanggung Jawab Sosial terhadap Lingkungan Hidup

Social Responsibility towards the Environment

Komitmen dan Kebijakan

Faktor lingkungan hidup menjadi perhatian khusus bagi Perusahaan mengingat operasi bisnis PET memiliki risiko dan dampak pada kelestarian lingkungan. Perusahaan menilai bahwa aspek pelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu faktor utama untuk menunjang keberlanjutan usaha di masa yang akan datang.

Untuk turut menjaga kelestarian lingkungan hidup Perusahaan melakukan beberapa kebijakan yang ramah lingkungan. Kegiatan tanggung jawab sosial di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh PET tidak hanya secara seremonial, tetapi juga mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari seluruh Perwira PET.

Pengaduan terkait Masalah Lingkungan

Pada tahun 2023, tidak terdapat pengaduan terkait masalah lingkungan.

Kegiatan dan Dampaknya
Penghijauan (Program Kampung Iklim)

Commitment and Policies

Environmental factors are of particular concern to the Company, given PET's business operations carry risks and impacts on environmental sustainability. The Company believes environmental conservation is one of the key factors to support business sustainability in the future.

To contribute to environmental conservation, the Company has implemented several environmentally friendly policies. PET's social responsibility activities in the environmental field are not merely ceremonial; they are also integrated into the daily lives of all PET Officers.

Complaints Related to Environmental Issues

In 2023, there were no complaints related to environmental issues.

Activity and its Impact
Reforestation (Climate Village Program)



Deskripsi Program

Program Penghijauan (Program Kampung Iklim) di RW 06 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten merupakan program yang bertujuan untuk meminimalisir dampak dari efek Gas Rumah Kaca (GRK) dan juga dilakukan guna merespon isu perubahan iklim. Program ini merupakan kolaborasi antara Terminal LPG Tanjung Sekong dengan masyarakat terutama ibu-ibu yang nantinya menjadi Kelompok Wanita Tani di RW 06. yang mencakup kegiatan pembuatan hidroponik hingga Legalitas Kelompok Wanita Tani Wahid Sapa.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp28.750.000 (Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Program Description

The Reforestation Program (Climate Village Program) in RW 06, Lebak Gede Village, Pulomerak District, Cilegon, Banten aims to minimize the impact of Greenhouse Gas (GHG) emissions and respond to climate change issues. This program is a collaboration between the Tanjung Sekong LPG Terminal and the community, particularly womens who will form the Women Farmers Group in RW 06. It encompasses activities ranging from hydroponic cultivation to obtaining legal recognition for the Women Farmers Group Wahid Sapa.

Implementation Costs

The realized budget for this assistance amounted to Rp28,750,000 (Twenty-Eight Million Seven Hundred Fifty Thousand Rupiah).



TJSL Fuel Terminal Baubau Program Rehabilitasi Terumbu Karang Melalui Upaya Transplantasi Fuel Terminal Baubau

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp196.500.000 (Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

SER Fuel Terminal Baubau Coral Reef Rehabilitation Program through Coral Transplantation Efforts at the Fuel Terminal Baubau

Implementation Cost

The budget allocated for this assistance amounts to Rp196,500,000 (One hundred and ninety-six million five hundred thousand Indonesian Rupiah).



Gambar Proses fragmentasi
Figure Fragmentation Process



Gambar Monitoring media
Figure Media Monitoring



Deskripsi Program

Program Kehati Taman Nasional Ujung Kulon merupakan sinergi antara Terminal LPG Tanjung Sekong-PT Pertamina Energy Terminal a subsidiary of PT Pertamina International Shipping dengan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Program Kehati memiliki misi sebagai partisipasi aktif multi pihak dalam usaha konservasi Badak Jawa yang disertai peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar habitat badak secara berkelanjutan. Kegiatan ini dikemas dalam kegiatan *Rhino Goes To School*.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp201.250.000 (Dua Ratus Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Sumber : Dokumentasi BTNUK 2023

Program Description

The Kehati Program at Ujung Kulon National Park is a collaboration between Terminal LPG Tanjung Sekong-PT Pertamina Energy Terminal, a subsidiary of PT Pertamina International Shipping, and the Ujung Kulon National Park Agency. The Kehati Program aims to actively engage multiple stakeholders in the conservation efforts of the Javan Rhino while at the same time promoting sustainable economic development for the communities surrounding the rhino habitat. The conducted activities are *Rhino Goes To School*.

Implementation Costs

The realized budget for this assistance is Rp201,250,000 (Two Hundred One Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah).



Source: Documentation of BTNUK 2023



Kegiatan Pertamina Lestari masuk ke dalam pilar lingkungan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan ekosistem hutan mangrove dengan melakukan penanaman 1500 pohon mangrove dan pembibitan 3000 mangrove serta memberikan pelatihan kepada warga disekitar pinggir laut yang dilaksanakan di kelurahan Belakang Padang, Batam.

Pertamina Lestari's activities fall under the environmental pillar, aiming to preserve the sustainability of the mangrove ecosystem by planting 1500 mangrove trees, propagating 3000 mangroves, and providing training to coastal residents which conducted at Belakang Padang Sub-district, Batam.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp99.100.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta Seratus ribu rupiah).

Implementation Costs

The realized budget for this assistance amounted to Rp99,100,000 (Ninety-Nine Million One Hundred Thousand Rupiah).





Sertifikasi atas Pengelolaan Lingkungan

Sertifikasi



Certification of Environment Management

Certification

01

Nama Sertifikasi
Certification Name

ISO 14001:2015 -
Environmental Management System
(FT Kotabaru)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
bsi

Masa Berlaku
Validity Period
11 September 2021 - 10 September 2024
September 11, 2023 - September 10, 2024

02

Nama Sertifikasi
Certification Name

ISO 9001:2015 -
Quality Management System
(FT Kotabaru)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
bsi

Masa Berlaku
Validity Period
11 September 2021 - 10 September 2024
September 11, 2023 - September 10, 2024



03

Nama Sertifikasi
Certification Name

ISO 45001:2018 -
Occupational Health & Safety System
(FT Kotabaru)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
bsi

Masa Berlaku
Validity Period
26 November 2021 - 25 November 2024
November 26, 2023 - November 25, 2024

04

Nama Sertifikasi
Certification Name
SNI ISO/IEC 17025:2005 Pertamina Pulau
Sambu

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia

Masa Berlaku
Validity Period
20 Januari 2021-19 Januari 2026
January 20, 2021 - January 19, 2026



05

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 14001:2015 -
Environmental Management System
(FT Baubau)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
bsi

Masa Berlaku
Validity Period
5 September 2022 - 20 Oktober 2024
September 5, 2022 - October 20, 2024

05



07

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 9001:2015 -
Quality Management System
(FT Baubau)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
bsi

Masa Berlaku
Validity Period
5 September 2022 - 20 Oktober 2024
September 5, 2022 - October 20, 2024

06

Nama Sertifikasi
Certification Name
ISO 45001:2018 -
Occupational Health & Safety System
(FT Baubau)

Badan/Lembaga Pemberi Sertifikasi
Certification Agency/Instancy
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia

Masa Berlaku
Validity Period
5 September 2022 - 20 Oktober 2024
September 5, 2022 - October 20, 2024

07



06



Tanggung Jawab Sosial terhadap Masyarakat

Social Responsibility to the Community

Program *community development* yang dilaksanakan PET, adalah program kegiatan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

PET's community development program is a systematic and planned program aimed at enhancing community access to achieve better social, economic, and quality of life conditions.

PET senantiasa berkomitmen untuk terus menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui komitmen tersebut, Perusahaan merencanakan dan menetapkan program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sesuai kebutuhan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jangka panjang, Perusahaan berupaya menciptakan sinergi yang baik dan tumbuh bersama para pemangku kepentingan sebagai modal sosial dalam menjamin keberlanjutan Perusahaan.

PET is committed to continuously implementing community development and empowering programs to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs). Through this commitment, the Company plans and establishes targeted programs that provide benefits according to the needs as mandated by applicable regulations and laws. In the long term, the Company strives to create good synergy and grow together with stakeholders as social capital to ensure its sustainability.

Pelaksanaan Kegiatan dan Dampaknya

Implementation of Activities and Its Impacts

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat antara lain:

Throughout the year 2023, the Company has implemented various social responsibility activities towards the community, including:

Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah

Empowerment of Communities through Waste Bank-Based Programs



Deskripsi Program

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Bank Sampah Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten merupakan program Program TJSL pemilahan sampah anorganik dan organik atau sampah rumah tangga, pemberian sarana dan prasarana penunjang bank sampah serta mengumpulkan nasabah.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp109.250.000,- (Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Program Description

The Community Empowerment Program based on Waste Banks in Lebak Gede Village, Pulomerak District, Cilegon, Banten is a SER program focused on the separation of inorganic and organic household waste. This initiative includes providing supporting facilities and infrastructure for the waste bank and gathering customers.

Implementation Costs

The budget realized for this assistance is Rp109,250,000 (One Hundred Nine Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah).





Ocean Literacy

Ocean Literacy



Resume Kegiatan

Activity Summary

Program CSR/TJSL berupa perbaikan sarana Perpustakaan SDIT Bahtera Insani, penambahan rak dan buku buku bacaan, penambahan gambar dinding yang menarik salah satunya logo Seanergi Pertamina International Shipping, hal ini dilakukan untuk mendorong minat membaca dari siswa dan siswi SDIT Bahtera Insani dan menjadikan perpustakaan merupakan tempat atau sumber dari Ilmu yang didapat dari membaca. Program ini diberikan diarea Ring I Integrated Terminal Tanjung Uban, tepatnya di Kp. Bugis – Tanjung Uban Utara

The CSR/SER program involved improving the library facilities at SDIT Bahtera Insani by adding bookshelves, reading books, and attractive wall decorations, including the Seanergi Pertamina International Shipping logo. This initiative aims to boost the students' interest in reading and establish the library as a significant source of knowledge. The program was implemented in the Ring I area of Integrated Terminal Tanjung Uban, specifically in Kp. Bugis – Tanjung Uban Utara.

Biaya Pelaksanaan

Implementation Cost

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp102.250.000,- (Seratus Dua juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah).

The realized budget for the assistance is Rp102.250.000 (One Hundred Two Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah).



Program Pelatihan dan Bantuan Kepada Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia DPC Kecamatan Bintan Utara

Assistance Program for the Indonesian Traditional Fishermen Union, DPC North Bintan District



Deskripsi Program

Program CSR/TJSL berupa Sosialisasi Kewirausahaan dan pemberian Bubu Ketam/Kepiting dan Jaring Khusus Udang kepada Nelayan Tradisional yang berada di Kampung Mentigi Kelurahan Tanjung Uban Kota yang tergabung dalam organisasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) DPC Kecamatan Bintan Utara Program ini diberikan diarea Ring I Integrated Terminal Tanjung Uban, tepatnya di Kp. Mentigi – Kelurahan Tanjung Uban Kota, Kecamatan Bintan Utara.

Program Description

The CSR/SER program provided 2250 Bubu Ketam/ Crab traps and 45 special shrimp nets to traditional fishermen in Kampung Mentigi, Tanjung Uban Kota District, who are members of the Indonesian Traditional Fishermen’s Union (KNTI) DPC Kecamatan Bintan Utara. This program was implemented in the Ring I area of Integrated Terminal Tanjung Uban, specifically in Kampung Mentigi, Tanjung Uban Kota Subdistrict, North Bintan District.



Program Bantuan Kepada Yayasan Cahaya Lentera Difa

Assistance Program for Cahaya Lentera Difa Foundation



Deskripsi Program

Program CSR/TJSL berupa pembekalan dan dukungan peralatan karya seni membatik dan perluasan tempat kerja bagi anak-anak difabel dalam aktifitasnya di Yayasan Lentera Cahaya Difa yang berada di Jalan Permaisuri No. 33B Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kecamatan Bintan Utara.

Program Description

CSR/SER program in the form of support for batik-making equipment and expansion of workspace for disabled children in their activities at the Lentera Cahaya Difa Foundation located at Jalan Permaisuri No. 33B, South Tanjung Uban Selatan District, North Bintan District.





Pertamina Ocean Literacy

Pertamina Ocean Literacy



Deskripsi Program

Program TJSL PERTAMINA OCEAN LITERACY merupakan salah satu program yang memiliki focus untuk adalah Pengenalan lingkungan maritime, pengenalan Lingkup Bisnis & Keanekaragaman Hayati serta berbagi Keperluan Sekolah untuk Siswa Berprestasi dan Siswa

Program Description

The PERTAMINA OCEAN LITERACY SER Program is one that focuses on introducing the maritime environment, understanding the scope of business and biodiversity, as well as providing school supplies for high-achieving and underprivileged students and honorary teachers.

Kurang mampu serta guru Honorer sebagai wujud pedulinya perusahaan terhadap dunia Pendidikan di Kecamatan Belakang Padang.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp.102.250.000,- (Seratus Dua juta Dua ratus Lima puluh ribu rupiah).

This initiative demonstrates the Company's concern for education in the Belakang Padang District.

Implementation Cost

The realized budget for this assistance is Rp.102,250,000 (One Hundred Two Million Two Hundred Fifty Thousand Rupiah)



Tanggung Jawab Sosial terhadap K3

Social Responsibility towards OHS

Aspek ketenagakerjaan dan K3 merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang keberlanjutan Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan menempatkan aspek Ketenagakerjaan dan K3 menjadi salah satu tanggung jawab sosial Perusahaan. Perusahaan yakin bahwa praktik ketenagakerjaan dan K3 yang dikelola dengan baik akan mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia yang unggul dan kompeten. Dalam bidang ketenagakerjaan, Perusahaan merujuk Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Komitmen Direksi dituangkan di dalam Kebijakan *Health, Safety, Security & Environment* (HSSE) yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 1 Februari 2022. Setiap tahun Fungsi HSSE Perusahaan merencanakan kegiatan implementasi aspek HSSE yang lebih baik. Upaya-upaya tersebut tercermin dalam program-program kerja HSSE yang difokuskan pada upaya menuju *zero incident*.

The aspects of employment and OHS are critical in supporting the sustainability of the Company. Therefore, the Company places employment and OHS aspects as one of its social responsibilities. The Company believes well-managed employment practices and OHS will promote the creation of superior and competent Human Resources. In the employment aspect, the Company refers to Law No. 13 of 2003 concerning Employment. The Board of Directors' commitment is outlined in the Health, Safety, Security & Environment (HSSE) Policy, which was signed by the Director on February 1, 2022. Each year, the Company's HSSE Function plans activities to implement better HSSE aspects. These efforts are reflected in HSSE work programs that focus on striving for zero incidents.



Pelaksanaan dan Kegiatan Ketenagakerjaan

1. Kesetaraan Gender dan Kesempatan Kerja

Dalam menjalankan proses rekrutmen calon Pegawai, Perusahaan senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya kepada siapapun tanpa memandang aspek gender, perbedaan etnis, agama, ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik tertentu. Perusahaan berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip non-diskriminasi di dalam proses rekrutmen Pegawai dengan membuka kesempatan kerja yang sama bagi perempuan (*gender equity and equality*), sejauh memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

2. Kesempatan Untuk Mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan

Perusahaan secara berkesinambungan menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan SDM yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi setiap Pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3. Fasilitas Pendukung Kesejahteraan Pegawai

Perusahaan telah menyediakan tempat/sarana ibadah yang bertujuan agar setiap Pegawai tetap dapat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing.

4. Kesejahteraan Pegawai

Perusahaan senantiasa memperhatikan kualitas kesejahteraan seluruh Pegawainya dengan memberikan kompensasi dan manfaat yang sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan oleh setiap Pegawai terhadap Perseroan demi terciptanya level produktivitas kerja yang optimal. Setiap Pegawai juga memiliki jatah cuti.

5. Kebebasan Berserikat

Seluruh hak dan kewajiban Pegawai telah tertuang di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pihak manajemen dan Serikat Pekerja. Perusahaan bersikap terbuka terhadap setiap perubahan kebijakan yang berkaitan dengan SDM.

6. Remunerasi Pegawai

Sebagai wujud kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, Perusahaan telah menetapkan kebijakan pemberian Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/P) yang besarnya disesuaikan dengan wilayah kerja operasional masing-masing Pegawai.

7. Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan

Apabila terjadi keluhan kesah dan perselisihan terkait ketenagakerjaan, Pegawai dapat melakukan pengaduan. Pada tahun 2023, tidak terdapat pengaduan yang masuk terkait ketenagakerjaan.

Implementation and Employment Activities

1. Gender Equality and Employment Opportunities

In the recruitment process of prospective employees, the Company upholds the principles of Human Rights by providing the broadest possible job opportunities to everyone regardless of gender, ethnicity, religion, race, class, or physical condition. The Company is committed to implementing non-discriminatory principles in the employee recruitment process by offering equal employment opportunities for women (*gender equity and equality*) as long as they meet the established requirements.

2. Opportunities for Education and Training Programs

The Company continuously organizes human resource education and training programs aimed at fulfilling the competency needs of each employee according to their respective fields.

3. Supporting Facilities for Employee Well Being

The Company provides places/facilities for worship so every employee can perform their religious practices and activities according to their beliefs.

4. Employee Well Being

The Company consistently considers the quality of well being for all its employees by providing compensation and benefits that match the contributions made by each employee to the Company, aiming to achieve an optimal level of work productivity. Every employee also has a leave allowance.

5. Freedom of Association

All the rights and obligations of employees are outlined in the Collective Labor Agreement (PKB) signed by the management and the Workers' Union. The Company is open to any policy changes related to human resources.

6. Employee Remuneration

As a form of the Company's compliance with applicable regulations in the field of labor, the Company has established a policy for providing the Regional/Provincial Minimum Wage (UMR/P), which is adjusted according to the operational work area of each employee.

7. Handling Employment Complaints

If there are complaints and disputes related to employment, employees can file complaints to the Company. In 2023, there were no complaints filed related to employment.



Deskripsi Program

Program Pengembangan Pemuda Berbasis Sertifikasi Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, Banten merupakan program Program TJSL dalam bidang *capacity building*. Program ini dimulai dari kegiatan pelatihan atau sertifikasi. Dengan kondisi pemuda-pemudi yang masuk ke dalam kategori pengangguran terbukaikutsertakan ke dalam sertifikasi akan menambah nilai jual mereka. Adapun sertifikasi yang dilaksanakan pada kegiatan CSR 2023 ialah Sertifikasi K3 Umum terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta dilanjutkan pembentukan paguyuban Safety Cilegon.

Biaya Pelaksanaan

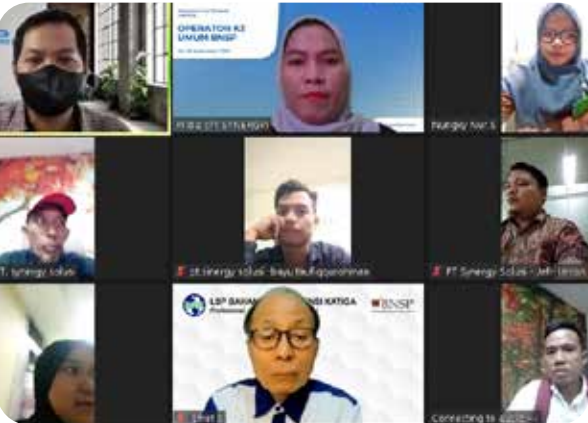
Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp86.250.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Program Description

The Youth Development Program Based on Certification in Lebak Gede Subdistrict, Pulomerak District, Cilegon, Banten is a SER program in the capacity building field. This program starts with training or certification activities. With youth falling into the category of open unemployment, participating in certification will increase their market value. The certification carried out in the CSR 2023 activities is the General OHS Certification related to Occupational Health and Safety. The follow-up to this certification activity is the establishment of the Cilegon Safety Community.

Implementation Costs

The budget allocated for this assistance was Rp86,250,000 (Eighty-six million two hundred fifty thousand Indonesian Rupiah).





Pemberdayaan dan Pelatihan Keselamatan Kerja, serta penggunaan APAR para juru kemudi Kapal Pancung di Kelurahan Belakang Padang. Selain itu juga dilakukan peremajaan kapal milik masyarakat di sekitar Ring 1 Fuel Terminal Pulau Sambu.

Biaya Pelaksanaan

Anggaran biaya yang direalisasikan untuk bantuan ini adalah senilai Rp85.050.000,- (Delapan puluh juta Lima puluh ribu rupiah).

This program involves empowering and providing safety training, as well as training on the use of fire extinguishers (APAR), for the helmsmen of Pancung boats in Belakang Padang Sub-district. Additionally, the program includes the rejuvenation of community-owned boats around the Ring 1 Fuel Terminal on Pulau Sambu.

Implementation Cost

The realized budget for the assistance is Rp85,050,000 (Eighty million and fifty thousand rupiah).

Main Overview
Management Report
Company Profile
Management Discussion and Analysis
Good Corporate Governance
Corporate Social Responsibility





Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

Social Responsibility Towards Customers

PET memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa meningkatkan kualitas produk serta layanan yang diberikan pada pelanggan, dengan terus menjaga kepentingan seluruh pelanggan. Perusahaan menyadari bahwa produk dan layanan berkualitas menjadi kunci dalam menjaga loyalitas pelanggan untuk menjaga keberlangsungan bisnis Perusahaan. Perusahaan juga telah memiliki kebijakan dan prosedur untuk menjaga kepuasan pelanggan dan sebagai bentuk tanggungjawab kepada pelanggan.

Komitmen dan Kebijakan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Oleh sebab itu, Perusahaan terus meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen karena konsumen merupakan kunci penting dan menjadi prioritas Perusahaan, hal tersebut diterapkan agar usaha yang dijalankan oleh Perusahaan mampu untuk terus bertahan. Komitmen pada penerapan tanggung jawab terhadap produk/jasa kepada pelanggan, dilaksanakan dengan upaya untuk memberikan pelayanan terbaik, baik dalam segmen usaha penyimpanan produk BBM/LPG, penyediaan *fresh water* dengan menjamin kualitas jasa yang diberikan melalui pengelolaan manajemen mutu. Sementara komitmen pada penerapan tanggung jawab produk/jasa kepada pemasok, dilaksanakan dengan penerapan proses tender/lelang yang terbuka dan pemenuhan kewajiban sesuai kontrak pemberian pekerjaan.

Program Peningkatan Layanan Kepada Pelanggan

Fungsi *Commercial & Business Optimization* menjaga kedekatan dalam melakukan identifikasi dan inovasi produk yang ditawarkan serta untuk menyediakan dukungan kepada pelanggan dengan tetap menyesuaikan kebutuhan. Upaya berkelanjutan untuk peningkatan kinerja operasi dan layanan diluncurkan perusahaan dengan melaksanakan *program strategic initiative*.

PET is deeply committed to continually improving the quality of products and services provided to customers while maintaining the customers' interests. The Company realizes the quality products and services are key to maintaining customer loyalty and sustaining the business. PET has policies and procedures in place to ensure customer satisfaction as a form of responsibility to its customers.

Commitment and Policy

In accordance with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, a consumer is defined as anyone who uses goods and/or services available in society, whether for personal, family, other people's, or other living beings' interests and not for trade. Therefore, the Company continuously enhances consumer trust and satisfaction as consumers are a crucial key and priority for the Company, ensuring the Company's endeavors can persist. Commitment to the implementation of responsibility towards products/services to customers is carried out by efforts to provide the best service, both in the business segment of storing Fuel/LPG products and providing fresh water, ensuring the quality of services provided through quality management. Meanwhile, the commitment to the implementation of responsibility towards products/services to suppliers is carried out by implementing open tender/bidding processes and fulfilling obligations according to the job contract.

Customer Service Improvement Program

The Commercial & Business Optimization function maintains closeness in identifying and innovating offered products and providing support to customers while adapting to their needs. Continuous efforts to improve operational performance and services are launched by the Company through the implementation of strategic initiative programs.

Saluran penyampaian keluhan

Salah satu bentuk kepedulian PET terhadap konsumen atau pelanggan adalah dengan memberikan hak yang seluas- luasnya bagi konsumen atau pelanggan untuk melakukan pengaduan terkait produk atau jasa. PET menyediakan saluran pengaduan melalui:

Telepon : (0254) 601146-601147

Faksimili: (0254) 601148

Email: corsec.pet@pertamina.com

Website: <https://pertamina-pet.com>

Prosedur Tindak Lanjut Atas Keluhan Pelanggan

1. *Customer Fresh Water/Terminal* akan mengirimkan laporan *feedback* atas aspek-aspek teknis kepada PIC yang berada di titik operasional.
2. PIC yang berada di titik operasional akan menyampaikan kepada Fungsi *Commercial & Business Optimization*.
3. Fungsi *Commercial & Business Optimization* akan meneruskan dan memverifikasi data kepada Fungsi operasional (Fungsi *Fresh Water Supply* dan Fungsi *Terminal Optimization & Standard Assurance*)
4. Fungsi Operasional akan menindaklanjuti laporan tersebut.
 - a. Jika laporan berkaitan dengan kelalaian SDM, maka Fungsi Operasional akan menindaklanjuti dan akan berkoordinasi dengan Fungsi *Business Support*.
 - b. Jika laporan berkaitan dengan kerusakan *asset* operasional yang digunakan, maka Fungsi Operasional akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Fungsi *Commercial & Business Optimization* dan Fungsi *Engineering & Reability* jika diperlukan adanya investasi
5. Fungsi *Commercial & Business Optimization* akan berkoordinasi kepada *customer* bahwa akan dilakukannya tindak lanjut mengenai *feedback* yang diberikan.

Biaya Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pelanggan

Selama tahun 2023, Perusahaan belum mengalokasikan biaya tanggung jawab sosial terhadap pelanggan secara khusus.

Complaint Channels

One form of PET's concern for consumers or customers is by providing extensive rights for consumers or customers to make complaints related to products or services. PET provides complaint channels through:

Telephone: (0254) 601146-601147

Fax: (0254) 601148

Email: corsec.pet@pertamina.com

Website: <https://pertamina-pet.com>

Customer Complaint Follow-Up Procedure

1. The Customer Fresh Water/Terminal will submit a feedback form on technical aspects to the designated PIC at the operational point.
2. The PIC at the operational point will convey the feedback to the Commercial & Business Optimization Function.
3. The Commercial & Business Optimization Function will forward and verify the data to the Operational Functions (Fresh Water Supply Function and Terminal Optimization & Standard Assurance Function).
4. The Operational Function will follow up on the report.
 - a. If the report relates to human resource negligence, the Operational Function will follow up and coordinate with the Business Support Function.
 - b. If the report relates to damage to operational assets, the Operational Function will follow up and coordinate with the Commercial & Business Optimization Function and the Engineering & Reliability Function if investment is required.
5. The Commercial & Business Optimization Function will coordinate with the customer regarding the follow-up on the provided feedback.

Cost of Social Responsibility Towards Customers

During the year 2023, the Company has not specifically budgeted for the cost of social responsibility towards customers.

Pernyataan Tanggung Jawab Dewan Komisaris atas Laporan Tahunan 2023 PT Pertamina Energy Terminal

Statement of Responsibility of the Board of Commissioners on the 2023 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

Berlandaskan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka PET menerbitkan Laporan Tahunan 2023 yang telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Laporan Tahunan 2023 PET menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, laporan keuangan konsolidasian untuk periode 01 Januari sampai 31 Desember 2023, serta informasi lain yang relevan dan signifikan bagi pemangku kepentingan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the prevailing regulations in Indonesia, PET issues the 2023 Annual Report, which has been fully and responsibly compiled for the accuracy of its contents, including the Annual Report and Financial Statements of the Company.

The PET 2023 Annual Report presents information regarding the Company's performance, implementation of Corporate Governance, execution of the Company's social responsibilities, consolidated financial statements for the period from January 1 to December 31, 2023, as well as other relevant and significant information for stakeholders.

This statement is made in good faith.

Jakarta, Mei 2024

Jakarta, May 2024



Bambang Sujito

Komisaris

Commissioner

Pernyataan Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Tahunan 2023 PT Pertamina Energy Terminal

Statement of Responsibility of the Board of Directors on the 2023 Annual Report of PT Pertamina Energy Terminal

Berlandaskan dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka PET menerbitkan Laporan Tahunan 2023 yang telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Laporan Tahunan 2023 PET menyajikan informasi mengenai kinerja Perusahaan, penerapan Tata Kelola Perusahaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan, laporan keuangan konsolidasian untuk periode 01 Januari sampai 31 Desember 2023, serta informasi lain yang relevan dan signifikan bagi pemangku kepentingan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Based on the principles of Good Corporate Governance (GCG) and the prevailing regulations in Indonesia, PET issues the 2023 Annual Report, which has been fully and responsibly compiled for the accuracy of its contents, including the Annual Report and Financial Statements of the Company.

The PET 2023 Annual Report presents information regarding the Company's performance, implementation of Corporate Governance, execution of the Company's social responsibilities, consolidated financial statements for the period from January 1 to December 31, 2023, as well as other relevant and significant information for stakeholders.

This statement is made in good faith.

Jakarta, Mei 2024

Jakarta, May 2024

Bayu Prostiyo

Direktur

Director

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

**CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

**LAPORAN KEUANGAN/
*FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2023/
*31 DECEMBER 2023***

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG/
DIRECTOR'S STATEMENT REGARDING**

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2023
SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2023**

**THE RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS AS AT
31 DECEMBER 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2023**

Atas nama Direksi, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

On behalf of the Director, I, the undersigned:

Nama : Bayu Prostiyo
Alamat : Jl. Raya Anyer Km. 119
Randakari, Ciwandan, Cilegon
Banten - 42446
Telepon : (0254) 601147 - 601148
Jabatan : Direktur

Name : Bayu Prostiyo
Address : Jl. Raya Anyer Km. 119
Randakari, Ciwandan, Cilegon
Banten - 42446
Telephone : (0254) 601147 - 601148
Position : Director

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Pertamina Energy Terminal ("Perusahaan");
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Pertamina Energy Terminal (the "Company");*
2. *The Company's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. a. *All information has been fully and correctly disclosed in the Company's financial statements;*
b. *The Company's financial statements do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or facts; and*
4. *I am responsible for the Company's internal control systems.*

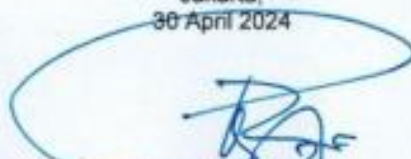
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Thus, this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi.

For and on behalf of the Director.

Jakarta,
30 April 2024



Bayu Prostiyo
Direktur/Director

PT Pertamina Energy Terminal
Kantor Pusat
Jalan Raya Anyer Km 119, Ciwandan
Cilegon, Banten 42466

Kantor Bisnis
Jalan Yos Sudarso No 205, Sunter
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14360

T (0254) 601146-601147 F 0254 601148
www.pertamina-pet.com



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pertamina Energy Terminal ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf "Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan" pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Opinion

We have audited the financial statements of PT Pertamina Energy Terminal (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements" paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 (21) 5099 2901 / 3119 2901, F: +62 (21) 5290 5555 / 5290 5050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

00857/2.1025/AU.1/10/1130-6/1/IV/2024

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditors' responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

JAKARTA,
30 April 2024

Daniel Kohar

Daniel Kohar, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1130



Perantara Energi Terbaruk
008572.1025/AU.1/10/1130-6/1/IV/2024

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 1/1 Schedule

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023
 (Disajikan dalam ribuan Rupiah)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023
(Expressed in thousands of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	4	664,535,031	532,135,822	Cash and cash equivalents
Piutang usaha				Trade receivables
- Pihak berelasi	5, 21	70,986,611	72,019,202	Related parties -
- Pihak ketiga	5	3,191,934	3,040,372	Third parties -
Aset kontrak				Contract assets
- Pihak berelasi	6, 21	228,949,130	163,166,081	Related parties -
- Pihak ketiga	6	3,663,605	9,053,739	Third parties -
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
- Pajak lain-lain	14a	-	20,446,589	Other taxes -
Persediaan		20,457	667,644	Inventories
Uang muka dan biaya dibayar dimuka		<u>273,465</u>	<u>342,829</u>	Advances and prepayments
Jumlah aset lancar		<u>971,620,233</u>	<u>800,872,278</u>	Total current assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap	7	6,828,196,678	6,465,383,116	Fixed assets
Aset hak-guna	13a	65,324,048	159,685,541	Right-of-use assets
Penyertaan saham	8, 21	1,313,570	1,194,214	Investment in shares
Pajak dibayar dimuka				Prepaid taxes
- Pajak lain-lain	14a	96,665,234	-	Other taxes -
Aset pajak tangguhan	14e	47,293,181	62,707,772	Deferred tax assets
Taksiran pengembalian pajak				Estimated claim for tax refund
- Pajak penghasilan	14b	25,936,505	2,296,824	Corporate income tax -
Aset tidak lancar lainnya		<u>-</u>	<u>1,774,617</u>	Other non-current assets
Jumlah aset tidak lancar		<u>7,064,729,216</u>	<u>6,693,042,084</u>	Total non-current assets
JUMLAH ASET		<u>8,036,349,449</u>	<u>7,493,914,362</u>	TOTAL ASSETS

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 1/2 Schedule

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali data saham)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
except share data)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang usaha				Trade payables
- Pihak berelasi	9, 21	117,339,255	87,489,901	Related parties -
- Pihak ketiga	9	16,596,447	19,636,781	Third parties -
Biaya masih harus dibayar	10	338,423,981	42,294,364	Accrued expenses
Utang pajak				Taxes payable
- Pajak penghasilan	14c	-	17,836,643	Corporate income tax -
- Pajak lain-lain	14c	8,808,620	6,104,257	Other taxes -
Liabilitas kontrak	17	-	314,116,000	Contract liabilities
Bagian jangka pendek dari liabilitas sewa	13b	73,206,947	72,467,328	Current portion of lease liabilities
Bagian jangka pendek dari liabilitas imbalan pasca kerja	12	<u>1,422,922</u>	<u>997,527</u>	Current portion of post-employment benefit obligations
Jumlah liabilitas jangka pendek		<u>555,798,172</u>	<u>560,942,801</u>	Total current liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa	13b	54,994,989	126,147,319	Lease liabilities
Liabilitas imbalan pasca kerja	12	23,277,449	14,823,382	Post-employment benefit obligations
Pinjaman pemegang saham	11	<u>543,135,276</u>	<u>-</u>	Shareholder loan
Jumlah liabilitas jangka panjang		<u>621,407,714</u>	<u>140,970,701</u>	Total non-current liabilities
JUMLAH LIABILITAS		<u>1,177,205,886</u>	<u>701,913,502</u>	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal per saham Rp1.000, modal dasar 38.214.276 lembar saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 9.957.086 lembar saham	15	9,957,086,000	9,957,086,000	Share capital - par Rp1,000 per shares, share capital authorised 38,214,276 shares, share capital issued and fully paid 9,957,086 shares
Tambahan modal disetor	15	(3,241,595,356)	(3,241,595,356)	Additional paid-in capital
Rugi komprehensif lain		(2,884,576)	(1,926,270)	Other comprehensive loss
Saldo laba				Retained earnings
- Dicadangkan	16	10,220,812	10,220,812	Appropriated -
- Belum dicadangkan		<u>136,316,683</u>	<u>68,215,674</u>	Unappropriated -
JUMLAH EKUITAS		<u>6,859,143,563</u>	<u>6,792,000,860</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>8,036,349,449</u>	<u>7,493,914,362</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an
integral part of these financial statements.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 2 Schedule

**LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Catatan/ Notes	023	2022	
Pendapatan	17	953,536,263	950,826,380	Revenue
Beban pokok pendapatan	18	(859,791,613)	(849,311,367)	Cost of revenue
Laba bruto		93,744,650	101,515,013	Gross profit
Beban umum dan administrasi	19	(76,759,071)	(76,329,330)	General and administrative expenses
Pendapatan keuangan		5,738,039	1,280,154	Finance income
Beban keuangan		(6,970,466)	(8,278,007)	Finance costs
Lain-lain, bersih	20	75,458,611	1,681,870	Others, net
Laba sebelum pajak penghasilan		91,211,763	19,869,700	Profit before income tax
Beban pajak penghasilan	14d	(23,110,754)	(6,697,097)	Income tax expense
Laba tahun berjalan		68,101,009	13,172,603	Profit for the year
Penghasilan komprehensif lain				Other comprehensive income
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	12	(1,347,953)	2,735,000	Remeasurement of post-employment benefit liabilities
Pajak penghasilan terkait	14e	296,549	(601,700)	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain		119,357	195,210	Changes in fair value of equity instruments at fair value through other comprehensive income
Pajak penghasilan terkait		(26,259)	(42,946)	Related income tax
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan		67,142,703	15,458,167	Total comprehensive income for the year

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 3 Schedule

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**
(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2023**
(Expressed in thousands of Rupiah)

	Modal/ saham/ Share capital	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	(Rugi)/ pendapatan komprehensif lain/ Other comprehensive (loss)/income	Dicadangkan/ Appropriated	Saldo labal/ Retained earnings	Jumlah/ Total
					Belum dicadangkan/ Unappropriated	
Saldo 1 Januari 2022	9,553,569,000	(3,241,595,356)	(4,211,834)	10,220,812	55,043,071	6,373,025,693
Penerbitan saham	403,517,000	-	-	-	-	403,517,000
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	13,172,603	13,172,603
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak:						
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	2,133,300	-	-	2,133,300
- Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	152,264	-	-	152,264
Saldo 31 Desember 2022	9,957,086,000	(3,241,595,356)	(1,926,270)	10,220,812	68,215,674	6,792,000,860
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	68,101,009	68,101,009
Penghasilan komprehensif lain setelah pajak:						
- Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja	-	-	(1,051,404)	-	-	(1,051,404)
- Perubahan nilai wajar instrumen ekuitas melalui penghasilan komprehensif lain	-	-	93,098	-	-	93,098
Saldo 31 Desember 2023	9,957,086,000	(3,241,595,356)	(2,884,576)	10,220,812	136,316,683	6,859,143,563

Balance as at 1 January 2022

Share issuance

Profit for the year

Other comprehensive
income, net of tax:
Remeasurement of post -
employment benefit liabilities
Changes in fair value of equity -
instruments at fair value through
other comprehensive income

Balance as at 31 December 2022

Profit for the year

Other comprehensive
income, net of tax:
Remeasurement of post -
employment benefit liabilities
Changes in fair value of equity -
instruments at fair value through
other comprehensive income

Balance as at 31 December 2023

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an
integral part of these financial statements.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 4 Schedule

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah)

**STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Arus kas dari aktivitas operasi				Cash flows from operating activities
Penerimaan kas dari pelanggan		893,734,941	925,061,941	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan		(743,853,138)	(346,005,163)	Cash paid to suppliers and employees
Penerimaan kas dari pendapatan keuangan		5,738,039	1,280,154	Cash receipts from finance income
Pembayaran atas pajak penghasilan badan		(48,902,197)	(807,490)	Payments of corporate income taxes
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi		<u>106,717,645</u>	<u>579,529,442</u>	Net cash flows provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas investasi				Cash flows from investing activities
Perolehan aset tetap		(515,906,551)	(356,211,246)	Acquisition of fixed assets
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(515,906,551)</u>	<u>(356,211,246)</u>	Net cash flows used in investing activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan				Cash flows from financing activities
Penerimaan dari pinjaman pemegang saham	11	545,208,300	48,000,000	Proceeds from shareholder loan
Pembayaran liabilitas sewa	13b	(3,209,342)	(2,829,731)	Repayments of lease liabilities
Pembayaran beban bunga liabilitas sewa	13b	(410,843)	(108,148)	Payments of interest expense of lease liabilities
Penerimaan dari penerbitan saham	15	-	250,388,091	Proceeds from issuance of shares
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>541,588,115</u>	<u>295,450,212</u>	Net cash flows provided from financing activities
Kenaikan neto kas dan setara kas		132,399,209	518,768,408	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	4	<u>532,135,822</u>	<u>13,367,414</u>	Cash and cash equivalents at beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	<u>664,535,031</u>	<u>532,135,822</u>	Cash and cash equivalents at end of the year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/1 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Pertamina Energy Terminal, dahulu PT Peteka Karya Tirta, ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 69 oleh Ny. Yetty Taher, S.H., tanggal 21 Januari 1988 di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. 02-3306 HT.01.01.TH.89 tanggal 14 April 1989 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 69 tanggal 30 Maret 1989 dengan nama PT Peteka Karya Tirta. Nama Perusahaan diubah menjadi PT Pertamina Energy Terminal berdasarkan Akta Notaris No. 17 tanggal 28 November 2022 oleh Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0086649.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir berdasarkan Akta No. 06 tanggal 7 Juli 2023 dari Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, mengenai perubahan Direksi Perusahaan. Perubahan anggaran dasar tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0135894 tanggal 7 Juli 2023.

Sesuai dengan Akta No. 03 tanggal 19 Agustus 2021 oleh Notaris Anizar, S.H., M.KN., yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-0044880.AH.01.02. tahun 2021 tanggal 20 Agustus 2021, Perusahaan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Penyediaan air untuk industri air kemasan dan air minum isi ulang;
- b. Konstruksi jaringan irigasi dan drainase, konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih, dan konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair dan gas;
- c. Perdagangan besar bahan dan barang kimia;
- d. Angkutan melalui saluran pipa;
- e. Pergudangan dan penyimpanan;
- f. Penyimpanan minyak dan gas bumi;
- g. Aktivitas penyimpanan B3; dan
- h. Pergudangan dan penyimpanan lainnya.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION

a. Establishment and general information

PT Pertamina Energy Terminal, formerly PT Peteka Karya Tirta, (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 69 by Ny. Yetty Taher, S.H., dated 21 January 1988 in Jakarta. The deed of establishment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 02-3306 HT.01.01.TH.89 dated 14 April 1989 and was published in the State Gazette No. 69 dated 30 March 1989. under the name of PT Peteka Karya Tirta. The Company's name was changed to PT Pertamina Energy Terminal based on Notarial Deed No. 17 dated 28 November 2022, of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., notary in West Jakarta. The deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0086649.AH.01.02 Year 2022 dated 30 November 2022.

The Company's Articles of Association have been amended several times. The latest amendment was made by Notarial Deed No. 06 dated 7 July 2023 of Ivan Lazuardi Suwana, S.H., M.Kn., Notary in West Jakarta, concerning changes in the Director of the Company. The amendment to the articles of association has been notified to the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0135894 dated 7 July 2023.

In accordance with its Articles of Association under Notarial Deed No 03 dated 19 August 2021 of Anizar, S.H., M.KN., which was registered by the Minister of Law and Human Rights through its Letter No. AHU-0044880.AH.01.02. year 2021 dated 20 August 2021, the Company shall conduct the following main businesses:

- a. Supply of water for the bottled water and refill drinking water industry;
- b. Construction of irrigation and drainage networks, construction of clean water treatment civil buildings, and construction of civil buildings, infrastructure and facilities for solid, liquid and gas waste treatment systems;
- c. Wholesale of chemical materials and goods;
- d. Supply by pipeline;
- e. Warehousing and storage;
- f. Oil and gas storage;
- g. B3 storage activities; and
- h. Warehousing and other storage.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/2 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan informasi umum (lanjutan)

Perusahaan berdomisili di Cilegon, Banten dan memiliki 26 kantor cabang yang, antara lain, terletak di Batam, Teluk Kabung, Dumai, Tanjung Uban, Tanjung Panjang, Tanjung Priok, Balongan, Cirebon, Merak, Balikpapan, Pontianak, Pekanbaru, Belawan, Wayame, Plaju, Surabaya, Gresik, Tuban, Kupang, Maumere, Manggis, Cilacap, Tanjung Sekong, Kota Baru, Bau-Bau dan Sambu.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1988.

b. Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023
Komisaris	Hufron
Direktur	Bayu Prostiyo

c. Penyelesaian atas laporan keuangan

Laporan keuangan ini diotorisasi untuk diterbitkan sesuai dengan resolusi Direksi Perusahaan pada tanggal 30 April 2024.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi material yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan, yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten terhadap tahun yang disajikan, kecuali dinyatakan lain.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah disusun berdasarkan dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

a. Establishment and general information (continued)

The Company is domiciled in Cilegon, Banten and has 26 branches located, among others, in Batam, Teluk Kabung, Dumai, Tanjung Uban, Tanjung Panjang, Tanjung Priok, Balongan, Cirebon, Merak, Balikpapan, Pontianak, Pekanbaru, Belawan, Wayame, Plaju, Surabaya, Gresik, Tuban, Kupang, Maumere, Manggis, Cilacap, Tanjung Sekong, Kota Baru, Bau-Bau and Sambu.

The Company commenced its commercial operations in 1988.

b. Boards of Commissioner and Director

The composition of the Company's Board of Commissioner and Director as at 31 December 2023 and 2022 was as follows:

	2023	2022
Komisaris	Hufron	Commissioner
Direktur	Bayu Prostiyo	Hari Purnomo Director

c. Completion of the financial statements

These financial statements were authorised for issue in accordance with a resolution of the Director of the Company on 30 April 2024.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the material accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company, which are in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

The accounting policies have been consistently applied to all the years presented, unless otherwise stated.

a. Basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/3 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan telah disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, serta menggunakan dasar akrual kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi dan juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau kompleks atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

PSAK dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru/revisi berikut telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku pada atau setelah 1 Januari 2023 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi;
- Amendemen PSAK 16 "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- Amendemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan" tentang definisi estimasi akuntansi;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan" tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal;
- Amendemen PSAK 46 "Pajak Penghasilan: Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua"; dan
- Amendemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah" tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akad ijarah.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies for those accounts and using accrual basis except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS")

The following new/revised SFAS and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued and effective for financial year starting on or after 1 January 2023 did not result in changes to the Company's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current year or prior year:

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about disclosure of accounting policies;
- The amendments to SFAS 16 "Property, Plant and Equipment" about proceeds before intended use;
- The amendments to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" about definition of accounting estimates;
- The amendments to SFAS 46 "Income Tax" about deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction;
- The amendments to SFAS 46 "Income Taxes International Tax Reform: Pillar Two Model Rules"; and
- The amendments to SFAS 107 "Ijarah Accounting" about recognition, measurement, and disclosure of ijarah contracts.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/4 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") (lanjutan)

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang kewajiban diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar;
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan; dan
- Amendemen PSAK 2 "Laporan Arus Kas" dan PSAK 60 "Instrumen Keuangan - Pengungkapan" tentang pengaturan pembiayaan pemasok.

Standar baru, amendemen dan interpretasi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Perusahaan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 74 "Kontrak Asuransi" tentang penerapan awal PSAK 74 dan PSAK 71 – informasi komparatif.

Mulai tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK akan diubah sebagaimana diumumkan oleh DSAK-IAI.

b. Mata uang fungsional dan penyajian

(i) Mata uang fungsional dan penyajian

Item-item yang disertakan dalam laporan keuangan Perusahaan diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah ("Rp"), yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of the financial statements (continued)

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards ("IFAS") (continued)

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Company's operation, but effective for the financial year beginning 1 January 2024 are as follows:

- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about the classification of liabilities class as current or non-current.
- The amendments to SFAS 73 "Leases" about lease liability in a sale and leaseback;
- The amendments to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements" about non-current liabilities with covenants; and
- Amendment to SFAS 2 "Cash Flow Statements" and SFAS 60 "Financial Instruments - Disclosures" about supplier finance arrangements.

New standards, amendments and interpretations issued which are relevant to the Company's operation, but effective for the financial year beginning 1 January 2025 are as follows:

- SFAS 74 "Contract Insurance"; and
- The amendments to SFAS 74 "Insurance Contract" about initial application of SFAS 74 and SFAS 71 - comparative information.

Starting from 1 January 2024, references to the individual SFAS and IFAS will be changed as published by DSAK IAI.

b. Functional and presentation currency

(i) Functional and presentation currency

Items included in the Company's financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The financial statements are presented in Rupiah ("Rp"), which is the Company's functional currency.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/5 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Mata uang fungsional dan penyajian (lanjutan)

(ii) Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan menjadi mata uang fungsional menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang berasal dari pembayaran atas transaksi-transaksi tersebut dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun diakui dalam laba rugi.

Nilai tukar yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut (dalam satuan penuh):

	<u>2023</u>
1 Dolar Amerika Serikat ("Dolar AS")	15,439

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

d. Transaksi pihak berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana didefinisikan pada PSAK 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

e. Piutang usaha

Piutang usaha adalah jumlah tagihan dari pelanggan untuk jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha.

Jika pembayaran piutang diharapkan selesai dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika tidak, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar. Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan provisi atas penurunan nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Functional and presentation currency (continued)

(ii) Transactions and balances

Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the exchange rate prevailing at the date of the transaction. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.

The exchange rates used as at 31 December 2023 and 2022 were as follows (in full amount):

	<u>2022</u>
1 United States Dollar ("US Dollar")	15,592

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks and time deposits with a maturity period of three months or less at the time of placement and which are not used as collateral or restricted.

d. Transactions with related parties

The Company has entered into transactions with related parties as defined in SFAS 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

Transactions with related parties are based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transaction between unrelated parties.

e. Trade receivables

Trade receivables are amounts due from customers for services performed in the ordinary course of business.

If collection is expected in one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), they are classified as current assets. If not, they are presented as non-current assets. Trade receivables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method, less any provision for impairment.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/6 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

f. Aset kontrak

Aset kontrak merupakan jumlah pendapatan yang belum ditagihkan pada akhir periode pelaporan keuangan sehubungan dengan jasa yang telah diberikan.

g. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode "rata-rata bergerak".

Nilai realisasi bersih adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran beban penjualan.

Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan secara periodik terhadap kondisi persediaan.

h. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai. Harga perolehan termasuk pengeluaran yang dapat didistribusikan secara langsung atas perolehan aset tersebut.

Biaya-biaya setelah pengakuan awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Perusahaan mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi ketika terjadi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi umur manfaat aset tetap sebagai berikut:

Tahun/Years

Bangunan	20-25
Instalasi	20-25
Kapal	25
Kendaraan dan alat berat	5-20
Peralatan kantor	5

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Contract assets

Contract assets represent the amount of unbilled revenue at the end of the financial reporting period in respect of services rendered.

g. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost or net realisable value. Costs are determined using the "moving average" method.

Net realisable value is the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less the estimate of the selling expenses.

Provision for inventory obsolescence is provided based on the periodic review of the condition of the inventories.

h. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over their beneficial periods using the straight-line method.

i. Fixed assets

Fixed assets are initially stated at the cost of acquisition, less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Cost of acquisition includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as separate assets, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to the profit or loss during the financial period in which they are incurred.

All repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are charged to the profit or loss as incurred.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful lives of the fixed assets as follows:

Buildings
Installations
Vessel
Vehicles and heavy equipments
Office equipments

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/7 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Aset tetap (lanjutan)

Masa manfaat aset, nilai sisa, dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika diperlukan, setidaknya setiap akhir periode pelaporan. Dampak dari setiap revisi diakui dalam laporan laba rugi, ketika perubahan terjadi.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dengan jumlah tercatat aset) diakui dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Nilai tercatat aset segera diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan apabila nilai tercatat aset lebih besar daripada estimasi jumlah terpulihkan.

j. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai aset. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Fixed assets (continued)

The assets' useful lives, residual values and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at least at the financial period-end. The effects of any revisions are recognised in the profit or loss, when the changes arise.

An item of fixed assets is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss and in the period in which the asset is derecognised.

An asset's carrying amount is written down immediately to its recoverable amount if the asset's carrying amount is greater than its estimated recoverable amount.

j. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

The recoverable amount is the higher of an asset's Fair Value Less Cost to Sell ("FVLCTS") and Value in Use ("VIU"). Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognised in the profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/8 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

j. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

k. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang telah diperoleh dari pemasok dalam kegiatan usaha normal. Utang lain-lain adalah kewajiban untuk membayar atas barang dan jasa selain pembelian yang dilakukan dalam transaksi bisnis pada umumnya. Utang usaha dan utang lain-lain dikelompokkan sebagai liabilitas jangka pendek apabila pembayaran jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang. Jika tidak, utang usaha tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur sebesar harga perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

l. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset, dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Perusahaan sebagai penyewa

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Perusahaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Impairment of non-financial assets (continued)

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

k. Trade payables and other payables

Trade payables are obligations to pay for goods or services that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Other payables are obligations for goods or services other than purchases that have been acquired in the ordinary course of business from suppliers. Trade payables and other payables are classified as current liabilities if payment is due within one year or less. If not, they are presented as non-current liabilities.

Trade and other payables are recognised initially at fair value and subsequently measured at amortised cost using the effective interest method.

l. Leases

Determination whether an arrangement is, or contains, a lease is made based on the substance of the arrangement and assessment of whether fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets, and the arrangement conveys a right to use the asset.

The Company as lessee

Leases are recognised as a right-of-use asset and a corresponding liability at the date at which the leased asset is available for use by the Company.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/9 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi), dikurangi piutang insentif sewa
- pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu
- harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan, di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan, suku bunga pinjaman inkremental penyewa digunakan, yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Perusahaan dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif, yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

The Company as lessee (continued)

Assets and liabilities arising from a lease are initially measured on a present value basis. Lease liabilities include the net present value of the following lease payments:

- fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives receivable
- variable lease payment that are based on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date
- amounts expected to be payable by the lessee under residual value guarantees
- the exercise price of a purchase option if the lessee is reasonably certain to exercise that option, and
- payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the lessee exercising that option.

Lease payments to be made under reasonably certain extension options are also included in the measurement of the liability.

The lease payments are discounted using the interest rate implicit in the lease. If the rate cannot be readily determined, which is generally the case for leases in the Company, the lessee's incremental borrowing rate is used, being the rate that the individual lessee would have to pay to borrow the funds necessary to obtain an asset of similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment with similar terms, security and conditions.

The Company is exposed to potential future increases in variable lease payments based on an index or rate, which are not included in the lease liability until they take effect. When adjustments to lease payments based on an index or rate take effect, the lease liability is reassessed and adjusted against the right-of-use asset

Lease payments are allocated between principal and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/10 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai penyewa (lanjutan)

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- biaya langsung awal

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika Perusahaan cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian, aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya.

Sewa jangka pendek dan yang aset pendasarnya bernilai rendah

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa yang aset pendasarnya bernilai rendah. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Perusahaan mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Perusahaan:

- mengukur kembali dan mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasian;

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

The Company as lessee (continued)

Right-of-use assets are measured at cost comprising the following:

- the amount of the initial measurement of lease liability
- any lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received
- any initial direct costs

Right-of-use assets are generally depreciated over the shorter of the asset's useful life and the lease term on a straight-line basis. If the Company is reasonably certain to exercise a purchase option, the right-of-use asset is depreciated over the underlying asset's useful life.

Short-term leases and leases of low-value assets

The Company has elected not to recognise right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less and leases of low-value assets. The Company recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modifications

The Company accounts for a lease modifications as a separate leases if both the:

- modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as separate leases, at the effective date of the lease modification, the Company:

- remeasures and allocates the consideration in the modified contract;
- determines the lease term of the modified lease;

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/11 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

I. Sewa (lanjutan)

**Sewa jangka pendek dan yang aset
pendasarnya bernilai rendah (lanjutan)**

- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Perusahaan mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

m. Pinjaman

Pinjaman diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya transaksi yang terjadi. Pinjaman kemudian dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi; selisih antara hasil perolehan (dikurangi dengan biaya transaksi) dan nilai penarikan diakui dalam laba rugi selama periode pinjaman dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Biaya-biaya yang dibayarkan untuk mendapatkan fasilitas pinjaman diakui sebagai biaya transaksi dari pinjaman tersebut, apabila besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut. Dalam hal ini, biaya tersebut ditangguhkan sampai dengan penarikan dilakukan. Apabila tidak ada bukti bahwa besar kemungkinan akan dilakukan penarikan atas sebagian atau seluruh fasilitas tersebut, biaya tersebut dikapitalisasi sebagai pembayaran dimuka untuk jasa likuiditas dan diamortisasi selama periode dari fasilitas yang terkait.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Leases (continued)

**Short-term leases and leases of low-value
assets (continued)**

- remeasures the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Company's incremental borrowing rate at the effective date of the modification;
- decreases the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Company recognises in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- makes a corresponding adjustment to the right-of-use assets for all other lease modifications.

m. Borrowings

Borrowings are recognised initially at their fair value, net of any transaction costs incurred. Borrowings are subsequently carried at amortised cost; any difference between the proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the profit or loss over the year of the borrowing, using the effective interest rate method.

Fees paid on the establishment of the loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is deferred until the drawdown occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a prepayment for liquidity services and amortised over the period of the facility to which it relates.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/12 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Pinjaman (lanjutan)

Biaya pinjaman baik yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat diatribusikan dengan akuisisi, konstruksi atau produksi aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut sampai aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan maksudnya atau dijual. Untuk pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi selama tahun berjalan, dikurangi pendapatan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut. Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi dengan pengeluaran untuk aset kualifikasian. Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode dimana biaya-biaya tersebut terjadi.

Pinjaman diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar kecuali Perusahaan mempunyai hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas tersebut untuk setidaknya 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

n. Imbalan kerja

(i) Kewajiban pensiun

Perusahaan harus mencadangkan jumlah minimal imbalan pensiun sesuai dengan Kontrak Kerja Bersama ("KKB"). KKB menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan KKB adalah program imbalan pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja, atau kompensasi.

Kewajiban program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal akhir periode dikurangi nilai wajar aset program.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Borrowings (continued)

Borrowing costs either directly or indirectly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalised as part of the cost of that asset until such time as the asset is substantially ready for its intended use or sale. For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any income earned on the temporary investment of such borrowings. For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying asset. All other borrowing costs are recognised in the profit or loss in the period in which they are incurred.

Borrowings are classified as current liabilities unless the Company has an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date.

n. Employee benefits

(i) Pension obligations

The Company is required to provide a minimum amount of pension benefit in accordance with the Company's Collective Labour Agreement ("CLA"). Since the CLA sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the CLA represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit to be provided, usually as a function of one or more factors such as age, years of service, or compensation.

The liability recognised in the statement of financial position in respect of the defined benefit pension plan is the present value of the defined benefit obligation at the period end date less the fair value of plan assets.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/13 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

(i) Kewajiban pensiun (lanjutan)

Kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskonto estimasi arus kas keluar masa depan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah (dengan pertimbangan saat ini tidak ada pasar aktif untuk obligasi korporat berkualitas tinggi) dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan.

Biaya jasa kini dari program pensiun imbalan pasti diakui dalam laporan laba rugi pada beban imbalan kerja dimana mencerminkan peningkatan kewajiban imbalan pasti yang dihasilkan dari jasa karyawan dalam tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan asumsi aktuarial dibebankan atau dikreditkan ke laba komprehensif lainnya yang merupakan bagian dari cadangan lainnya pada tahun dimana terjadinya perubahan tersebut.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

(ii) Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan kerja jangka panjang lainnya, yang terdiri dari penghargaan masa kerja, diakui di laporan posisi keuangan berdasarkan nilai kini dari kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi.

(iii) Pesangon pemutusan kontrak kerja

Pesangon pemutusan kontrak kerja terutang ketika Perusahaan memberhentikan hubungan kerja sebelum usia pensiun normal atau ketika karyawan menerima penawaran mengundurkan diri secara sukarela dengan kompensasi imbalan pesangon.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Employee benefits (continued)

(i) Pension obligations (continued)

The defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of high-quality Government bonds (considering that currently there is no deep market for high-quality corporate bonds) that are denominated in the currency in which the benefit will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

The current service cost of the defined benefit plan is recognised in the profit or loss in employee benefits expenses reflecting the increase in the defined benefit obligation resulting from employee service in the current year.

Past service costs are recognised immediately in the profit or loss.

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are charged or credited to other comprehensive income and presented as part of other reserves in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in the profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

(ii) Other long-term employee benefits

Other long-term employee benefits, which consist of long service rewards, are recognised in the statements of financial position at the present value of the defined benefit obligation. The actuarial gains and losses and past service costs are recognised immediately in profit or loss.

(iii) Termination benefits

Termination benefits are payable when an employee's employment is terminated by the Company before the normal retirement age, or whenever an employee accepts voluntary redundancy in exchange for these benefits.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/14 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

(iii) Pesangon pemutusan kontrak kerja (lanjutan)

Perusahaan mengakui pesangon pemutusan kontrak kerja ketika Perusahaan berkomitmen untuk memberhentikan kontrak kerja sesuai dengan rencana formal *terinci* tanpa ada kemungkinan untuk dibatalkan. Pesangon yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan didiskontokan ke nilai kini.

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui pada laporan laba rugi, kecuali untuk pajak atas transaksi yang diakui di pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak penghasilan kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan metode *balance sheet liability*, untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan. Pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal aset atau liabilitas (kecuali berasal dari kombinasi bisnis) dimana transaksinya tidak mempengaruhi laba rugi akuntansi dan laba rugi kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan. Aset pajak tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Employee benefits (continued)

(iii) Termination benefits (continued)

The Company recognises termination benefits when it is demonstrably committed to a termination when the Company has a detailed formal plan to terminate the employment of current employees without possibility of withdrawal. Benefits falling due more than 12 months after the end of the reporting period are discounted to their present values.

o. Taxation

The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated based on tax laws enacted at the reporting date. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation. It establishes provisions, where appropriate, based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is recognised using the balance sheet liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the financial statements. The deferred income tax is not accounted for if it arises from the initial recognition of an asset or liability (other than in a business combination) when the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.

Deferred income tax is determined using tax rates pursuant to laws or regulations that have been enacted or substantially enacted at the reporting date and are expected to be applied when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled. Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/15 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Modal saham

Saham biasa dikelompokkan sebagai ekuitas. Biaya langsung yang berkaitan dengan penerbitan saham baru disajikan sebagai pengurang ekuitas, setelah dikurangi pajak, dari jumlah yang diterima.

q. Aset keuangan

Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar, (baik melalui penghasilan komprehensif lain, atau melalui laba rugi); dan
- aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis entitas untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan, hal ini akan tergantung pada apakah Perusahaan telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan mereklasifikasi investasi utang jika dan hanya jika model bisnis untuk mengelola aset tersebut berubah.

Pengakuan dan pengukuran

Pada pengakuan awal, Perusahaan mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Share capital

Ordinary shares are classified as equity. Incremental costs directly attributable to the issuance of new shares are shown in equity as a deduction, net of tax, from the proceeds.

q. Financial assets

Classification

The Company classifies its financial assets in the following measurement categories:

- those to be measured subsequently at fair value (either through other comprehensive income ("FVOCI"), or through profit or loss ("FVTPL"); and
- those to be measured at amortised cost.

The classification depends on the entity's business model for managing financial assets and the contractual terms of cash flows.

For assets measured at fair value, gains and losses will be recorded in the statement of profit or loss or other comprehensive income. For investments in debt instruments, this will depend on the business model in which the investment is held. For investments in equity instruments that are not held for trading, this will depend on whether the Company has made an irrevocable election at initial recognition to record the equity investment at fair value through other comprehensive income.

The Company reclassifies debt investments when and only when its business model for managing those assets changes.

Recognition and measurement

At initial recognition, the Company measures a financial asset at its fair value plus, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss, transaction costs that are directly attributable to the acquisition of the financial asset. Transaction costs of financial assets carried at fair value through profit or loss are expensed in profit or loss.

Financial assets with embedded derivatives are considered in their entirety when determining whether their cash flows are solely payment of principal and interest.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/16 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen utang

Pengukuran selanjutnya atas instrumen utang bergantung kepada model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset dan karakteristik dari arus kas. Terdapat tiga kategori pengukuran dalam mengklasifikasikan instrumen utang:

i. Biaya perolehan diamortisasi

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual, dimana arus kas tersebut merupakan pembayaran pokok dan bunga, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Penghasilan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan disajikan dalam keuntungan/(kerugian) lainnya. Penurunan nilai aset keuangan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi.

ii. Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset yang dimiliki untuk pengumpulan arus kas kontraktual dan untuk penjualan keuangan aset, dimana arus kas aset merupakan pembayaran pokok dan bunga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar dicatat pada penghasilan komprehensif lain. Kerugian penurunan nilai, pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi pada pendapatan/(beban) lain-lain.

Pendapatan bunga dari aset keuangan ini termasuk dalam penghasilan keuangan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan pada lain-lain, bersih, dan penurunan nilai disajikan pada bagian terpisah dalam laporan laba rugi.

ii. Nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Financial assets (continued)

Recognition and measurement (continued)

Debt instruments

Subsequent measurement of debt instruments depends on the business model for managing the asset and the cash flow characteristics of the asset. There are three measurement categories into which the Company classifies its debt instruments:

i. Amortised cost

Assets that are held for collection of contractual cash flows, where those cash flows solely represent payments of principal and interest, are measured at amortised cost. Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Any gain or loss arising on derecognition is recognised directly in profit or loss and presented in other gains/(losses). Impairment losses are presented as a separate line item in the profit or loss.

ii. FVOCI

Assets that are held for collection of contractual cash flows and for selling the financial assets, where payments of principal and interest are measured at FVOCI. Movements in the fair value are taken through other comprehensive income ("OCI"). Impairment losses, interest income and foreign exchange gains and losses are recognised in profit or loss. When the financial asset is derecognised, the cumulative gain or loss previously recognised in OCI is reclassified from equity to profit or loss and recognised in other income/(expenses).

Interest income from these financial assets is included in finance income using the effective interest rate method. Foreign exchange gains and losses are presented in others, net and impairment expenses are presented as a separate line item in the profit or loss.

ii. FVTPL

Financial assets at fair value through profit or loss are subsequently carried in the statement of financial position at fair value, with changes in fair value recognised in the profit or loss.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/17 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)

Instrumen ekuitas

Perusahaan selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Dimana manajemen Perusahaan telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar dari investasi ekuitas pada penghasilan komprehensif lain. Tidak ada reklasifikasi selanjutnya atas keuntungan dan kerugian dari nilai wajar ke laba rugi setelah penghentian pengakuan investasi. Dividen dari investasi tersebut terus diakui dalam laporan laba rugi sebagai penghasilan lainnya ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran ditetapkan. Investasi pada instrumen ekuitas tidak diuji penurunan nilai.

r. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, entitas saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan berniat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

s. Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup berdasarkan basis *forward-looking* untuk seluruh saldo piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan. Selain untuk piutang usaha dan kontrak aset tanpa komponen pendanaan yang signifikan, Perusahaan menerapkan pendekatan umum untuk mengukur KKE.

Perusahaan menilai dengan basis *forward-looking* kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan. Catatan 3 merinci bagaimana Perusahaan menentukan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Financial assets (continued)

Recognition and measurement (continued)

Equity instruments

The Company subsequently measures all equity investments at fair value. Where the Company's management has elected to present fair value gains and losses on equity investments in OCI, there is no subsequent reclassification of fair value gains and losses to profit or loss following the derecognition of the investment. Dividends from such investments continue to be recognised in profit or loss as other income when the Company's right to receive payments is established. Equity investments are not tested for impairment.

r. Offsetting of financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position if, and only if, the entity currently has a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liabilities simultaneously.

s. Impairment of financial assets

The Company applies the "simplified approach" to measure the Expected Credit Loss ("ECLs") which uses a lifetime expected loss allowance on a forward-looking basis for all trade receivables and contract assets without significant financing component. Other than trade receivables and contract assets without a significant financing component, the Company applies a general model to ensure ECLs.

The Company assesses on a forward-looking basis the expected credit losses associated with its debt instruments carried at amortised cost and FVOCI. The impairment methodology applied depends on whether there has been a significant increase in credit risk. Note 3 details how the Company determines whether there has been a significant increase in credit risk.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/18 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

t. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi dengan biaya untuk menjual dan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau Perusahaan aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Impairment of non-financial assets

The Company assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Company makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or Companies of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognised impairment losses recognised for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated. A previously recognised impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognised. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/19 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

**t. Penurunan nilai aset non-keuangan
(lanjutan)**

Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

u. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan. Jika imbalan yang dijanjikan di kontrak mengandung suatu jumlah yang bersifat variabel, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah imbalan tersebut sebesar jumlah yang diharapkan berhak diterima atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dikurangi dengan estimasi jumlah jaminan kinerja jasa yang akan dibayarkan selama periode kontrak;
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di yang tertuang dalam nilai kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diperkirakan berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Impairment of non-financial assets (continued)

The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognised for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognised in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

u. Revenue and expense recognition

Revenue

Revenue recognition has to fulfill five steps of assessment:

1. *Identify contract(s) with customer;*
2. *Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;*
3. *Determine the transaction price. Transaction price is the amount of consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer. If the consideration promised in a contract includes a variable amount, the Company estimates the amount of consideration to which it expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer less the estimated amount of service level guarantee which will be paid during the contract period;*
4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each of the distinct goods or services promised in the contract. Where these are not directly observable, the relative standalone selling prices is estimated based on expected cost plus margin; and*
5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of said goods or services).*

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/20 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Pendapatan (lanjutan)

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- a. Suatu titik waktu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- b. Suatu periode waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam suatu periode waktu, Perusahaan memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang harus diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Kewajiban kontrak diakui ketika jumlah penerimaan dari pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

Pendapatan dari jasa penunjang penyediaan air, penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Bahan Bakar Minyak ("BBM") dan Liquefied Petroleum Gas ("LPG") diakui pada waktu tertentu saat jasa telah diserahkan kepada pelanggan.

Penerapan panduan praktis

Perusahaan memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk tidak menyesuaikan jumlah imbalan atas efek komponen pendanaan signifikan, jika Perusahaan mengharapkan, saat kontrak dimulai, bahwa periode antara saat Perusahaan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dan saat pelanggan melakukan pembayaran atas barang atau jasa adalah satu tahun atau kurang.

Pendapatan bunga

Pendapatan atau biaya bunga untuk semua instrumen keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dicatat menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, sebagaimana mestinya, digunakan periode yang lebih singkat, sampai mencapai nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense recognition (continued)

Revenue (continued)

A performance obligation may be satisfied at the following:

- a. A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
- b. Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Payment of the transaction price differs for each contract. A contract asset is recognised once the consideration paid by the customer is less than the balance of performance obligation which has been satisfied. A contract liability is recognised once the consideration paid by the customer is more than the balance of performance obligation which has been satisfied.

Revenues from water supply support services, and receiving, storing and delivering fuel and Liquefied Petroleum Gas ("LPG") are recognised at a point in time when services have been rendered to the customers.

Application of practical expedient

The Company applies the practical expedient to not adjust the promised amount of consideration for the effects of a significant financing component if the Company expects, at contract inception, that the period between when the Company transfers a promised good or services to the customer and when the customer pays for the goods or services will be one year or less.

Interest revenue

Interest income or expense on all financial instruments measured at amortised cost is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/21 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Beban dari kontrak dengan pelanggan

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak dan menghasilkan meningkatkan atau meningkatkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") dan biaya tambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") diakui sebagai aset bila biaya tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi berdasarkan PSAK 72 dan diharapkan akan dipulihkan. Aset ini diamortisasi dengan dasar sistematis yang konsisten dengan pengalihan atas barang atau jasa yang berkaitan dengan aset tersebut.

Beban lainnya

Beban diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Penerapan panduan praktis

Perusahaan memilih untuk menerapkan panduan praktis untuk mengakui biaya yang terjadi untuk mendapatkan kontrak sebagai beban saat terjadinya jika periode amortisasi aset tersebut adalah satu tahun atau kurang.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Revenue and expense recognition (continued)

Expenses from contracts with customers

The costs that directly relate to the contract generate or enhance resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") and incremental costs of obtaining a contract ("cost to obtain") are recognised as assets if they meet the criteria for capitalisation under SFAS 72 and expected to be recovered. These assets are amortised on a systematic basis that is consistent with the transfer to the customer of the goods or services to which the assets relate.

Other expenses

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

Application of practical expedient

The Company applies the practical expedient to recognise the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortisation period of the asset is one year or less.

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG PENTING

Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan atas pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun finansial berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan interim disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Company's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters available when the interim financial statements were prepared. Existing assumptions and circumstances about future developments, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/22 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Penurunan nilai aset non-keuangan

Sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan, setiap aset atau unit penghasil kas dievaluasi setiap periode pelaporan untuk menentukan apakah ada indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi, estimasi jumlah yang dapat dipulihkan akan dilakukan dan kerugian penurunan nilai akan diakui sejauh jumlah tercatat melebihi jumlah yang dapat dipulihkan. Jumlah yang dapat diperoleh kembali dari sebuah aset atau kelompok aset penghasil kas diukur pada nilai wajar yang lebih tinggi dikurangi biaya untuk menjual dan nilai penggunaan.

Penentuan nilai wajar dan nilai yang digunakan mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi tentang ekspektasi volume transaksi, harga jual (mempertimbangkan harga saat ini dan masa lalu, tren harga dan faktor-faktor terkait), biaya operasi, dan belanja modal di masa depan. Estimasi dan asumsi ini memiliki risiko dan ketidakpastian; sehingga ada kemungkinan bahwa perubahan situasi akan mengubah proyeksi ini, yang selanjutnya dapat mempengaruhi jumlah aset yang dapat dipulihkan. Dalam keadaan seperti itu, beberapa atau semua aset mungkin akan mengalami penurunan nilai atau biaya penurunan nilai dikurangi dengan dampak yang dicatat dalam laporan laba rugi.

Estimasi masa manfaat aset tetap

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap adalah berdasarkan penelaahan Perusahaan terhadap praktik industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Impairment of non-financial assets

In accordance with the Company's accounting policy, each asset or cash generating unit is evaluated every reporting period to determine whether there are any indications of impairment. If any such indication exists, a formal estimate of the recoverable amount is performed and an impairment loss recognised to the extent that the carrying amount exceeds the recoverable amount. The recoverable amount of an asset or cash generating group of assets is measured at the higher of fair value less costs to sell and value in use.

The determination of the fair value and value in use requires management to make estimates and assumptions about expected transaction volumes, selling prices (considering current and historical prices, price trends and related factors), operating costs and future capital expenditure. These estimates and assumptions are subject to risk and uncertainty; hence there is a possibility that changes in circumstances will alter these projections, which may have an impact on the recoverable amount of the assets. In such circumstances, some or all of the carrying value of the assets may be further impaired or the impairment charge reduced with the impact recorded in profit or loss.

Estimating useful lives of fixed assets

The Company estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilisation, as anchored to business plans and strategies that also consider expected market behaviour. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on the Company's assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least at each financial year end and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limitations on the use of the assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/23 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Estimasi masa manfaat aset tetap (lanjutan)

Perusahaan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 5 sampai dengan 25 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan melakukan penelaahan dan penyesuaian terhadap estimasi masa manfaat aset tetapnya. Lihat Catatan 7 untuk detail penyesuaian.

Imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya neto imbalan pasca kerja mencakup tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Perubahan asumsi- asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Tingkat diskonto ditentukan pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perusahaan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang Rupiah, mata uang yang mana imbalan akan dibayar, dan yang memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja yang terkait.

Asumsi utama yang digunakan untuk penentuan liabilitas imbalan pasca kerja lainnya termasuk asumsi kondisi pasar saat ini.

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimating useful lives of fixed assets (continued)

The Company estimates the useful lives of these fixed assets to be within 5 to 25 years. These are common life expectancies applied in the industry where the Company conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

At 1 January 2023, the Company conducted a review and adjustment of the estimated useful lives of its fixed assets. See Note 7 for details of the adjustments.

Post-employment benefit

The present value of post-employment obligations depends on several factors that are determined via an actuarial basis based on several assumptions. Assumptions used to determine the net cost of post-employment benefits include discount rate and salary increase rate. Changes in these assumptions will affect the carrying amounts of post-employment benefit obligations.

The appropriate discount rate at the end of the reporting period is the interest rate used in determining the present value of estimated future cash outflows expected to settle other post-employment liabilities. In determining the appropriate level of interest rates, the Company considers the interest rates of Government bonds denominated in Rupiah, the currency in which the benefits will be paid, and which have a time period similar to those of related employment benefits liability.

The key assumptions used for determining post-employment liabilities include current market conditions.

Leases

Determining whether an arrangement is or contains a lease requires careful judgement to assess whether the arrangement conveys a right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use and right to direct the use of the asset, even if the right is not explicitly specified in the arrangement.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/24 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Sewa (lanjutan)

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai penyewa untuk beberapa aset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Provisi untuk penurunan nilai atas piutang usaha

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan KKE seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan KKE, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi, untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Perusahaan menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Leases (continued)

The Company has various lease agreements where the Company acts as a lessee in respect of certain assets. The Company evaluates whether significant risk and reward of ownership of the leased asset are transferred to the lessee based on SFAS 73, which requires the Company to make judgements and estimates of transfer of risks and rewards of ownership of a leased asset.

Since the Company could not readily determine the implicit rate, management used the Company's incremental borrowing rate as a discount rate. There are a number of factors to consider in determining an incremental borrowing rate, many of which need judgement in order to be able to reliably quantify any necessary adjustments to arrive at the final discount rates. In determining an incremental borrowing rate, the Company considers the following main factors: the Company's corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the economic environment, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.

Provision for impairment of trade receivables

The implementation of SFAS 71 resulted in a change to the assessment of the significant accounting estimates and judgements related to provision for loss impairment of receivables. The Company applies a simplified approach to measure ECL which uses a lifetime expected loss allowance for all trade receivables. In determining ECL, management is required to exercise judgement in defining what is considered to be a significant increase in credit risk and in making assumptions and estimates to incorporate relevant information about past events, current conditions and forecasts of economic conditions. Judgement has been applied in determining the lifetime and point of initial recognition of receivables.

The level of a specific provision is evaluated by management on the basis of factors that affect the collectibility of the accounts. In these cases, the Company uses judgement based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of the Company's relationship with the customers and customers' credits status based on third-party credit reports and known market factors, to record specific reserves for customers against amounts due in order to reduce the Company's receivables to amounts that it expects to collect.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/25 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

Provisi untuk penurunan nilai atas piutang usaha
(lanjutan)

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual, Perusahaan juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Pajak penghasilan

Pertimbangan dan asumsi dibutuhkan dalam menentukan pengurangan beban tertentu dalam mengestimasi provisi beban pajak penghasilan untuk Perusahaan. Secara khusus, perhitungan beban pajak penghasilan Perusahaan melibatkan penafsiran terhadap peraturan perpajakan dan peraturan lainnya. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang dapat menyebabkan ketidakpastian di dalam penentuan kewajiban pajak selama bisnis normal.

Semua pertimbangan dan estimasi yang dibuat manajemen seperti yang diungkapkan di atas dapat dipertanyakan oleh Kantor Pajak. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakpastian dalam penentuan kewajiban pajak. Apabila terdapat perbedaan perhitungan pajak dengan jumlah yang telah dicatat, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan pajak tangguhan dalam tahun dimana penentuan pajak tersebut dibuat.

Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Provision for impairment of trade receivables
(continued)

These specific reserves are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts estimated. In addition to specific provision against individually significant receivables, the Company also recognises a collective impairment provision against credit exposure of its debtors which are grouped based on common credit characteristics, and although not specifically identified as requiring a specific provision, have a greater risk of default than when the receivables were originally granted to the debtors.

Income taxes

Judgements and assumptions are required to determine the deductibility of certain expenses during the estimation of the provision for income tax expense for the Company. In particular, the calculation of the Company's income tax expenses involves the interpretation of applicable tax laws and regulations. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain, during the ordinary course of business.

All judgements and estimates taken by management, as discussed above, may be challenged by the Tax Office. As a result, the ultimate tax determination becomes uncertain. Where the final outcome of these matters is different from the amounts initially recorded, such differences will have an impact on the income tax and deferred income tax provision in the year in which this determination is made.

The Company recognises liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Kas di bank		
Entitas berelasi dengan		
Pemerintah (Catatan 21)		
Rupiah		
PT Bank Mandiri		
(Persero) Tbk ("Mandiri")	86,124,105	524,546,089
PT Bank Negara Indonesia		
(Persero) Tbk ("BNI")	1,724,443	1,102,859
	<u>87,848,548</u>	<u>525,648,948</u>
Dolar AS		
Mandiri	572,186,483	1,986,874
	<u>572,186,483</u>	<u>1,986,874</u>
Jumlah kas di bank	<u>660,035,031</u>	<u>527,635,822</u>

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash in banks
Government-related entities
(Note 21)
Rupiah
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk ("Mandiri")
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk ("BNI")
US Dollar
Mandiri
Total cash in banks

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/26 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2023
Deposito berjangka	
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 21)	
Rupiah	
BNI	4,500,000
Jumlah deposito berjangka	4,500,000
Jumlah kas dan setara kas	664,535,031

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2022
	4,500,000
Jumlah deposito berjangka	4,500,000
Jumlah kas dan setara kas	532,135,822

Time deposits
Government-related entities
(Note 21)
Rupiah
BNI

Total time deposits

Total cash and cash equivalents

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada akhir periode pelaporan senilai jumlah tercatat dari setiap kelas kas dan setara kas sebagaimana yang dijabarkan di atas.

The maximum exposure to credit risk at the end of the reporting period is the carrying amount of each class of cash and cash equivalents mentioned above.

Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka berkisar antara 2,25%-3,38% pada 2023 dan 2022.

The annual interest rates of time deposits range from 2.25%-3.38% in 2023 and 2022, respectively.

5. PIUTANG USAHA

	2023
Pihak berelasi (Catatan 21)	71,896,343
Provisi penurunan nilai	(909,732)
	<u>70,986,611</u>
Pihak ketiga	3,311,509
Provisi penurunan nilai	(119,575)
	<u>3,191,934</u>
Jumlah piutang usaha, neto	74,178,545

5. TRADE RECEIVABLES

	2022
	72,832,200
	(812,998)
	<u>72,019,202</u>
	3,159,947
	(119,575)
	<u>3,040,372</u>
Jumlah piutang usaha, neto	75,059,574

Related parties (Note 21)
Provision for impairment

Third parties
Provision for impairment

Total trade receivables, net

Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

The details of trade receivables based on aging schedule are as follows:

	2023
0 - 30 hari	62,664,794
30 - 90 hari	534,229
90 - 365 hari	4,027,446
Lebih dari 365 hari	7,981,383
	<u>75,207,852</u>

	2022
	40,596,185
	27,701,429
	6,610,366
	1,084,167
	<u>75,992,147</u>

0 - 30 days
30 - 90 days
90 - 365 days
More than 365 days

Provisi penurunan nilai

(1,029,307)

Provision for impairment

Jumlah

74,178,545

Total

Mutasi saldo provisi penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for impairment of trade receivables are as follows:

	2023
Saldo awal	932,573
Penambahan	96,734
Pemulihan	-
Saldo akhir	1,029,307

	2022
	403,683
	811,612
	(282,722)
Saldo akhir	932,573

Beginning balance
Addition
Recovery

Ending balance

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/27 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. PIUTANG USAHA (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa provisi atas penurunan nilai piutang tersebut cukup untuk menutupi kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha.

5. TRADE RECEIVABLES (continued)

Management believes that the provision for impairment of receivables is adequate to cover loss on uncollectible trade receivables.

6. ASET KONTRAK

6. CONTRACT ASSETS

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pihak berelasi (Catatan 21)	229,334,029	163,358,278	Related parties (Note 21)
Provisi penurunan nilai	<u>(384,899)</u>	<u>(192,197)</u>	Provision for impairment
	<u>228,949,130</u>	<u>163,166,081</u>	
Pihak ketiga	3,745,996	9,136,130	Third parties
Provisi penurunan nilai	<u>(82,391)</u>	<u>(82,391)</u>	Provision for impairment
	<u>3,663,605</u>	<u>9,053,739</u>	
Jumlah	<u>232,612,735</u>	<u>172,219,820</u>	Total

Mutasi saldo provisi penurunan nilai aset kontrak adalah sebagai berikut:

The movements in the provision for impairment of contract assets are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Saldo awal	274,588	338,006	Beginning balance
Penambahan	192,702	-	Addition
Pemulihan	<u>-</u>	<u>(63,418)</u>	Recovery
Saldo akhir	<u>467,290</u>	<u>274,588</u>	Ending balance

7. ASET TETAP

7. FIXED ASSETS

	<u>2023</u>			
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>
Harga perolehan				Acquisition cost
Tanah	9,140,216	-	-	9,140,216
Bangunan	975,185,688	-	139,023,257	1,114,208,945
Kapal	478,624	-	-	478,624
Kendaraan dan alat berat	168,132,235	-	-	168,132,235
Instalasi	7,594,251,425	-	19,194,766	7,613,446,191
Peralatan kantor	<u>21,846,964</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>21,846,964</u>
	8,769,035,152	-	158,218,023	8,927,253,175
Aset dalam penyelesaian	<u>1,264,824,900</u>	<u>725,388,860</u>	<u>(158,218,023)</u>	<u>1,831,995,737</u>
	<u>10,033,860,052</u>	<u>725,388,860</u>	<u>-</u>	<u>10,759,248,912</u>
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan	428,006,359	38,725,162	-	466,731,521
Kapal	191,388	17,952	-	209,340
Kendaraan dan alat berat	147,869,201	2,509,189	-	150,378,390
Instalasi	2,977,582,434	299,182,456	-	3,276,764,890
Peralatan kantor	<u>14,827,554</u>	<u>2,595,271</u>	<u>-</u>	<u>17,422,825</u>
	<u>3,568,476,936</u>	<u>343,030,030</u>	<u>-</u>	<u>3,911,506,966</u>
Penurunan nilai	<u>-</u>	<u>19,545,268</u>	<u>-</u>	<u>19,545,268</u>
Nilai buku	<u>6,465,383,116</u>			<u>6,828,196,678</u>
				Net book value

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/28 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

7. FIXED ASSETS (continued)

	2022			
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Harga perolehan				Acquisition cost
Tanah	9,140,216	-	-	9,140,216
Bangunan	969,000,833	-	6,184,855	975,185,688
Kapal	478,624	-	-	478,624
Kendaraan dan alat berat	166,199,160	-	1,933,075	168,132,235
Instalasi	7,518,491,024	-	75,760,401	7,594,251,425
Peralatan kantor	16,394,712	-	5,452,252	21,846,964
	8,679,704,569	-	89,330,583	8,769,035,152
Aset dalam penyelesaian	1,049,412,039	304,743,444	(89,330,583)	1,264,824,900
	9,729,116,608	304,743,444	-	10,033,860,052
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Bangunan	381,465,617	46,540,742	-	428,006,359
Kapal	167,457	23,931	-	191,388
Kendaraan dan alat berat	138,334,076	9,535,125	-	147,869,201
Instalasi	2,553,970,242	423,612,192	-	2,977,582,434
Peralatan kantor	13,306,575	1,520,979	-	14,827,554
	3,087,243,967	481,232,969	-	3,568,476,936
Nilai buku	6,641,872,641			6,465,383,116

Alokasi beban penyusutan adalah sebagai berikut:

The allocation of depreciation expenses was as follows:

	2023	2022	
Beban pokok pendapatan (Catatan 18)	342,622,061	480,881,541	Cost of revenue (Note 18)
Beban umum dan administrasi (Catatan 19)	407,969	351,428	General and administrative expenses (Note 19)
Jumlah	343,030,030	481,232,969	Total

Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah yang terletak di Cilegon dengan luas area seluas 23.614 meter persegi. Hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan ("HGB") atas nama Perusahaan. Jangka waktu HGB antara 20 dan 30 tahun, yakni akan berakhir sampai dengan tahun 2035 dan 2038 dan dapat diperpanjang.

The Company owned certain land which is located in Cilegon with a total area of 23,614 square meters. The certificates of ownership of the land are in the form of Hak Guna Bangunan ("HGB") under the name of the Company. The terms of HGB range from 20 to 30 years, which will expire in 2035 to 2038, and can be extended upon expiration.

Pada tanggal 1 Januari 2023, Perusahaan melakukan penelaahan dan penyesuaian terhadap estimasi sisa masa manfaat aset tetapnya berdasarkan laporan penilai dari KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 23 Mei 2023. Rincian dan perubahan masa manfaat sebagai berikut:

At 1 January 2023, the Company conducted a review and adjustment of the estimated remaining useful lives of its fixed assets based on an appraisal report from KJPP Toto Suharto and Rekan dated 23 May 2023. The details and changes in estimated useful lives are as follows:

Perubahan estimasi sisa masa manfaat:

Changes in estimated remaining useful lives:

Aset/Assets	Sebelum perubahan/ Before changes	Setelah perubahan/ After changes
Bangunan/Buildings	1-22 Tahun/Years	1-25 Tahun/Years
Kapal/Vessel	12 Tahun/Years	16 Tahun/Years
Kendaraan dan alat berat/Vehicles and heavy	1-17 Tahun/Years	1-18 Tahun/Years
Instalasi/Installation	1-22 Tahun/Years	1-23 Tahun/Years
Peralatan kantor/Office equipments	1-4 Tahun/Years	1-5 Tahun/Years

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/29 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. ASET TETAP (lanjutan)

Dampak dari perubahan estimasi sisa masa manfaat aset tetap ini mengurangi depresiasi tahun berjalan sejumlah Rp116.420.599.

Pada tahun 2023, Perusahaan membukukan penurunan nilai sebesar Rp19.545.268 atas tangki bahan bakar di terminal BBM ("TBBM") Pulau Sambu. Penurunan nilai tersebut berdasarkan laporan penilai KJPP Toto Suharto dan Rekan tanggal 25 April 2024.

Bunga yang dikapitalisasi sebagai bagian dari aset tetap untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.226.376.

Aset tetap Perusahaan diasuransikan terhadap risiko kerugian, kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp8.255.356.812 dan Rp7.475.522.032. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

7. FIXED ASSETS (continued)

The impact of the change in the estimated remaining useful lives of the fixed assets reduced the depreciation for the current year by Rp116,420,599.

In 2023, the Company recorded an impairment of Rp19,545,268 on fuel tanks in terminal BBM ("TBBM") Pulau Sambu. The impairment was based on an appraisal report from KJPP Toto Suharto and Rekan dated 25 April 2024.

Interest capitalised as part of fixed assets for the year ended 31 December 2023 was Rp1,226,376.

The Company's fixed assets are insured against losses, accidents, fire and other risks with sum insured for year ended 31 December 2023 and 2022 were Rp8,255,356,812 and Rp7,475,522,032, respectively. Management believes that the sum insured are adequate to cover possible losses arising from such risks.

8. PENYERTAAN SAHAM

Akun ini merupakan porsi kepemilikan saham minoritas pada PT Pertamina Marine Engineering ("PME") dengan persentase kepemilikan 0,83% dengan nilai wajar Rp1.313.570 pada tanggal 31 Desember 2023 (2022: Rp1.194.214).

8. INVESTMENT IN SHARES

This account represents a minority shareholding in PT Pertamina Marine Engineering ("PME") with an ownership percentage of 0.83% with a fair value of Rp1,313,570 as at 31 December 2023 (2022: Rp1,194,214).

9. UTANG USAHA

	<u>2023</u>
Pihak berelasi (Catatan 21)	117,339,255
Pihak ketiga	16,596,447
Jumlah	<u>133,935,702</u>

9. TRADE PAYABLES

	<u>2022</u>	
	87,489,901	Related parties (Note 21)
	19,636,781	Third parties
Total	<u>107,126,682</u>	Total

10. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	<u>2023</u>
Operasional	322,839,311
Biaya karyawan	15,584,670
Jumlah	<u>338,423,981</u>

10. ACCRUED EXPENSES

	<u>2022</u>	
	24,554,740	Operations
	17,739,624	Employee expenses
Total	<u>42,294,364</u>	Total

11. PINJAMAN DARI PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal 15 Desember 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dana dengan PT Pertamina International Shipping ("PIS") untuk jangka waktu 18 bulan dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar AS\$75.000.000 (nilai penuh) dan suku bunga sebesar SOFR+0,82% per tahun. Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah menarik pinjaman sebesar Rp543.135.276.

11. SHAREHOLDER LOAN

On 15 December 2023, the Company signed a loan agreement with PT Pertamina International Shipping ("PIS") for a period of 18 month with a maximum loan facility of US\$75,000,000 (full amount) and an interest rate of SOFR+0.82% per annum. As of 31 December 2023, the Company has drawn down Rp543,135,276 of the loan.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/30 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. PINJAMAN DARI PEMEGANG SAHAM (lanjutan)

Pinjaman dari pemegang saham tidak dapat diminta dibayarkan kembali sewaktu-waktu oleh pemegang saham, oleh karena itu, pinjaman tersebut disajikan sebagai liabilitas jangka panjang.

Beban bunga dari pinjaman ini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.226.376.

Pada tanggal 1 November 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dana dengan PT Pertamina International Shipping ("PIS") untuk jangka waktu 1 tahun dengan maksimum fasilitas pinjaman sebesar AS\$13.700.000 (nilai penuh) dan suku bunga sebesar 7,06% per tahun (dalam Rp) atau 1,18% per tahun (dalam AS\$). Sampai dengan 31 Desember 2021, Perusahaan telah menarik Rp98.000.000 dengan bunga Rp108.944.

Pada bulan Januari 2022, Perusahaan menarik Rp48.000.000 sehingga total pinjaman dari pemegang saham menjadi Rp146.000.000. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tertanggal 29 Desember 2022, para pemegang saham setuju untuk mengonversi seluruh pinjaman dari pemegang saham menjadi modal saham. Jumlah pinjaman yang dikonversi termasuk bunga adalah Rp153.128.909.

11. SHAREHOLDER LOAN (continued)

The shareholder loan is not repayable on demand by the shareholder therefore it is presented as non-current liability.

Interest expense from this loan for the year ended 31 December 2023 was Rp1,226,376.

On 1 November 2021, the Company signed a loan agreement with PT Pertamina International Shipping ("PIS") for a period of 1 year with a maximum loan facility of US\$13,700,000 (full amount) and an interest rate of 7.06% per annum (in Rp) or 1.18% per annum (in US\$). As of 31 December 2021, the Company has drawn down Rp98,000,000 with an interest of Rp108,944.

In January 2022, the Company drew down Rp48,000,000 bringing the total shareholder loan to Rp146,000,000. Based on the Shareholders Circular Resolution dated 29 December 2022, the shareholders agreed to convert all loans from shareholders into share capital. The amount of loan and interest converted is Rp153,128,909.

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Penilaian aktuarial atas liabilitas imbalan pasca kerja dilakukan oleh konsultan aktuaria terdaftar, Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, sebagaimana yang tercantum dalam laporan pada tanggal 2 Februari 2024, menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai yang termasuk dalam laporan posisi keuangan yang berasal dari Perusahaan sehubungan dengan liabilitas imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut:

12. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS

The actuarial valuation of employment benefits obligations is calculated by a registered actuarial consultant, Steven & Mourits Actuary Consultant Office as stated in its report dated 2 February 2024, using the projected unit credit method.

The amounts included in the statement of financial position arising from the Company's obligation in respect of these post-employment benefits are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	<u>24,700,371</u>	<u>15,820,909</u>	<i>Present value of benefit obligations</i>
Bagian lancar	<u>1,422,922</u>	<u>997,527</u>	Current portion
Bagian tidak lancar	<u>23,277,449</u>	<u>14,823,382</u>	Non-current portion

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/31 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

**12. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS
(continued)**

Beban imbalan pasca kerja yang dibebankan di
laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

*Amounts charged in the profit or loss and in respect
of these post-employment benefits are as follows:*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Biaya jasa kini	8,355,315	6,191,331	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	215,238	(561,861)	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	671,067	704,766	<i>Interest cost</i>
Pengakuan/(keuntungan) kerugian aktuarial untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya	<u>(8,554)</u>	<u>6,955</u>	<i>Recognition of actuarial (income)/loss for Other Long-term Employee Benefit ("OLTEB")</i>
Jumlah	<u>9,233,066</u>	<u>6,341,191</u>	Total

Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja yang
diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya
(sebelum pajak) adalah sebagai berikut:

*Remeasurement of employee benefit obligation
recognised as other comprehensive income (before
tax) is as follows:*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pengukuran kembali nilai kini liabilitas:			<i>Remeasurement of present value liabilities:</i>
Kerugian atas perubahan asumsi demografi	-	334,634	<i>Loss on changes in demographic assumptions</i>
Kerugian/(keuntungan) atas perubahan asumsi ekonomis	1,655,264	(2,645,607)	<i>Loss/(gain) on changes in financial assumptions</i>
Keuntungan atas penyesuaian pengalaman	<u>(307,311)</u>	<u>(424,027)</u>	<i>Gain on changes in experience adjustments</i>
Jumlah	<u>1,347,953</u>	<u>(2,735,000)</u>	Total

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah
sebagai berikut:

*The movement of present value of benefit
obligations is as follows:*

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pada awal tahun	15,820,909	12,214,718	<i>Beginning of the year</i>
Biaya jasa kini	8,355,315	6,191,331	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	215,238	(561,861)	<i>Past service cost</i>
Biaya bunga	671,067	704,766	<i>Interest cost</i>
Pengakuan (keuntungan)/kerugian aktuarial untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya	(8,554)	6,955	<i>Recognition of actuarial (income)/loss for OLTEB</i>
Pembayaran imbalan	(1,701,557)	-	<i>Benefits paid</i>
Dibebankan/(dikreditkan) pada pendapatan komprehensif lain	<u>1,347,953</u>	<u>(2,735,000)</u>	<i>Charged/(credited) to other comprehensive income</i>
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	<u>24,700,371</u>	<u>15,820,909</u>	Present value of benefit obligations at the end of the year

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/32 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

**12. POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATIONS
(continued)**

Asumsi utama yang digunakan pada tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The key assumptions used in 2023 and 2022 are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Tingkat diskonto	6,6% -6,8%	6.8% - 7.2%	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji per tahun	8,2%	8.2%	<i>Annual salary increase</i>
Tingkat mortalita	TMI IV – 2019	TMI IV – 2019	<i>Mortality rate</i>
Usia pensiun normal	56	56	<i>Normal retirement age</i>

Melalui program imbalan pasti yang dimiliki oleh Perusahaan, maka Perusahaan terekspos beberapa risiko berikut:

Through its defined benefit pension plans, the Company is exposed to a number of risks, which are detailed below:

- a. Risiko suku bunga. Kewajiban imbalan pasti yang dihitung berdasarkan PSAK 24 (Revisi 2014) menggunakan tingkat diskonto obligasi. Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat diskonto tersebut naik/turun sebesar 1%, maka kewajiban imbalan pasti akan cenderung mengalami penurunan sebesar Rp10.172.427 atau kenaikan sebesar Rp12.030.873.
- b. Risiko kenaikan gaji. Kenaikan aktual gaji dibandingkan dengan tingkat estimasi kenaikan gaji akan membuat kewajiban imbalan pasti menjadi lebih tinggi. Pada tanggal 31 Desember 2023 jika tingkat kenaikan gaji tersebut naik/turun sebesar 1% maka kewajiban imbalan pasti akan mengalami peningkatan sebesar Rp12.098.477 atau penurunan sebesar Rp10.098.850.

- a. *Interest rate risk. The defined benefit obligation calculated under SFAS 24 (Revised 2014) uses a discount rate on bond yields. As at 31 December 2023, if the discount rate had increased/decreased by 1%, the post-employment benefit obligations would have decreased by Rp10,172,427 or increased by Rp12,030,873.*

- b. *Salary increase risk. Higher actual increase in expected salary will increase the defined benefit obligation. As at 31 December 2023, if the salary increase rate had increased/decreased by 1%, the post-employment benefit obligations would have increased by Rp12,098,477 or decreased by Rp10,098,850.*

Analisis sensitivitas diatas didasarkan pada perubahan atas asumsi tunggal dengan asumsi lainnya konstan. Pada praktiknya, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi, dan perubahan-perubahan dalam beberapa asumsi mungkin saling berhubungan.

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and the changes in some of the assumptions may be correlated.

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan pasti adalah 11,70 tahun.

The weighted average duration of the defined benefit obligation is 11.70 years.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits as at 31 December 2023 is presented below:

	<u>Kurang dari satu tahun/ Less than one year</u>	<u>1 sampai 5 tahun/ Between 1 and 5 years</u>	<u>5 sampai 10 tahun/ Between 5 and 10 years</u>	<u>Lebih dari 10 tahun/ Over 10 years</u>	<u>Jumlah/Total</u>
Liabilitas imbalan pasca kerja	<u>1,422,922</u>	<u>4,020,309</u>	<u>6,216,532</u>	<u>64,378,497</u>	<u>76,038,260</u>

*Post-employment
benefit obligations*

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/33 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA

13. LEASES

a. Aset hak-guna

a. Right-of-use-assets

2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Penyesuaian/ Adjustment	Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition costs
Hak atas tanah	189,082,399	-	(82,420,076)	106,662,323	Land rights
Kendaraan	4,947,526	10,823,015	-	15,770,541	Vehicles
Jumlah	194,029,925	10,823,015	(82,420,076)	122,432,864	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Hak atas tanah	30,548,336	21,332,465	(2,105,050)	49,775,751	Land rights
Kendaraan	3,796,048	3,537,017	-	7,333,065	Vehicles
Jumlah	34,344,384	24,869,482	(2,105,050)	57,108,816	Total
Nilai tercatat	159,685,541			65,324,048	Net carrying value
2022					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions		Saldo akhir/ Ending balance	
Harga perolehan					Acquisition costs
Hak atas tanah	158,723,805		30,358,594	189,082,399	Land rights
Kendaraan	1,123,608		3,823,918	4,947,526	Vehicles
Jumlah	159,847,413	34,182,512		194,029,925	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Hak atas tanah	7,913,393		22,634,943	30,548,336	Land rights
Kendaraan	843,165		2,952,883	3,796,048	Vehicles
Jumlah	8,756,558	25,587,826		34,344,384	Total
Nilai tercatat	151,090,855			159,685,541	Net carrying value

Seluruh beban penyusutan aset hak-guna dicatat ke akun beban pokok pendapatan (Catatan 18).

All depreciation expenses of right-of-use assets were recorded as cost of revenue (Note 18).

b. Liabilitas sewa

b. Lease liabilities

	2023	2022	
Saldo awal	198,614,647	161,974,051	Beginning balance
Penambahan	10,823,015	31,427,320	Additions
Penyesuaian	(84,586,008)	-	Adjustment
Beban bunga	6,970,465	8,151,155	Interest expense
Pembayaran	(3,620,183)	(2,937,879)	Payments
	<u>128,201,936</u>	<u>198,614,647</u>	
Bagian lancar	73,206,947	72,467,328	Current portion
Bagian tidak lancar	54,994,989	126,147,319	Non-current portion

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/34 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. SEWA (lanjutan)

13. LEASES (continued)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

b. Lease liabilities (continued)

Laporan arus kas menyajikan saldo berikut
berkaitan dengan sewa:

The statement of cash flows shows the following
amounts related to leases:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Arus kas dari aktivitas pendanaan			Cash flows from financing activities
Pembayaran liabilitas sewa	3,209,342	2,829,731	Repayments of lease liabilities
Pembayaran beban bunga liabilitas sewa	410,843	108,148	Payments of interest expense of lease liabilities
Jumlah	<u>3,620,185</u>	<u>2,937,879</u>	Total

14. PERPAJAKAN

14. TAXATION

a. Pajak dibayar dimuka

a. Prepaid taxes

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pajak lain-lain			Other taxes
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	96,665,234	20,446,589	Value Added Tax ("VAT")
Jumlah	<u>96,665,234</u>	<u>20,446,589</u>	Total
Bagian lancar	-	20,446,589	Current portion
Bagian tidak lancar	96,665,234	-	Non-current portion

b. Taksiran pengembalian pajak

b. Estimated claim for tax refund

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Lebih bayar pajak penghasilan			Overpayment of corporate income tax
- 2023	16,900,470	-	2023 -
- 2021	9,036,035	2,296,824	2021 -
Jumlah	<u>25,936,505</u>	<u>2,296,824</u>	Total

c. Utang pajak

c. Taxes payable

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kurang bayar pajak penghasilan			Underpayment of corporate income tax
- Pasal 29	-	17,836,643	Article 29 -
	-	17,836,643	
Pajak lain-lain			Other taxes
- Pasal 21	3,395,688	3,034,023	Article 21 -
- Pasal 23	255,350	625,388	Article 23 -
- Pasal 25	820,124	-	Article 25 -
- Pasal 4(2)	4,337,458	2,444,846	Article 4(2) -
	8,808,620	6,104,257	
Jumlah	<u>8,808,620</u>	<u>23,940,900</u>	Total

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/35 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Beban pajak penghasilan

d. Income tax expense

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Kini	5,129,049	18,644,133	Current
Tangguhan	15,684,881	(11,947,036)	Deferred
Penyesuaian tahun lalu	<u>2,296,824</u>	<u>-</u>	Prior year adjustment
Jumlah	<u>23,110,754</u>	<u>6,697,097</u>	Total

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak Perusahaan dengan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

The reconciliations between profit before income tax of the Company and the Company's estimated taxable income for the years ended 31 December 2023 and 2022, are as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	91,211,763	19,869,700	Profit before income tax
Koreksi fiskal:			Fiscal corrections:
Liabilitas imbalan pasca kerja	7,531,494	6,341,191	Post-employment benefit obligations
Provisi atas penurunan nilai piutang usaha dan aset kontrak	289,435	465,472	Provision for impairment of trade receivables and contract assets
Aset tetap	(122,609,893)	19,451,894	Fixed asset
Penurunan nilai aset tetap	19,545,268	-	Impairment of fixed asset
Sewa	23,948,783	28,046,152	Leases
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	9,198,947	11,851,806	Expense not deductible for tax purposes
Pendapatan yang dikenakan pajak final	<u>(5,801,939)</u>	<u>(1,280,154)</u>	Income subject to final tax
Estimasi laba kena pajak	<u>23,313,858</u>	<u>84,746,061</u>	Estimated taxable income
Beban pajak kini	<u>5,129,049</u>	<u>18,644,133</u>	Current tax expenses
Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka:			Less prepaid income taxes
- Pasal 23	14,648,404	807,490	Article 23 -
- Pasal 25	<u>7,381,115</u>	<u>-</u>	Article 25 -
	<u>22,029,519</u>	<u>807,490</u>	
(Lebih bayar)/kurang bayar pajak penghasilan	<u>(16,900,470)</u>	<u>17,836,643</u>	(Overpayment)/underpayment of corporate income tax

Perhitungan pajak penghasilan kini dilakukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak. Nilai tersebut mungkin disesuaikan ketika SPT disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak ("DJP").

Current income tax computations are based on estimated taxable income. The amounts may be adjusted when the SPT is submitted to the Directorate General of Taxation ("DGT").

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/36 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

d. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

d. Income tax expense/(benefit) (continued)

Pajak atas laba Perusahaan sebelum pajak berbeda dari nilai teoritis yang mungkin muncul apabila menggunakan rata-rata tertimbang tarif pajak terhadap laba pada entitas dalam jumlah sebagai berikut:

The tax on the Company's profit before income tax differs from the theoretical amount that would arise using the weighted average tax rate applicable to profits on the entity is as follows:

	2023	2022	
Laba sebelum pajak penghasilan	91,211,763	19,869,700	Profit before income tax
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif yang berlaku	20,066,588	4,371,334	Income tax calculated at applicable tax rate
Dampak pajak penghasilan atas:			Tax effects of:
Beban yang tidak dapat diperhitungkan menurut pajak	2,023,768	2,607,397	Expense not deductible for tax purposes
Pendapatan yang dikenakan pajak final	(1,276,426)	(281,634)	Income subject to final tax
Penyesuaian tahun lalu	2,296,824	-	Prior year adjustment
Beban pajak penghasilan	23,110,754	6,697,097	Income tax expense

e. Aset pajak tangguhan

e. Deferred tax assets

2023					
Saldo awal/ Beginning balance	(Dibebankan) dikreditkan pada laba rugi/ (Charged) credited to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) pada pendapatan komprehensif lainnya/ Credited (charged) to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Liabilitas imbalan pasca kerja	3,480,599	1,656,929	296,549	5,434,077	Post-employment benefit obligations
Provisi penurunan piutang usaha dan kontrak aset	265,577	63,676	-	329,253	Provision for impairment of receivables and contract assets
Penurunan nilai aset tetap	-	4,299,959	-	4,299,959	Impairment of fixed asset
Aset tetap	50,652,377	(26,974,177)	-	23,678,200	Fixed assets
Aset hak guna	(35,130,819)	20,759,528	-	(14,371,291)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	43,702,765	(15,490,796)	-	28,211,969	Lease liabilities
Penyertaan saham	(262,727)	-	(26,259)	(288,986)	Investment in shares
Jumlah	62,707,772	(15,684,881)	270,290	47,293,181	Total
2022					
Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan (dibebankan) pada laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan pada pendapatan komprehensif lainnya/ Charged to other comprehensive income	Saldo akhir/ Ending balance		
Liabilitas imbalan pasca kerja	2,687,237	1,395,062	(601,700)	3,480,599	Post-employment benefit obligations
Provisi penurunan piutang usaha dan kontrak aset	163,173	102,404	-	265,577	Provision for impairment of receivables and contract assets
Aset tetap	46,372,960	4,279,417	-	50,652,377	Fixed assets
Aset hak guna	(33,239,988)	(1,890,831)	-	(35,130,819)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	35,641,781	8,060,984	-	43,702,765	Lease liabilities
Penyertaan saham	(219,781)	-	(42,946)	(262,727)	Investment in shares
Jumlah	51,405,382	11,947,036	(644,646)	62,707,772	Total

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/37 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

f. Administrasi

Berdasarkan undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, perusahaan yang berdomisili di Indonesia menghitung dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. DJP dapat menetapkan atau mengubah pajak dalam batas waktu lima tahun saat terutangnya pajak.

g. Surat ketetapan pajak

Tahun pajak 2021 – pajak penghasilan badan

Pada bulan Juli 2023, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) No. 0001/206/21/051/21 atas pajak penghasilan badan tahun 2021 senilai Rp9.036.035 yang telah dibayarkan pada bulan Agustus 2023. Atas SKPKB tersebut Perusahaan mengajukan keberatan pada bulan Oktober 2023. Perusahaan berpendapat bahwa perlakuan perpajakannya telah sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga pembayaran atas SKPKB ini dicatat sebagai kelebihan pembayaran pajak penghasilan di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2023. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Perusahaan belum menerima hasil keberatan tersebut.

14. TAXATION (continued)

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, companies which domiciled in Indonesia calculate and pay taxes based on self assessment. The DGT may assess or amend taxes within five years by the time the tax becomes due.

g. Tax assessment letter

Fiscal year 2021– corporate income taxes

In July 2023, the Company received Tax Assessment Letters (SKPKB) No. 0001/206/21/051/21 for underpayment of corporate income tax of Rp9,036,035 which was paid in August 2023. The Company filed an objection letter to the SKPKB in October 2023. The Company believes that its tax positions are in accordance with tax regulations, therefore, the payment for the SKPKB is recorded as an overpayment of income tax in the statement of financial position as at 31 December 2023. As at the completion date of the financial statements, the Company has not yet received the results of the objection.

**15. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR**

Modal saham

Modal saham ditempatkan dan disetor adalah sebagai berikut:

Nama pemegang saham/ Shareholders' name
PIS
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")
PT Pertamina Port and Logistics ("PPL")
Jumlah

Nama pemegang saham/ Shareholders' name
PIS
PT Pertamina Trans Kontinental ("PTK")
PT Pertamina Port and Logistics ("PPL")
Jumlah

Berdasarkan Akta No. 4 tanggal 30 Desember 2022 oleh Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn. Perusahaan telah menerbitkan 403.517 lembar saham senilai Rp403.517.000 kepada PIS. Penerbitan saham baru ini sehubungan dengan konversi dari pinjaman dari pemegang saham sejumlah Rp153.128.909 dan penerimaan kas dari penerbitan saham baru sejumlah Rp250.388.091.

**15. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL**

Share capital

The composition of issued and fully paid share capital, was as follows:

2023		
Jumlah saham/ Number of shares	Modal saham/ Share capital	Persentasi kepemilikan/ Percentage of ownership
9,955,394	9,955,394,000	99.98301%
1,691	1,691,000	0.01698%
1	1,000	0.00001%
9,957,086	9,957,086,000	100%

2022		
Jumlah saham/ Number of shares	Modal saham/ Share capital	Persentasi kepemilikan/ Percentage of ownership
9,955,394	9,955,394,000	99.98301%
1,691	1,691,000	0.01698%
1	1,000	0.00001%
9,957,086	9,957,086,000	100%

Based on Notarial Deed No. 4 dated 30 December 2022 by Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn, the Company issued 403,517 shares with total value of Rp403,517,000 to PIS. The issuance of new shares is related to the conversion of shareholder loan amounting to Rp153,128,909 and the cash receipts from the issuance of new shares amounting to Rp250,388,091.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/38 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**15. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL
DISETOR (lanjutan)**

Tambahan modal disetor

	<u>2023</u>
Tambahan modal disetor	3,241,595,356

Tambahan modal disetor berasal dari penerbitan saham di tahun 2021 untuk pengalihan enam terminal milik Pertamina. Nilai wajar dari saham yang diterbitkan sebesar Rp9.551.877.000. Selisih antara nilai wajar sebesar Rp9.551.877.000 dan nilai buku aset yang dialihkan di tahun 2021 sebesar Rp6.310.281.644, sebesar Rp3.241.595.356 dicatat pada akun tambahan modal disetor sesuai penerapan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

**15. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN
CAPITAL (continued)**

Additional paid-in capital

	<u>2022</u>
	3,241,595,356

Additional paid-in capital

Additional paid-in capital is derived from issued shares in 2021 for the transfer of six ports owned by Pertamina. The fair value of the shares issued was Rp9,551,877,000. The difference between the fair value of Rp9,551,877,000 and the book value of transferred assets in 2021 of Rp6,310,281,644, amounting to Rp3,241,595,356, was recorded as additional paid-in capital, following SFAS 38 (Revised 2012), "Business Combinations on Entity under Common Control".

**16. SALDO LABA YANG DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA**

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan wajib menyalurkan dari laba neto setiap tahun buku untuk cadangan. Penyisihan cadangan tersebut dilakukan sampai dengan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Perusahaan belum memenuhi jumlah minimum cadangan umum ini sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas. Tidak ada batasan waktu untuk pembentukan cadangan.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 Perusahaan telah membentuk dana cadangan sebesar Rp10.220.812.

16. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Based on Law No. 40 Year 2007 on Limited Liability Companies, the Company is required to allocate from its net profit every financial year as a reserve fund. The reserve fund should be provided until at minimum 20% of the issued and paid-up capital. The Company has not fulfilled the minimum amount of this general reserved in accordance with the Limited Liability Company Law. There is no time limit on the establishment of the reserve.

As at 31 December 2023 and 2022, the Company has appropriated an amount of Rp10,220,812 as the general reserves.

17. PENDAPATAN

	<u>2023</u>
Jasa penyimpanan	885,255,683
Penyediaan air bersih	68,280,580
Pengolahan limbah	-
Jumlah	<u>953,536,263</u>

Perusahaan mengakui aset kontrak dan liabilitas kontrak terkait pendapatan berikut ini:

	<u>2023</u>
Aset kontrak yang berkaitan dengan kontrak:	
- Jasa penyimpanan	211,264,072
- Penyediaan air bersih	21,348,663
Jumlah	<u>232,612,735</u>

17. REVENUE

	<u>2022</u>
	848,521,587
	68,998,962
	33,305,831

*Storage services
Clean water supply
Waste management*

Total

The Company has recognised contract assets and contract liabilities related to the following revenues:

	<u>2022</u>
	172,219,820
	-
Total	<u>172,219,820</u>

*Contract assets relating to contract:
Storage services -
Clean water supply -*

Total

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/39 Schedule

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. PENDAPATAN (lanjutan)

17. REVENUE (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Liabilitas kontrak yang berkaitan dengan kontrak:			Contract liabilities relating to contract:
- Jasa penyimpanan	-	314,116,000	Storage services -
Jumlah	-	314,116,000	Total

Lihat Catatan 21 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 21 for related party transactions and balances.

18. BEBAN POKOK PENDAPATAN

18. COST OF REVENUE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Penyusutan (Catatan 7 dan 13a)	367,491,543	506,469,367	Depreciation (Notes 7 and 13a)
Jasa penunjang penyimpanan	371,857,422	241,958,812	Storage support services
Gaji dan tunjangan	49,035,090	45,049,761	Salaries and allowances
Penyediaan air bersih	42,943,603	43,402,788	Clean water supply
Penurunan nilai aset tetap	19,545,268	-	Impairment of fixed assets
Pengolahan limbah	-	6,916,299	Waste management
Lain-lain	8,918,687	5,514,340	Others
Jumlah	859,791,613	849,311,367	Total

Lihat Catatan 21 untuk rincian transaksi dan saldo pihak berelasi.

Refer to Note 21 for related party transactions and balances.

19. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

19. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Gaji dan tunjangan	68,437,026	66,205,457	Salaries and allowances
Jasa penunjang penyimpanan	5,017,985	3,008,686	Storage support services
Penyusutan (Catatan 7)	407,969	351,428	Depreciation (Note 7)
Lain-lain	2,896,091	6,763,759	Others
Jumlah	76,759,071	76,329,330	Total

20. LAIN-LAIN, BERSIH

20. OTHERS, NET

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Keuntungan dari pemutusan kontrak (Catatan 22)	85,471,747	-	Gain from termination of contract (Note 22)
Penyesuaian liabilitas sewa	4,270,982	-	Lease liability adjustment
Rugi selisih kurs, neto	(15,241,490)	(13,154)	Foreign exchange loss, net
Penyisihan piutang tak tertagih	(289,436)	(465,472)	Bad debt expense
Lain-lain	1,246,808	2,160,496	Others
Jumlah	75,458,611	1,681,870	Total

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/40 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH**

**21. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES**

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships with related parties are as follows:

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related parties and government-related entities	Sifat hubungan/ Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/ Balances and nature of transactions
PT Pertamina (Persero) ("Pertamina")	Pemegang saham utama/ Ultimate shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha/ Revenue, cost of revenue, trade receivables and trade payables
PIS	Pemegang saham mayoritas/ Majority shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha dan pinjaman dari pemegang saham/ Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, trade payables and loan from shareholder
PTK	Pemegang saham/Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha/ Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets, and trade payables
PPL	Pemegang saham/Shareholder	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha/ Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Pertamina Patra Niaga ("PPN")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak dan utang usaha/ Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur ("PHKT")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan aset kontrak/ Revenue and contract assets
PT Pertamina Marine Solutions ("PMSol")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan, beban pokok pendapatan, piutang usaha, aset kontrak, utang usaha/ Revenue, cost of revenue, trade receivables, contract assets and trade payables
PME	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan, aset kontrak, penyertaan saham dan utang usaha/ Cost of revenue, contract assets, investment in shares and trade payables
PT Kilang Pertamina Internasional ("KPI")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Training & Consulting ("PTC")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Prima Armada Raya ("PAR")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Bina Medika ("PBM")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Patra Jasa ("Patra Jasa")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan, piutang usaha dan utang usaha/ Cost of revenue, trade receivables and trade payables

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/41 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)

Sifat dari hubungan pihak berelasi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

21. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)

The nature of relationships with related parties are as follows: (continued)

Pihak berelasi dan entitas berelasi dengan pemerintah/Related parties and government-related entities	Sifat hubungan/Nature of relationships	Saldo dan sifat transaksi/Balances and nature of transactions
PT Elnusa Petrofin ("Elnusa")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Mitra Tours & Travel ("MTT")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Power Indonesia ("PPI")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia ("ATPI")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan/ Cost of revenue
PT Pertamina Maintenance & Construction ("PMC")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Drilling Contractor ("PDC")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Beban pokok pendapatan dan utang usaha/ Cost of revenue and trade payables
PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra ("PHE OSES")	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan dan aset kontrak/ Revenue and contract assets
Mandiri	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents
BNI	Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government-related entity	Penempatan kas dan setara kas/ Placement of cash and cash equivalents

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi usaha dan bukan usaha dengan pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah, yang terafiliasi dengan Perusahaan melalui kepemilikan langsung dan tak langsung, dan/atau di bawah kendali pihak yang sama. Harga jual atau beli antara pihak-pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah ditentukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak ketiga.

In the normal course of business, the Company entered into trade and other transactions with related parties and Government-related entities which are affiliated with the Company through equity ownership, either direct or indirect, and/or under common control. Sales or purchase prices among related parties and Government-related entities are made based on forms agreed by the parties and may not be the same as those of transactions between third parties.

Saldo-saldo dan transaksi signifikan dengan pihak berelasi dan entitas berelasi dengan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Significant balances and transactions with related parties and Government-related entities are as follows:

Kas dan setara kas (Catatan 4)

Cash and cash equivalents (Note 4)

	2023	2022	
Kas di Bank	660,035,031	527,635,822	Cash in banks
Deposito berjangka	4,500,000	4,500,000	Time deposit
Jumlah	664,535,031	532,135,822	Total

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/42 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)**

**21. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Piutang usaha (Catatan 5)

Trade receivables (Note 5)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PPN	56,869,912	60,542,605	PPN
PIS	11,098,397	10,255,025	PIS
PTK	2,280,758	-	PTK
Pertamina	1,084,168	1,084,168	Pertamina
Patra Jasa	401,271	-	Patra Jasa
PMSol	76,065	137,343	PMSol
PPL	65,850	252,108	PPL
Lain-lain	19,922	560,951	Others
	71,896,343	72,832,200	
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(909,732)	(812,998)	Provision for impairment of related parties
Jumlah	<u>70,986,611</u>	<u>72,019,202</u>	Total

Aset kontrak (Catatan 6)

Contract assets (Note 6)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PPN	211,117,647	133,918,622	PPN
PIS	12,529,931	21,780,453	PIS
PTK	2,857,383	6,825,030	PTK
PHE OSES	1,456,298	-	PHE OSES
PHKT	1,164,895	755,447	PHKT
PME	80,839	-	PME
PPL	37,038	27,328	PPL
PMSol	29,028	31,150	PMSol
Lain-lain	60,970	20,248	Others
	229,334,029	163,358,278	
Provisi penurunan nilai pihak berelasi	(384,899)	(192,197)	Provision for impairment of related parties
Jumlah	<u>228,949,130</u>	<u>163,166,081</u>	Total

Penyertaan saham (Catatan 8)

Investment in shares (Note 8)

	Kepemilikan/ Ownership (%)	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PME	0,83%	1,313,570	1,194,214	PME

Utang usaha (Catatan 9)

Trade payables (Note 9)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
PPN	41,206,312	8,761,147	PPN
PMSol	20,454,584	9,171,441	PMSol
PME	16,528,753	35,427,303	PME
PTC	14,999,178	14,266,293	PTC
PBM	5,487,153	1,608,870	PBM
KPI	4,274,328	165,269	KPI
ATPI	3,795,751	-	ATPI
Pertamina	3,710,457	475,254	Pertamina
PPL	1,827,662	252,162	PPL
PMC	1,801,190	-	PMC

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/43 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)**

**21. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Utang usaha (Catatan 9) (lanjutan)

Trade payables (Note 9) (continued)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PAR	1,457,576	5,455,581
PPI	771,801	-
PTK	634,508	5,186,158
PDC	-	5,231,500
Patra Jasa	-	671,447
Elnusa	-	600,510
Lain-lain	<u>390,002</u>	<u>216,966</u>
Jumlah	<u>117,339,255</u>	<u>87,489,901</u>

PAR
PPI
PTK
PDC
Patra Jasa
Elnusa
Others

Total

Pinjaman dari pemegang saham (Catatan 11)

Shareholders loan (Note 11)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PIS	<u>543,135,276</u>	<u>-</u>

PIS

Pendapatan

Revenue

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PPN	863,233,060	790,047,628
PIS	18,424,990	36,999,818
PHKT	6,682,261	7,628,022
PTK	6,207,591	5,456,175
PHE OSES	1,456,293	-
PMSol	502,502	168,493
Pertamina	-	733,568
Lain-lain	<u>654,239</u>	<u>468,869</u>
Jumlah	<u>897,160,936</u>	<u>841,502,573</u>

PPN
PIS
PHKT
PTK
PHE OSES
PMSol
Pertamina
Others

Total

Beban pokok pendapatan

Cost of revenue

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PTC	69,139,548	44,215,026
PME	44,546,321	62,722,304
PPN	40,666,912	5,973,834
PMSol	40,589,447	22,234,149
ATPI	7,273,135	-
KPI	5,817,269	1,642,854
PAR	4,882,501	4,914,938
Pertamina	3,172,730	855,294
PBM	2,612,305	1,612,120
PPL	2,217,102	900,401
PPI	2,028,052	-
PMC	1,707,284	-
PIS	1,226,376	8,278,007
Patra Jasa	907,309	3,589,920
PTK	797,388	1,476,823
MTT	199,262	630,996
PDC	113,757	5,231,500
Lain-lain	<u>572,065</u>	<u>550,209</u>
Jumlah	<u>228,468,763</u>	<u>164,828,375</u>

PTC
PME
PPN
PMSol
ATPI
KPI
PAR
Pertamina
PBM
PPL
PPI
PMC
PIS
Patra Jasa
PTK
MTT
PDC
Others

Total

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/44 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

**21. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN
PIHAK BERELASI DAN ENTITAS BERELASI
DENGAN PEMERINTAH (lanjutan)**

Kompensasi manajemen kunci

Manajemen kunci adalah Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan. Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>
Gaji dan imbalan lainnya	<u>2,391,031</u>

Manajemen kunci juga menerima kompensasi lain yang dibayarkan oleh PIS, induk perusahaan.

**21. NATURE OF RELATIONSHIP AND
TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES AND
GOVERNMENT-RELATED ENTITIES (continued)**

Key management compensation

Key management includes Director and Boards of Commissioner of the Company. The compensation paid or payables to key management are as below:

	<u>2022</u>	
	<u>2,248,453</u>	Salaries and other benefits

Key management also received other benefits which were paid by PIS, the parent company.

22. PERIKATAN PENTING DAN KOMITMEN

Perikatan penting dengan pelanggan

**Perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan
penyerahan BBM dan LPG dengan Patra Niaga**

Perusahaan bersama dengan Patra Niaga mengadakan perjanjian jasa penerimaan, penyimpanan dan penyerahan BBM dan LPG pada 30 Desember 2021 untuk terminal BBM ("TBBM") Tanjung Uban, Bau-Bau, Tanjung Sekong, Pulau Sambu dan Kota Baru. Estimasi kontrak total adalah sebesar Rp6.465.662.510.838 (setara AS\$106.706.774), dengan *thruput fee* berkisar dari AS\$1,12/KL sampai AS\$6,61/KL.

Basis volume *thruput* yang digunakan untuk perhitungan pendapatan adalah sesuai dengan volume aktual penyerahan BBM dan LPG yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jangka waktu perjanjian adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal 1 September 2021 – 31 Agustus 2031.

**Perjanjian kemitraan pengembangan dan
pemanfaatan TBBM Pulau Sambu antara
Pertamina dan Freepoint Commodities
Singapore Pte., Ltd., ("Freepoint")**

Pada tanggal 3 Mei 2019, Pertamina menandatangani perjanjian dengan Freepoint dengan nomor perjanjian SP-020/R00000/2019-S0. Perjanjian tersebut terkait dengan kemitraan antara Pertamina dan Freepoint untuk pengembangan dan pemanfaatan TBBM Pulau Sambu, jual beli Bottom Product. Berkaitan dengan pengalihan bisnis terminal dari Pertamina ke Perusahaan, kemitraan antara Freepoint dengan Pertamina tersebut beralih ke Perusahaan.

Berkaitan dengan kemitraan ini, Perusahaan mencatat liabilitas kontrak sebesar AS\$22.000.000 atas pendapatan diterima dimuka yang dibayarkan Freepoint ke Pertamina sebelum akuisisi bisnis terminal dari Pertamina ke Perusahaan.

22. SIGNIFICANT COMMITMENTS

Significant commitment with customer

**Service agreement for receiving, storage and
distribution of fuel and LPG with Patra Niaga**

The Company together with Patra Niaga, entered into service agreement for receiving, storage and distribution of fuel and LPG on 30 December 2021 for fuel terminal ("TBBM") Tanjung Uban, Bau-Bau, Tanjung Sekong, Pulau Sambu dan Kota Baru. The total contract estimate is Rp6,465,662,510,838 (equivalent to US\$106,706,774), with *throughput fee* ranging from US\$1.12/KL to US\$6.61/KL.

The *throughput* volume used for the calculation of revenue is the actual *throughput* volume agreed by both parties. The agreement is valid for 10 years from 1 September 2021 – 31 August 2031.

**Agreement for the development and utilisation
of Sambu Island TBBM between Pertamina and
Freepoint Commodities Singapore Pte., Ltd.,
("Freepoint")**

On 3 May 2019, Pertamina signed an agreement with Freepoint with agreement number SP-020/R00000/2019-S0. The agreement is related to the partnership between Pertamina and Freepoint for the development and utilisation of Sambu Island TBBM, selling and buying Bottom Product. In connection with the transfer of the terminal business from Pertamina to the Company, the partnership between Freepoint and Pertamina was transferred to the Company.

In connection with this partnership, the Company recorded a contract liability of US\$22,000,000 for the unearned revenues paid by Freepoint to Pertamina prior to the acquisition of the terminal business from Pertamina to the Company.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/45 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PERIKATAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

Perjanjian kemitraan pengembangan dan pemanfaatan TBBM Pulau Sambu antara Pertamina dan Freepoint Commodities Singapore Pte., Ltd., ("Freepoint") (lanjutan)

Pada tanggal 17 April 2023, telah dilakukan kesepakatan novasi *Terminal Lease Agreement* ("TLA") antara Freepoint, Pertamina, dan Perusahaan. Selanjutnya, TLA tersebut telah dilakukan terminasi dan Perusahaan telah membayar kepada Freepoint sejumlah AS\$16.214.327 sebagai pengembalian dari uang muka. Sisa uang muka sejumlah AS\$5.785.673 atau setara dengan Rp85.471.747 yang tidak perlu dikembalikan dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Undang-Undang No. 7/2021

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang pada tanggal 29 Oktober 2021 telah disahkan oleh Presiden sebagai UU No. 7/2021 ("UU HPP"). UU ini mengatur sejumlah aturan baru perpajakan sebagai salah satu cara Pemerintah mereformasi sistem perpajakan, salah satu implementasinya Nomor Induk Kependudukan ("NIK") sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") untuk wajib pajak orang pribadi

Ketentuan kebijakan lainnya yang menjadi poin penting di dalam UU HPP adalah:

PPN

Kenaikan tarif PPN umum secara bertahap, kenaikan dari 10% menjadi 11% mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Adanya sistem multi tarif PPN dengan rentang sekitar 5% - 15% dan tarif PPN 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak.

Pajak Penghasilan Orang pribadi ("PPh OP")

Adanya perubahan dan penambahan rentang tarif PPh OP menjadi 5 lapisan atau kategori yaitu lapisan kena pajak sampai dengan Rp60 juta (tarif pajak 5%), diatas Rp60 - Rp 250 juta (tarif pajak 15%), diatas Rp250 - Rp 500 juta (tarif pajak 25%), diatas Rp500 juta - Rp 5 miliar (tarif pajak 30%), dan lapisan kelima untuk pendapatan diatas Rp5 miliar (tarif pajak 35%).

22. SIGNIFICANT COMMITMENTS (continued)

Agreement for the development and utilisation of Sambu Island TBBM between Pertamina and Freepoint Commodities Singapore Pte., Ltd., ("Freepoint") (continued)

On 17 April 2023, signed a novation of *Terminal Lease Agreement* ("TLA") among Freepoint, Pertamina and the Company. Subsequently, this TLA was terminated and the Company paid US\$16,214,327 to Freepoint as a refund of Freepoint's advance payment. The remaining advance of US\$5,785,673 or equivalent to Rp85,471,747 that forfeited is recorded as other income.

Law No. 7/2021

On 7 October 2021, the Indonesian Parliament approved the *Harmonisation of Tax Regulations Bill*, which on 29 October 2021, was signed into law by the President as Law No. 7/2021 ("HPP Law"). This law regulates a number of new tax rules as one way for the Government to reform the tax system, one of which is the implementation of the *Population Identification Number as Taxpayer Identification Number* for individual taxpayers.

Other policy provisions that are important points in the HPP Law are:

VAT

Gradual increase in general VAT rates, increasing from 10% to 11% starting 1 April 2022 and 12% rate starting 1 January 2025. There is a VAT multi-tariff system with a range of around 5% - 15% and a VAT rate of 0% for the export of tangible and intangible taxable goods and the export of taxable services.

Personal Income Tax ("PPh OP")

There are changes and additions to the range of PPh OP rates into 5 layers or categories, namely: taxable layer up to Rp60 million (5% tax rate), above Rp60 million - Rp250 million (15% tax rate), above Rp250 million - Rp500 million (25% tax rate), above Rp500 million - Rp5 billion (30% tax rate) and the fifth layer for income above Rp5 billion (tax rate of 35%).

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/46 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. PERIKATAN PENTING DAN KOMITMEN (lanjutan)

Undang-Undang No. 7/2021 (lanjutan)

Program Pengungkapan Sukarela

Program ini akan diberlakukan selama enam bulan, yaitu pada kurun waktu 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 dan program ini hanya akan berlaku bagi wajib pajak badan yang sebelumnya berpartisipasi dalam program pengampunan pajak dan wajib pajak orang pribadi.

PPh Badan

Tarif PPh Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Perubahan UU Cukai

Perubahan berupa penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai, menggunakan prinsip pemidanaan sebagai upaya terakhir terkait pelanggaran cukai yang mencakup pelanggaran perizinan, pengeluaran barang kena cukai, barang kena cukai tidak dikemas, barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana, dan jual beli pita cukai.

22. SIGNIFICANT COMMITMENTS (continued)

Law No. 7/2021 (continued)

Voluntary Disclosure Programme

This programme will be implemented for six months, from 1 January 2022 to 30 June 2022 and this will be applicable only for corporate taxpayers who previously participated in the tax amnesty programme and individual taxpayers.

Corporate Income Tax

Domestic corporate income tax rates and permanent establishments are 22% which will come into effect in the 2022 fiscal year.

Changes to the Excise Law

The change is the addition or reduction of types of excisable goods, using the principle of punishment as a last resort related to excise violations which include licensing violations, releasing excisable goods, unpackaged excisable goods, excisable goods originating from criminal acts and the sale and purchase of excise stamps.

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Berbagai aktivitas yang dilakukan membuat Perusahaan terekspos terhadap berbagai risiko keuangan: risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar (termasuk dampak risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga). Tujuan dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengelola risiko dasar dalam upaya melindungi kesinambungan bisnis dalam jangka panjang dan meminimalkan dampak yang tidak diharapkan pada kinerja keuangan Perusahaan.

a. Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko pelanggan atau pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah maksimal eksposur dari risiko kredit adalah Rp971.326.311 (2022: Rp779.415.216).

Risiko kredit terutama berasal dari kas di bank, deposito berjangka, piutang usaha dan aset kontrak. Perusahaan juga telah menempatkan dananya pada bank yang memiliki kualitas kredit yang baik untuk transaksi kas dan bank serta deposito berjangka, terlihat dengan sebagian besar bank tersebut berperingkat "Baa2" dari lembaga pemeringkat Moody's.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk, liquidity risk, and market risk (including the effects of foreign currency exchange rates risk, and interest rates risk). The objectives of the Company's risk management are to identify, measure, monitor, and manage basic risks in order to safeguard the Company's long term business continuity and to minimise potential adverse effects on the financial performance of the Company.

a. Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Company. As at 31 December 2023, the total maximum exposure to credit risk was Rp971,326,311 (2022: Rp779,415,216)

Credit risk arises from cash in bank, time deposits, trade receivables and contract assets. The Company has placed its bank balances and time deposit in banks that have good credit for cash and bank and time deposit, quality as evidenced by most of the banks being rated "Baa2" based on Moody's.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/47 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko kredit (lanjutan)

a. Credit risk (continued)

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perusahaan memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, terdapat perjanjian yang mengikat secara hukum untuk kontrak penjualan, dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang usaha yang bermasalah. Kebijakan umum Perusahaan untuk pelanggan yang baru dan pelanggan yang sudah ada adalah sebagai berikut:

Management is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure to credit risk given that the Company has clear policies on the selection of customers, where the Company has legally binding agreements for its sales contracts, and historically low levels of bad debts. The Company has also established general policies to new and existing customers ,as follows:

- Memilih pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik.
- Menerima pelanggan baru yang disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai dengan kebijakan delegasi kekuasaan Perusahaan.

- *Selection of customers with strong financial conditions and good reputations.*
- *Acceptance of new customers is approved by the authorised personnel according to the Company's delegation of authority policy.*

b. Risiko likuiditas

b. Liquidity risk

Untuk mengatur risiko likuiditas, Perusahaan melakukan monitor dan menjaga level kas dan setara kas yang diperkirakan cukup untuk mendanai kegiatan operasional Perusahaan dan mengurangi pengaruh fluktuasi dalam arus kas. Manajemen juga secara rutin melakukan monitor atas perkiraan arus kas dan arus kas aktual, termasuk profil jatuh tempo pinjaman dan secara terus-menerus menilai kondisi pasar keuangan untuk kesempatan memperoleh dana.

To manage its liquidity risk, the Company monitors its level of cash and cash equivalents, and maintains these at a level deemed adequate to finance the Company's operational activities and to mitigate the effect of fluctuations in cash flows. The Company's management also regularly monitors projected and actual cash flows, including loans payable maturity profiles and continuously assesses the financial markets or opportunities to raise funds.

Tabel di bawah ini menggambarkan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal pelaporan berdasarkan jatuh temponya yang relevan berdasarkan periode sisa hingga tanggal jatuh tempo kontraktual. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel ini adalah nilai arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto termasuk estimasi pembayaran bunga:

The table below analyses the Company's financial liabilities at the reporting date into relevant maturity `ings based on the remaining period to the contractual maturity date. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows including estimated interest payments:

2023					
Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	1 sampai 3 tahun/ <i>Between 1 and 3 years</i>	Lebih dari 3 tahun/ <i>Later than 3 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Liabilitas keuangan				Financial liabilities	
Utang usaha	133,935,702	-	133,935,702	Trade payables	
Biaya masih harus dibayar	322,839,311	-	322,839,311	Accrued expenses	
Liabilitas sewa	85,054,328	49,666,973	1,084,837	Lease liabilities	
Jumlah liabilitas keuangan	541,829,341	49,666,973	1,084,837	592,581,151	Total financial liabilities
2022					
Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	1 sampai 3 tahun/ <i>Between 1 and 3 years</i>	Lebih dari 3 tahun/ <i>Later than 3 years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Liabilitas keuangan				Financial liabilities	
Utang usaha	107,126,682	-	107,126,682	Trade payables	
Biaya masih harus dibayar	24,554,740	-	24,554,740	Accrued expenses	
Liabilitas kontrak	237,799,320	-	237,799,320	Contract liabilities	
Liabilitas sewa	81,630,424	74,344,975	104,261,379	Lease liabilities	
Jumlah liabilitas keuangan	451,111,166	74,344,975	104,261,379	629,717,520	Total financial liabilities

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/48 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

c. Estimasi nilai wajar

Nilai wajar adalah suatu jumlah dimana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Aset dan liabilitas keuangan lancar Perusahaan diharapkan akan dapat direalisasi atau diselesaikan dalam jangka waktu dekat. Oleh karena itu, nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Nilai wajar ditentukan menggunakan diskonto arus kas masa depan pada suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati saat ini untuk instrumen dengan jangka waktu dan jatuh tempo yang sama.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

d. Manajemen risiko permodalan

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan keberlangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan, laba ditahan dan komponen ekuitas lainnya.

Direksi secara berkala melakukan reviu struktur permodalan Perusahaan. Sebagai bagian dari reviu ini, Direktur juga mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan.

e. Risiko pasar

i. Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Risiko yang dihadapi oleh Perusahaan sebagai akibat fluktuasi nilai tukar terutama terkait dengan kas di bank dan pinjaman dari pemegang saham dalam mata uang Dollar AS.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

c. Fair value estimation

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged or liability settled between knowledgeable and willing parties in an arm's length transaction.

The Company's current financial assets and liabilities are expected to be realised or settled in the near term. Therefore, their carrying amounts approximate their fair value.

The fair value is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms and remaining maturities.

Management considers that the carrying amounts of interest bearing financial assets and financial liabilities recorded at amortised cost in the financial statements approximate their fair values.

d. Capital risk management

The Company manages capital risk to ensure that they will be able to continue as a going concern, in addition to maximising the profits of the shareholders through the optimisation of the balance of debt and equity. The capital structure of the Company consists of cash and cash equivalents and equity attributable to equity holders of the parent, comprising issued capital, retained earnings and other equity components.

The Company's Directors periodically review the capital structure. As part of this review, the Directors consider the cost of capital and related risk.

e. Market risk

i. Foreign exchange risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Company's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from cash in banks and shareholder loan in US Dollar currency.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/49 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

e. Risiko pasar (lanjutan)

**i. Risiko nilai tukar mata uang asing
(lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing melemah/menguat sebanyak 1% dengan semua variabel konstan, laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 akan lebih tinggi/rendah sebesar Rp11.153.218.

ii. Risiko suku bunga

Risiko suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman jangka panjang dalam mata uang Dolar AS. Risiko tingkat suku bunga dari kas tidak signifikan.

Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga variabel mengekspos Perusahaan terhadap risiko suku bunga arus kas. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Perusahaan dengan risiko suku bunga nilai wajar.

Jika suku bunga pinjaman naik atau turun sebesar 1% dibandingkan dengan suku bunga pinjaman pada tanggal 31 Desember 2023 (dengan semua variabel lainnya dianggap tidak berubah), maka laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 masing-masing akan turun atau naik sekitar Rp150.870.

24. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengklasifikasikan kas dan setara kas, piutang usaha, dan aset kontrak sejumlah Rp971.326.311 (2022: Rp779.415.216) sebagai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, dan mengklasifikasikan penyertaan saham senilai Rp1.313.570 (2022: Rp1.194.214) sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengklasifikasikan utang usaha, biaya masih harus dibayar, liabilitas kontrak, liabilitas sewa, dan pinjaman kepada pemegang saham sejumlah Rp1.143.252.599 (2022: Rp644.412.069) sebagai liabilitas keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

23. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

e. Market risk (continued)

i. Foreign exchange risk (continued)

As at 31 December 2023, had the exchange rate of the Rupiah against the foreign currency depreciated/appreciated by 1% with all other variables held constant, profit before income tax for the year ended 31 December 2023 would have been higher/lower Rp11,153,218.

ii. Interest rate risk

The Company's interest rate risk mainly arises from long-term borrowings denominated in US Dollars. The interest rate risk from cash is not significant.

Borrowing issued at variable rate exposes the Company to cash flow interest risk. Borrowing issued at fixed rates exposes the Company to fair value interest risk.

If loan interest rates increase or decrease by 1% compared to the loan interest rate on 31 December 2023 (assuming all other variables remain unchanged), the profit before income tax of the Perusahaan for the year ended 31 December 2023 will decrease or increase by Rp150,870.

24. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2023, the Company classified its cash and cash equivalents, trade receivables, loan to related party and contract assets totaling Rp971,326,311 (2022: Rp779,415,216) as financial assets measured at amortised cost, and classified its investment in shares amounting to Rp1,313,570 (2022: Rp1,194,214) as fair value through other comprehensive income.

As at 31 December 2023, the Company classified its trade payables, accrued expenses, contract liabilities, lease liabilities and shareholder loan totaling Rp1,143,252,599 (2022: Rp644,412,069) as financial liabilities measured at amortised cost.

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Lampiran 5/50 Schedule

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2023**

(Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2023**

(Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. INFORMASI ARUS KAS

25. CASH FLOW INFORMATION

a. Transaksi non-kas

a. Non-cash transactions

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Pelunasan pinjaman pemegang saham melalui konversi ke modal saham	-	153,128,909	<i>Repayment of shareholder loan through conversion to share capital</i>
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	-	31,427,320	<i>Addition of right-of-use asset through lease liabilities</i>
Penambahan aset tetap melalui akrual dan utang usaha	(247,668,552)	(38,186,243)	<i>Acquisition of fixed assets through accruals and trade payables</i>

b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan

b. Reconciliation of liabilities arising from financing activities

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas adalah sebagai berikut:

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statements are as follows:

	<u>1 Januari/ January 2023</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Efek perubahan lainnya/ Other adjustment effect</u>	<u>31 Desember/ December 2023</u>	
Liabilitas sewa	198,614,647	(3,620,185)	(66,792,526)	128,201,936	<i>Lease liabilities</i>
Pinjaman dari pemegang saham	-	545,208,300	(2,073,024)	543,135,276	<i>Shareholder loan</i>
	<u>1 Januari/ January 2022</u>	<u>Arus kas/ Cash flow</u>	<u>Efek perubahan lainnya/ Other adjustment effect</u>	<u>31 Desember/ December 2022</u>	
Liabilitas sewa	161,974,051	(2,937,879)	39,578,475	198,614,647	<i>Lease liabilities</i>
Pinjaman dari pemegang saham	98,108,944	48,000,000	(146,108,944)	-	<i>Shareholder loan</i>

PT PERTAMINA ENERGY TERMINAL

Business Office:

Jl. Yos Sudarso No.205,
Sunter Jaya, Kec. Tj. Priok, Jkt Utara,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14360

Kantor Pusat:

Jl. Raya Anyer Km. 119, Kepuh, Kec. Ciwandan,
Kota Cilegon, Banten 42446



WWW.PERTAMINA-PET.COM